



RKPD

KABUPATEN BURU SELATAN

TAHUN 2027



LA HAMIDI, SH

BUPATI BURU SELATAN

GERSON E. SELSILY, SE., M.PD

WAKIL BUPATI BURU SELATAN





BUPATI BURU SELATAN
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2027
BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Perpres No. 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
16. Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2026
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2026;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2025-2029; Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor , NOREG Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor (1-140/2025);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025- 2029 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 Kabupaten Buru Selatan Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Perencanaan, Adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Nasional, Adalah Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
7. Pembangunan Daerah Adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan Masyarakat di Tingkat pusat dan daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD Adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun;

11. Rencana kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD Adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun;
13. Visi, Adalah rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
16. Kebijakan Adalah arah/Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program, adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
18. Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah tolak ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada Masyarakat;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka Menyusun rencana Pembangunan Daerah;
21. Program Pembangunan Daerah, adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
22. Kegiatan Perangkat Daerah, adalah serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output), dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;

23. Kinerja, adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan;
24. Indikator Kinerja, adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact);
25. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASS Adalah rancangan program prioritas dan patokan batas minimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran perangkat daerah sebelum dan sesudah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
27. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD Adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2026

BAB II

POKOK-POKOK PENYUSUNAN

Pasal 2

Ruang Lingkup RKPD adalah:

1. RKPD tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buru Selatan dalam periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2027, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
2. Sistematika RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (5) terdiri dari :
 - Bab 1. Pendahuluan
 - Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab 3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab 7. Penutup

Uraian Bab I sampai Bab VII sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan daerah serta menjadi acuan Masyarakat ikut serta partisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan dan sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2027; dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam menyusun KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2027.

BAB III

PENYESUAIAN RKPD

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2027 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.

Pasal 5

Dalam Hal RKPD Tahun 2027 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan menggunakan RKPD Tahun 2026 hasil Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada tanggal : 29 Juli 2026



Diundangkan di : Namrole
Pada tanggal 30 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
BURU SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 5
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029.

RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 menjadi salah satu dokumen dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2045.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendorong akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buru Selatan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.

Bupati Buru Selatan

LA HAMIDI

DAFTAR ISI

	Hal.
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1. Proses Penyusunan	I-3
1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan	I-4
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN	I-6
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-11
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-13
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-13
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-3
2.1.1. Aspek Geografi.....	II-3
2.1.2. Aspek Demografi DAERAH.....	II-7
2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKU).....	II-18
2.3. EVALUASI CAPAIAN PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN.....	II-57
2.4. EVALUASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	II-67
2.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027.....	II-85
2.6. TELAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	II-88
2.7. INOVASI DAERAH.....	II-95
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. ARAH KEBIJAKAN FISCAL,TARGET EKONOMI.....	III-1
3.1.1. Arah Fiscal dan Pembangunan Ekonomi Nasional.....	III-2
3.1.2. Arah Kebijakan Fiscal dan Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku.....	III-9
3.1.2.1 Capaian dan Proyeksi Ekonomi Makro Provinsi Maluku.....	III-12
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Buru Selatan	III-20
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-34
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-38
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-42
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-47
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-2
4.1.1. Visi	IV-2
4.1.2. Misi	IV-7

4.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2027.....	IV-39
4.2.1. Identifikasi Tantangan Global dan Domestik.....	IV-39
4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-39
4.2.2.1. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Nasional.....	IV-40
4.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2027.....	IV-57
4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2027.....	IV-58
4.3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-58
4.3.1.1. Peningkatan Kualitas daya Sain Sumber Daya Manusia,,,,.....	IV-59
4.3.1.2. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang bernilai tambah.....	IV-60
4.3.1.3. Penguatan UMKM,Koperasi dan kewirausahaan Lokal yang Inklusif.....	IV-61
4.3,1,4 Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penyusutan Ekonomi Inklusif.....	IV-61
4.3,1,5 Peningkatan Akses Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal	IV-62
4.3.1.6 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif.....	IV-62
4.3.1.7 Pembangunan berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana	IV-63
4,3,2. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Dasa Cita.....	IV-66
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027	V-2
5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2027	V-4
5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM).....	V-87
5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027.....	V-92
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2027	VI-1
BAB. VII PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN.	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.....	I-3
Tabel 1.2 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.....	I-5
Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027...	I-6
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2025	II-3
Tabel 2.2 Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Pengamatan di Stasiun Pengamat Kabupaten Buru.....	II-6
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025	II-7
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-8
Tabel 2.5 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	II-8
Tabel 2.6 Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-15
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-30
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 – 2025.....	II-31
Tabel 2.9 Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	II-32
Tabel 2.10 Jumlah Kematian ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-33
Tabel 2.11 Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025	II-34
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2024-2025.....	II-34
Tabel 2.13 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2024-2025.....	II-34
Tabel 2.14 Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025	II-35
Tabel 2.15 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024-2025.....	II-35
Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2025.....	II-36
Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-36
Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024-2025.....	II-37
Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2025.....	II-38
Tabel 2.20 Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-38
Tabel 2.21 Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2024-2025.....	II-39
Tabel.2.22. Pemberian Penghargaan dan Pengaduan Masyarakat	

	Tahun 2024-2025.....	II-39
Tabel 2.23	Cakupan Area Pelayanan Tahun 2024-2025.....	II-39
Tabel 2.24	Timbunan Sampah, Jumlah Sampah dan TPA/TPST/SPA Tahun 2024-2025	II-39
Tabel 2.25	Rasio Penduduk ber-KTP Tahun 2024– 2025.....	II-40
Tabel 2.26	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2024-2025.....	II-40
Tabel 2.27	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah Tahun 2024-2025	II-41
Tabel 2.28	Database Skala Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-42
Tabel 2.29	KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2024-2025	II-42
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024-2025	II-42
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Daerah Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-43
Tabel 2.32	Aksesibilitas Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-43
Tabel 2.33	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-44
Tabel 2.34	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-44
Tabel 2.35	Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-44
Tabel 2.36	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-45
Tabel 2.37	Persentase penduduk Kabupaten Buru Selatan yang Menggunakan Handphone/ Telepon Genggam Tahun 2024-2025.....	II-45
Tabel 2.38	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-46
Tabel 2.39	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-46
Tabel 2.40	Presentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2024-2025.....	II-47
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2024-2025	II-47
Tabel 2.42	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-48
Tabel 2.43	Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-48
Tabel 2.44	Persentase Bidang Olahraga Tahun 2024-2025.....	II-49
Tabel 2.45	Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024- 2025.....	II-49
Tabel 2.46	Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2024-2025	II-50
Tabel 2.47	Produksi Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-50
Tabel 2.48	Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-51
Tabel 2.49	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-51
Tabel 2.50	Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2024-2025.....	II-52
Tabel 2.51	Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-52
Tabel 2.52	Target Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2024-2025	II-53
Tabel 2.53	Capaian Indikator Bidang Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2025	II-53

Tabel 2.54	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-54
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025	II-54
Tabel 2.56	DayaTerpasang dan Distribusi Listrik di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.....	II-55
Tabel 2.57	Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restoran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.....	II-55
Tabel 2.58	Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru SelatanTahun 2024-2025.....	II-56
Tabel 2.59	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024- 2025.....	II-56
Tabel 2.60	Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	II-57
Tabel 2.61	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2025	II-57
Tabel 2.62	Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.....	II-58
Tabel 2.63	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan	II-62
Tabel 2.64	Target dan Realisasi Penerapan SPM Tahun 2025	II-68
Tabel 3.1	Proyeksi atau Target Ekonomi MakroIndonesia Tahun 2027.....	III-6
Tabel 3.2	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap Arah Kewilayaan Buru Selatan dalam RPJMN 2025-2029	III-8
Tabel 3.3	Target Indikator Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2027.....	III-18
Tabel 3.4	Capaian dan Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Buru Selatan.....	III-31
Tabel 3.5	Perbandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027	III-32
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 ,APBD Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027.....	III-32
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, Belanja Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Tahun 2027.....	III-42
Tabel 3.8	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025,Pembiayaan Tahun 2026 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2027.....	III-44
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029	IV-9
Tabel 4.2	Program dan kegiatan Penunjang Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.....	IV-35
Tabel 4.3	Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027	IV-37
Tabel 4.4	Hasil Penelahan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027.....	IV-52
Tabel 5.1	Rancangan Kerangka Pendanaan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.....	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Per Masing-Masing Urusan Tahun 2027	V-7
Tabel 5.3	Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.....	V-12
Tabel 5.4	Rencana Program/ Kegiatan Yang bersumber dari APBN/APBD I Tahun 2027.....	V-18

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-10
Gambar 1.2 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Spacial dan A- Spacial.....	I-11
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Buru Selatan	II-1
Gambar 2.2 Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan	II-2
Gambar 2.3 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan	II-9
Gambar 2.4 Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan	II-11
Gambar 3.1 Highlight Lokasi Prioritas Maluku	III-2
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai Triwulan III tahun 2025	III-4
Gambar 3.3 Perkembangan Laju Inflasi Indonesia Tahun 2025	III-5
Gambar 3.4 Arah Pembangunan Wilayah	III-7
Gambar 3.5 Nilai PDRB Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2023-2025.....	III-11
Gambar 4.1 Program Terbaik Hasil Tercepat.....	IV-23

DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-19
Grafik 2.2	PDRB PerKapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-21
Grafik 2.3	Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-21
Grafik 2.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-23
Grafik 2.5	Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-25
Grafik 2.6	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-26
Grafik 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-27
Grafik 2.8	Perkembangan Tingkat Gini Rasio Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	II-29
Grafik 3.1	PDRB Perkapita Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	III-12
Grafik 3.2	Tingkat Inflasi Provinsi Maluku Tahun 2021-2025	III-13
Grafik 3.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Tahun 2023-2025.....	III-14
Grafik 3.4	Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	III-15
Grafik 3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Tahun 2023-2025	III-16
Grafik 3.6	Indeks Gini Rasio Provinsi Maluku Tahun 2023 - 2025.....	III-17
Grafik 3.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	III-19
Grafik 3.8	PDRB Perkapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025	III-21
Grafik 3.9	Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	III-22
Grafik 3.10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	III-24
Grafik 3.11	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	III-25
Grafik 3.12	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025.....	III-27
Grafik 3.13	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024.....	III-28
Grafik 3.14	Perkembangan Tingkat Gini Rasio Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024.....	III-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 mengacu pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 dan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 mengusung tema sesuai tahapan pembangunan tahun 2027 yakni “ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ekonomi Lokal Yang Inklusif “ difokuskan pada (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (2) Pelatihan Tenaga Kerja; (3) Pengurangan Kemiskinan dan Stunting; (4) Perlindungan Sosial; (5) Pemerataan Manfaat Pembangunan, dimana hal tersebut selaras dengan isu strategis Nasional dan Provinsi Maluku. Adapun perkembangan dan tantangan perekonomian nasional yang mempengaruhi dasapijak perencanaan dan pembangunan tahun 2027, dimana Pada akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, perekonomian nasional Indonesia menunjukkan

ketahanan dan pertumbuhan yang kuat di tengah ketidakpastian global, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan tekanan fiskal, dimana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang tahun 2025, lalu menguat signifikan mencapai 5,61% pada triwulan I-2026. Permintaan Domestik dimana Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta kinerja positif sektor akomodasi, makan minum, dan konstruksi menjadi motor penggerak utama pertumbuhan. Stabilitas Makro Terjaga dimana Inflasi berada dalam tingkat yang terkendali, didukung oleh bauran kebijakan moneter yang hati-hati dari Bank Indonesia serta disiplin fiskal dari Kementerian Keuangan. Adapun tantangan Perekonomian antara lain (1). Tekanan Nilai Tukar Rupiah, dimana Fluktuasi dan penguatan dolar Amerika Serikat memberikan tekanan eksternal terhadap nilai tukar rupiah dan biaya impor bahan baku. (2). Ketidakpastian Global, dimana Eskalasi geopolitik dunia dan fragmentasi perdagangan global masih membayangi rantai pasok serta stabilitas eksternal. (3). Tekanan Fiskal dan Daya Beli dimana Pengelolaan anggaran negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan alokasi subsidi, pembiayaan program prioritas, serta upaya menjaga daya beli masyarakat kelas menengah-bawah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dengan fungsi mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Arahan penyusunan RENJA dan RKA OPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan kepada masyarakat;

9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

1.1.1. Proses Penyusunan

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

Penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan awal Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan top- down/bottom-up, teknokratis dan partisipatif maupun politis, termasuk mengakomodir proses telaahan Pokok pokok pikiran DPRD.

3. Penyusunan Rancangan RKPD;

Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempumakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk menghamoniskan dan mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tujuan membahas rancangan RKPD yang meliputi : (1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah; (2) menyepakati prioritas pembangunan daerah; (3) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; (4) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; (5) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang

kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

Rancangan akhir RKPD merupakan hasil penyelarasan Rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Buru, Rancangan RKPD Provinsi Maluku dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional.

6. Penetapan RKPD.

Penetapan RKPD adalah tahap akhir yang dilakukan setelah pembahasan/fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibahas di provinsi. Penetapan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Untuk memastikan bahwa output dari hasil penyusunan berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 melibatkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025-2029
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 yang terkait dengan tujuan, sasaran prioritas RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 dengan isu strategis
	Terwujudnya pembangunan konsistensi antara isu strategis dengan sasaran prioritas
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 dengan pagu anggaran OPD
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 dengan program/kegiatan OPD
	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2027
	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Tahun 2027

PRINSIP	INDIKATOR
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program dan output kegiatan tahun 2027 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) – berdasarkan matrik
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistic, integratif, tematik, dan spasial (HITS) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan proses penyusunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down serta politik. Detail konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027**

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	Usulan dari Musrenbang desa dan kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2027
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2027
DARI ATAS (TOP-DOWN)	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Buru tahun 2027 dengan Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Nasional dalam RKP 2027
	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027

TEKNOKRATIK	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027
PARTISIPATIF	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
POLITIK	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Buru Selatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD
	Pertimbangan, Pendapat dan Masukan DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027
	Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027

Dalam pendekatan substansi, RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan (Ruang atau Wilayah) dalam perencanaan

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor.143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025– 2029;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kl asifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 1981);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);
26. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2026, Nomor 346);
27. Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 09 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2026;
36. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2026.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD, dimana Renja OPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum musrenbang nasional. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2027. Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2027.

Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 harus diselesaikan pada bulan Juli Tahun 2026, sedangkan dokumen APBD Tahun 2027 harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember 2026. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempumakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RKPD Tahun 2027 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2027. Adapun tujuan adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Tahunan;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik;
3. Menciptakan kepastian kebijakan dan kepatutan perencanaan karena merupakan komitmen pembangunan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
4. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target perjanjian kinerja (perkin) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2027;
5. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, dan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat;
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive, dan kondusif, dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
8. Merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) OPD Tahun 2027;
9. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD tahun 2027;

1.5. SISTIMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB VII. PENUTUP.

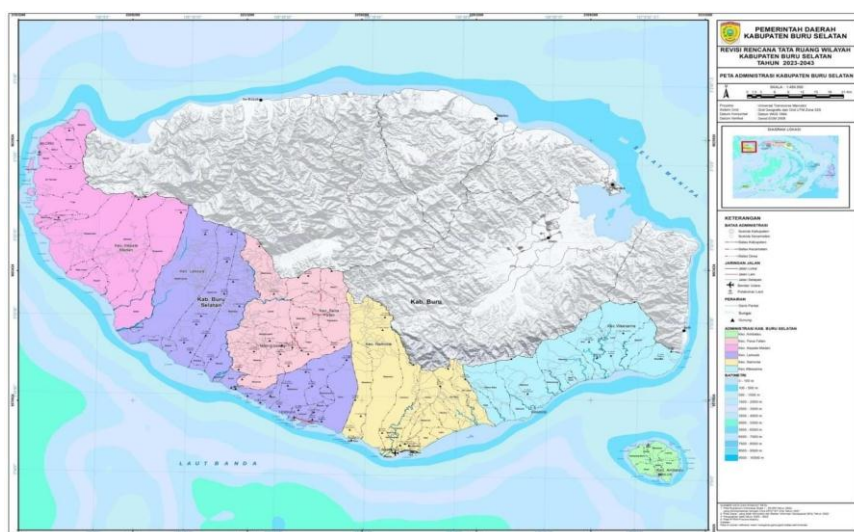
LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan suatu wilayah. Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah, untuk mengetahui aspek geografi dan demografi dalam menyusun perencanaan untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal pada suatu wilayah.

Secara Astronomis, Kabupaten Buru Selatan terletak antara 2°30' Lintang Selatan dan 5°50' Lintang Selatan dan antara 125°00' Bujur Timur dan 127°00' Bujur Timur (Gambar 2.1) dan terletak di jalur utama lalu lintas Laut (Tol Laut) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III). seperti terlihat pada Gambar 2.1.

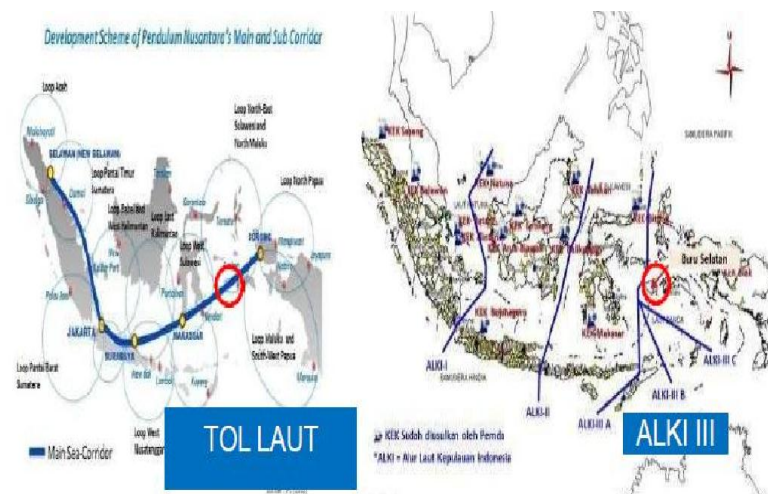


Sumber : Laporan Akhir RTRW Kab. Buru Selatan, 2023-2043

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Buru Selatan

Secara geografis Kabupaten Buru Selatan di Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Seram, Laut Banda di sebelah Selatan dan Barat, serta Selat Manipa dan Kabupaten Buru di sebelah Timur. Kabupaten Buru Selatan memiliki luas sekitar 3.780,56 km² dan wilayahnya meliputi sebagian dari Pulau Buru dan pulau-pulau lain di sekitarnya, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Kondisi Geostrategis dan

Geopolitik Kabupaten Buru Selatan dalam peran strategisnya secara nasional dan internasional berada pada posisi strategis jalur lintas alur kepulauan Indonesia ALKI III. UNCLOS 1982 ratifikasi undang-undang 17 tahun 1985 memberikan penguatan peran terhadap posisi jalur ALKI III dimana Kabupaten Buru Selatan berada pada alur lintas kapal internasional yang bila dikembangkan akan dapat memanfaatkan peluang ini sebagai potensi ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan kawasan di Indonesia timur. Untuk mendorong aktifitas arus barang dari pusat produksi di Kabupaten Buru Selatan jalur transportasi nasional yang dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan dan sistem tata transportasi wilayah yang mengkoneksikan wilayah Buru Selatan dengan pasar di wilayah Sulawesi dan Jawa telah dikembangkan Tol Laut sebagai stabilisator harga untuk memberikan nilai ekonomi terhadap setiap kebutuhan konsumsi dan hasil produksi masyarakat yang dijual ke pasar. Jalur laut ALKI III dan tol laut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar. 2.2. Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.

2.1.1. Aspek Geografi.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Buru Selatan 3.780,56 Km² terbagi menjadi 6 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Adapun batas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Laut Seram
- Sebelah Timur Kabupaten Buru dan Selat Manipa
- Sebelah Selatan Laut Banda
- Sebelah Barat Laut Banda

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi
Kabupaten Buru Selatan dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2025**

No. (1)	Kecamatan (2)	Ibu Kota Kecamatan (3)	Luas (Km ²) (4)	Desa (5)
1.	Leksula	Leksula	1.419,29	19
2.	Kepala Madan	Biloro	953,36	16
3.	Waesama	Wamsisi	540,93	11
4.	Namrole	Elfule	243,57	17
5.	Ambalau	Siwar	228,63	7
6.	Fena Fafan	Waekatin	394,78	11
Total			3.780,56	81

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka, Tahun 2026

2.1.1.2. Topografi dan Jenis Tanah.

Secara fisiografi (makro relief), bentuk wilayah Kabupaten Buru Selatan dikelompokkan berdasarkan dataran, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (plateau/pedmont) dengan bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru Selatan didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah berlereng agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 % yang meliputi luas 15,43 % dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam. Sedangkan di

bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampai agak curam.

Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Kabupaten Buru Selatan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu ; bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai. Sebagian besar tanah di Pulau Buru adalah jenis tanah kompleks, dimana persebaran jenis tanah ini meliputi;alluvial,podsolik merah kuning,organosol,grumasol dan tanah kompleks.

2.1.1.3. Geomorfologi dan Hidrogeologi.

Kondisi geomorfologi Pulau Buru dan pulau-pulau kecil lainnya yang termasuk ke dalam Kabupaten Buru Selatan dikontrol oleh geologi regional Provinsi Maluku, dimana wilayah ini merupakan ujung Barat Busur Kepulauan Non Magmatik dari Lingkaran Sirkam Pasifik. Oleh karena itu Kabupaten Buru Selatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa satuan Geomorfologi seperti berikut :

- 1) Satuan Geomorfologi Perbukitan/ Pegunungan Lipatan Patahan yang menempati wilayah bagian tengah Kabupaten Buru Selatan;
- 2) Satuan Geomorfologi Punggungan Homoklin yang meliputi wilayah bagian Utara dan Selatan Pulau Buru;
- 3) Satuan Geomorfologi Lembah dan Bantaran Sungai yang mengikuti lembah sungai-sungai besar juga menjadi wilayah permukiman.

Sedangkan kondisi hidrogeologi Pulau Buru dan pulau-pulau kecil lainnya yang termasuk dalam Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pola Aliran Sungai.

Sebagaimana telah dijelaskan didepan, sungai sebagai unsur geografi yang ada di Kabupaten Buru Selatan (28 sungai) mempunyai pola aliran; dendritik (menurun), paralell, trellis, rektanguler dan radier mengalir menuju pantai kontrol oleh struktur geologi (patahan, rekahan dan sistem perlipatan batuan) yang terdapat di wilayah ini. Tingkat kerapatan sungai sangat intensif, dimana hampir seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan tertutup oleh pola aliran sungai baik yang bersifat permanen maupun intermittent.

b. Zona Air Tanah.

Dari kondisi tersebut di atas dan didukung oleh kontrol batuan dan struktur geologi, maka secara umum neraca air tanah menunjukkan terdapat 2 (dua) zona air tanah, yaitu:

- Zona air tanah rendah, yang pada umumnya menempati punggung pemisah air morfologi (*morphological water divided*) sebagai pemisah daerah tangkapan hujan (*catchment area*) keempat wilayah DAS tersebut diatas serta pada 2 (dua) punggung yang terdapat di selatan daerah studi;
- Zona air tanah sedang–tinggi menempati hampir seluruh wilayah studi, yang mengelilingi Pulau Buru. Kawasan ini dapat tercapai jika sistem vegetasi tetap terjaga, sehingga tingkat peresapan (*recharged*) dapat dipertahankan dan *surface run off* dapat dicegah dan diperkecil.

c. Hidro Oceanografi.

Sesuai dengan kondisi geografinya Kabupaten Buru Selatan dikelilingi oleh Laut Seram di Utaradan Laut Banda di Selatan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai kabupaten yang berada di dalam Provinsi Maluku. Oleh karena itu, pada bagian utara dan selatan berada pada posisi gapura energi gelombang yang tinggi pada musim barat maupun musim timur, dengan arus laut dari selatan yang sangat kuat pada musim timur yang berlangsung pada bulan Juni sampai September. Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai dengan posisi Pulau Buru yang

berada di busur luar kepulauan non magmatik, maka Laut Seram di Utara dan Laut Banda di Selatan merupakan 2 (dua) palung laut dalam (samudera) yang sangat mempengaruhi wilayah ini, dengan kondisi batimetri yang sangat dalam.

2.1.1.4. Klimatologi.

Iklim di Kabupaten Buru Selatan dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kabupaten Buru Selatan dimana berdasarkan data klimatologi di stasiun meteorologi Pulau Buru pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata temperatur/suhu udara tertinggi tercatat di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar 29,9oC pada bulan November, sementara terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 27,0oC. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari dan Februari yaitu 19 hari dan yang terendah pada bulan Oktober dan November, yaitu 1 hari. Kondisi curah hujan, tercatat tertinggi pada bulan Juli sebesar 255,7 mm dan terendah pada bulan Oktober dan November. Secara umum tekanan udara di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2024 berkisar antara 1.008,4 mbar sampai dengan 1.012,3 mbar. Sementara kecepatan angin tertinggi pada bulan Juli dan September yaitu sebesar 19 knot dan terendah 14 knot pada bulan Juli dan September.

Tabel. 2.2 Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Stasiun Pengamat Kabupaten Buru

Rata-rata (average)							
Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	27,5	84	15	1.008,4	150,8	19	5,2
Februari	27,3	85	14	1.008,4	146,7	19	3,9
Maret	27,7	82	17	1.009,7	161,4	11	6,9
April	27,8	82	15	1.008,9	139,1	10	7,0
Mei	28,0	80	17	1.010,5	180,9	14	6,7
Juni	27,5	81	16	1.010,3	112,4	9	6,0
Juli	27,0	81	19	1.010,9	255,7	12	5,8
Agustus	27,9	73	18	1.012,3	11,0	5	8,5
September	27,9	71	19	1.011,6	68,7	7	7,9
Oktober	29,3	69	18	1.011,9	-	1	9,1

November	29,9	71	16	1.010,0	-	1	9,4
Desember	28,9	79	15	1.009,5	192,1	16	4,1

Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, 2025.

2.1.2. Aspek Demografi Daerah.

Perkembangan penduduk Kabupaten Buru Selatan dilihat dari jumlahnya pada tahun 2023-2025 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 sebesar 79.455 jiwa, naik menjadi 83.228 jiwa pada tahun 2025 dengan rata-rata pertumbuhan diatas 2 persen, Secara rinci perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
-1	-2	-3	-4
1	2023	79,455	-
2	2024	81,329	2.36
3	2025	83,228	2.33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, BPS 2026

Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk pada tahun 2024-2025 per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, maka Kecamatan Namrole tercatat sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni mencapai 3,75 persen, diikuti dengan Kecamatan Kepala Madan yang mencapai 2,26 persen, sementara Kecamatan Ambalau dengan pertumbuhan penduduk yang terkecil mencapai 1,21 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Kecamatan	2024	2025	Pertumbuhan Penduduk 2024-2025 (%)
-1	-2	-6	-7	-8
1	Kepala Madan	13,184	13,482	2.26
2	Leksula	14,718	14,994	1.88
3	Fena Fafan	4,557	4,646	1.95
4	Namrole	23,276	24,150	3.75
5	Waesama	16,236	16,485	1.53
6	Ambalau	9,358	9,471	1.21
Buru Selatan		81,329	83,228	2.33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, BPS, 2026

Sedangkan untuk kepadatan serta distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 terbesar berada di Kecamatan Namrole yaitu sebesar 99,15 jiwa/km², dan distribusi penduduk sebesar 29 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

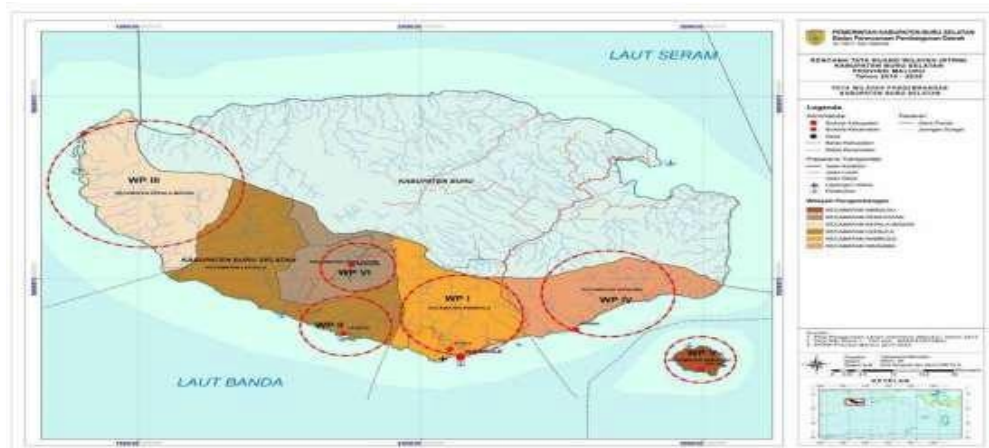
Tabel.2.5. Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Distribusi Penduduk (%)
-1	-2	-3	-4	-3	-3	-4
1	Kepala Madan	Biloro	953.36	13,482	14.14	16.20
2	Leksula	Leksula	1,419.29	14,994	10.56	18.02
3	Fena Fafan	Waekatin	394.78	4,646	11.77	5.58
4	Namrole	Elfule	243.57	24,150	99.15	29.02
5	Waesama	Wamsisi	540.93	16,485	30.48	19.81
6	Ambalau	Siwar	228.63	9,471	41.43	11.38
Total			3,780.56	83,228	22.01	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS, 2026

2.1.3. Wilayah Pengembangan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan guna membangun Buru Selatan sebagai Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada potensi unggulan daerah.



Sumber: RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Gambar 2.3. Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan

Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, potensi pengembangan wilayah dibagi berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkauan pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut. Keenam Wilayah Pengembangan tersebut sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Namrole dengan pusat pelayanan di Kota Namrole. Fungsi utama WP sebagai berikut :
 - a) Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Jasa
 - b) Pusat Transportasi Regional
 - c) Sentra produksi pertanian tanaman pangan
 - d) Sentra produksi kehutanan
 - e) Sentra produksi perikanan, dan
 - f) Wisata.

2. Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Leksula dengan pusat pelayanan di Kota Leksula. Fungsi utama WP II adalah :
 - a) Pusat Perdagangan
 - b) Pusat Pelayanan Jasa
 - c) Kawasan Ekonomi Khusus
 - d) Sentra produksi kehutanan, dan
 - e) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - f) Sentra produksi perkebunan
 - g) Sentra produksi perikanan
 - h) Wisata
3. Wilayah Pengembangan III yang meliputi Kecamatan Fena Fafan dengan pusat pelayanan di Kota Waekatin. Fungsi utama WP III adalah
 - a) Sentra produksi kehutanan
 - b) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - c) Sentra produksi perkebunan
 - d) Sentra produksi perikanan
 - e) Pendukung utama Kawasan Ekonomi Khusus
4. Wilayah Pengembangan IV yang meliputi Kecamatan Kepala Madan dengan pusat pelayanan di Kota Biloro. Fungsi utama WP IV adalah :
 - a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa
 - e) Wisata
5. Wilayah Pengembangan V yang meliputi Kecamatan Waisama dengan pusat pelayanan di Kota Wamsisi. Fungsi utama WP V adalah :
 - a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa

6. Wilayah Pengembangan VI yang meliputi Kecamatan Ambalau dengan pusat pelayanan di Kota Waelua. Fungsi utama WP VI adalah :
- a) Sentra produksi perkebunan
 - b) Sentra produksi perikanan
 - c) Wisata

2.1.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan.

Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem perkotaan di Kabupaten Buru Selatan, yang direncanakan tidak terlepas dari rencana struktur kota di Ibukota Kabupaten maupun Kota Kecamatan, karena Kota merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sistem Perkotaan diarahkan sesuai dengan hierarki jumlah penduduk, potensi dan kegiatan ekonominya. Pengembangan sistem kota-kota diarahkan sedemikian rupa, agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah, terutama berkaitan dengan kondisi fisik yang sebagian merupakan pulau-pulau dan kondisi bencana alam. Di pihak lain Kawasan perkotaan memerlukan pengelolaan secara individual yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas, serta mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan (Sustainable Development). Rencana struktur ruang Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.4. berikut :



Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043

Gambar 2.4. Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Adapun pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu :
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skalakecamatan atau beberapa desa; dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten, Sedangkan rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan.

Sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2034 bahwa Pengembangan sistem perkotaan ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya struktur ruang yang tangguh untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi berbasis pertanian lahan kering. Pengembangan sistem kota bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan potensinya dan daya tampung lingkungannya, baik itu struktur ruang internal pada Kabupaten Buru Selatan maupun struktur ruang eksternal dalam lingkup Provinsi Maluku, mengingat sektor ekonomi basis Kabupaten Buru Selatan adalah sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan maka konsep ruang yang akan diterapkan adalah pengembangan kabupaten dengan kota-kota atau kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pengembangan hirarki kota di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan pada arahan kebijakan nasional dan propinsi, disamping itu juga berdasarkan hasil kajian tentang tingkat perkembangan masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Buru Selatan. Berikut Hirarki sistem pusat-pusat permukiman bagi Kabupaten Buru Selatan yaitu :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole di Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, dan Desa Kamanglale memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi, memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan, Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala, memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulina memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di seluruh desa di Kabupaten Buru Selatan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Penetapan fungsi suatu kota didasari oleh alasan pertimbangan tertentu dimana keberadaan kota tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan sekitar dan pengembangan wilayah secara umum. Pertimbangan penetapan fungsi kota antara lain :

1. Fungsi kota yang didasarkan pada kedudukan dan lokasinya dimana berada pada kawasan strategis, dan kawasan tertentu seperti kawasan perbatasan, dan kawasan tumbuh cepat, sehingga kota tersebut perlu berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi (kegiatan industri, agroindustri, pertambangan, dll) dan pusat perhubungan guna mendukung usaha pemasaran;
2. Kota yang berfungsi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi desa-desa di kawasan belakangnya yang memiliki karakteristik relatif terpencil dan terbelakang atau merupakan pengembangan kawasan ekonomi baru. Fungsi kota tersebut sebagai pusat pengumpul dan distribusi;
3. Sinkronisasi sistem pusat pemukiman dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku untuk Kabupaten Buru Selatan.

**Tabel 2.6. Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023**

REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023	
Rencana Pusat Permukiman	Fungsi
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, Desa Farmite dan Desa Kamanglale;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;

REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023	
Rencana Pusat Permukiman	Fungsi
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diseluruh Desa;	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa;

2.1.4.1. Rencana dan Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Buru Selatan, proses identifikasi kawasan yang telah dilakukan berhasil mengidentifikasi kawasan lindung meliputi :

a. Zona Lindung Lokal dan Zona Penyangga Hutan Mangrove.

Kawasan yang direncanakan meliputi : Leksula, Kepala Madan, Desa Wamsisi dan Desa Namrole, dengan luasan hutan mangrove adalah $\pm 1.600,24$ Ha (hasil analisa citra, 2005). Perairan pesisir pantai yang dimaksud adalah desa Nalbesy, Teluk Leksula, Mefa, Tifu, Pulau Tomahu, dan Pulau Fogi.

b. Kawasan Lindung Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan Sempadan Danau.

Perencanaan kawasan lindung sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau diarahkan untuk kawasan-kawasan yang masih mungkin untuk dipertahankan. Sempadan pantai berjarak 100 m atau disesuaikan lebar pantai, sempadan sungai utama 100 meter, sub sungai 50 meter dan sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman atau kota 15 meter atau disesuaikan dengan jarak sempadan

yang tersisa atau topografi sungai. Kawasan lindung untuk sempadan danau 100 meter.

2.1.4.2. Rencana dan Arah Pengelolaan Kawasan Budidaya.

Adapun rencana dan arahan pengelolaan kawasan budidaya yang ada di Kabupaten Buru Selatan meliputi :

- 1) Kawasan Perikanan Tangkap
- 2) Kawasan Pariwisata terdapat di Leksula dan Namrole
- 3) Zona Prasarana dan Sarana Perikanan

2.1.4.3. Kawasan Rawan Bencana.

Adapun penentuan zonasi/ wilayah rawan bencana Kabupaten Buru Selatan terbagi menjadi :

a. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir.

Kawasan rawan banjir meliputi wilayah ekologis adalah wilayah ekologi Buru Selatan Timur, Pulau Ambalau, Desa Waemulang dan Desa Waemala.

b. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Abrasi dan Akresi.

Abrasi dan akresi umumnya terjadi di pesisir pantai wilayah ekologi Teluk Leksula–Tanjung Waitepu, Pantai Enbofi, Mefa, Fogi–Air Ternate. Abrasi pantai juga terjadi intensif sepanjang pesisir Kabupaten Buru Selatan. Pada Pulau Ambalau tingkat abrasi cukup tinggi, demikian juga pada pantai Namrole dan Wamsisi.

c. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Erosi dan Sedimentasi.

Erosi terjadi pada area perbukitan karst dan denudasional, sementara Sedimentasi terjadi di muara sungai Waemala, Waehaka dan Waemulang.

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

2.2.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

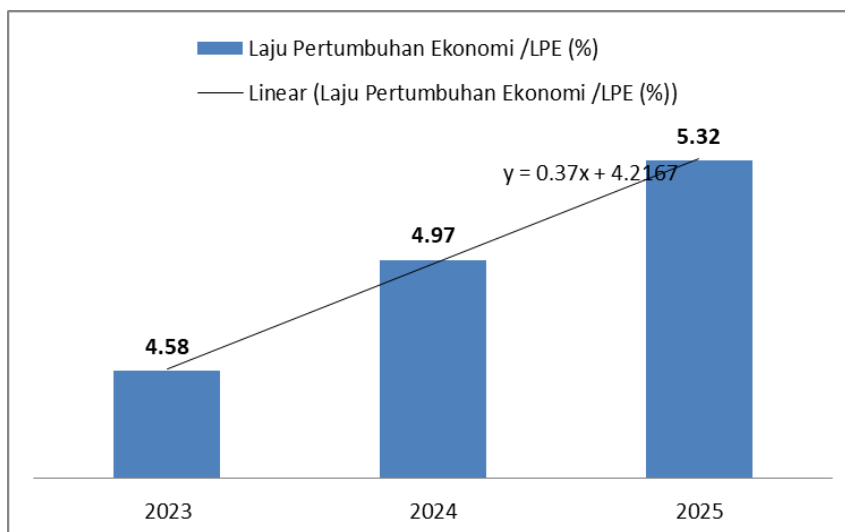
Tingkat kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator Ekonomi Makro antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan PDRB, PDRB Perkapita, Gini ratio, Tingkat Kemiskinan, Laju Inflasi dan Pengangguran

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku yang memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini mencerminkan dinamika pembangunan yang terus berlangsung, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Buru Selatan menunjukkan tren yang positif, didorong oleh peningkatan produksi komoditas unggulan serta dukungan program pembangunan daerah. Analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan dan merumuskan strategi yang tepat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS Buru Selatan Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,3 persen, pada tahun 2023 LPE mencapai 4,58 persen, naik menjadi 4,97 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 5,32 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**



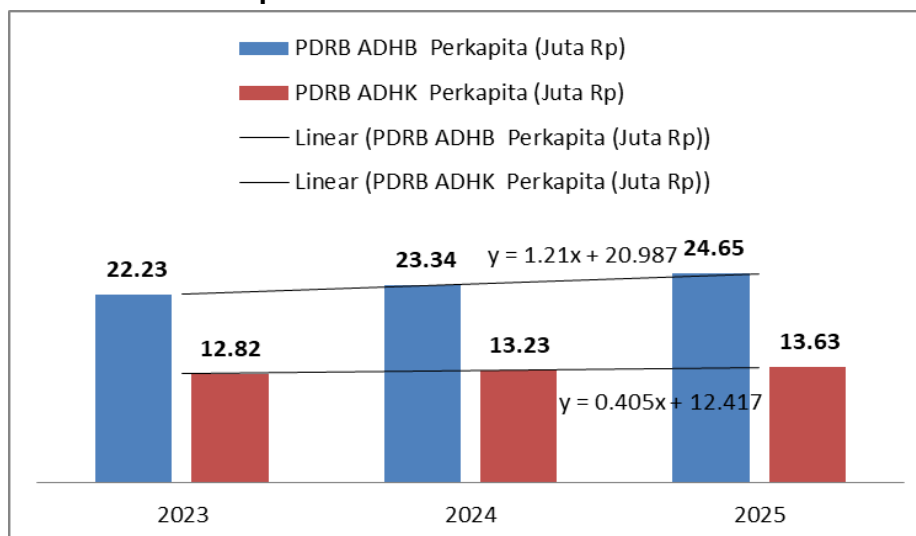
Sumber : BPS Buru Selatan, 2025, diolah, bapelitbang Kab. Buru Selatan

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi Inklusif terutama UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi inklusif yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

b. PDRB Perkapita.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah dan menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Buru Selatan, PDRB per kapita memberikan informasi penting mengenai kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan wilayah serta distribusi hasil pembangunan kepada penduduk. Perubahan nilai PDRB per kapita dari waktu ke waktu tidak hanya mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi indikator efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, analisis terhadap PDRB per kapita sangat krusial dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2023–2025 mencerminkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor makro ekonomi nasional maupun kondisi lokal. Berdasarkan data BPS Buru Selatan PDRB ADHB per kapita menunjukkan tren peningkatan, dimana dari Rp. 22,23 juta rupiah pada tahun 2023, naik menjadi Rp. 23,34 juta pada tahun 2024. dan pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 24,65 Juta Rupiah perkapita/tahun, dengan rata-rata pertumbuhan 1,21 Juta Rupiah perkapita/tahun. Sementara PDRB ADHK per kapita pada tahun 2023 mencapai 12,82 Juta Rupiah, naik menjadi 13,23 Juta Rupiah dan pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 13,63 Juta Rupiah Perkapita/tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik2.2. PDRB PerKapita
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**

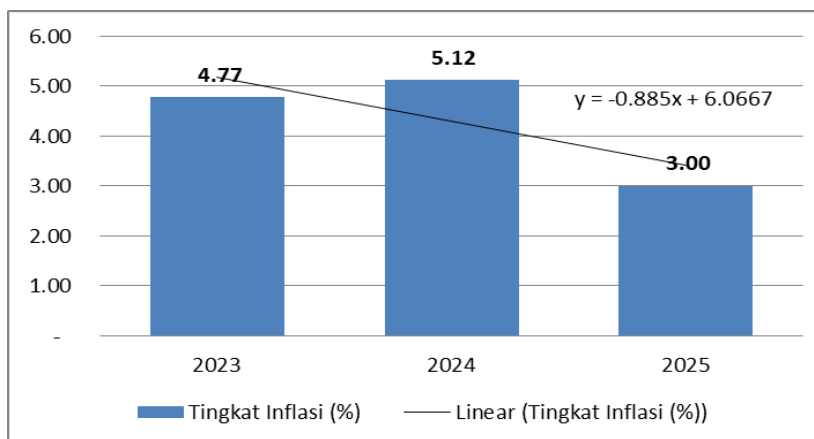


Sumber :, BPS Buru Selatan, 2025

1. Laju Inflasi.

Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan year-on-year pada tahun 2023 mencapai 4,77 persen naik menjadi 5,12 persen pada tahun 2024, namun pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 3,00 persen, dengan rata-rata penurunan selama 3 tahun terakhir sebesar 0,88 persen . Dengan Komuditas Penyumbangan Utamanya Adalah Transportasi, Makanan, Minuman, Dan Tembakau, Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran Dan Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik.2.3. Laju Inflasi Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2023-2025**



Sumber :, BPS Buru Selatan, 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi Inflasi di kabupaten Buru Selatan tahun 2025:

1. peningkatan jumlah penduduk tidak di barengi dengan kebutuhan bahan pokok, sehingga permintaan terhadap kebutuhan bahan pokok melebihi pasokan yang tersedia, hal ini mengakibatkan harga bahan pokok akan cenderung naik.
2. Tingginya Biaya Logistik dan Distribusi: Aksesibilitas dan infrastruktur transportasi yang belum memadai (darat, laut, udara) menyebabkan biaya angkut barang menjadi sangat mahal. Hal ini berakibat langsung pada tingginya harga jual barang di tingkat konsumen.
3. Ketergantungan pada Pasokan Luar Daerah: Daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pokok (seperti beras, minyak, bahan bangunan) secara mandiri. Ketergantungan pasokan dari luar membuat harga sangat rentan terhadap gangguan distribusi.
4. Terbatasnya Infrastruktur Ekonomi: Kurangnya gudang penyimpanan, pasar yang belum memadai, dan minimnya fasilitas distribusi menyebabkan stok barang tidak stabil. Saat pasokan terlambat, harga akan langsung melonjak.
5. Faktor Geografis dan Cuaca (Musiman): Bencana alam atau cuaca ekstrem sering memutuskan akses distribusi sehingga memicu kelangkaan barang pokok.
6. Rantai Distribusi yang Panjang: Rantai pasok yang melibatkan banyak perantara menyebabkan harga di tingkat pengecer menjadi sangat tinggi dibandingkan harga pokok produksi.

Keterbatasan Tenaga Ahli dan Modal: Minimnya pelaku usaha sehingga membuat persaingan usaha tidak sehat, yang memungkinkan pedagang besar menetapkan harga tinggi.

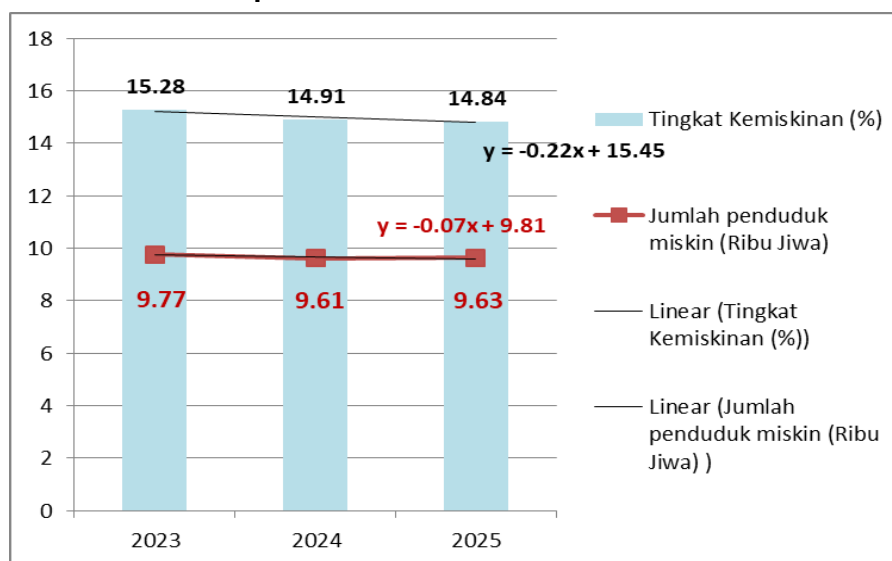
2. Tingkat Kemiskinan.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang

disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Capaian Persentase penduduk miskin Buru Selatan dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami penurunan cukup baik, dimana pada tahun 2023 presentase penduduk miskin mencapai 15,28 persen atau sebanyak 9.770 jiwa, turun menjadi 14,91 persen atau sebesar 9.610 jiwa pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 turun lagi menjadi 14,84 persen atau sebesar 9.630 jiwa, dengan rata-rata penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,22 persen atau berkurang sebesar 70 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Buru Selatan, 2025, diolah, bapelitbang Kab. Buru Selatan

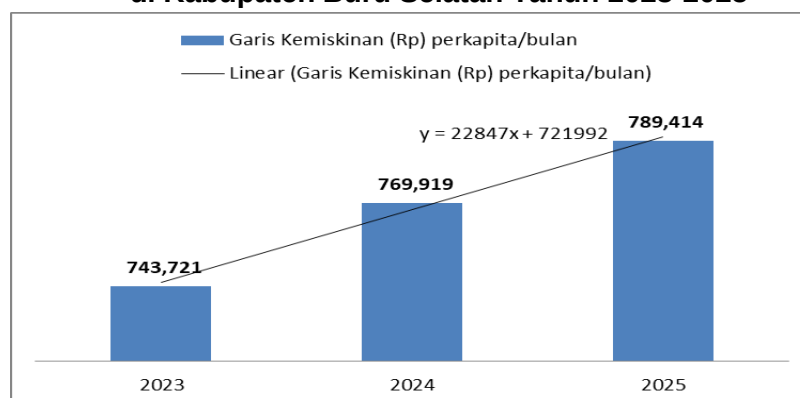
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan tahun 2025 di Buru Selatan antara lain adalah:

1. Adanya intervensi program perlindungan sosial dari Pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Sembako dari Kemensos;
2. peningkatan harga komoditas tanaman perkebunan rakyat (kelapa kopra);

3. Sektor pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan positif pada triwulan I 2025. Momentum bulan Ramadhan pada awal pekan pertama Maret menyebabkan aktivitas panen tanaman pangan meningkat 32,35%;
4. Produksi tanaman hortikultura mengalami peningkatan pada triwulan I Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya;
5. Peningkatan industri makanan dan minuman serta penyediaan makan minum karena kebutuhan permintaan konsumen saat momentum bulan Ramadhan;

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Seiring kenaikan harga komoditas makanan dan non makanan, garis kemiskinan Kabupaten Buru Selatan selama 3 (Tiga) tahu terakhir juga terus mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2023 mencapai Rp.743.721, naik menjadi Rp.769.919 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 GK Buru selatan lagi menjadi Rp.789.414 per kapita per bulan, dengan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir sebesar Rp.22.847 per kapita per bulan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5. Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025



Sumber BPS Buru Selatan 2025.

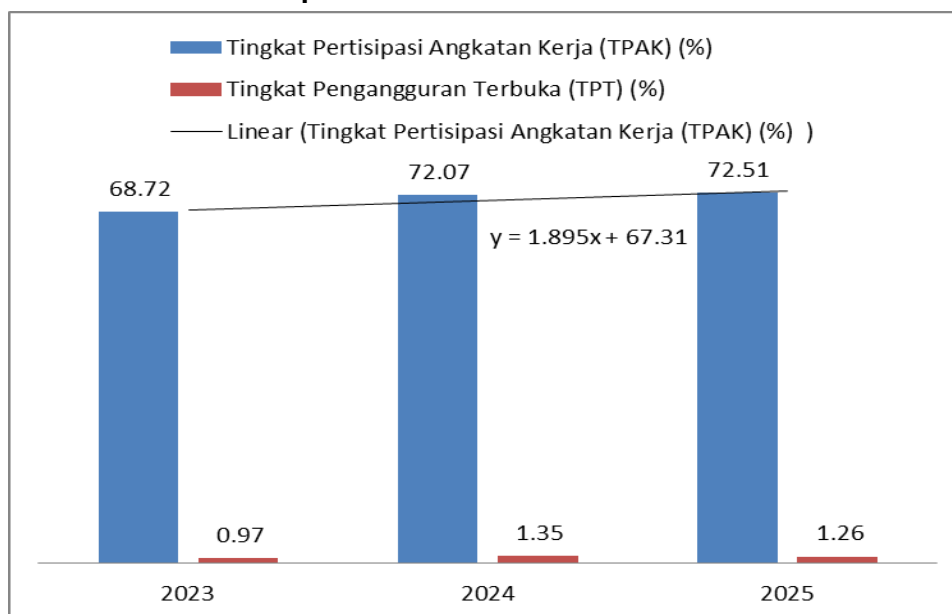
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Di Kabupaten Buru Selatan, TPAK mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja dan keterlibatan penduduk dalam aktivitas produktif yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya partisipasi angkatan kerja dapat menunjukkan ketersediaan lapangan kerja, dorongan ekonomi lokal, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menyambut peluang usaha dan investasi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah bisa menjadi sinyal adanya hambatan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, atau ketimpangan gender dalam dunia kerja. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis TPAK menjadi penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Buru Selatan. TPAK di Kabupaten Buru Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 TPAK Buru Selatan mencapai 68,72 persen, naik menjadi 72,07 persen pada tahun 2024, dan tahun 2025 ditargetkan naik menjadi 72,51 persen, dengan rata-rata kenaikan dalam tiga tahun terakhir sebesar 1,89 persen.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, TPT mencerminkan seberapa besar proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Indikator ini tidak hanya merefleksikan dinamika pasar tenaga kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap TPT menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan berkelanjutan, khususnya dalam rangka memperkuat daya saing tenaga kerja lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat daerah.

TPT Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 mencapai 0,97 persen, naik menjadi 1,35 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 ditargetkan menjadi 1,26 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Buru Selatan 2025, diolah, bapelitbang Buru Selatan.

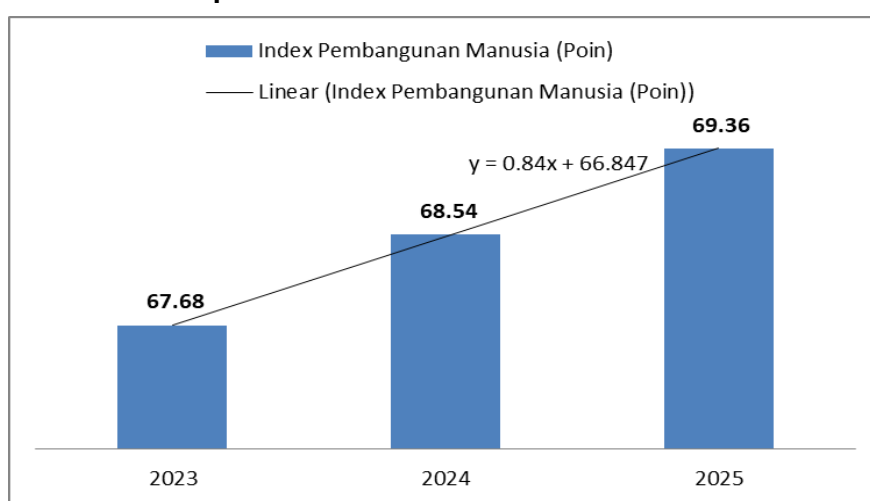
2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan penduduk suatu wilayah dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di Kabupaten Buru Selatan, IPM digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia secara berkelanjutan dan berkeadilan. Nilai IPM mencerminkan sejauh mana penduduk memperoleh akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Oleh karena itu, pencapaian IPM menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dimana pada tahun 2023 IPM Buru Selatan mencapai 67,68 poin, meningkat menjadi 68,54 poin pada tahun 2024, dan ditargetkan menjadi 69,40 poin pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84 poin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Buru Selatan 2025, diolah, bapelitbang Buru Selatan.

Peningkatan IPM 2025 didorong oleh peningkatan pada semua komponen IPM yang terdiri dari:

- Umur Harapan Hidup/UHH (tahun) saat lahir mencapai 70,54 tahun;
- Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun) mencapai 13,01 tahun;
- Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun) mencapai 8,74 tahun; dan Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah) meningkat 8.664.000 perkapita/tahun.

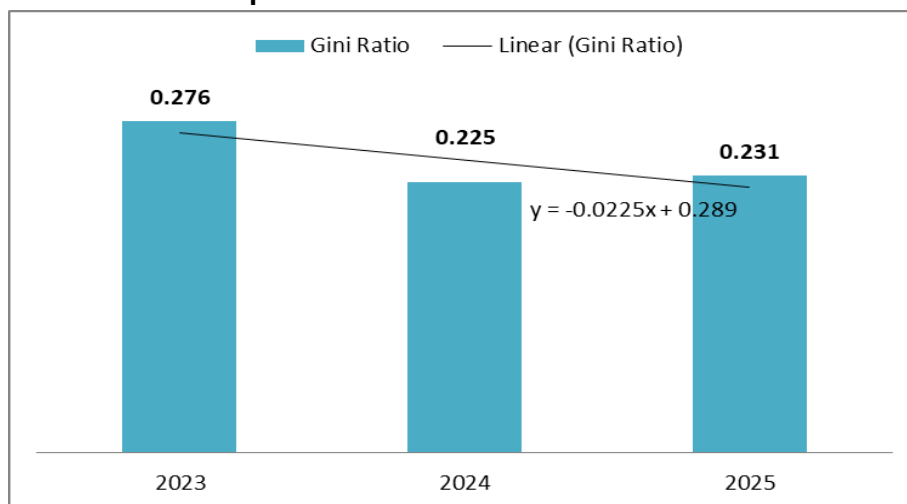
1. Gini Rasio/ Indeks Gini.

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan dan keadilan ekonomi suatu wilayah. Salah satu alat ukur yang umum digunakan

adalah Indeks Gini, yang merepresentasikan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari pemerataan sempurna. Di Kabupaten Buru Selatan, penghitungan Indeks Gini menjadi dasar dalam menilai kondisi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat serta sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Indeks Gini Kabupaten Buru Selatan dalam Tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun cenderung menurun, dimana pada tahun 2023 GR mencapai 0,276, turun menjadi 0.225 pada tahun 2024, tapi pada tahun 2025 GR naik lagi menjadi 0,231, namun kalo dilihat pada rata-rata pertumbuhan selama tahun 2023-2025 GR mengalami penurunan sebesar 0,020, artinya dengan rata-rata penurunan ini sangat optimis bahwa target pada tahun 2027 dan kedepan GR Buru Selatan semakin mendekati angka 0, sehingga hal ini Menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau distribusi pendapatan yang merata di masyarakat. Semakin rendah angkanya, semakin kecil ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin.

Grafik 2.8 Perkembangan Tingkat Gini Rasio Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi Gini Rasio di kabupaten Buru Selatan tahun 2025:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas: masih kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Kurangnya mobilitas barang dan jasa menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya hidup, dan membatasi akses masyarakat ke pusat-pusat ekonomi, yang memperlebar kesenjangan pendapatan.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah membatasi produktivitas dan peluang kerja. Perbedaan tingkat pendidikan yang tinggi antar pekerja menyebabkan disparitas pendapatan yang signifikan, di mana tenaga kerja terdidik mendapatkan penghasilan jauh lebih tinggi daripada pekerja tidak terdidik.
3. Struktur Ekonomi yang Terbatas (Ketergantungan Sektor Primer): Perekonomian sering kali hanya bertumpu pada sektor pertanian atau ekstraksi sumber daya alam tanpa adanya nilai tambah (industrialisasi). Hal ini menciptakan ketergantungan dan membatasi alternatif mata pencaharian masyarakat.
4. Kemiskinan Struktural: Lingkaran kemiskinan menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk berinvestasi dalam pendidikan atau usaha. Kemiskinan ini menyebabkan 40% lapisan masyarakat terbawah kesulitan meningkatkan taraf hidupnya, sehingga memperlebar rasio Gini.
5. Ketimpangan Distribusi Investasi: Investasi yang masuk seringkali kurang menyerap tenaga kerja lokal, sehingga manfaat ekonomi tidak merata.

2.2.2. ASPEK PELAYANAN UMUM.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar.

Urusan wajib dasar diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

a. Bidang Urusan Pendidikan.

Secara umum, pencapaian Kabupaten Buru Selatan pada bidang pendidikan dari tahun 2023 - 2025 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7. Capaian Kinerja Indikator
Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**

INDIKATOR	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
APK SD/MI/Sederajat (%)	112,02	111,15	86,95
APK SMP/MTs/Sederajat(%)	89,53	90,88	74,73
Angka Partisipasi Murni (APM)			
APM SD/ MI/Sederajat (%)	96,99	97,25	76,24
APM SMP/ MTs/Sederajat (%)	82,31	82,81	56,91
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
APS usia 7 -12 (%) (SD/MI)	100	99,88	76,24
APS usia 13-15 (%) (SMP/MTS)	95,90	95,93	56,91
Angka Putus Sekolah			
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0	0	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0	0	0
Angka Kelulusan			
Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	100
Fasilitas Pendidikan			
Sekolah SD/SDLB Kondisi Bangunan Baik (%)	85,71	85,71	85,72
Sekolah SMP/SMPLB Kondisi Bangunan Baik (%)	73,04	85,71	85,72
Rasio Ketersediaan Sekolah			
Rasio Ketersediaan Sekolah SD sederajat terhadap penduduk usia sekolah	95,10	98,51	90,66
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP sederajat terhadap penduduk usia Sekolah	-	62,83	87,5
Rasio Pendidik dan Peserta Didik per Kelas Rata-Rata			
Rasio Guru/Murid SD /SDLB	-	55,34	7,88
Rasio Guru/Murid SMP/ SMPLB	-	-	4,71
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)	8,23	-	-
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,84	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buru Selatan, 2026

b. Bidang Urusan Kesehatan.

Capaian kinerja sektor kesehatan umumnya mengalami perbaikan hal ini terlihat dari angka yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2023-2025, pada beberapa indikator kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2025 misalnya persalinan ditolong tenaga kesehatan (%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2023, data ini menunjukkan bahwa program pemerintah sangat baik dilakukan. Adapun sejumlah indikator urusan kesehan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.8.Capaian Indikator Kesehatan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**

No.	Uraian	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	2,74	4,80	0
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	25,57	26,87	0
3.	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (%)	63,83	82,39	69,1
4.	Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	52,04	52,39	33,0
5.	Pelayanan kesehatan bayi (%)	87,31	87,23	87,8
6.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	3,66	2,47	81,0
7.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk/kurus (%)	0,53	0,10	100
8.	Menurunnya Prevalensi Balita Stunting (%)	3,54	3,58	3,2
9.	Desa/Kelurahan UCI (%)	61,9	43,21	12,3
10.	Jumlah Kasus HIV/AIDS (Kasus)	7	10	20
11.	Rasio Posyandu per satuan balita	17,34	15,75	17,4
12.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan penduduk	0,67	0,64	0,6
13.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	0,025	0,025	0
14.	Rasio Dokter per satuan penduduk (/1.000)	0,27	0,49	0,4
15.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1.000)	0,35	11,57	0,4
16.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	NA	100	100
17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	37,84	80,65	100
18.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	59,20	31,00	58
19.	Cakupan Puskesmas	100	216,67	216,6
20.	Cakupan pembantu Puskesmas	49,38	48,15	48,1
21.	PHBS (%)	35,50	25,18	57,0
22.	Rasio akseptor KB (%)	29,78	39,00	49,4
23.	Cakupan peserta KB aktif (%)	29,78	39,00	49,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2026.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau setiap elemen masyarakat hingga ke seluruh penjuru desa di Kabupaten Buru Selatan. Realitanya fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru Selatan masih perlu ditingkatkan. Tabel berikut menampilkan data tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan.

**Tabel 2.9. Tabel Fasilitas Kesehatan
Menurut Kecamatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025**

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik	Posyandu Aktif	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala Madan	1	3	5	-	19	-
2.	Leksula	-	3	10	-	29	-
3.	Namrole	1	2	9	9	30	-
4.	Waesama	-	2	9	-	34	-
5.	Ambalau	-	2	4	-	8	-
6.	Fena Fafan	-	1	2	-	9	1
Jumlah		2	13	39	9	129	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2026

Adapun jumlah kematian ibu maternal dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.10. Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per
1.000 Kelahiran Hidup Kab. Buru Selatan Tahun 2023-2025**

No.	Uraian	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kematian ibu hamil	-	2	-
2.	Kematian ibu bersalin	2	-	-
3.	Kematian ibu nifas	1	3	-
4.	Kematian bayi	14	7	9
5.	Bayi Lahir Mati	17	28	19

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2026

c. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

1. Peserta KB Aktif.

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Pada tahun 2025 jumlah pasangan usia subur sebanyak 14.812 pasangan, jumlah peserta KB aktif 5.777 orang dengan persentase peserta program KB aktif sebesar 39%. Berikut data jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan tahun 2023-2025.

Tabel 2.11. Tabel Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Satuan	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	14.812	14.812	9.790
2.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Pasangan	4.411	5.777	4.841
3.	Persentase Peserta Program KB Aktif	%	29,7	39,0	49,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2026

d. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Akses Air Bersih.

Persentase pengguna air bersih di Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 sebesar 65,2 persen meningkat menjadi 65,3 persen pada tahun 2025, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih (jiwa)	39.508	39.600
2.	Persentase Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih (%)	65,2	65,3

Sumber : Dinas PUPR Kab.Buru Selatan, 2026

2. Rumah Tinggal Bersanitasi.

Persentase rumah tangga bersanitasi tahun 2024 sebesar 65,2 persen meningkat menjadi 65,3 persen pada tahun 2025. Data rumah tangga yang mendapat akses sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase rumah tangga bersanitasi	57,0	57,1
2.	Presentase rumah tangga pengguna air	65,2	65,3

Sumber : Dinas PUPR Kab.Buru Selatan, 2026

3. Kondisi Jalan.

Jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten di Buru Selatan dengan kondisi jalan Kab. Buru Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025

Tahun	Jalan Kabupaten				
	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	Panjang jalandengan kondisi baik (Km)		Panjang jalan dengankondisi rusak (Km)	
		Km	(%)	Km	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2023	384,28	60,73	15,8	323,56	82,9
2024	384,28	63,88	16,6	320,41	83,4
2025	384,28	63,53	16,5	320.76	83,5

Sumber : Dinas PUPR Kab.Buru Selatan, 2026

e. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pada urusan perumahan di Buru Selatan beberapa indikator menyentuh capaian 90% bahkan lebih di tahun 2024 dan 2025. Indikator selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	49,72	95,45
2.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	0,92	0,23
3.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	54,14	89,52

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Buru Selatan

f. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tahun 2025 beberapa indikator tingkat ketercapaian hingga 100%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	391 orang	91 orang
2.	Penegakan Perda	100	100
3.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	3,91	3,91
4.	Tingkat waktu tanggap/respon time rate (%)	NA	NA

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buru Selatan

g. Bidang Urusan Sosial.

1. Bantuan.

Secara umum bantuan sosial di Buru Selatan menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan capaian 79,20% di tahun 2024 menjadi 84,39% di tahun 2025. Indikator bantuan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.17. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Indikator	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	58,88	68,30
2.	Persentase PMKS yang tertangani	61,70	62,50
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	61,70	62,50
4.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100
6.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	NA	NA
7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	84,39	84,39

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buru Selatan

2.2.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar.

Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, serta Perpustakaan dan Kearsipan.

a. Bidang Urusan Tenaga Kerja.

Pada urusan tenaga kerja terdapat beberapa Indikator urusan tenaga kerja, diantaranya cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan mencapai 100%. Indikator selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.18. Capaian Indikator Kinerja Bidang
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024-2025**

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	22,5	22,5
2.	Persentase Pekerja Lulus Pendidikan Menengah dan Tinggi Bekerja Keahlian Menengah Tinggi	58,96	58,96
3.	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	34	34

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buru Selatan

b. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak ada jumlah KDRT yang terjadi di Buru Selatan sehingga capaian target sebesar 100%. Indikator lainnya tertera dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.19. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2025**

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100
2.	Jumlah KDRT	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buru Selatan

b. Bidang Urusan Ketahanan Pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buru Selatan tingkat capaian lebih tinggi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20. Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	41,70	59,54
2.	Pencapaian skor pola pangan harapan (Kkal/Kap/hr)	1.983	1.609
3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buru Selatan, 2026

c. Bidang Lingkungan Hidup.

Urusan bidang lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun capaian terselenggaranya KHLS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten tahun 2024 terlaksana dan 2025 juga terlaksana, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21. Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2026

Tabel 2.22. Pemberian penghargaan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota, likasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota (orang)	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2026

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat yang melakukan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang pada tahun 2025.

Tabel 2.23. Cakupan Area Pelayanan Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase cakupan area pelayanan (%)	30,8	33,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2026

Tabel 2.24. Tabel Timbunan Sampah, Jumlah sampah dan TPA/TPST/SPA Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Timbunan sampah yang ditangani (%)	71	76
2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	70	75
3.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten (%)	60	70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2026

d. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Rasio Penduduk ber-KTP.

Rasio penduduk ber KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP (17 Tahun keatas atau telah menikah). Capaian rasio penduduk ber KTP per 2025 mencapai 92,26%.

Tabel 2.25. Tabel Rasio Penduduk ber-KTP Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk (%)	57,54	90,52

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2026

2. Presentase Rasio Bayi Berakte ber-Akta Kelahiran.

Rasio bayi berakte kelahiran yang dimaksud adalah Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran dibagi Jumlah keseluruhan bayi lahir yang dilaporkan. Capaian rasio bayi berakte kelahiran pada Tahun 2025 sebesar 84,03 persen.

Tabel 2.26. Rasio Bayi berakte Kelahiran Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	81,03	84,03

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2026

3. Pasangan Berakte Nikah (%).

Capaian rasio pasangan berakte Nikah pada tahun 2024 adalah sebesar 38,14 persen dan 40,18 persen pada tahun 2025. Masih rendahnya capaian rasio pasangan berakte nikah ini oleh masih banyaknya masyarakat khususnya pasangan non muslim yang hanya melakukan pernikahan secara agama dan tidak melakukan pencatatan pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk pasangan muslim banyak yang belum memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Tabel 2.27. Tabel Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	38,14	40,18

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2026

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten.

Dalam era yang serba digital tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan database kependudukan menjadi hal yang vital, banyak aplikasi pelayanan maupun data baik yang diperuntukkan untuk internal administrasi kependudukan maupun instansi pengguna lain serta data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan

negara lainnya. Akan tetapi, masih banyaknya data anomali penduduk yaitu seperti data ganda, identitas invalid maupun sistem error. Oleh karena itu, administrasi

Kependudukan dalam berproses validasi database kependudukan secara kontinyu terus melakukan pembenahan. Untuk layanan database kependudukan baik secara online yang bisa diakses oleh instansi pengguna maupun secara statistik data menggunakan Konsolidasi Data Bersih, sehingga data yang diperoleh masyarakat maupun pengguna adalah data valid bukan data anomali. Adapun ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten telah tersedia dan Instansi Pemerintah maupun swasta dapat melakukan Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Terhitung pada tanggal 24 April 2021 database kependudukan telah berskala Nasional sehingga database kependudukan Tidak tersedia lagi di Kabupaten.

Tabel 2.28. Tabel Database Skala Kabupaten Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala Kabupaten	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2026

5. KTP Nasional berbasis NIK.

Pada tahun 2024 - 2025 Disdukcapil Kab. Buru Selatan telah menggunakan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.29. Tabel KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2026

e. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian indikator pada urusan pemberdayaan masyarakat desa terdapat indikator yang tingkat capaian mencapai 100%, yakni persentase PKK aktif. Capaian indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (%)	93,82	93,82
2.	Persentase PKK Aktif	100	100
3.	Persentase Desa berstatus Swasembada	7,40	7,40

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2025

f. Bidang Urusan Perhubungan.

Pada urusan perhubungan, pencapaian kinerja urusan perhubungan mengalami peningkatan pada tahun 2024 ke tahun 2025. Jumlah arus penumpang angkutan umum darat meningkat dari 15.330 orang di tahun 2024 menjadi 16.270 orang di tahun 2025. Begitupun indikator lain yang sebagian besar juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.31. Tabel Indikator Kinerja Daerah Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	34.946	51.467
2.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	9	9
3.	Persentase layanan angkutan darat (%)	10	10,4
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	12,96	12,96
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	27.220	28.220
6.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	11.937	13.232

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2026

Dalam hal aksesibilitas, di Buru Selatan terdata rasio panjang jalan mengalami penurunan yang lumayan signifikan yakni dari 19,64 km per jumlah kendaraan menjadi 12,96 km per jumlah kendaraan di tahun 2025.

**Tabel 2.32. Aksesibilitas Daerah
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	12,96	12,96

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2026

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami peningkatan secara terus-menerus dari tahun 2024 ke tahun 2025, begitupun barang yang terangkut angkutan umum juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.33. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan
Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	74.103	75.123
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	131.999	132.533

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2026

Jumlah barang yang terangkut Buru Selatan tercatat meningkat dari tahun ke tahun, yaitu selama tahun 2023-2025. Salah satunya jumlah barang melalui dermaga per tahun sebanyak 71.336 ton di tahun 2024 menjadi 81.732 ton di tahun 2025. Indikator lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.34. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	71.336	81.732
2.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	50.267	50.267

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2026

Begitupun dengan penumpang pesawat yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2024 berjumlah 4.338 orang menjadi 5.532 orang di tahun 2025. Data jumlah penumpang pesawat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35. Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang
Pesawat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Datang	5.532	6.654
2.	Pergi	6.405	7.215
Total		10.407	13.869

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2026

g. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika.

Keterbukaan komunikasi dan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Bidang urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Buru Selatan melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Berikut merupakan capaian bidang urusan komunikasi dan informatika tahun 2024- 2025.

**Tabel 2.36. Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Indikator	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	92,87	92,87

Sumber : Dinas Kominfo Kab.Buru Selatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat cakupan layanan telekomunikasi Kabupaten Buru Selatan terus-menerus mengalami peningkatan walaupun belum mencapai angka 100% dalam kurung waktu tiga tahun, yakni tahun 2024-2025, dimana alat komunikasi merupakan semua media atau alat yang saling terhubung yang digunakan untuk pertukaran informasi antar individu ataupun kelompok. Salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan oleh penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah telepon genggam. Telepon genggam atau biasa disebut dengan Handphone ini merupakan alat komunikasi yang berkembang seiring dengan berkembangnya zaman sehingga banyak dimiliki orang saat ini. Berikut Persentase penduduk Kabupaten Buru Selatan yang menggunakan Handphone/Telepon Genggam:

Tabel 2.37. Persentase penduduk yang Menggunakan Handphone/Telepon Genggam Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone	79,92	90,00

Sumber : Dinas Kominfo Kab.Buru Selatan Tahun 2026

Akses internet sudah merupakan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Internet adalah jalur masuk suatu individual atau kelompok untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer, komputer atau perangkat lainnya. Berikut persentase proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Buru Selatan tahun 2024-2025:

Tabel 2.38. Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	51,90	70,50

Sumber : Dinas Kominfo Kab.Buru Selatan Tahun 2026

h. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1. Koperasi Aktif.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Buru Selatan tercatat pada tahun 2024 sebesar 99,30 persen dan sama pada tahun 2025, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Koperasi Aktif	99,30	99,30

Sumber : Dinas Koperasi Kab. Buru Selatan, 2026

2. Usah Mikro dan Kecil

Sama halnya dengan koperasi aktif, persentase Usaha Mikro dan Kecil juga tetap pada angka yang sama di tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel 2.40. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	117	117

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Buru Selatan , 2026

Tabel 2.41. Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Tahun			
		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	30	30	40	40
2.	Jumlah koperasi dan UKM penerima bantuan hibah	7 Koperasi dan 10 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM
3.	Jumlah produk UKM yang dipromosikan	15	15	20	20

No.	Indikator	Tahun			
		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta design dan teknologi	15	15	20	20

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Buru Selatan , 2026

i. Bidang Urusan Penanaman Modal.

Adapun jumlah investor di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 sebanyak 176 di tahun 2024 dan sebanyak 2.045 di tahun 2025, begitupun jumlah investasi dan diikuti oleh rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Tahun	
		2024	2025
		(3)	(4)
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	524	378
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rupiah)	135.517.000.000	70.479.571.105
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang)	176	2.045

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Buru Selatan, 2026

j. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Bidang Urusan Kepemudaan bertanggung jawab untuk pengembangan organisasi pemuda. Kabupaten Buru Selatan memiliki beberapa organisasi pemuda aktif yang telah terealisasi dari beberapa jumlah yang telah ditargetkan, berikut persentase organisasi yang aktif di Kabupaten Buru Selatan tahun 2024-2025:

Tabel 2.43. Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Organisai Pemuda (%)	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Buru Selatan

Kabupaten Buru Selatan tidak hanya memiliki indikator kinerja dalam bidang kepemudaan saja, namun juga memiliki indikator kinerja dalam bidang olahraga. Berikut capaian dari indikator kinerja bidang olahraga tahun 2024-2025:

Tabel 2.44. Persentase Bidang Olahraga Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan pembinaan Olahraga (orang)	7	7
2.	Cakupan pembinaan atlet muda (orang)	1	5
3.	Jumlah atlet berprestasi	150	160
4.	Jumlah prestasi olahraga	1	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Buru Selatan

k. Bidang Urusan Perpustakaan.

Persentase Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2024 mencapai 3.969 buku dan tidak mengalami peningkatan ditahun 2025. Sedangkan persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat tidak mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni sebesar 75 persen di tahun 2025 . Kedepan dapat direncanakan basis data dengan menyediakan sumber buku-buku yang dapat diinformasikan kepada masyarakat tetapi harus berbasis internet, sehingga masyarakat akan mudah mengaksesnya

**Tabel 2.45. Capaian Indikator Bidang Urusan
Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2025**

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	1.721	2.255
2.	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah)	3.969	3.969
3.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	75	75

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kab. Buru Selatan, 2026

I. Bidang Urusan Kearsipan.

Bidang Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pengelolaan arsip dinamis maupun statis kewenangan daerah merupakan salah satu urusan kearsipan di daerah. Tabel berikut merupakan data arsip Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 dan 2025 :

Tabel 2.46. Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kab. Buru Selatan, 2026

2.2.2.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

a. Bidang Layanan Kelautan Dan Perikanan.

Produksi perikanan adalah keseluruhan hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan ataupun hewan air lainnya yang diambil dari sumber perikanan alami maupun tempat . Pada Kabupaten Buru Selatan produksi perikanan dilakukan dengan keduanya yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Berikut jumlah produksi perikanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2024-2025:

**Tabel 2.47. Produksi Perikanan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Produksi perikanan tangkap (%)	84,20	100
2.	Produksi perikanan budidaya (%)	72,90	43,91

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2026

Mendasar dari produksi perikanan, Kabupaten Buru Selatan juga mengukur nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkap untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Berikut nilai tukar nelayan dan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2024-2025:

**Tabel 2.48. Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Tukar Nelayan	101,60	101,65
2.	Angka Konsumsi ikan (%)	78,50	105,84

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2026

Selain Nilai Tukar Nelayan, juga terdapat cakupan bina kelompok nelayan yang terealisasi sebesar 75 persen pada tahun 2025. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.49. Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025**

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	90	75

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2026

b. Bidang Urusan Pertanian.

Pada urusan bidang pertanian, Kabupaten Buru Selatan capaian beberapa indikator sebesar 100% di tahun 2025. Indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.50. Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,98	104,72
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	36,71	36,54
3.	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Ada	Ada
4.	Cakupan bina kelompok petani (%)	20,51	13,57
5.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	5,74	5,61
6.	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	100	100
7.	Tersedianya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani (km)	NA	0,4

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buru Selatan, 2026

c. Bidang Urusan Pariwisata.

Bidang urusan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan bertanggungjawab atas 2 sub urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata. Pada urusan kebudayaan terdapat 3 indikator yang telah terealisasi di tahun 2023-2025 yaitu (1) penyelenggaraan festival seni dan budaya, (2) benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan, (3) cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Berikut tabel capaian keempat indikator kinerja urusan kebudayaan.

Tabel 2.51. Tabel Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya (Event)	3	2
2.	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (jumlah)	24	31
3.	Jumlah Cagar Budaya yang di Kelola Secara Terpadu (BCB)	6	6

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2026

**Tabel. 2.52. Target Capaian Urusan
Pariwisata Tahun 2024-2025**

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	95,29	97,97
2.	Lama Kunjungan Wisatawan (hari)	1.675	26.224
3.	Jumlah pengembangan obyek wisata unggulan (destinasi)	3	3
4.	PAD Sektor Pariwisata (%)	8,0	17,9
5.	Jumlah SDM Profesional Bidang Pariwisata (orang)	10	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2026

d. Bidang Urusan Perdagangan.

Untuk urusan perdagangan, semua indikator tercapai 100% pada tahun 2024. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.53. Capaian Indikator Bidang Perdagangan
dan Perindustrian Tahun 2024-2025**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	15,31	16,11
2.	Ekspor bersih perdagangan (poin)	980	980
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	21,60	21,60

Sumber : Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Buru Selatan,

2.2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH.

Daya saing daerah merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional untuk kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha.

Tabel 2.54. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berdasarkan jenis pengeluaran	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Makanan (Rp)	423.318	
Non Makan (Rp)	329.762	
Total Pengeluaran rata-rata per kapita (Rp)	752.081	
Presentase Makanan (%)	56,29	
Presentase Non Makanan (%)	43,71	

Sumber :BPS Kab. Buru Selatan

2.2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur khususnya pada bidang perhubungan merupakan hal yang penting dalam rangka mempermudah konektivitas antar wilayah, baik antar kecamatan, kecamatan dan Kabupaten maupun Kabupaten dan Provinsi. Berikut indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025.

Tabel 2.55. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Perhubungan			
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	34.946	51.467
2.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	9	9
3.	Persentase layanan angkutan darat (%)	10	10,4
4.	Pemasangan Rambu-rambu	30	20
5.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	12,96	12,96
6.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	27.220	27.220
7.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	34.946	51.467
8.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	11.937	15.345
Aksesibilitas Daerah			
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	12,96	12,96
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum			
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	74.103	74.103
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	131.999	131.999
Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun			

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	81.732	85.000
2.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	50.267	52.168

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buru Selatan, 2026

a. Ketersediaan Daya Listrik.

Kebutuhan akan listrik di Kabupaten Buru Selatan sangatlah penting bagi masyarakat karena sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2025 pasokan listrik yang ada di wilayah Kabupaten Buru Selatan, pada umumnya dipasok oleh cabang PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ulp Namrole, Kp Wamsisi, Kp. Leksula, Kp Ambalau.

Tabel 2.56. Daya Terpasang dan Distribusi Listrik di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Daya Terpasang Tahun 2025 (Kw)
(1)	(2)	(3)
1.	Leksula dan Fena Fafan	1.070
2.	Namrole	7.650
3.	Waesama	1.750
4.	Ambalau	637
Jumlah		11.107 kW

Sumber : PLN ULP Namrole Kab. Buru Selatan

b. Hotel dan Restoran.

Untuk hotel dan restoran di Buru Selatan tergambar dalam tabel 2.66. dimana jumlah dan macam pajak retribusi sebanyak 8 jenis pajak di tahun 2025.

Tabel 2.57. Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restoran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran (Unit)	38	45
2.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel (Unit)	14	18
3.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Berbintang (Unit)	1	1

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Jumlah dan Macam Pajak Daerah (Jenis)	8	9
5.	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi	13	15
6.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha (Buah)	20	20

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2026

c. Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank

Fasilitas perbankan dan lembaga keuangan non bank di Buru Selatan terdata sebanyak 5 unit, dengan rincian bank cabang sebanyak 4 unit dan perusahaan asuransi sebanyak 1 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58. Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis dan Jumlah Bank Cabang (Unit)	4 Unit	5 Unit
2.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit)	1 Unit	1 Unit

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2026

2.2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi.

a. Lama Proses Perijinan.

Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru Selatan beserta lama pembuatannya sebagai berikut.

Tabel 2.59. Lama Proses Perizinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lama Proses Perizinan	5 hari	5 Hari

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Buru Selatan, 2026

b. Angka Kriminalitas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Buru Selatan, jumlah perkara pidana yang dilaporkan di Buru Selatan pada tahun 2025 sebanyak 119 kasus, perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 35 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60. Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian/ Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah perkara pidana yang dilaporkan	119 Kasus
2.	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	35 Kasus

Sumber : Polres Kab. Buru Selatan, 2026

2.2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia.

a. Tingkat Pendidikan.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan potensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Buru Selatan. Berikut persentase tingkat Pendidikan penduduk Kabupaten Buru Selatan berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 2.61. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2025

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat/ Ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	13,33	7,05	8,72	6,51
Perempuan	8,63	6,40	8,06	5,52
40 Persen Terbawah	13,81	7,70	9,55	8,20
40 Persen Tengah	12,51	9,28	10,19	7,21
40 Persen Teratas	19,10	11,92	12,22	8,20
Buru Selatan	8,96	5,40	6,09	4,73

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2025

2.3.EVALUASI CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Tabel 2.62. Tabel Rekapitulasi Capaian Program Pada Evaluasi hasil RKPD Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.0.00.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN					
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149,399,596,70 0.00	0,00	236,695,935,266,67	229,470,735,1 72	153,60
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	38,269,386,000	0,00	1597478 642,91	32,827,091,28 1.00	85,78
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	0,00	0,00	-	0,00
	1.02.2.14.0.00.03.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67,207,084,000 .00	0,00	0,08	65,917,301,59 6.00	98,08
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48,267,118,700 .00	0,00	72,71	40,114,188,76 2.00	83,11
6	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,002,430,900. 00	0,00	2.583,33	725,241,000.0 0	72,35
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	373,814,000.00	0,00	200,00	373,814,000.0 0	100,00
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	822,729,000.00	0,00	66,67	879,223,638.0 0	106,87
9	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	199,500,000.00	0,00	25,00	199,500,000.0 0	100,00
10	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	956,457,000.00	0,00	37,50	920,518,150.0 0	96,24
	1.02.2.14.0.00.03.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI					
11	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14,897,957,000	0,00	113,33	11,515,332,07 3	77,29
	1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH					
12	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,898,560,400	0,00	80,56	5,274,794,485	89,43
13	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	874,520,000	0,00	15,00	284,499,750	32,53
14	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,117,771,100	0,00	620,37	5,548,411,750	77,95
15	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	490,124,500	0,00	250,00	113,304,000	23,12

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2,846,574,500	0,00	4,35	2,001,992,000	70,33
17	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10,386,751,550	0,00	80,00	1,698,199,000	16,35
18	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	868,159,550	0,00	100,00	698,403,450	80,45
19	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	43,582,058,400	0,00	53,33	3,430,358,200	7,87
20	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,128,933,000	0,00	50,00	246,888,400	21,87
	1.04.2.10.0.00.02.00.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN					
21	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,539,729,900	0,00	74,34	2,298,257,993	90,49
22	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	188,578,600	0,00	40,00	146,541,000	77,71
23	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	148,759,500	0,00	25,00	118,939,500	79,95
24	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	100,000,000	0,00	20,00	939,5	0,94
25	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	0,00	0,00	-	0,00
26	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	383,860,000	0,00	0,00	682,665,000	177,84
27	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	162,881,000	0,00	50,00	98,123,600	60,24
	1.05.0.00.0.00.03.00.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
28	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,864,902,000	0,00	75,00	349,192,530	18,72
29	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	433,680,000	0,00	33,33	93,640,000	21,59
30	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	15,423,000	0,00	50,00	15,423,000	100,00
	1.05.0.00.0.00.04.00.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
31	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,827,326,700	0,00	181,44	2,623,625,784	92,80
32	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	246,716,300	0,00	75,08	147,931,000	59,96

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.06.0.00.0.00.01.00 00	DINAS SOSIAL					
33	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,075,751,500	0,00	44,64	25,286,855,536	822,14
34	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	79,033,000	0,00	50,38	101,912,000	128,95
35	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	95,216,000	0,00	2,71	111,864,000	117,48
36	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,026,876,500	0,00	0,26	418,064,000	40,71
37	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	73,548,000	0,00	0,22	25,000,000	33,99
	2.08.2.13.0.00.01.00 00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					
38	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	89,074,000	0,00	80,00	91,680,000	102,93
39	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,016,404,400	0,00	156,19	2,653,905,821	87,98
40	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	298,132,600	0,00	125,00	176,006,720	59,04
41	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	341,387,000	0,00	200,00	299,607,122	87,76
	2.09.0.00.0.00.01.00 00	DINAS KETAHANAN PANGAN					
42	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,363,204,100	0,00	127,88	2,059,347,710	87,14
43	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	354,400,000	0,00	500,00	263,784,000	74,43
44	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	253,154,400	0,00	282,50	159,197,800	62,89
45	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	83,726,000	0,00	120,00	72,718,979	86,85
46	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20,778,500	0,00	50,00	1,876,500	9,03
	2.11.3.28.0.00.01.00 00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
47	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,262,569,200	0,00	100,00	4,105,315,612	96,31
48	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	293,344,000	0,00	100,00	279,265,500	95,20

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
49	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	26,252,000	0,00	100,00	2,819,000	10,74
50	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	0,00	100,00	-	0,00
51	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	41,905,800	0,00	100,00	6,365,000	15,19
52	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	0,00	0,00	-	0,00
53	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	170,655,000	0,00	100,00	56,855,000	33,32
54	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	0,00	0,00	-	0,00
55	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	92,007,000	0,00	50,00	162,625,000	176,75
56	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	150,000,000	0,00	50,00	123,300,000	82,20
	2.12.0.00.0.00.01.00 00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
57	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,313,436,740	0,00	70,05	2,022,301,367	87,42
58	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	389,505,000	0,00	0,00	240,450,162	61,73
59	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	87,650,000	0,00	0,10	1,780,000	2,03
60	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	12,423,000	0,00	10,00	1,000,000	8,05
	2.15.0.00.0.00.01.00 00	DINAS PERHUBUNGAN					
61	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,414,003,000	0,00	24,80	2,175,631,602	90,13
62	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	250,000,000	0,00	106,25	227,600,000	91,04
63	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	687,550,000	0,00	50,00	194,658,575	28,31
	2.16.2.21.0.00.01.00 00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
64	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	91,441,200	0,00	200,00	48,051,000	52,55

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
65	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	52,374,000	0,00	0,00	22,200,000	42,39
66	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	223,771,900	0,00	100,00	162,965,000	72,83
	2.17.3.32.2.07.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
67	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	0,00		6,346,275,890	0,00
68	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	0,00		7,962,400,000	0,00
69	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	0,00		5,950,000	0,00
70	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	0,00		5,396,050,000	0,00
	2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
71	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,360,661,800	0,00	97,15	2,141,912,726	90,73
72	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	571,373,000	0,00	0,00	-	0,00
73	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	94,823,200	0,00	34,67	109,123,500	115,08
74	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	0,00	0,00	-	0,00
	2.19.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
75	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,048,399,700	0,00	84,58	1,804,217,600	88,08
76	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	454,038,000	0,00	10,00	339,038,000	74,67
77	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	414,906,000	0,00	50,00	915,540,000	220,66
78	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150,000,000	0,00	100,00	30,000,000	20,00
	2.23.2.24.0.00.02.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
79	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,753,206,000	0,00	190,91	1,416,978,969	80,82
80	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	232,798,000	0,00	100,11	4,302,459,000	1.848,15

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,977,000	0,00	33,33	4,965,000	99,76
82	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	0,00	0,00	-	0,00
	3.25.0.00.0.00.01.00	DINAS PERIKANAN					
83	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,345,144,100	0,00	58,65	2,022,546,296	86,24
84	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1,970,684,300	0,00	13,75	2,201,156,829	111,70
85	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	28,503,300	0,00	50,00	23,700,000	83,15
86	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	171,478,100	0,00	0,00	61,440,000	35,83
	3.26.2.22.0.00.01.00	DINAS PARIWISATA					
87	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	675,241,000	0,00	60,00	288,665,500	42,75
88	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	31,340,500	0,00	0,00	-	0,00
89	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,012,253,500	0,00	114,71	1,744,114,370	86,67
90	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	215,536,000	0,00	25,00	104,573,500	48,52
91	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	67,100,000	0,00	0,00	60,685,000	90,44
	3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN					
92	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,177,710,000	0,00	2.956,03	4,944,777,643	95,50
93	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,001,413,000	0,00		1,731,246,915	86,50
	3.30.3.31.0.00.02.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
94	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,998,880,500	0,00	1.395,24	458,377,299	22,93
95	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	26,775,400	0,00	2.125,00	48,310,000	180,43
96	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	64,547,000	0,00	275,00	43,127,000	66,81
97	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	210,177,000	0,00	633,33	24,040,000	11,44
98	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1,366,717,200	0,00	30,52	282,415,315	20,66

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
99	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	831,053,000	0,00	2.050,00	349,456,000	42,05
100	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	47,029,900	0,00	350,00	20,061,000	42,66
	4.01.0.00.0.00.01.00 00	SEKRETARIAT DAERAH					
101	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,083,169,000	0,00	56,70	19,815,474,222	79,00
	4.01.0.00.0.00.01.00 01	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA					
102	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	415,893,000	0,00	50,00	345,843,560	83,16
103	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,107,253,000	0,00	28,89	513,242,400	46,35
	4.01.0.00.0.00.01.00 02	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					
104	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	654,591,500	0,00	170,37	1,107,175,720	169,14
105	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	265,608,500	0,00	83,33	404,179,400	152,17
	4.01.0.00.0.00.01.00 03	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
106	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	862,832,300	0,00	5,488,985, 833,33	658,678,300	76,34
107	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10,516,695,400	0,00	469,901,4 80,000,00	9,398,029,600	89,36
	4.01.0.00.0.00.01.00 04	BAGIAN HUKUM					
108	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	758,153,100	0,00	1,802,125, 599,90	556,456,200	73,40
109	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	304,204,000	0,00	155,740,8 75,000,00	92,107,970,000	30.278,36
	4.01.0.00.0.00.01.00 05	BAGIAN UMUM					
110	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,140,999,800	0,00	110,555,7 27,78	5,318,358,542	169,32
	4.01.0.00.0.00.01.00 06	BAGIAN ORGANISASI					
111	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	875,400,000	0,00	322,00	1,362,472,300	155,64

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.0.00.0.00.01.00 07	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER					
112	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	933,600,000	0,00	154,37	593,609,942	63,58
	4.01.0.00.0.00.01.00 08	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
113	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	609,530,000	0,00	350,77	596,890,000	97,93
114	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	901,470,000	0,00	250,00	329,469,000	36,55
	4.01.0.00.0.00.01.00 09	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
115	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	633,390,000	0,00	80,00	488,538,000	77,13
116	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	338,010,000	0,00	62,50	223,605,000	66,15
	4.02.0.00.0.00.01.00 00	SEKRETARIAT DPRD					
117	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,893,815,000	0,00	75,54	19,466,290,187	93,17
118	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9,960,183,000	0,00	54,43	10,129,505,900	101,70
	5.01.5.05.0.00.02.00 00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
119	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,088,625,900	0,00	30,30	5,040,734,948	82,79
120	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,023,001,000	0,00	33,23	1,397,614,524	69,09
121	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	789,576,400	0,00	10,53	156,532,500	19,82
122	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	207,360,700	0,00	1,20	9,807,000	4,73
	5.02.0.00.0.00.02.00 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
123	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,573,781,200	0,00	288,43	15,465,897,765	54,13
124	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	127,789,638,000	0,00	292,31	94,426,864,620	73,89
125	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	590,434,000	0,00	83,67	687,999,168	116,52

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.0.00.0.00.03.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
126	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,099,531,000	0,00	91,67	2,405,341,949	77,60
127	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	686,841,000	0,00	83,33	128,405,800	18,70
	5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA					
128	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,660,069,000	0,00	86,07	2,453,137,044	92,22
129	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,503,098,000	0,00		4,667,770,760	103,66
130	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,147,502,000	0,00		870,810,000	75,89
	6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH					
131	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,803,273,000	0,00	58,02	2,596,319,889	92,62
132	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	589,230,000	0,00	41,85	528,208,400	89,64
133	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	352,912,000	0,00	63,89	96,622,000	27,38
	7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN NAMROLE					
134	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,369,372,500	0,00	93,14	2,229,573,000	94,10
135	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,233,000	0,00	0,00	20,233,000	100,00
136	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17,110,500	0,00	0,00	17,110,000	100,00
137	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21,149,000	0,00	0,00	21,149,000	100,00
138	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45,052,000	0,00	2,94	45,052,000	100,00
	7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN LEKSULA					
139	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,372,856,000	0,00	2,419,86	2,982,473,736	88,43
140	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57,189,800	0,00	23,03	35,119,800	61,41
141	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62,400,240	0,00	2,63	48,288,500	77,39

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.0.00.0.00.03.00 00	KECAMATAN WAESAMA					
142	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,093,571,000	0,00	77,50	1,510,236,150	72,14
143	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12,000,000	0,00	100,00	12,111,000	100,93
144	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26,225,000	0,00	33,33	11,385,000	43,41
145	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42,970,000	0,00	0,00	14,480,000	33,70
146	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,337,000	0,00	0,00	17,337,000	100,00
	7.01.0.00.0.00.04.00 00	KECAMATAN KEPALA MADAN					
147	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,099,628,500	0,00	1,407,971, 726,35	1,740,709,938	82,91
148	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,790,000	0,00	820,000,0 00,00	103,189,500	1.173,94
149	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95,997,500	0,00	0,00	-	0,00
150	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51,350,000	0,00	1,651,118, 750,00	46,288,000	90,14
	7.01.0.00.0.00.05.00 00	KECAMATAN AMBALAU					
151	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,633,434,200	0,00	685,37	1,129,582,780	69,15
152	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17,048,000	0,00	100,00	17,048,000	100,00
153	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24,798,700	0,00	1,43	24,208,500	97,62
154	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44,942,200	0,00	50,00	43,899,000	97,68
	7.01.0.00.0.00.06.00 00	KECAMATAN FENA FAFAN					
155	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,659,822,400	0,00	222,05	1,292,711,357	77,88
156	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66,223,200	0,00	4,17	35,085,300	52,98
157	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73,856,120	0,00	4,17	46,905,220	63,51
	8.01.0.00.0.00.01.00 00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
158	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,386,962,900	0,00	47,22	2,188,321,599	91,68
159	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	800,000,200	0,00	0,00	763,997,780	95,50
160	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	66,400,000	0,00	69,23	66,400,000	100,00
161	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	32,250,000	0,00	0,00	32,250,000	100,00
162	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1,583,997,000	0,00	25,00	1,105,378,000	69,78
163	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	536,954,900	0,00	102,00	418,522,203	77,94
TOTAL			758,280,047,000	0,00	5,351,508, 596,63	813,245,503,154	107,25

Sumber data : Aplikasi SIPD Kemendagri tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas terdapat 163 Program yang tersebar pada 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2025 dan yang tidak memenuhi target/ tidak memiliki pagu pada RKPD 2025 adalah sebanyak 15 Program yang tersebar pada 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah.

2.4. EVALUASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 terdiri dari enam urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan bidang sosial. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63.
Target dan Realisasi Anggaran Penerapan SPM Tahun 2025

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Tahun Anggaran 2025 (Setelah Perubahan)		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.059.777.300	605.885.120	29,41
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.227.451.900	402.194.120	32,76
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.227.451.900	402.194.120	32,76
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	375.641.900	-	-
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	314.182.000	-	-
1.3	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	234.800.000	234.070.000	99,69
1.4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87.743.000	-	-
1.5	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	215.085.000	168.124.120	78,16
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	564.000.000	-	-
2.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	564.000.000	-	-
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	268.325.400	203.691.000	75,91
3.1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	18.000.000	-	-
3.2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	36.900.000	-	-
3.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	213.425.400	203.691.000	95,43
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.649.162.000	54.975.000	3,33
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.649.162.000	54.975.000	3,33
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.649.162.000	54.975.000	3,33
1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	623.107.000	50.700.000	8,13
1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	469.601.000	1.050.000	0,22
1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.741.000	1.125.000	41,04
1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	309.716.000	2.100.000	0,67
1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	211.000.000	-	-
1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.997.000	-	-
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	578.760.000	105.482.000	18,22

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Tahun Anggaran 2025 (Setelah Perubahan)		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	563.100.000	105.482.000	18,73
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	563.100.000	105.482.000	18,73
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	563.100.000	105.482.000	18,73
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.660.000	-	-
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.660.000	-	-
1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	15.660.000	-	-
IV.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	140.630.000	131.300.000	93,36
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.630.000	131.300.000	93,36
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	140.630.000	131.300.000	93,36
1.1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	140.630.000	131.300.000	93,36
V.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	364.793.000	354.827.000	97,26
A.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	233.550.000	233.550.000	100
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	233.550.000	233.550.000	100
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	233.550.000	233.550.000	100
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	15.423.000	15.423.000	100

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Tahun Anggaran 2025 (Setelah Perubahan)		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.423.000	15.423.000	100
1.1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15.423.000	15.423.000	100
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	115.820.000	105.854.000	91,39
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	36.350.000	36.224.000	99,65
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	36.350.000	36.224.000	99,65
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	79.470.000	69.630.000	87,61
2.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	79.470.000	69.630.000	87,61
VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	34.128.000	30.932.000	90,63
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	34.128.000	30.932.000	90,63
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	34.128.000	30.932.000	90,63
1.1	Pemberian Layanan Rujukan	34.128.000	30.932.000	90,63
TOTAL		4.827.250.300	1.283.401.120	26,58

Penerapan SPM bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di seluruh wilayah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, SPM menjadi instrumen untuk memastikan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan SPM memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, pelaksanaan SPM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



Dalam penyusunan RKPD, pencapaian target SPM menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan, dan alokasi anggaran perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, maka dalam dokumen ini perlu melihat capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

1. Urusan Bidang Pendidikan

Tabel 2.64
Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98.29%	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					94.87%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4113	4113	0	100.00%	
2 .	Pendidikan Dasar					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14177	14177	0	100.00%	
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00%	
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	840	840	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buru Selatan

Secara keseluruhan, peningkatan capaian pada ketiga jenis pelayanan dasar tersebut mencerminkan semakin optimalnya penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2025. Meskipun demikian, upaya peningkatan presentase Mutu Layanan terhadap ketiga jenis pelayanan tersebut akan terus ditingkatkan melalui alokasi Anggaran pada urusan Bidang pendidikan di tengah kebijakan efisiensi Anggaran yang terjadi.

2. Urusan Bidang Kesehatan

Tabel 2.65
Capaian SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			93.42%	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	85	85	0	100.00%	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	53	53	0	100.00%	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					93.21%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	130	130	0	100.00%	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					85.92%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	391	391	0	100.00%	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					91.03%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	6099	6099	0	100.00%	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					92.11%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	3610	3610	0	100.00%	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					91.89%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	161	161	0	100.00%	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					97.32%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	80	80	0	100.00%	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					97.85%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN	Orang	62	62	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS						
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					83.04%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	29	29	0	100.00%	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					92.15%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	26	26	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buru Selatan

Secara keseluruhan, capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2025 masih tergolong baik dengan rata-rata capaian sebesar 93,42 persen. Namun demikian, terdapat beberapa jenis pelayanan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama pelayanan kesehatan bagi balita dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang masih menunjukkan capaian relatif rendah. Upaya penguatan akses pelayanan, peningkatan cakupan deteksi dini, serta optimalisasi pendataan dan pemantauan sasaran perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pencapaian target SPM pada tahun-tahun mendatang.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.66
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					65.45%	
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					73.72%	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)						
	*tidak masuk dalam hitungan	Orang	60580	40680	19900	40680.00%	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					57.17%	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)						
	*tidak masuk dalam hitungan	Orang	60580	34636	25944	34636.00%	

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buru Selatan

Secara keseluruhan, capaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 masih menghadapi tantangan yang cukup besar, khususnya dalam penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik yang capaian pelayanannya masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum serta sanitasi, perluasan cakupan layanan, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut diharapkan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terus meningkat dan menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.67
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			77.98%	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	53	53	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	80.00%	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					55.95%	
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	55.95%	

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buru Selatan

Secara umum, rendahnya capaian kinerja pada tahun 2025 terhadap layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tercatat sebesar 0 tidak mencerminkan rendahnya kualitas pelayanan, melainkan disebabkan oleh tidak adanya warga negara

yang menjadi sasaran pelayanan pada jenis layanan dasar tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat kebutuhan intervensi layanan yang harus diberikan selama tahun berjalan. Ke depan, Pemerintah Daerah tetap perlu menjaga kesiapan penyelenggaraan layanan perumahan dan kawasan permukiman, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana maupun kebutuhan relokasi masyarakat akibat pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga pelayanan dapat segera diberikan apabila terdapat sasaran yang membutuhkan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,

Tabel 2.68
Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						86.74%	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					86.74%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	55	55	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	6.74%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						93.11%	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					89.33%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	600	600	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	9.33%	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					90.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	600	600	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	10.00%	
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100.00%	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	600	600	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						100.00%	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah	Jumlah	-80%	80.00%	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19	19	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buru Selatan

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Keberhasilan dalam capaian indikator pelayanan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, memperkuat perlindungan masyarakat, serta memberikan pelayanan penyelamatan dan penanggulangan kebakaran secara cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan minimal.

6. Urusan Bidang Sosial.

Tabel 2.69
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		INDIKATOR UTAMA			97.74%	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					98.46%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	381	381	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.46%	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					96.67%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	381	381	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.67%	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					96.92%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	381	381	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.92%	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					96.67%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	381	381	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.67%	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	381	381	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buru Selatan

Secara keseluruhan, capaian indikator pelayanan dasar Urusan Bidang Sosial tahun 2025 tersebut di atas mencerminkan semakin optimalnya penyelenggaraan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Buru Selatan.. Meskipun demikian, upaya peningkatan presentase Mutu Layanan terhadap jenis pelayanan tersebut melalui alokasi Anggaran pada urusan Bidang Sosial di tengah kebijakan efisiensi Anggaran yang terjadi.

2.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis
RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027

ASPEK/ URUSAN	AKAR MASALAH	DATA DUKUNG	STATEMENT PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	2	3	4	4
Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Daerah yang Masih rendah	Terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, minimnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta kurangnya infrastruktur pendukung ekonomi daerah	Angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 adalah 69,36	Masih Rendahnya tingkat literasi digital dan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pengembangan potensi lokal menyebabkan sumber daya manusia belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap dinamika ekonomi modern	Kualitas SDM dan Literasi Masih Rendah
Implementasi nilai-nilai kemuliaan ahlak masih perlu ditingkatkan	kesadaran dan penerapan sikap jujur, disiplin, serta tanggung jawab sosial belum merata di berbagai lapisan masyarakat	Angka Indeks Kerukunan antar umat beragama Buru Selatan tahun 2025	Kurangnya pembinaan karakter sejak dini dan peran aktif lingkungan sosial dalam menanamkan nilai moral menyebabkan nilai-nilai akhlak belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Penegakan Hukum dan Demokrasi Belum Optimal
Masih belum optimalnya mutu pelayanan bidang sosial dasar	Mutu pelayanan bidang sosial dasar di Kabupaten Buru Selatan masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung yang memadai	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Kurangnya pengawasan, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan turut memperlambat peningkatan kualitas layanan	Pelestarian dan Ketahanan Sosial Budaya Rendah

ASPEK/ URUSAN	AKAR MASALAH	DATA DUKUNG	STATEMENT PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	2	3	4	4
Pembangunan kebudayaan, stabilitas sosial dan inklusifitas nilai adat belum optimal	Masih terbatasnya perhatian terhadap pelestarian serta pengembangan potensi budaya lokal.	Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah sebesar 60,38%	Beberapa wilayah masih menghadapi kesenjangan sosial serta perbedaan pandangan antar kelompok yang dapat memicu disharmoni sosial	Pelestarian dan Ketahanan Sosial Budaya Rendah
Angka kemiskinan dan stunting masih tinggi	Keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi menjadi salah satu penyebab. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi bantuan dan layanan sosial tidak merata, terutama di daerah pedalaman dan pesisir	Angka Kemiskinan masih tinggi 14,84% dan Prevalensi Stunting 39,7%	Program intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan secara optimal karena kurangnya koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan pendanaan	Infrastruktur Rendah dan Kesenjangan antar Wilayah
Ketahanan pangan masih rendah yang mendorong garis kemiskinan tinggi	produktivitas sektor pertanian dan perikanan belum optimal, sementara sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada kedua sektor tersebut. Keterbatasan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan tani, serta akses terhadap pupuk dan bibit unggul, membuat hasil produksi tidak stabil dan sulit bersaing di pasar	Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 48,83	Lemahnya sistem distribusi dan pasar lokal mengakibatkan hasil pertanian masyarakat tidak terserap dengan baik, sehingga pendapatan petani dan nelayan belum dapat ditingkatkan secara signifikan. Kurangnya dukungan dalam pengembangan ekonomi pangan lokal dan minimnya edukasi tentang diversifikasi pangan.	Risiko Bencana, Perubahan Iklim, Kerentanan Daya Dukung Wilayah dan Kemandirian Pangan Lokal
Laju dan tingkat ketahanan ekonomi serta inklusifitas pelaksanaannya masih rendah	Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan perikanan tradisional yang rentan terhadap perubahan cuaca, harga pasar, serta minimnya inovasi dan teknologi	Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi masih rendah tahun 2025 0,413	Kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menyebabkan peluang ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan	Kemitraan dan Kesiambungan Pembangunan Belum Optimal
Adanya keterbatasan dan belum meratanya infrastruktur, akses serta konektivitas antar wilayah	Keterbatasan dan belum meratanya infrastruktur, akses, serta konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh belum meratanya pembangunan dan kualitas infrastruktur dasar	Nilai Indeks Infrastruktur masih rendah, tahun 2025 2,78	Keterbatasan investasi dan anggaran daerah memperlambat pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, potensi lokal sulit dikembangkan secara optimal dan kesenjangan antar wilayah	Infrastruktur Rendah dan Kesenjangan Wilayah

ASPEK/ URUSAN	AKAR MASALAH	DATA DUKUNG	STATEMENT PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	2	3	4	4
Produktivitas dan hilirisasi sektor unggulan masih belum optimal	Sebagian besar kegiatan ekonomi masih berfokus pada produksi bahan mentah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, tanpa diikuti dengan pengolahan lanjutan yang dapat meningkatkan nilai jual	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,66% - Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,21% - Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 3,66%	Rendahnya akses terhadap teknologi, modal, serta sumber daya manusia terampil menyebabkan efisiensi dan daya saing produk lokal masih terbatas.	Pembangunan Ekonomi, IPTEK dan Inovasi Belum Optimal
Kondisi kapasitas fiskal sangat kecil dan dukungan PAD masih sangat rendah	Kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Buru Selatan yang sangat kecil dan dukungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah mencerminkan lemahnya indikator kemandirian dan efektivitas keuangan daerah.	Nilai Indeks pengelolaan Keuangan Daerah Buru Selatan tahun 2025	Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan masih minim	Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat Belum Optimal dan Rendahnya Kapasitas Fiskal
Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan belum berjalan secara baik	Masih terdapat keterbatasan dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan, di mana koordinasi antar perangkat daerah belum optimal.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	sistem pengawasan internal dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan masih rendah, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.	Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat Belum Optimal dan Rendahnya Kapasitas Fiskal
Potensi kejadian bencana alam dan perubahan iklim tinggi	Wilayah ini rawan terhadap banjir, tanah longsor, kekeringan, serta gelombang tinggi akibat kondisi topografi dan cuaca ekstrem	Nilai Indeks Resiko Bencana masih tinggi, Tahun 2025 adalah 155,20	Kurangnya sistem peringatan dini, minimnya infrastruktur penanggulangan bencana, dan rendahnya kapasitas lembaga lokal memperlihatkan belum optimalnya kesiapan menghadapi ancaman tersebut	Risiko Bencana, Perubahan Iklim, Kerentanan Daya Dukung Wilayah dan Kemandirian Pangan Lokal
Pencapaian pembangunan desa yang berstatus mandiri masih sangat rendah	Lemahnya indikator kemandirian ekonomi, kapasitas kelembagaan, serta kualitas pelayanan dasar di tingkat desa. Dari sisi ketahanan sosial, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah dan semangat gotong royong mulai menurun.	Nilai Presentase Desa mandiri yang masih rendah, pada tahun 2025 adalah 2,50%	Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana juga turut memperlambat kemajuan menuju desa mandiri.	Kemitraan dan Kesiambungan Pembangunan Belum Optimal

ASPEK/ URUSAN	AKAR MASALAH	DATA DUKUNG	STATEMENT PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	2	3	4	4
Ketersediaan Data, Riset, dan Inovasi Pembangunan Daerah Belum Memadai	Masih rendahnya Ketersediaan data, riset, dan pengembangan inovasi di Kabupaten Buru Selatan	Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 adalah 45,67	Penerapan Sistem Satu Data di tingkat daerah belum mencapai potensi penuhnya. Hal ini terlihat dari belum adanya integrasi data antar sektor, adanya keterbatasan dalam hal validitas dan akurasi data, serta penggunaan data spasial yang belum maksimal dalam perencanaan wilayah serta pemantauan kemajuan pembangunan	Pembangunan Ekonomi, IPTEK dan Inovasi Belum Optimal

2.6. TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Dalam penyusunan rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kabupaten. Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2027 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 3 daerah pemilihan yang meliputi 6 kecamatan. Kegiatan reses ini berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2027, KUA-PPAS dan APBD tahun 2027. Selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027. Berikut ini adalah usulan pokok-pokok pikiran berdasarkan kamus usulan dan permasalahan dari 20 anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.71
Rumusan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada RKPD 2027

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VALIDASI/ KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase ASN yang Berkinerja baik		Kabupaten Buru Selatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	- Pengembangan Kompetensi ASN					
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi epemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VALIDASI/ KET
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Ketahanan Pangan	
	- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rasio luas daerah irigasikewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
9	PEOGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VALIDASI/ KET
1	2	3	4	5	6	7
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partisipasi Murni SMP.MTS		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Pendidikan	
	- Penyelenggaraan Pendidikan Dasar					
	- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah					
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan((%))		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Persentase)		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Pertanian	
	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
	- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					

1	2	3	4	5	6	7
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VALIDASI/ KET
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat		Kabupaten Buru Selatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA	
	- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan Sosial		Kabupaten Buru Selatan	Dinas Sosial	
	Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					

Sumber data Rancangan Kamus Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dari usulan yang diajukan di atas, maka keterkaitan antar usulan dengan Prioritas Pembangunan Daerah serta perangkat daerah pengampu kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.71
Keterkaitan antara Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas
Pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	6
1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
	- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penguatan UMKM, koperasi, dan kewirausahaan lokal yang inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
	- Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
	- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi epemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
	- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Penguatan UMKM, koperasi, dan kewirausahaan lokal yang inklusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
	- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan UMKM, koperasi, dan kewirausahaan lokal yang inklusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	6
	- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi inklusi	Dinas Ketahanan Pangan
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendukung SDM dan ekonomi lokal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi inklusi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan ketahanan bencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	- Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan
	- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan yang bernilai tambah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan yang bernilai tambah	Dinas Pertanian
	- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan yang bernilai tambah	Dinas Pertanian
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA
15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan	Dinas Sosial

NO	PROGRAM/ KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	6
	Kabupaten/Kota	ekonomi inklusi	

2.7. INOVASI DAERAH

Permasalahan Pembangunan tahun 2025 yang menjadi dasar penentuan isu strategis adalah hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut :

Inovasi daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, serta daya saing ekonomi dan sosial. Inovasi ini mencakup berbagai bidang, seperti teknologi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan inovasi, pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Inovasi daerah juga dapat menciptakan peluang usaha baru, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing sektor industri dan ekonomi kreatif. Inovasi dalam bidang pelayanan publik dan sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Penerapan teknologi dalam pemerintahan dan layanan publik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan berinteraksi dengan pemerintah. Dengan inovasi, pemerintah daerah dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, nilai Indeks Inovasi Daerah kabupaten Buru Selatan pada tahun 2025 adalah 45,67 dari yang di targetkan yaitu sebesar 44,49 atau dengan realisasi capaian 101,51 atau termasuk dalam kategori daerah yang inovatif.

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dalam berbagai sektor. Kabupaten Buru Selatan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa inisiatif program dan kegiatan yang mendukung penciptaan ekosistem inovasi dan budaya inovasi di kalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Perangkat Daerah antara lain :

1. Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat Buru Selatan, Pemenang lomba Krenova mendapatkan fasilitas berupa uang pembinaan, piagam, piala.
2. Penyelenggaraan Lomba Krenova Kategori Perangkat Daerah. Lomba ini diikuti oleh semua Organisasi Perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Buru Selatan.

Pada tahun 2024, inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.72
Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI BUDIDAYA IKAN LELE DALAM EMBER (PERKAYA BUDIKDAMBER)	Inovasi BUDIKDAMBER adalah inovasi yang memiliki keunggulan dalam efisiensi lahan, kemudahan penerapan, dan minimnya kebutuhan modal, sehingga sangat cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat pedesaan dengan keterbatasan sumber daya. Aksi ini melibatkan pelatihan kepada kelompok budidaya ikan (Pokdakan), penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan peningkatan produksi.	DINAS PERIKANAN
2	GERAKAN BERSAMA INTERNET POSITIF (GEBASEPO)	Inovasi ini dilaksanakan di Kabupaten Buru Selatan bertujuan mengkampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat di Wilayah kabupaten Buru Selatan agar tidak melakukan postingan-postingan negatif pada akun akun di dunia maya, seperti pada akun Facebook,	DINAS KOMINFO

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		instagram, WhatsApp dan akun-akun media sosial lainnya. Postingan tersebut diantaranya, ujaran kebencian, berita bohong, video asusila, Isu-isu SARA, Judi Online, serta ancaman dan pemerasan via online yang sangat meresahkan masyarakat. Ini juga merupakan gerakan melawan musuh yang memiliki akun-akun palsu di dunia maya yang tak tampak di dunia nyata.	
3	OPTIMALISASI PERAN KEAMANAN PANGAN SEBAGAI USAHA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN HAK KONSUMEN	Inovasi Optimalisasi peran Keamanan Pangan sebagai usaha Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Hak Konsumen adalah bentuk terobosan yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat.	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	OPTIMALISASI SUMBERDAYA PENYULUH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN BURU SELATAN	Inovasi Optimalisasi Sumberdaya Penyuluh dalam rangka Peningkatan Produksi Pertanian ini menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian memiliki empat peran kunci: fasilitator, mediator, komunikator, dan konsultan. Sebagai fasilitator, penyuluh membantu petani dalam mengakses teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Sebagai mediator, mereka memfasilitasi dialog antara petani dan pihak terkait untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Sebagai komunikator, penyuluh membantu dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada petani mengenai praktik pertanian. Juga sebagai konsultan, mereka memberikan saran dan bimbingan teknis kepada petani dalam menerapkan praktik-praktik tersebut.	DINAS PERTANIAN

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
5	GERAKAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA (GEMA TABEA)	Inovasi Gerakan Masyarakat Tangguh Bencana (GEMA TABEA) adalah sebuah terobosan dalam bentuk aksi dan implementasi transformasi pengetahuan dan pelatihan dan simulasi kepada masyarakat desa untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Desa yang dimaksud di sini adalah kelurahan atau istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	BPBD

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Buru Selatan yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2027.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Maluku, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2027. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokokpokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan

kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2027. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.

3.1.1. Arah Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Nasional.

a. Arah Kebijakan Fiskal Kolaboratif, Terarah, dan Terukur

Kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk kolaboratif, terarah dan terukur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Fokus kebijakan mencakup:

1. Optimalisasi Pendapatan Negara.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk mengonversi peningkatan aktivitas ekonomi menjadi penerimaan negara melalui reformasi administrasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, yang ditempuh melalui modernisasi administrasi perpajakan dan PNPB, integrasi basis data didukung oleh digitalisasi untuk mencegah kebocoran dan menangkap seluruh aktivitas ekonomi (termasuk sektor informal), penguatan pengawasan, simplifikasi regulasi untuk mengurangi informalitas, penerapan windfall tax secara terukur dan terarah, serta penguatan sinergi pusat dan daerah.

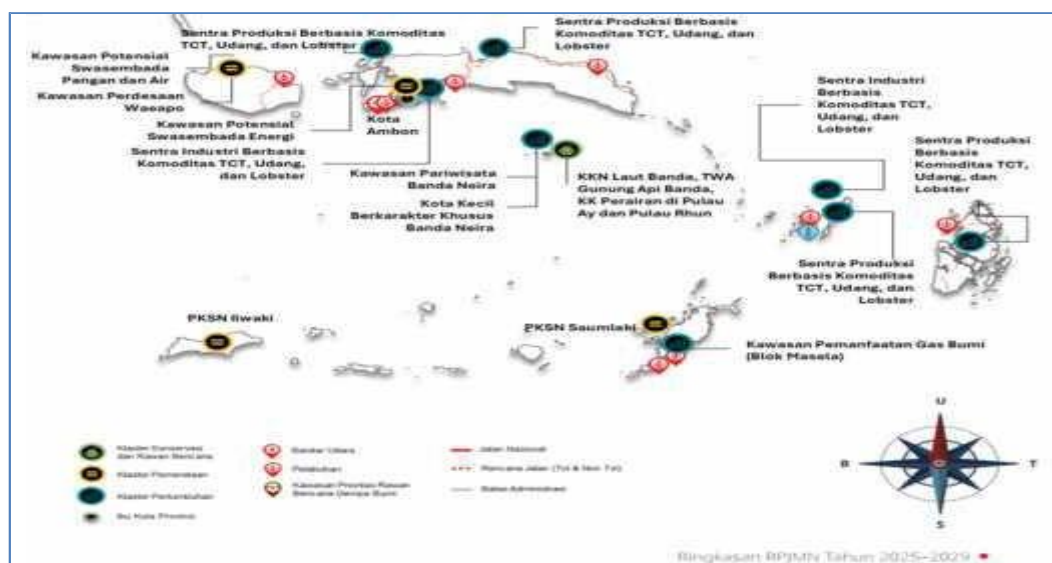
2. Belanja Negara Efisien dan Terukur.

Belanja negara diprioritaskan pada belanja produktif dengan daya ungkit tinggi terhadap perekonomian (better spending) untuk mendukung pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

3. Pengelolaan Defisit dan Instrumen Pembiayaan Inovatif, Prudent, dan Berkelanjutan.

Pembiayaan utang tetap menjadi instrumen utama untuk memenuhi kebutuhan defisit dengan pengelolaan risiko yang rukur, terutama terkait tingkat imbal hasil (yield) dan jatuh tempo (maturity). Pembiayaan non-utang diperkuat melalui sinergi Indonesia Investment Authority (INA) dan BPI Danantara, penguatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BLU/BLUD, serta pemanfaatan aset negara dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara lebih efektif dan efisien. Seluruh instrumen tersebut dikelola terpadu untuk memperkuat sinergi pendanaan antara APBN, sektor swasta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat daerah, pembiayaan utang daerah didorong agar lebih sinergis dengan instrumen APBN dan APBD. Penguatan kapasitas fiskal daerah juga dilakukan melalui perluasan skema pembiayaan inovatif, termasuk KPDBU, land value capture, dana abadi daerah, peningkatan peran BUMD dan pemanfaatan BMD, serta optimalisasi SAL dan dana daerah yang masih mengendap di perbankan untuk mendukung kebutuhan pembangunan.

Arah Pembangunan ekonomi Nasional tahun 2027 di Indonesia untuk wilayah Maluku diarahkan untuk menjadi “Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia”. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan highlight lokasi prioritas Wilayah Maluku dengan rincian sebagai berikut

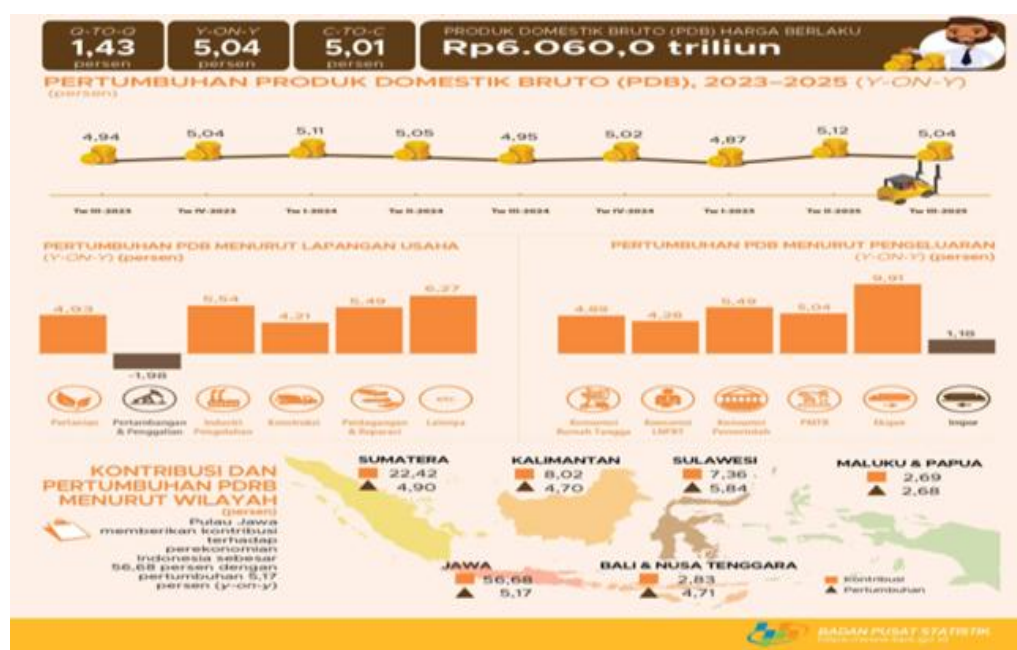


Gambar.3.1.. Highlight Lokasi Prioritas Maluku

Sasaran pembangunan Nasional berfokus pada: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, hasil tersebut dapat dicapai dengan adanya dukungan belanja pemerintah untuk infrastruktur dan program sosial untuk menggerakkan ekonomi. Penguatan Sektor Swasta: Mendorong kredit perbankan untuk meningkatkan investasi swasta. Pengembangan SDM & Digitalisasi: Peningkatan SDM unggul, pendidikan berbasis digital, serta pengembangan kewirausahaan global. Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Pengembangan sektor ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerataan & UMKM: Fokus pada pemerataan pembangunan dan pengembangan UMKM. Stabilitas Makroekonomi: Menjaga inflasi dan disiplin fiskal, meski ada isu perlambatan dan tantangan dari ketidakpastian global dan kebutuhan reformasi struktural untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Sampai tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal IV diproyeksikan bisa mencapai 5,45 persen (y-on-y), namun hingga Januari 2026 belum merilis data resmi PDB Kuartal IV/2025, Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year (y-on-y) pada Kuartal I (Q1) mencapai 4,87 persen, sementara Kuartal II (Q2) mencapai 5,12 persen dan Kuartal III (Q3) mencapai 5,04 persen.

Capaian ini dipengaruhi dari sisi Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 4,93 persen, Industri Pengolahan mencapai 5,54 persen, Kontruksi 4,21 persen, Industri Pengolahan 5,49 persen dan Jasa lainnya yang menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 6,27 persen, sementara Sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,89 persen, Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 4,28 persen, Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT) sebesar 5,04 persen, sementara dari sisi Ekspor tumbuh sebesar 9,91 persen, adapun kontribusi pertumbuhan PDRB menurut wilayah di indonesia, untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar dibawah berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai Triwulan III tahun 2025

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah – panjang. Untuk akselerasi

transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil. Laju Inflasi Indonesia sampai dengan bulan Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) atau tahunan sebesar 2,92 persen, dengan komoditas penyumbang utamanya adalah Emas Perhiasan sebesar 0,79 persen, sementara laju Inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m), pada Desember 2025 sebesar 0,64 persen, dengan komoditas penyumbang utamanya adalah cabai Rawit yakni sebesar 0,17 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar.3.3. Perkembangan Laju Inflasi Indonesia tahun 2025

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

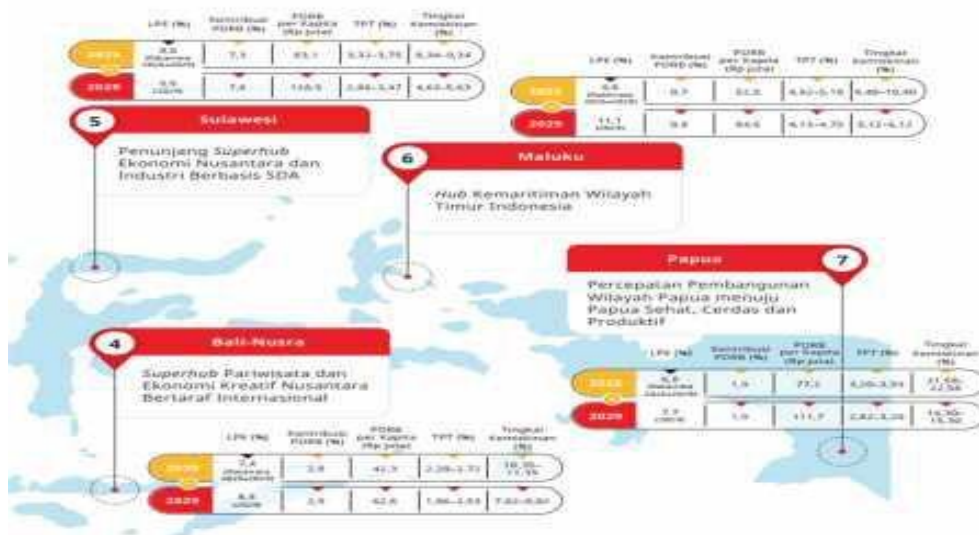
Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Adapun Arah Pembangunan Wilayah

Maluku adalah “ Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia” yang ditetapkan dengan proyeksi atau target beberapa indikator makro antara lain, Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2027 di proyeksikan mencapai 5,80 - 6,50 persen, Laju Inflasi di proyeksikan mencapai $2,5 \pm 1,0$ persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka di proyeksikan menjadi 4,30 - 4,87 persen, dan Tingkat Kemiskinan di targetkan turun mencapai 6,00 - 6,50 persen pada tahun 2027, , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.3.1. Capaian dan target ekonomi makro Nasional

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,80 - 6,50
2	Laju Inflasi	%	2,92	$2,5 \pm 1,0$
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,25	6,00 - 6,50
4	Rasio Gini	%	0,363	0,362 - 0,367
5	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,88	0,57
6	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	Na	39,57
7	IKLH Daerah	Angka	78,58	76,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,85	4,30 - 4,87

Sumber :. Permen PPN RI No 4 Tahun 2026



Sumber : Dokumen RPJMN 2025-2029

Gambar.3.4. Arah Pembangunan Wilayah

3.1.2. Arah Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku.

strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku akan menjadi acuan utama dalam mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan terkoordinasi. Strategi memberikan kerangka berpikir jangka menengah dalam menjawab isu-isu strategis, sedangkan arah kebijakan memastikan bahwa setiap langkah operasional pemerintah daerah tetap berada dalam koridor pembangunan yang telah ditetapkan. Tanpa strategi dan arah kebijakan yang jelas, pelaksanaan program dan kegiatan berisiko tidak terfokus, tidak efisien, dan tidak sinkron antar sektor maupun antar wilayah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan membantu menjamin konsistensi antara visi-misi kepala daerah dengan implementasi kebijakan pembangunan di lapangan. Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak bersifat ad hoc, melainkan terstruktur dan berorientasi pada hasil. Perumusan ini juga menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya, pemantauan capaian pembangunan, serta evaluasi kinerja, sehingga seluruh proses pembangunan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2027 Pemerintah Provinsi Maluku menitikberatkan pada Penguatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan lebih focus pada Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dengan memaksimalkan potensi lokal, Pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas SDM. serta Prioritas:

- Hilirisasi Komoditas Unggulan: Pemberian insentif dan fasilitasi untuk hilirisasi komoditas unggulan Maluku;
- Pengembangan UMKM: Program pendampingan, pelatihan, dan akses permodalan bagi UMKM, serta pembukaan aksesibilitas pasar;
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri lokal;

- Penguatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Program kesehatan preventif dan kuratif, serta peningkatan gizi, terutama pada ibu dan anak;
- Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Implementasi program pengelolaan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

RPJMN 2025 – 2029 mengarahkan kabupaten Buru Selatan sebagai Kawasan Afirmasi dengan fokus Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka. Highlight Indikasi Intervensi sebagai berikut.

Tabel.3.2. Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Buru Selatan Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
1	Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka:	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui : 1 Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan output : penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran	• Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta pemerataan guru • Pendampingan program makan siang bergizi bagi anak sekolah dan pesantren • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		2 Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output : pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen 3 Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output : pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sakolah dan remaja 4 Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output : pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA	

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
		5 Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output : rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh 6 Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output : pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan 7 Peningkatan literasi, dengan output : pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital	
		8 Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan output : pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan Kontekstual Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
		1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>Telemedicine</i>	

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
		2 Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis 3 Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>Telemedicine</i> 4 Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting 5 Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga Esehatan	

Sumber : Dok. RPJMD Promal 2025-2029

3.1.2.1. Capaian dan Proyeksi Ekonomi Makro Provinsi Maluku.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi Maluku Selama periode 2023-2025 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 mencapai 58,48 Trilyun Rupiah meningkat menjadi 62,64 Trilyun Rupiah dan meningkat lagi menjadi 66,31 Trilyun Rupiah pada tahun 2025 dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 5,91 Trilyun Rupiah, sementara capaian pertahun LPE Provinsi Maluku berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, dimana pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 5,21 persen (y-o-y), selanjutnya meningjat menjadi 5,34 persen (y-o-y), namun pada tahun 2024 turun menjadi 4,56, hal ini disebabkan salah satunya dari kebijakan fiskal (Efisiensi Anggaran) dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : - BPS Provinsi Maluku ,2026

Gambar.3.5. Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Maluku Tahun 2023-2025

Pada tahun 2025 capaian LPE provinsi Maluku dipengaruhi dari sisi Lapangan Usaha yang tertinggi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 23,96 persen, selanjutnya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,75 persen dan diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,49 persen dan paling terendah adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 0,10 persen, sementara dari sisi pengeluaran tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 70,30 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 27,59 persen, selanjutnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 23,70 persen, dan yang terendah dari Net Ekspor Antar Daerah mencapai (minus) -18,79 persen.

2. PDRB Perkapita.

Pada periode 2023-2025, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita Maluku mencapai sebesar 30,46 Juta Rupiah, naik menjadi 32,20 Juta Rupiah pada tahun

2024, dan pada tahun 2025 mencapai 33,65 Juta Rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan selama 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 1,59 Juta Rupiah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS Provinsi Maluku 2026,

Grafik.3.1.PDRB Perkapita Provinsi Maluku 2023-2025

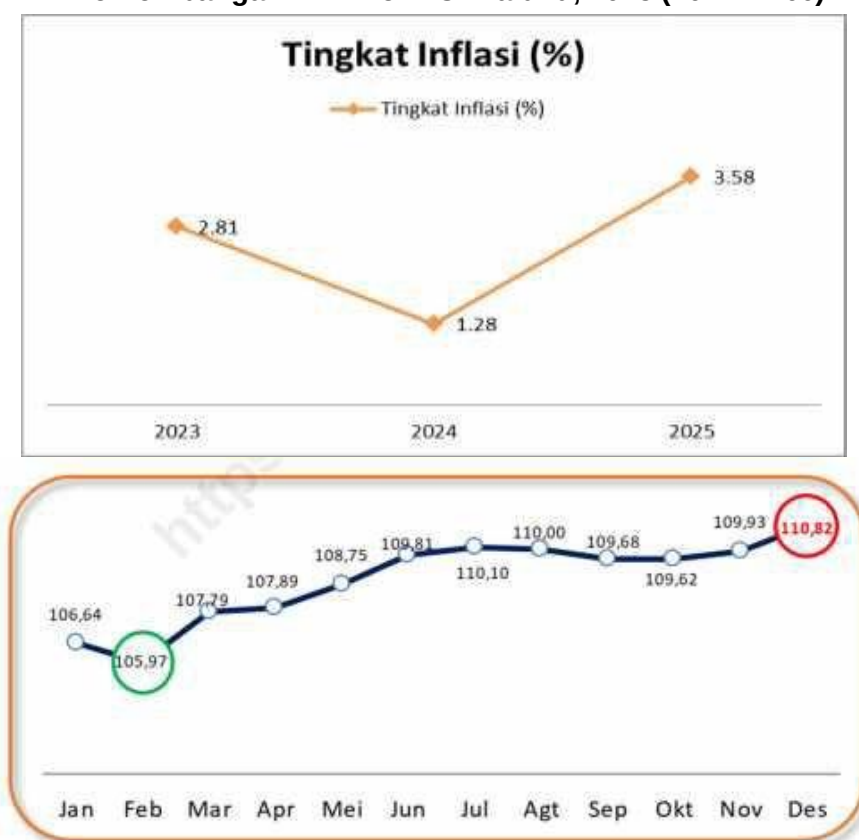
3. Tingkat Inflasi.

Selama periode tahun 2023 hingga 2025, inflasi tahunan gabungan indeks harga konsumen (IHK) di Provinsi Maluku menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi serta faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi harga barang dan jasa di Maluku. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Maluku, inflasi tahunan di Maluku pada tahun 2023 mencapai 2,81 persen, turun menjadi 1,28 persen pada tahun 2024, inflasi kembali mengalami peningkatan sebesar 3,58 persen pada tahun 2025, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas utama di Maluku seperti bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, rokok putih, tukang mandor, ikan teri, nasi dengan lauk, dan embal.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar 110,82. IHK Provinsi Maluku selama tahun 2025 menunjukkan tren penurunan pada bulan Februari dan September - Oktober. Sebaliknya tren kenaikan terjadi pada Maret – Agustus dan

November - Desember. IHK tertinggi terjadi pada Desember 2025 sebesar 110,82 sementara IHK terendah pada bulan Februari 2025 sebesar 105,97. Dibanding 38 Provinsi di Indonesia, IHK Provinsi Maluku pada Desember 2025 berada pada ranking ke-11. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik.3.2. Tingkat Inflasi Tahun 2023-2025 dan Perkembangan IHK Provinsi Maluku Tahun 2025, Perkembangan IHK Provinsi Maluku, 2025 (2022 = 100)



Sumber : - BPS Provinsi Maluku 2026

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Jumlah angkatan kerja berdasarkan data BPS Provinsi Maluku pada tahun 2023 sebanyak 910.758 orang, naik menjadi 966.813 orang pada tahun 2024, dan terus naik lagi menjadi 984.241 orang, kenaikan ini secara otomatis akan berdampak terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada tahun 2023 TPAK mencapai 63,60 persen sementara TPT mencapai 6,31 persen, pada tahun 2024 TPAK mencapai 66,52 persen TPT mencapai

6,11 persen dan pada tahun 2025 TPAK mencapai 66,66 persen, sementara TPT mencapai 6,27 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut..

Grafik.3.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Tahun 2023-2025

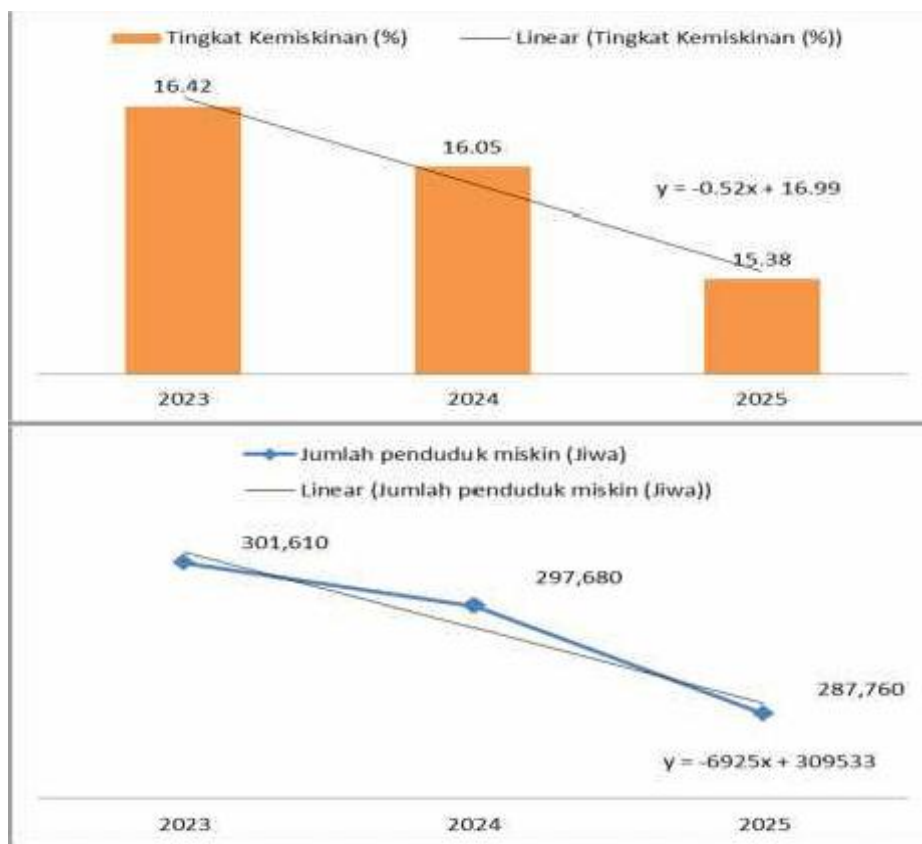


Sumber : - Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2025

5. Tingkat Kemiskinan.

Capaian Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami penurunan cukup baik, dimana pada tahun 2023 persentase penduduk miskin mencapai 16,42 persen atau sebanyak 301.610 jiwa (Maret 2023), turun menjadi 16,05 persen atau sebesar 297.680 jiwa pada tahun 2024 (Maret 2024) dan pada tahun 2025 turun lagi menjadi 15,38 persen atau sebesar 287.760 jiwa (Maret 2025), dengan rata-rata penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,52 persen atau berkurang sebesar 6.925 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik.3.4. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Tahun 2023-2025



Sumber : - Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2025

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku selama 3 (Tiga) tahun terakhir dari 2023-2025 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 IPM mencapai 72,75 poin, meningkat menjadi 73,40 poin pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 74,09 poin pada tahun 2025, hal ini sudah tentu menggambarkan terjadi peningkatan juga pada komponen IPM, baik Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Standar layak hidup yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun juga mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut

**Grafik.3.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Maluku Tahun 2023-2025**



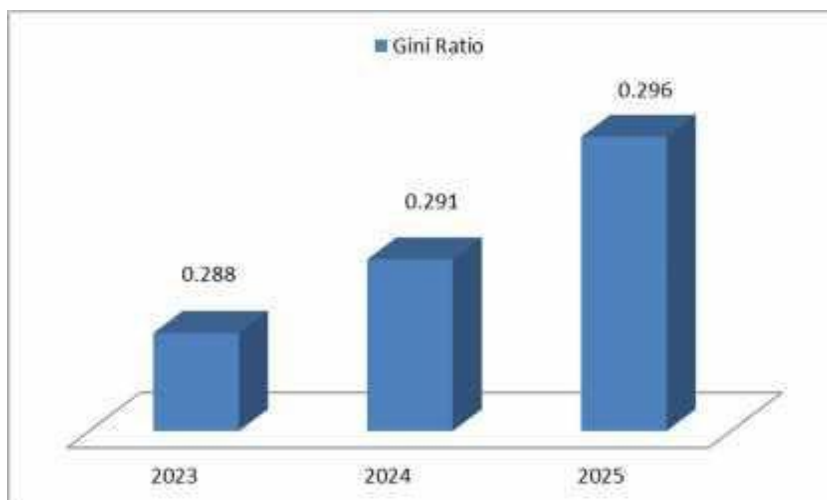
Sumber : - Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2025

7. Gini Rasio (GR).

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Rasio, dimana Gini ratio berkisar dari 0 hingga 1; semakin mendekati 0, semakin merata distribusi pengeluaran penduduk, sedangkan mendekati 1 menandakan ketimpangan tinggi.

Gini Rasio Provinsi Maluku selama 3 (Tiga) tahun terakhir (2023-2025) terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 GR mencapai 0,288, meningkat menjadi 0,291 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 0,296 pada tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

**Grafik.3.6. Indeks Gini Rasio
Provinsi Maluku Tahun 2023-2025**



Sumber : - - Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2025

8. Proyeksi / Target Indikator Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2027.

Struktur ekonomi Provinsi Maluku didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian daerah. Potensi yang besar pada sektor-sektor unggulan menawarkan peluang untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi wilayah ke depan. Diperlukan kebijakan yang relevan dan khusus untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan serta mengatasi tantangan yang dihadapi, sehingga mampu memaksimalkan potensi ekonomi Provinsi Maluku dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun proyeksi indikator ekonomi makro yang di targetkan Provinsi Maluku pada tahun 2027 untuk mengukur keberhasilan pembangunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian dan Target Indikator ekonomi Makro Provinsi Maluku

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,31	6,85
2	PDRB Per Kapita	juta	34,03	42,65
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,27	0,29
4	Tingkat Kemiskinan	%	15,38	13,67
5	Rasio Gini	%	0,296	0,261- 0,265
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,69	0,50
7	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	Na	40,45
8	IKLH Daerah	Angka	81,03 - 81,72	82,76
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,27	5,80

Sumber : - Dok. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029,
- Proyeksi, Diolah Bapelitbang Buru Selatan

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Buru Selatan.

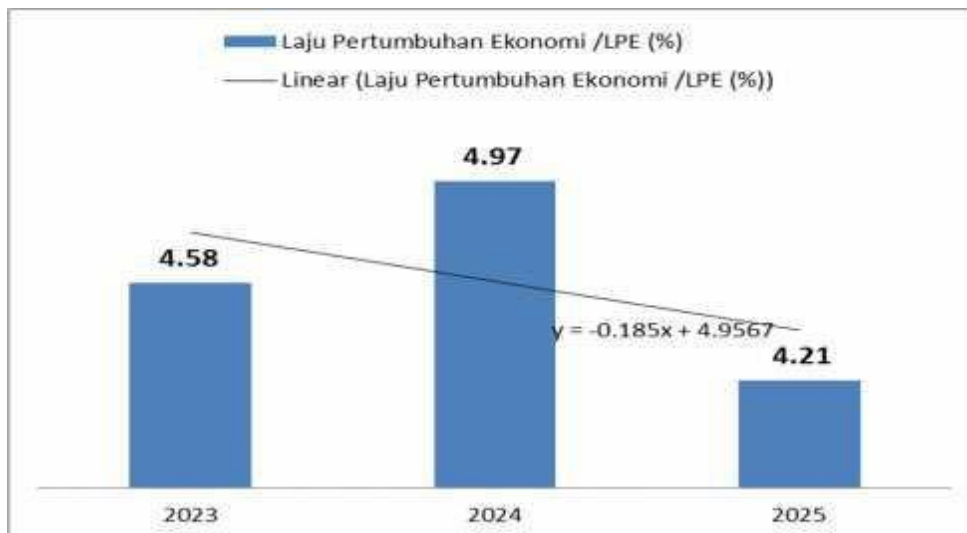
1. Pertumbuhan Ekonomi.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku yang memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini mencerminkan dinamika pembangunan yang terus berlangsung, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Buru Selatan menunjukkan tren yang positif, didorong oleh peningkatan produksi komoditas unggulan serta dukungan program pembangunan daerah. Analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan dan merumuskan strategi yang tepat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS Buru Selatan Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2023 LPE mencapai 4,58 persen, naik menjadi 4,97 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 turun mencapai 4,21 persen, dengan rata-rata pertumbuhan dalam 3 tahun

terakhir mengalami penurunan sebesar 0,18 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik.3.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**



Sumber :, BPS Buru Selatan, 2025, diolah, bapelitbang Kab. Buru Selatan

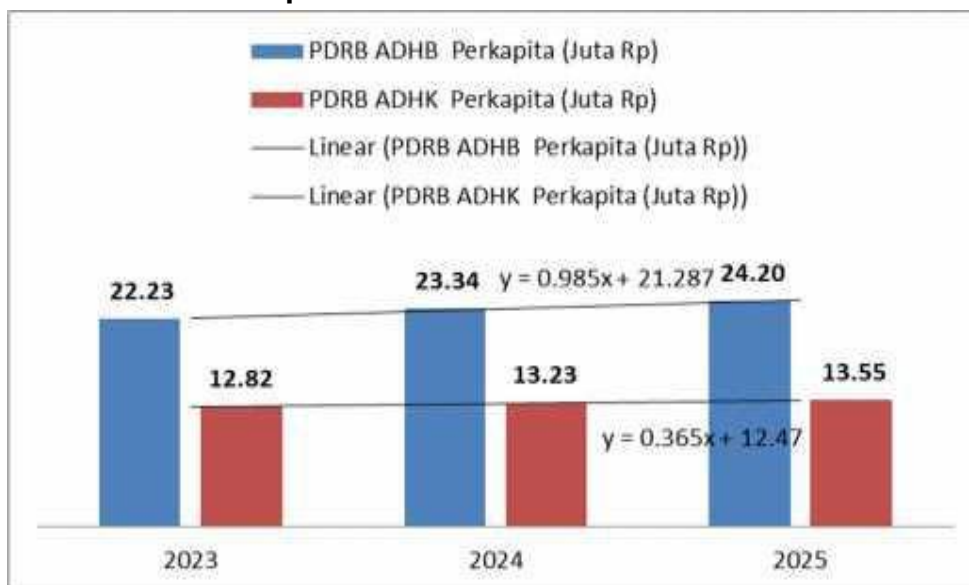
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi Inklusif terutama UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi inklusif yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

2. PDRB Perkapita.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah dan menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Buru Selatan, PDRB per kapita memberikan informasi penting mengenai kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan wilayah serta distribusi hasil pembangunan kepada penduduk. Perubahan nilai PDRB per kapita dari waktu ke waktu tidak hanya mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi indikator efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, analisis terhadap PDRB per kapita sangat krusial dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2023–2025 mencerminkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor makro ekonomi nasional maupun kondisi lokal. Berdasarkan data BPS Buru Selatan PDRB ADHB per kapita menunjukkan tren peningkatan, dimana dari Rp. 22,23 juta rupiah pada tahun 2023, naik menjadi Rp. 23,34 juta pada tahun 2024. dan pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 24,20 Juta Rupiah perkapita/tahun, dengan rata-rata pertumbuhan 1,21 Juta Rupiah perkapita/tahun. Sementara PDRB ADHK per kapita pada tahun 2023 mencapai 12,82 Juta Rupiah, naik menjadi 13,23 Juta Rupiah dan pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 13,55 Juta Rupiah Perkapita/tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.8. PDRB PerKapita
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**

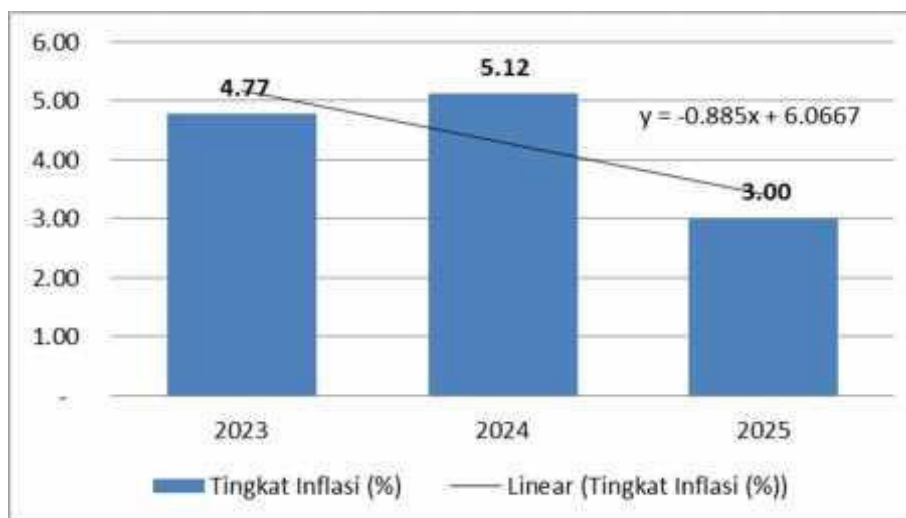


Sumber : BPS Buru Selatan, 2025

3. laju Inflasi.

Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan year-on-year pada tahun 2023 mencapai 4,77 persen naik menjadi 5,12 persen pada tahun 2024, namun pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 3,00 persen, dengan rata-rata penurunan selama 3 tahun terakhir sebesar 0,88 persen .Dengan Komuditas Penyumbangan Utamanya Adalah Transportasi, Makanan, Minuman, Dan Tembakau, Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran Dan Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik.3.9. Laju Inflasi
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**



Sumber : , BPS Buru Selatan, 2025.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Inflasi di kabupaten Buru Selatan tahun 2025:

1. peningkatan jumlah penduduk tidak di barengi dengan kebutuhan bahan pokok, sehingga permintaan terhadap kebutuhan bahan pokok melebihi pasokan yang tersedia, hal ini mengakibatkan harga bahan pokok akan cenderung naik.
2. Tingginya Biaya Logistik dan Distribusi: Aksesibilitas dan infrastruktur transportasi yang belum memadai (darat, laut, udara) menyebabkan biaya angkut barang menjadi sangat mahal. Hal ini berakibat langsung pada tingginya harga jual barang di tingkat konsumen.
3. Ketergantungan pada Pasokan Luar Daerah: Daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pokok (seperti beras, minyak, bahan bangunan) secara mandiri. Ketergantungan pasokan dari luar membuat harga sangat rentan terhadap gangguan distribusi.
4. Terbatasnya Infrastruktur Ekonomi: Kurangnya gudang penyimpanan, pasar yang belum memadai, dan minimnya fasilitas distribusi menyebabkan stok barang tidak stabil. Saat pasokan terlambat, harga akan langsung melonjak.
5. Faktor Geografis dan Cuaca (Musiman): Bencana alam atau cuaca ekstrem sering memutuskan akses distribusi sehingga memicu kelangkaan barang pokok.

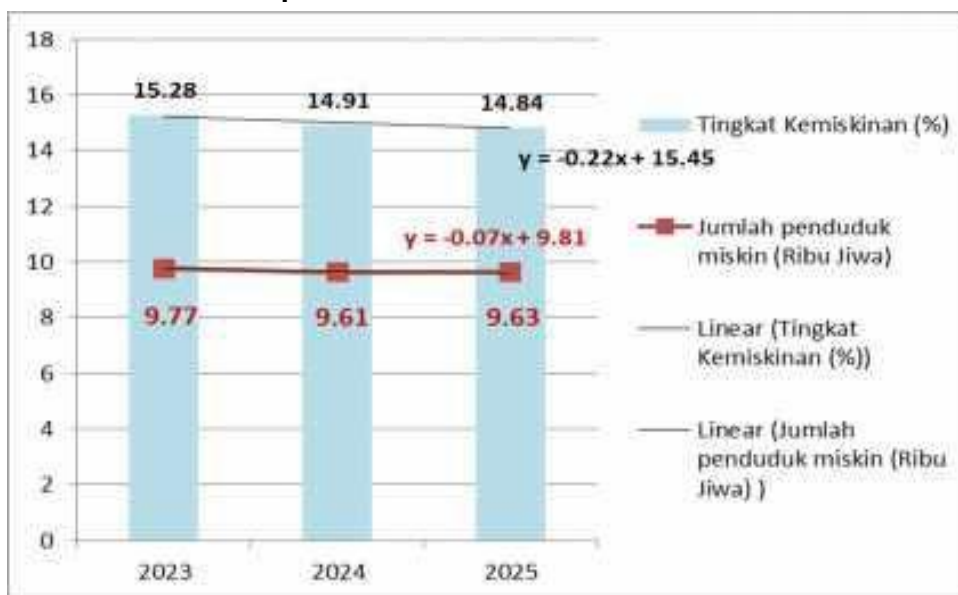
6. Rantai Distribusi yang Panjang: Rantai pasok yang melibatkan banyak perantara menyebabkan harga di tingkat pengecer menjadi sangat tinggi dibandingkan harga pokok produksi.
7. Keterbatasan Tenaga Ahli dan Modal: Minimnya pelaku usaha sehingga membuat persaingan usaha tidak sehat, yang memungkinkan pedagang besar menetapkan harga tinggi.

4. Tingkat Kemiskinan.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Capaian Persentase penduduk miskin Buru Selatan dari tahun 2023 sampai 2025 mengalami penurunan cukup baik, dimana pada tahun 2023 presentase penduduk miskin mencapai 15,28 persen atau sebanyak 9.770 jiwa, turun menjadi 14,91 persen atau sebesar 9.610 jiwa pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 turun lagi menjadi 14,84 persen atau sebesar 9.630 jiwa, dengan rata-rata penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,22 persen atau berkurang sebesar 70 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.10. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Buru Selatan, 2025, diolah, bapelitbang Kab. Buru Selatan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan tahun 2025 di Buru Selatan antara lain adalah:

1. Adanya intervensi program perlindungan sosial dari Pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Sembako dari Kemensos;
2. Adanya peningkatan harga komoditas tanaman perkebunan rakyat (kelapa kopra);
3. Sektor pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan positif pada triwulan I 2025. Momentum bulan Ramadhan pada awal pekan pertama Maret menyebabkan aktivitas panen tanaman pangan meningkat 32,35%;
4. Produksi tanaman hortikultura mengalami peningkatan pada triwulan I Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya;
5. Peningkatan industri makanan dan minuman serta penyediaan makan minum karena kebutuhan permintaan konsumen saat momentum bulan Ramadhan.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Seiring kenaikan harga komoditas makanan dan non makanan, garis kemiskinan Kabupaten Buru Selatan selama 3 (Tiga) tahun terakhir juga terus mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2023 mencapai Rp.743.721, naik menjadi Rp.769.919 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 GK Buru selatan lagi menjadi Rp.789.414 per kapita per bulan, dengan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir sebesar Rp.22.847 per kapita per bulan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.11. Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025



Sumber BPS Buru Selatan 2025.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat

.Pengangguran Terbuka (TPT) .

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Di Kabupaten Buru Selatan, TPAK mencerminkan dinamika pasar

tenaga kerja dan keterlibatan penduduk dalam aktivitas produktif yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya partisipasi angkatan kerja dapat menunjukkan ketersediaan lapangan kerja, dorongan ekonomi lokal, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menyambut peluang usaha dan investasi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah bisa menjadi sinyal adanya hambatan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, atau ketimpangan gender dalam dunia kerja. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis TPAK menjadi penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Buru Selatan.

TPAK di Kabupaten Buru Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 TPAK Buru Selatan mencapai 68,72 persen, naik menjadi 72,07 persen pada tahun 2024, dan tahun 2025 ditargetkan naik menjadi 72,36 persen, dengan rata-rata kenaikan dalam tiga tahun terakhir sebesar 1,82 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, TPT mencerminkan seberapa besar proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Indikator ini tidak hanya merefleksikan dinamika pasar tenaga kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap TPT menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan berkelanjutan, khususnya dalam rangka memperkuat daya saing tenaga kerja lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat daerah.

TPT Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 mencapai 0,97 persen, naik menjadi 1,35 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 ditargetkan menjadi 1,29 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.12. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**



Sumber : BPS Buru Selatan 2026,

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan penduduk suatu wilayah dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di Kabupaten Buru Selatan, IPM digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia secara berkelanjutan dan berkeadilan. Nilai IPM mencerminkan sejauh mana penduduk memperoleh akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Oleh karena itu, pencapaian IPM menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dimana pada tahun 2023 IPM Buru Selatan mencapai 67,68 poin, meningkat menjadi 68,54 poin pada tahun 2024, dan ditargetkan menjadi 69,40 poin pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84 poin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**



Sumber :, BPS Buru Selatan 2026, IPM Promal 2026.

Peningkatan IPM 2025 didorong oleh peningkatan pada semua komponen IPM yang terdiri dari:

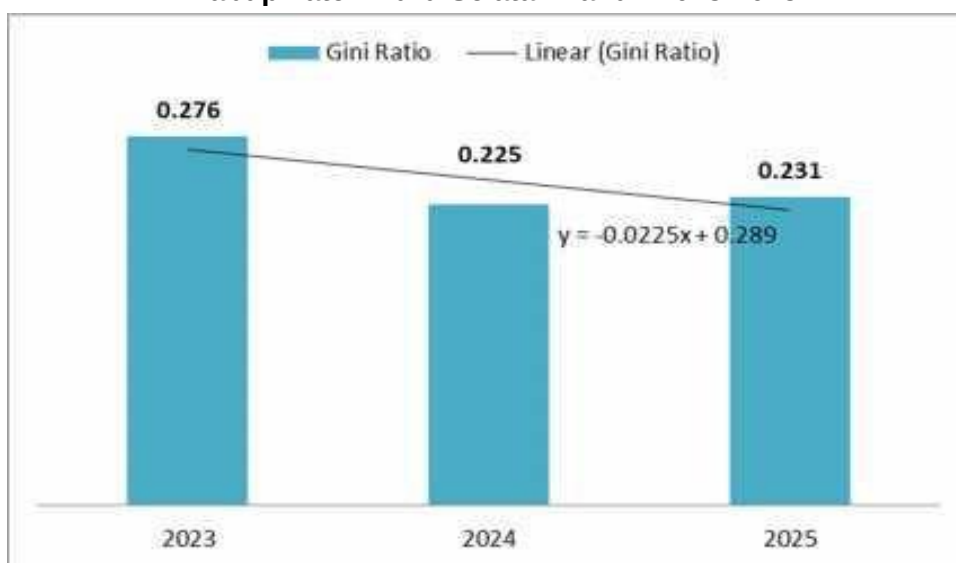
- Umur Harapan Hidup/UHH (tahun) saat lahir mencapai 70,54 tahun;
- Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun) mencapai 13,01 tahun;
- Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun) mencapai 8,74 tahun; dan
- Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah) meningkat 8.664.000 perkapita/tahun.

7. Gini Rasio/ Indeks Gini.

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan dan keadilan ekonomi suatu wilayah. Salah satu alat ukur yang umum digunakan adalah Indeks Gini, yang merepresentasikan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari pemerataan sempurna. Di Kabupaten Buru Selatan, penghitungan Indeks Gini menjadi dasar dalam menilai kondisi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat serta sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Indeks Gini Kabupaten Buru Selatan dalam Tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun cenderung menurun, dimana pada tahun 2023 GR mencapai 0,276, turun menjadi 0.225 pada tahun 2024, tapi pada tahun 2025 GR naik lagi menjadi 0,231, namun kalo dilihat pada rata-rata pertumbuhan selama tahun 2023-2025 GR mengalami penurunan sebesar 0,020, artinya dengan rata-rata penurunan ini sangat optimis bahwa target pada tahun 2027 dan kedepan GR Buru Selatan semakin mendekati angka 0, sehingga hal ini Menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau distribusi pendapatan yang merata di masyarakat. Semakin rendah angkanya, semakin kecil ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin.

**Grafik .3.14. Perkembangan Tingkat Gini Rasio
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi Gini Rasio di kabupaten Buru Selatan tahun 2025:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas: masih kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Kurangnya mobilitas barang dan jasa menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya hidup, dan membatasi akses masyarakat ke pusat-pusat ekonomi, yang memperlebar kesenjangan pendapatan.

2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah membatasi produktivitas dan peluang kerja. Perbedaan tingkat pendidikan yang tinggi antar pekerja menyebabkan disparitas pendapatan yang signifikan, di mana tenaga kerja terdidik mendapatkan penghasilan jauh lebih tinggi daripada pekerja tidak terdidik.
3. Struktur Ekonomi yang Terbatas (Ketergantungan Sektor Primer):
Perekonomian sering kali hanya bertumpu pada sektor pertanian atau ekstraksi sumber daya alam tanpa adanya nilai tambah (industrialisasi). Hal ini menciptakan ketergantungan dan membatasi alternatif mata pencaharian masyarakat.
4. Kemiskinan Struktural: Lingkaran kemiskinan menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk berinvestasi dalam pendidikan atau usaha. Kemiskinan ini menyebabkan 40% lapisan masyarakat terbawah kesulitan meningkatkan taraf hidupnya, sehingga memperlebar rasio Gini.
5. Ketimpangan Distribusi Investasi: Investasi yang masuk seringkali kurang menyerap tenaga kerja lokal, sehingga manfaat ekonomi tidak merata.

8. Proyeksi/Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi domestik dan global beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka kondisi perekonomian Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4. Capaian dan Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Buru Selatan

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,21	5,68
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp Juta	13,55	16,18
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2,96	3,10
4	Tingkat Kemiskinan	%	14,84	9,71
5	Rasio Gini	Indeks	0,231	0,200
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,36	71,14
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	54,23	101,64
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,29	1,09

Sumber : - BPS Buru Selatan, RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029

9. Tantangan dan prospek ekonomi tahun 2026 dan 2027.

Menjawab sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upayameningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui target indikator makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2027 berikut disajikan data sandingan target indikator makro tahun tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Nasional	Maluku	Buru Selatan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	6,85	5,68
2	PDRB Per Kapita	juta	Na	42,65	16,18
3	Kontribusi PDRB	%	Na	0,29	3,10
4	Tingkat Kemiskinan	%	8,25	13,67	9,71
5	Rasio Gini	%	0,363	0,261- 0,265	0,200
6	Indeks Modal Manusia (IMM) /IPM	Indeks	0,88	0,50	4,21
7	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	Na	40,45	Na
8	IKLH Daerah	Angka	78,58	82,76	54,23
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,85	5,80	1,29

Sumber : - Dok. RPJMN 2025-2029
Dok. RPJMD Promal 2025-2029
RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (money follow program), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah serta mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pemenuhan mandatory spending menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu :

- a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
- b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- d. Belanja Wajib dari pajak Daerah paling rendah 10% - 50% sesuai dengan jenis Pajak Daerah.

Parameter Kapasitas Fiskal Daerah, merupakan salah satu dasar kebijakan anggaran Pemerintah Daerah ke depan, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Mengukur sejauh mana kemandirian daerah dalam menggali potensi pajaknya. Transfer ke Daerah (TKD) Dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program strategi, dan Belanja Daerah: Fokus pada realisasi belanja pegawai, belanja modal untuk infrastruktur publik, dan belanja sosial. Kapasitas Fiskal Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2023 sampai 2025, dapat dilihat pada tabel beri

Realisasi APBD Tahun anggaran 2023 – 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD-P TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI APBD TAHUN 2025 (Rp)	APBD TAHUN 2026 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	PROYEKSI RKPD TAHUN 2027 (Rp)	TARGET RPJMD TAHUN 2027 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	660,170,900,738.00	574,606,096,242.81	601,108,052,140.00	(49,413,046,207.00)	(0.07)	631,163,454,400.00	797,068,058,534.00	165,904,604,134.00	26.29
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43,550,449,239.00	13,110,655,796.63	38,193,484,140.00	4,292,837,292.00	0.10	40,103,158,000.00	20,118,186,540.00	(19,984,971,460.00)	(49.83)
4. 1. 01.	Pajak Daerah	11,950,000,000.00	2,300,197,609.00	10,300,000,000.00	7,999,802,391.00	0.67	10,815,000,000.00	7,427,010,000.00	(3,387,990,000.00)	(31.33)
4. 1. 02.	Retribusi Daerah	7,521,303,000.00	4,922,916,979.00	7,521,300,000.00	(3,000.00)	(0.00)	7,897,365,000.00	3,961,468,710.00	(3,935,896,290.00)	(49.84)
4. 1. 03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,376,238,977.00	5,376,238,977.00	6,000,000,000.00	623,761,023.00	0.12	6,300,000,000.00	3,160,200,000.00	(3,139,800,000.00)	(49.84)
4. 1. 04.	Lain-lain PAD yang Sah	18,702,907,262.00	511,302,231.63	14,372,184,140.00	(4,330,723,122.00)	(0.23)	15,090,793,000.00	5,569,507,830.00	(9,521,285,170.00)	(63.09)
4. 2.	Pendapatan Transfer	612,420,451,499.00	558,109,247,415.18	558,714,568,000.00	(53,705,883,499.00)	(0.10)	586,650,296,400.00	743,170,671,642.00	156,520,375,242.00	26.68
4. 2. 01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	601,620,451,499.00	546,499,712,670.00	547,714,568,000.00	(53,905,883,499.00)	(0.09)	575,100,296,400.00	732,170,671,642.00	157,070,375,242.00	27.31
	- Dana Perimbangan	-	26,924,574,333.00	-	-	-	-	-	-	-
	- DBH Pajak/ DBH SDA	7,589,442,000.00	414,028,050.00	2,714,284,000.00	(4,875,158,000.00)	(0.64)	2,849,998,200.00	3,610,000,000.00	760,001,800.00	26.67
	- Dana Alokasi Umum	417,872,781,499.00	374,740,206,253.00	356,890,540,000.00	(60,982,241,499.00)	(0.15)	374,735,067,000.00	473,176,671,642.00	98,441,604,642.00	26.27
	- Dana Alokasi Khusus	99,550,147,000.00	82,606,387,234.00	130,306,489,000.00	30,756,342,000.00	0.31	136,821,813,450.00	178,500,000,000.00	41,678,186,550.00	30.46
	- Dana Desa	68,815,500,000.00	54,021,935,800.00	57,803,255,000.00	(11,012,245,000.00)	(0.16)	60,693,417,750.00	76,884,000,000.00	16,190,582,250.00	26.68
	- Dana Insentif Fiskal	7,792,581,000.00	7,792,581,000.00	-	(7,792,581,000.00)	(1.00)	-	-	-	-
4. 2. 02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10,800,000,000.00	11,609,534,745.18	11,000,000,000.00	200,000,000.00	0.02	11,550,000,000.00	11,000,000,000.00	(550,000,000.00)	(4.76)
4. 3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,200,000,000.00	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	-	-	4,410,000,000.00	33,779,200,352.00	29,369,200,352.00	665.97
4. 3. 01.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,200,000,000.00	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	-	-	4,410,000,000.00			-
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4,200,000,000.00	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	-	-	4,410,000,000.00			-
	JUMLAH PENDAPATAN	660,170,900,738.00	574,606,096,242.81	601,108,052,140.00	(59,062,848,598.00)	(0.09)	631,163,454,400.00	797,068,058,534.00	165,904,604,134.00	26.29

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK Fisik dan DBHCHT, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Banku Provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2027 antara lain :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- a. Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan melalui pemutakhiran data objek pajak dan penyusunan road map PAD;
- b. Optimalisasi peran dan fungsi OPD penghasil;

- c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan PAD;
- d. Program pemberian apresiasi untuk masyarakat atas pembayaran pajak daerah;
- e. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah;;
- f. Penyertaan modal untuk BUMD/PERUSDA;
- g. Meningkatkan pendayagunaan Aset dan Keuangan Daerah;
- h. Implikasi Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Meningkatkan Dana Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah :

- a. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan DBH baik dari Pajak maupun bukan pajak;
- b. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang di jadikan instrumen dasar perhitungan dana transfer;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku dalam pelaksanaan Dana Transfer. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

- b. Memanfaatkan Potensi Pendapatan Daerah

Pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Buru Selatan melalui sinergi database dengan Perangkat Daerah lainya yang terkait dan peningkatan

hubungan/kerjasama antar Kabupaten/ Kota.

- c. Meningkatkan kinerja pelaporan dan evaluasi atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer. Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel. 3.6. Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD-P TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI APBD TAHUN 2025 (Rp)	APBD TAHUN 2026 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	PROYEKSI RKPD TAHUN 2027 (Rp)	TARGET RPJMD TAHUN 2027 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	660,170,900,738.00	574,606,096,242.81	601,108,052,140.00	(49,413,046,207.00)	(0.07)	631,163,454,400.00	797,068,058,534.00	165,904,604,134.00	26.29
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43,550,449,239.00	13,110,655,796.63	38,193,484,140.00	4,292,837,292.00	0.10	40,103,158,000.00	20,118,186,540.00	(19,984,971,460.00)	(49.83)
4. 1. 01.	Pajak Daerah	11,950,000,000.00	2,300,197,609.00	10,300,000,000.00	7,999,802,391.00	0.67	10,815,000,000.00	7,427,010,000.00	(3,387,990,000.00)	(31.33)
4. 1. 02.	Retribusi Daerah	7,521,303,000.00	4,922,916,979.00	7,521,300,000.00	(3,000.00)	(0.00)	7,897,365,000.00	3,961,468,710.00	(3,935,896,290.00)	(49.84)
4. 1. 03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,376,238,977.00	5,376,238,977.00	6,000,000,000.00	623,761,023.00	0.12	6,300,000,000.00	3,160,200,000.00	(3,139,800,000.00)	(49.84)
4. 1. 04.	Lain-lain PAD yang Sah	18,702,907,262.00	511,302,231.63	14,372,184,140.00	(4,330,723,122.00)	(0.23)	15,090,793,000.00	5,569,507,830.00	(9,521,285,170.00)	(63.09)
4. 2.	Pendapatan Transfer	612,420,451,499.00	558,109,247,415.18	558,714,568,000.00	(53,705,883,499.00)	(0.10)	586,650,296,400.00	743,170,671,642.00	156,520,375,242.00	26.68
4. 2. 01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	601,620,451,499.00	546,499,712,670.00	547,714,568,000.00	(53,905,883,499.00)	(0.09)	575,100,296,400.00	732,170,671,642.00	157,070,375,242.00	27.31
	- Dana Perimbangan	-	26,924,574,333.00	-	-	-	-	-	-	-
	- DBH Pajak/ DBH SDA	7,589,442,000.00	414,028,050.00	2,714,284,000.00	(4,875,158,000.00)	(0.64)	2,849,998,200.00	3,610,000,000.00	760,001,800.00	26.67
	- Dana Alokasi Umum	417,872,781,499.00	374,740,206,253.00	356,890,540,000.00	(60,982,241,499.00)	(0.15)	374,735,067,000.00	473,176,671,642.00	98,441,604,642.00	26.27
	- Dana Alokasi Khusus	99,550,147,000.00	82,606,387,234.00	130,306,489,000.00	30,756,342,000.00	0.31	136,821,813,450.00	178,500,000,000.00	41,678,186,550.00	30.46
	- Dana Desa	68,815,500,000.00	54,021,935,800.00	57,803,255,000.00	(11,012,245,000.00)	(0.16)	60,693,417,750.00	76,884,000,000.00	16,190,582,250.00	26.68
	- Dana Insentif Fiskal	7,792,581,000.00	7,792,581,000.00	-	(7,792,581,000.00)	(1.00)	-	-	-	-
4. 2. 02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10,800,000,000.00	11,609,534,745.18	11,000,000,000.00	200,000,000.00	0.02	11,550,000,000.00	11,000,000,000.00	(550,000,000.00)	(4.76)
4. 3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,200,000,000.00	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	-	-	4,410,000,000.00	33,779,200,352.00	29,369,200,352.00	665.97
4. 3. 01.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,200,000,000.00	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	-	-	4,410,000,000.00			-
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4,200,000,000.00	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	-	-	4,410,000,000.00			-
	JUMLAH PENDAPATAN	660,170,900,738.00	574,606,096,242.81	601,108,052,140.00	(59,062,848,598.00)	(0.09)	631,163,454,400.00	797,068,058,534.00	165,904,604,134.00	26.29

Sumber : BPKAD , Bapeltbang Kabupaten Buru Selatan, 2026,

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2027 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2027 diarahkan pada prioritas sebagai berikut

a. Mandatory Spending.

Pemenuhan belanja antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%).

b. Urusan Pemerintah Daerah.

Alokasi Belanja yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan, seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Dana Desa.

c. Pelayanan dan Operasional.

Alokasi Belanja kepada OPD yang sifatnya wajib diselenggarakan dalam 1 tahun penuh, seperti, belanja listrik, telekomunikasi, kebersihan kantor, dll.

d. Pelayanan Dasar.

Alokasi Belanja untuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPMP Program dan Kegiatan Prioritas. Alokasi Belanja untuk Program Kegiatan Prioritas dalam RKPD tahun

2027 melalui pendekatan Money Follow Program, Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial.

e. Aspirasi Masyarakat.

Alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat, yang disampaikan melalui kunjungan kerja DPRD pada saat pelaksanaan Reses.

f. Prioritas Perangkat Daerah.

Alokasi Belanja untuk Program Kegiatan prioritas OPD dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

g. Prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Alokasi Belanja untuk mendukung Program Kegiatan Prioritas Pusat dan Provinsi, seperti terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Mendorong peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien.

Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Prioritas.

Penggunaan anggaran tahun 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan- kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang

telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan belanja produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative Financing. Belanja Daerah 2026 juga memprioritaskan untuk menindaklanjuti INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d. Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

f. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana

Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g. Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target dalam perencanaan, realisasi belanja daerah tahun 2025, target belanja daerah tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025,
Belanja Tahun 2026 dan Proyeksi serta proporsi Belanja Tahun 2027**

KODE	URAIAN				PENETAPAN APBD P TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI APBD TAHUN 2025 (Rp)	APBD TAHUN 2026 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	PROYEKSI APBD TAHUN 2027 (Rp)	Mandatory Spanding (%)
5.				BELANJA DAERAH	671,438,588,890.00	441,979,833,572.00	709,558,052,140.00	38,119,463,250.00	5.68%	670,198,653,400.00	
5.	1.			Belanja Operasi	521,611,074,838.00	343,944,690,561.00	548,419,807,147.00	26,808,732,309.00	5.14%	294,949,377,040.00	44.01
5.	1.	01.		Belanja Pegawai	296,244,391,422.00	212,446,140,784.00	343,440,030,400.00	47,195,638,978.00	15.93%	201,050,230,400.00	30.00
5.	1.	02.		Belanja Barang dan Jasa	180,275,203,416.00	102,463,312,189.00	181,772,280,547.00	1,497,077,131.00	0.83%	91,868,468,000.00	13.71
5.	1.	04.		Belanja Subsidi	1,920,000,000.00	1,560,000,000.00	1,224,000,000.00	- 696,000,000.00	-36.25%	964,249,640.00	0.14
5.	1.	05.		Belanja Hibah	27,842,621,639.00	16,023,759,001.00	21,397,496,200.00	- 6,445,125,439.00	-23.15%	571,259,000.00	0.09
5.	1.	06.		Belanja Bantuan Sosial	15,328,858,361.00	11,451,478,587.00	586,000,000.00	- 14,742,858,361.00	-96.18%	495,170,000.00	0.07
5.	2.			Belanja Modal	37,700,788,871.00	13,101,851,529.00	52,205,405,260.00	14,504,616,389.00	38.47%	272,816,436,360.00	40.71
5.	2.	01.		Belanja Modal Tanah	964,541,900.00	587,682,000.00	5,229,662,600.00	4,265,120,700.00	442.19%	2,416,973,000.00	0.36
5.	2.	02.		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,556,914,200.00	2,761,137,079.00	14,336,397,629.00	5,779,483,429.00	67.54%	2,185,937,000.00	0.33
5.	2.	03.		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,710,241,018.00	2,405,964,750.00	12,940,664,908.00	- 1,769,576,110.00	-12.03%	100,529,798,010.00	15.00
5.	2.	04.		Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	13,405,970,700.00	7,347,067,700.00	19,548,886,123.00	6,142,915,423.00	45.82%	167,549,663,350.00	25.00
5.	2.	05.		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	63,121,053.00	-	149,794,000.00	86,672,947.00	137.31%	134,065,000.00	0.02
5.	3.			Belanja Tidak Terduga	2,363,804,000.00	1,403,926,000.00	9,000,000,000.00	6,636,196,000.00	280.74%	2,500,000,000.00	0.37
5.	3.	01.		Belanja Tidak Terduga	2,363,804,000.00	1,403,926,000.00	9,000,000,000.00	6,636,196,000.00	280.74%	2,500,000,000.00	1.01
5.	4.			Belanja Transfer	109,762,921,181.00	83,529,365,482.00	99,932,839,733.00	- 9,830,081,448.00	-8.96%	99,932,840,000.00	14.91
5.	4.	02.		Belanja Bantuan Keuangan	109,762,921,181.00	83,529,365,482.00	99,932,839,733.00	- 9,830,081,448.00	-8.96%	99,932,840,000.00	14.91
				- Dana Desa							
				- Alokasi Dana Desa							
				JUMLAH	671,438,588,890.00	441,979,833,572.00	709,558,052,140.00	38,119,463,250.00	5.68%	670,198,653,400.00	100.00

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Buru Selatan, 2026

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Optimalisasi penggunaan SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada PERUSDA;
3. Pengelolaan Hutang terutama untuk menjaga arus kas pad BLUD.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam satu tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel Berikut ini

**Tabel 3.8. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025,
Pembiayaan Tahun 2026 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2027**

KODE	URAIAN	APBD P 2025	REALISASI APBD 2025	RAPBD 2026	Bertambah/ (Berkurang)	%	PROYEKSI APBD 2027	%
6.	PEMBIAYAAN	11,267,688,152.00	12,517,688,152.00	108,450,000,000.00	99,000,000,000.00	-2881.70%	39,035,199,000.00	(135.99)
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	12,517,688,152.00	12,517,688,152.00	160,700,000,000.00	150,000,000,000.00	1198.30%	10,714,801,000.00	(93.33)
0 0 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12,517,688,152.00	12,517,688,152.00	10,700,000,000.00	-1,817,688,152.00	-14.52%	10,714,801,000.00	0.14
6. 1. 08.	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00	100.00%	0	(100.00)
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	1,250,000,000.00	-	52,250,000,000.00	51,000,000,000.00	-80.00%	49,750,000,000.00	(4.78)
6. 2. 02.	Penyertaan Modal Daerah	1,250,000,000.00	-	250,000,000.00	-1,000,000,000.00	-80.00%	250,000,000.00	-
0 0 07.	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	-	52,000,000,000.00	52,000,000,000.00	100.00%	49,500,000,000.00	(4.81)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1,250,000,000.00	-	52,250,000,000.00	51,000,000,000.00	4080.00%	49,750,000,000.00	(4.78)
	PEMBIAYAAN NETTO	11,267,688,152.00	12,517,688,152.00	108,450,000,000.00	99,000,000,000.00	878.62%	39,035,199,000.00	(135.99)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	-	145,143,950,822.81	-	1,817,688,152.00	1.25%	-	

sumber : Bidang Anggaran, BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 202

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

Sasaran Pembangunan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kondisi kinerja pembangunan yang ingin dicapai pada tahun perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD. Perumusan sasaran pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis daerah, kapasitas fiskal daerah, serta arah kebijakan dan Prioritas Nasional, tantangan global, nasional dan regional seperti isu SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) termasuk juga standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP Nasional Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan fokus pembangunan daerah pada tahun perencanaan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan. Penetapan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengacu pada Prioritas Nasional dalam RKP serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi Maluku dan karakteristik daerah. Prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda nasional.

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang terintegrasi lintas urusan dan berorientasi pada hasil, dengan menerapkan prinsip *money follows program* dan penganggaran berbasis kinerja. Sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD.

Dengan ditetapkannya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, RKPD diharapkan menjadi pedoman pembangunan tahunan daerah yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pembangunan Kabupaten Buru Selatan di tahun 2027 berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Visi dan misi tersebut merupakan janji politik yang diusung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 silam dan secara resmi menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan dalam kurun waktu 2025-2029 mendatang. Dengan adanya visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Buru Selatan menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025–2029, yang selanjutnya menjadi Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD periode 2025-2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 mengacu pada Peraturan RPJMD Provinsi Maluku dan RPJN Nasional.

4.1.1. Visi.

Visi Pembangunan Kabupaten Buru Selatan adalah sesuai dengan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih tahun 2025-2029 yang merupakan buah pemikiran atas dasar kondisi wilayah maupun tatanan masyarakat Buru Selatan adalah:

“Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan”

Frasa **“Arah Baru”** dalam visi ini menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Buru Selatan akan menggunakan pendekatan strategis yang menekankan pada transformasi menyeluruh dalam visi, kebijakan dan pola pembangunan wilayah dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang lebih baik dan inklusif di dukung oleh potensi Sumber Daya Alam Lokal, SDM berkualitas, ekosistem layanan dan usaha yang bermartabat.

Kata “Maju” dalam visi ini berarti bahwa Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Kemajuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Buru Selatan sebagai daerah yang lebih sejahtera.

HUMANIS merupakan akronim dari kata **Harmonis, Unggul, Mandiri, Agamais, Nasionalis, Inklusif** dan **Solidaritas**. Berikut ini diuraikan makna dari masing-masing kata sebagaimana disebutkan.

Kata "**Harmonis**" dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai di tengah keberagaman sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Kehidupan yang harmonis menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang stabil, kondusif, dan produktif, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkeadilan.

Harmonis mencerminkan terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam suasana yang saling menghormati, mendukung, dan bekerjasama; kehidupan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi, solidaritas, dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan; Keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab bersama; lingkungan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan sejahtera sebagai cerminan nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan yang menjadi identitas khas Buru Selatan.

Melalui semangat Harmonis, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang damai, inklusif, toleran, dan beretika, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang selaras dan seimbang dalam keberagaman. Kata "Unggul" dalam visi pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan mencerminkan tekad dan komitmen pemerintah

daerah untuk mewujudkan kualitas dan daya saing tinggi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Keunggulan ini tidak hanya diukur dari capaian angka atau prestasi semata, tetapi juga dari kemampuan daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat. Secara keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan akan mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan layanan sosial dasar, layanan publik, akses dan konektivitas transportasi, ketahanan budaya serta keberlanjutan lingkungan.

Kata "**Mandiri**" dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menggambarkan tekad untuk menciptakan daerah yang memiliki kemandirian di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Kemandirian ini berarti kemampuan daerah untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar.

Mandiri mencerminkan daerah yang kuat secara ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan lokal, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan; pemerintahan yang mampu merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan mengandalkan kapasitas dan sumber daya daerah sendiri; masyarakat yang memiliki daya juang, kreatifitas, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta berdaya saing di tengah dinamika global; kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal.

Dengan semangat Mandiri, diharapkan Buru Selatan menjadi daerah yang tidak hanya mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, tetapi juga mampu membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kokoh, sehingga siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan secara berkelanjutan.

Kata “**Agamais**” dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual dan keagamaan menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral sebagai landasan etika dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata “**Nasionalis**” dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan Nasionalis berarti menanamkan kecintaan terhadap tanah air, penghargaan terhadap simbol dan identitas negara, serta komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Nasionalisme lokal menjadi kekuatan moral dan politik dalam membangun dari daerah untuk Indonesia.

Kata “**Inklusif**” dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan ruang pembangunan yang terbuka dan berpihak kepada seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, gender, suku, agama, atau latar belakang budaya. Inklusif berarti pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Inklusif mencerminkan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya; pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, layanan publik, dan hak-hak sipil secara adil bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi; pengakuan dan penghormatan atas keberagaman sosial dan budaya sebagai kekuatan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang mendengar, memahami, dan menampung aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Dengan semangat Inklusif, Kabupaten Buru Selatan diarahkan menjadi daerah yang ramah, terbuka, dan adil bagi semua warganya, di mana tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam proses kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kata "**Solidaritas**" dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan mencerminkan semangat kebersamaan, saling tolong-menolong, dan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nilai ini menjadi perekat sosial yang mencegah ketimpangan, memulihkan dari bencana, dan mempercepat kemajuan yang merata.

Kata "**Berkelanjutan**" dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan bertanggung jawab agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya sosial ekonomi secara lestari.

Berkelanjutan mencerminkan pembangunan daerah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan dan tetap terjaga kelestariannya; penguatan sistem ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan global, perubahan iklim, maupun perkembangan teknologi; upaya menjaga kesinambungan antar program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya, agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi jangka panjang daerah; mewujudkan keseimbangan antara kemajuan pembangunan fisik dengan pembangunan kualitas hidup manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Dengan semangat Berkelanjutan, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup yang layak bagi generasi masa depan, dalam lingkungan yang sehat, adil, dan sejahtera.

4.1.2. Misi.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan merumuskan misi pembangunan sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama periode 2025–2029. Misi pembangunan ini menjadi pedoman sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mengarahkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan agar berjalan secara terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, potensi, dan karakteristik wilayah, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Penetapan misi juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, misi pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan mulai dari pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dasar, perlindungan lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika perubahan global yang semakin cepat, terutama dalam konteks digitalisasi, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim.

Berdasarkan Visi sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dirumuskan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter.
2. Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).

4. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
5. Memperkuat keharmonisan dan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya.

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029, Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<i>Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter (MISI 1)</i>	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Buru Selatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karakter untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan bermartabat	Indeks Modal Manusia	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di Buru Selatan	Indeks Pembangunan Manusia
				Angka Literasi/Numerasi
				Indeks Pembangunan Literasi masyarakat
				Indeks Literasi Digital
				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)
				Harapan lama sekolah
				Persentase anak dari keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan
				Persentase sekolah inklusif yang menerima anak berkebutuhan khusus
			2. Terselenggaranya program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan SDM di pasar kerja lokal maupun nasional	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
				Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Persentase lulusan SMK yang bekerja di bidang kompetensinya
				Jumlah peserta didik SMK yang memiliki sertifikat kompetensi nasional
				Jumlah kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri
				Persentase perempuan dan kelompok rentan (disabilitas, masyarakat adat) yang mengikuti pelatihan kerja
			3. Menguatnya karakter melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai moral serta etika yang mendukung terciptanya masyarakat yang bermartabat	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
				Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum
				Jumlah sekolah/madrasah yang melaksanakan program penguatan profil Pelajar Pancasila

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Persentase siswa yang mengikuti program ekstrakurikuler berbasis nilai moral, budaya lokal, dan nasionalisme Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan program "Desa Berkarakter" Persentase anak dari keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan Indeks Perlindungan Anak
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi	Prevalensi Stunting	1. Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan di Buru Selatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase masyarakat yang mengakses layanan kesehatan promotif dan preventif (per 10.000 kelahiran hidup) Persentase peserta tanggap yang menerapkan asih (p) bersih dan sehat (P4BS) kesehatan per 1000 ibu hamil Persentase Desa Sama
	Mengembangkan, serta akses dan masyarakat antara pemerintah, swasta, dan seluruh warga untuk mendukung	Indeks Modal Sosial	1. Meningkatnya sinergi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang serta melaksanakan program-program pembangunan sosial dan ekonomi di Buru Selatan	Persentase Desa Sama Persentase Desa Sama Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program pembangunan

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	pembangunan sosial dan Ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan		2. Menguatnya jaringan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi(%)
			3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan sosial dan ekonomi melalui forum-forum kolaboratif dan pelibatan aktif di tingkat lokal	Indeks Pembangunan Pemuda
				Indeks Pembangunan Gender
				Indeks Ketimpangan Gender
<i>Mempercepat Pembangunan Ekonomi berbasis potensi lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (MISI 2)</i>	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita	1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor ekonomi lokal	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
				Kontribusi PDRB Penyediaan Makan dan Minum (%)

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	optimalisasi potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat secara Merata			Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
				Koefisien Variasi Harga
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
				Tingkat Inflasi
				Inklusi Keuangan (%)
				Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
				Indeks Daya saing Daerah (IDSD)
				Jumlah sertifikasi produk lokal untuk meningkatkan daya Saing
				Indeks Inovasi Daerah (IID)

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			2. Terciptanya lapangan kerja dan wirausaha baru yang inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
				Persentase Tenaga Kerja sektor Kelautan dan Perikanan (%)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
				Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor dengan nilai tambah tinggi
				Persentase penurunan tingkat pengangguran
				Jumlah wirausaha baru yang berasal dari kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel, dan kelompok marginal lainnya)
				Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) atau lembaga keuangan lokal

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
				Rasio Kewirausahaan Daerah
				Jumlah usaha yang mengadopsi teknologi baru dalam produksi dan distribusi
				Jumlah usaha yang mengadopsi prinsip ekonomi sirkular (reduce, reuse, recycle)
				Jumlah kebijakan atau regulasi yang mendukung peran aktif masyarakat dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan
<i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) (MISI 3)</i>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, serta menjunjung	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsive.	Indeks Pelayanan Publik
				Indeks Inovasi Daerah
				Persentase instansi pemerintah yang menerapkan sistem pelayanan publik berbasis digital (e-government)

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Tinggi integritas dan partisipasi publik		2. Terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik KKN	Jumlah inovasi dalam pelayanan publik yang diterapkan setiap tahun
				Nilai SAKIP
				Indeks Merit
				Indeks Inovasi Daerah
				Indeks SPBE
				Indeks Reformasi Hukum
				Indeks Integritas Nasional
				Indeks Demokrasi Indonesia
			3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentasi implementasi rencana kelitbangan
				Indeks Inovasi dan Riset Maritim
				Jumlah aplikasi atau platform digital yang disediakan untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktu Wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan Mitigasi Bencana (MISI 4)	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan 2. Rasio Gini 3. Indeks Infrastruktur 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5. Presentasi Penurunan Emisi GRK 6. Indeks Resiko Bencana	1. Meningkatnya pemerataan Pembangunan infrastruktur wilayah.	Indeks Infrastruktur
				Presentase Desa Mandiri (%)
			2. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah di kab/ kota (%)
				Indeks Ketahanan Lingkungan
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
				Indeks Risiko Bencana
			3. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
				Indeks Konektivitas

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Memperkuat Keharmonisan dan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya (MISI 5)	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan harmonis melalui penguatan nilai nilai keagamaan, adat, dan budaya lokal	Indeks Modal Sosial Indeks Kerukunan Beragama		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berlanjutan (%)
				Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Aman
				Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
			1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Terpeliharanya keberagaman budaya dan adat istiadat lokal sebagai identitas sosial masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
				Indeks Pembangunan Kebudayaan
				Jumlah situs budaya dan warisan adat yang terdaftar dalam inventarisasi nasional atau daerah
				Jumlah kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung pelestarian warisan budaya dan adat istiadat lokal
			3. Terciptanya kehidupan sosial yang	Indeks Pembangunan Hukum

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			toleran dan bebas dari konflik antar kelompok masyarakat	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang selaras dengan proses pentahapan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Tahun 2027 pada pelaksanaan tahun ketiga yaitu "**Penguatan Daya Saing Daerah Dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal**". Tahapan ini menjadi instrumen krusial dalam menjamin konsistensi antara mandat politik kepala daerah dengan target-target kinerja makro yang bersifat teknokratis. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan ini menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang terstruktur dan responsif terhadap tantangan lintas sektor. Setiap sasaran dirancang untuk dapat diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), sehingga mampu menjadi alat navigasi bagi perangkat daerah dalam merancang program-program prioritas. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menargetkan bahwa pada akhir periode RPJMD 2029 akan terjadi peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, efisiensi layanan publik, serta resiliensi sosial dan lingkungan. Penyelarasan tujuan dan sasaran daerah ini juga telah dirancang agar sinkron dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, sehingga menciptakan sinergi lintas level pemerintahan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat diimplementasikan secara terukur dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menetapkan sejumlah indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Berikut disajikan tabel indikator kinerja utama dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta capaian Tahun 2025-2026 dan target Tahun 2027.

**Tabel 4.2. Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025 dan Target 2026 dan 2027**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2027	Target Akhir RPJMD (Th. 2029)
2		3	4	5
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	5,68	6,48
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	63,70	72,40
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,36	71,14	72,94
Tingkat Kemiskinan	%	14,84	14,25	13,83
Rasio Gini	Indeks	0,23	0,20	0,19
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,41	83,69	84,03
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3,66	4,23	4,62
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	48,83	56,60	58,90
Indeks Infrastruktur	Angka	2,78	3,02	3,29
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	24,20	24,33	25,01
Persentase Desa Mandiri	%	2,50	3,80	6,33
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,29	1,09	0,95
Indeks Risiko Bencana	Indeks	155,20	118,47	114,19
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	82,41	83,69	84,03
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	39,07	25,66	19,18
Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,54	72,93	74,75
Pertumbuhan Ekonomi	Miliar Rupiah	1.114,48	1.115,30	1.115,62

**Tabel 4.3 Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 dan 2027**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,41	83,67	83,69	84,03
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	48,83	55,50	56,60	58,90
3	Indeks Infrastruktur	Angka	2,78	2,90	3,02	3,29
4	Perkembangan Indeks Desa	Indeks	N/A	0,664	0,685	0,729
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	N/A	35,01	36,65	38,56

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	N/A	72,35	73,48	75,60
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	(%)	N/A	100,00	100,00	100,00
6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	N/A	31,32	30,51	28,96
7	Kapasitas Air Baku	(%)	151,60	151,70	151,75	151,85
8	Indeks Inovasi dan Riset Maritim	Indeks	N/A	34,47	34,97	35,97
9	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	0,78	0,82	0,85	0,92
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	67,07	68,32	69,60	72,22
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155,20	120,67	118,47	114,19
12	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	N/A	188,20	188,60	190,50
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	66,25	87,79	88,67	90,45
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	70	75	80	90
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	82,41	83,67	83,69	84,03
16	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	N/A	230	225	215
17	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0,19	0,20	0,21	0,24
18	Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase	N/A	65	70	80
19	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	N/A	35	40	50
20	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	N/A	20	25	35
21	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	N/A	65	67	69
22	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	96	97	99

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
23	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium	Persentase	N/A	35	40	50
24	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	N/A	100	100	100
25	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	N/A	0	1	1
26	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	N/A	0,4	0,5	0,7
27	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	95,45	54,69	57,43	63,31
28	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	N/A	35	40	50
29	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	N/A	35	40	50
30	Penanganan Sampah	Ton	8.018,41	8.254,29	8.497,10	9.004,37
31	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	(%)	1,609	2,1	2,100	2,100
32	Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Ton	3,55	16,59	17,42	19,2
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	5,42	5,68	6,48
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,54	72,48	73,58	75,78
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,36	70,27	71,14	72,94
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	14,84	14,47	14,25	13,83
5	Rasio Gini	Indeks	0,23	0,21	0,20	0,19
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	N/A	60,38	60,88	61,88
7	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	24,20	23,99	24,33	25,01
8	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(%)	6,33	4,12	4,45	5,25
9	PDRB Ekonomi Kreatif	(%)	N/A	14,50	14,75	15,12

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	22,55	27,55	29,94	35,32
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	N/A	57,88	59,12	61,67
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	36,91	93,90	95,68	98,40
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	N/A	65,28	66,32	68,25
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	58,00	75,53	86,11	100
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	N/A	82,63	83,70	85,88
14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0	14,00	15,00	19,00
15	Angka Literasi/Numerasi	%	N/A	60	70	90
16	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	57,90	61,19	63,54	68,51
17	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	N/A	83,05	86,03	92,32
18	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N/A	10,00	20,00	30,00
19	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	0	4	3	2
20	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	N/A	14,35	16,25	20,15
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	61,20	72,95	73,40	74,30
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,29	1,17	1,09	0,95
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,59	0,56	0,55	0,53
24	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	N/A	51,50	52,50	54,50
25	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	9	6	5	4

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	89,02	86,68	87,19	88,21
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,33	87,36	87,41	87,51
28	Indeks Literasi Digital	Angka	N/A	4,05	4,19	4,48
29	Persentase Angka criminal	%	N/A	0,01	0,01	0,01
30	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	8,30	8,81	8,99	9,34
31	Rasio Kriminal	Rasio	N/A	1,47	1,33	1,06
32	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	(%)	89,02	63,27	66,42	72,72
33	Akses sanitasi layak	%	57,17	68,32	69,60	72,22
34	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	12,92	12,95	13,02
35	Rasio ketersediaan daya Listrik	Rasio	N/A	1,23	1,26	1,32
36	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	58,96	59,16	59,26	59,46
37	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	N/A	15,24	15,34	15,54
38	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,01	2,36	2,38	2,45
40	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.074,20	13,325	13,658	14,348
41	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	105,84	100	100	100
42	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	39,07	31,50	28,00	21,00
43	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	123	122	123	125
44	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	N/A	22	23	24
45	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	N/A	17	18	20

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
46	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	N/A	86	87	89
47	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	50,00	100	100	100
48	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	N/A	60	70	90
49	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	15	54	56	60
50	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	95,00	91	92	94
51	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	90	90	90
52	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	90	90	95
53	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase	10,48	10	10	10
54	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	Desa	N/A	5	10	20
55	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut	Orang	51,467	45,000	50,000	60,000
56	Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Persentase	N/A	16	17,5	20
57	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	93,75	16	19	25
58	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	0	1	2	4
59	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan	%	N/A	91	92	94

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
	pemerintahan					
60	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	92,7	93,3	95,2
61	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Persentase	100	100	100	100
62	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	N/A	52	54	60
63	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	N/A	432	648	1,458
64	Jumlah Barang Melalui Dermaga	Ton	536,016	90,000	95,000	105,000
65	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,12	0,12	0,12	0,12
66	Persentase Kepemilikan KIR	Persentase	N/A	20	25	35
67	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	N/A	3,819	4,048	4,549
68	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	N/A	40	45	55
69	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	N/A	317	336	377
70	Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Ikan	Unit	0	5	7	10
71	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Unit	92	75	80	90
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	N/A	6,59	6,82	7,31
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (IUP)	%	0	2,8	3,00	3,8
3	Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi	%	N/A	0	0,1	0,1
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	3,66	4,04	4,23	4,62

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
5	Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program pembangunan	Angka	N/A	6	6	7
6	Tingkat Inflasi	(%)	N/A	2,80	2,50	2,15
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,07	3,18	3,29	3,51
9	Persentase Desa Mandiri	%	2,50	2,53	3,80	6,33
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	89,52	57,12	58,67	61,90
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,56	0,54	0,55	0,58
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45,67	46,39	47,83	50,84
13	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	N/A	0,01	0,01	0,02
14	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	N/A	0,290	0,300	0,390
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	N/A	0,25	0,26	0,27
16	Inklusi Keuangan	(%)	N/A	2,33	2,41	2,58
17	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	N/A	1,43	1,53	1,18
18	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	N/A	2,64	2,78	3,10
19	Koefisien Variasi Harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	N/A	0,25	0,35	0,55
20	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	%	N/A	0,413	0,423	0,444
21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	N/A	2,33	2,41	2,58
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	N/A	7,67	7,71	7,79
23	Total Kredit/PDRB	(%)	N/A	0,256	0,261	0,271
24	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	N/A	54,01	54,32	54,94
25	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	N/A	10,50	11,26	12,26
26	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	N/A	48,50	49,15	50,10
27	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	N/A	66,2	68,4	70,6
27	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	15	25	32,40	48,49
28	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan	Persentase	N/A	30	40	60

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
	Tervalidasi					
29	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	N/A	75	75	75
30	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	75,60	64,1	65,2	68
31	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	20	10	10	10
32	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	Investor	0	2	2	4
33	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN	%	00:00	00:00	00:00	00:00
34	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	N/A	64,1	65,2	68
35	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan	%	N/A	75	77	83
36	Persentase jumlah hasil pemantauan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri dikeluarkan Besaryang oleh instansi terkait	%	0	58	61	66
37	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha	Perusahaan/UK M/IKM	630	660	690	750
38	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	N/A	93.750.000	98.438.000	108.518.000
39	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	34,00	45	50	60
40	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	N/A	21,56	28,69	41,13
41	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	96	97	99
42	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	87	89	95
43	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	70,47	67,2	68,4	74,9

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
44	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	%	N/A	58,9	61	68
45	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi	Data	2	3	4	5
46	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	93,75	30	33	39
47	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah	70.479.571.105	36.547.915.904	39.593.576.103	45.684.896.501
48	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	36,55	36,55	39,60	45,70
49	Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA)	Indeks	N/A	62,5	63,7	66,1
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	59,35	63,70	72,40
2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	N/A	70,50	80,10	81,10
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	N/A	2,34	2,66	3,44
4	Nilai SAKIP	Nilai	N/A	50-60	60-70	70-80
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,96	2,82	3,00	3,39
6	Indeks Merit	Indeks	N/A	0.20-0.40	0.61-0.80	0.80-100
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	66,04	40,50	41,50	44,50
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	N/A	81	82	84
9	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government)	Persentase	N/A	4,00	5,00	7,00
10	Indeks Integritas Nasional	Persentase	N/A	70,27	70,37	70,57
11	Jumlah aplikasi atau platform digital yang disediakan untuk partisipasi masyarakat dalam	Angka	1	1	1	1
12	Persentase Capaian Aksi HAM	%	38,92	78,15	78,65	79,00
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	N/A	77,28	81,15	89,46
13	Persentase Penegakan Perda	%	75,00	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
14	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	30-50	50-60	60-70	70-80
15	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	77	78	80
16	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	92	93	95
17	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	77	78	80
18	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,27	88,29	88,31
19	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	85	88	95
20	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	77	79	85
21	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	82	83	85
22	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	%	N/A	95	96	98
23	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	97	98	100
24	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	99,99	99,99	99,99
25	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	94	95	99
26	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	67,2	71,8	74,9
27	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	25	30	35	45
28	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	89	90	92

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6	7
29	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,27	88,29	88,31
30	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,27	88,29	88,31
31	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	92	93	95
32	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	102	102	102
33	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	92	94	97
34	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	94	95	98
35	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	97	98	100
36	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	77	78	80
37	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	102	102	102
38	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	102	102	102
39	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	100	100	100
40	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	97	98	100
41	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	77	78	80

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
42	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,27	88,29	88,31
43	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	93	94	96
44	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	87	88	90
45	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,38	79,40	79,42
46	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,38	79,39	79,43
47	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,38	79,40	79,42
48	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	77	78	80
49	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,38	79,40	79,42
50	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	0	25	40
51	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	60	150	200	300
52	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	100	100	100	100
V INDIKATOR KINERJA KUNCI						
AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	51,24	96,50	97,00	98,00
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI	%	96,06	97,68	97,60	97,42
3	Persentase Guru Bersertifikat	%	70,21	72,00	74,00	77,00
4	Persentase Sekolah dengan Sarana Prasarana yang Layak	%	78,02	62,00	62,50	63,50
5	Jumlah Siswa pada Jenjang PAUD	Angka	2,254	2,33	2,350	2,366
6	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI	%	1,50	1,55	1,60	1,70
7	Angka Partisipasi Sekolah SMP/ MTs	%	56,91	98,25	98,46	99,98

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
8	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SMP/ MTs	%	N/A	38	40	44
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	%	113,08	100	100	100
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	%	90,90	97,12	100	100
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	%	0	13,48	13,20	12,50
12	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	12	17	19	23
13	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SD/ MI	%	N/A	38	40	44
14	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs	%	114,25	114,64	114,66	114,75
15	Angka Partisipasi Sekolah SD/ MI	%	98,01	98,02	98,03	98,05
16	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,82	0,77	0,72	0,68
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100
2	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	25	100	100	100
3	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	95	95	96
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100	46,16	53,86	69,26
5	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase	N/A	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persentase	100	50,0	60,0	80,0
7	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	22,00	11,4	10,4	8,4

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
8	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persentase	50,00	100	100	100
9	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup	Persentase	84,00	70,50	74,60	80,03
10	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	100	61,55	69,25	84,65
11	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Persentase	80,00	48,70	53,05	61,75
12	Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persentase	100	100	100	100
13	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	49,00	1,4	1,4	1,4
14	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar	Persentase	79,00	100	100	100
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	11,90	50,00	55,00	65,00
16	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	N/A	7	6	4
17	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi	Persentase	18,00	20,51	23,02	28,04
18	Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persentase	N/A	100	100	100
19	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase	46,15	61,55	69,25	84,65
20	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	Persentase	N/A	78,09	79,09	81,09
21	Penemuan Kasus TBC	%	34,47	55,0	60,0	75,0
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	20	25	25	25
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	6,60	87	91	98
3	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	1,30	1,29	1,34	1,36
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	1,30	1,29	1,34	1,35

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
5	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	16,53	60	70	90
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	N/A	60	62	66
7	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persentase	N/A	24	26	29
8	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	65,37	75	80	90
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	N/A	0	50	50
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	N/A	0	70	70
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	N/A	78,05	79,61	86,10
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	0,23	1,32	2,24	5,03
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	60	100	150	250
2	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	92	95	98
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	77	79	81
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1	Persentase Penurunan PPKS	%	0,28	3,2	3,3	3,5
2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	N/A	66,5	67,5	68,0
3	Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan	Persentase	58,73	60,00	61,10	63,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
	Sosial					
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	73,00	74,00	76,00
5	Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial	Kepala Keluarga	N/A	76	78	80
AG	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	6	10	12	16
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	N/A	0.20:0.20	0.15:0.15	0.05:0.05
AH	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	35,81	37,68	37,08	35,89
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kkal/Kapita/Hari	1,429	2,400	2,400	2,400
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	50	2,100	2,100	2,100
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	78,00	62,65	64,43	67,99
AI	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	N/A	60	70	90
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	N/A	80	80	80
3	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persentase	N/A	70	70	70
AJ	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	50,48	63,1	63,9	65,2
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	31,04	14,95	14,7	14,2

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	59,76	60,8	63,9	67,4
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	N/A	70,2	71,3	73,1
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	N/A	2.45-24.6	24.4-24.5	24.2-24.3
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	7,50	10,3	12,6	16,3
7	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	10,57	6,7	5,6	4,5
8	Persentase KB Pasca Persalinan	Persentase	44,34	35,29	37,99	46,09
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	33,00	62,5	63,7	66,1
AK	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
1	Rasio Kenektivitas Darat	Rasio	0,50	0,45	0,50	0,60
2	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0,87	0,45	0,50	0,60
AL	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	N/A	50,23	54,6	59,2
AM	5.01 – PERENCANAAN					
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	Persentase	91	90	92	95
2	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	90	92	95
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	91	90	92	95
4	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	90	92	95
5	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	90	92	95

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4		5	6
AN	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	N/A	81	82	84
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	N/A	0	50	53

4.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2027

4.2.1. Identifikasi Tantangan Global dan Tantangan Domestik



Kementerian PPN/
Bappenas

INDONESIA
2015

**PEMBANGUNAN DI TAHUN 2027 DIHADAPKAN
PADA BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK**



Tantangan Global 2027

-  **Adanya ketidakpastian kebijakan perdagangan** akibat adanya kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan
-  **Dinamika ketegangan geopolitik serta geoekonomi** yang berpotensi mengganggu stabilitas global
-  **Risiko utang global yang tinggi dan defisit fiskal lebih lebar** karena adanya pengetatan kondisi keuangan global
-  **Ketimpangan teknologi dan disrupsi AI** yang dapat meningkatkan kesenjangan antar negara
-  **Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan suhu global** berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan

Sumber: OECD, WEF, World Bank, dan IMF

Tantangan Domestik 2027

-  **Meningkatnya utang publik dan swasta yang jatuh tempo** dan dapat menekan ruang fiskal dan memperlebar defisit
-  **Produktivitas dan kesejahteraan pekerja masih rendah** dan dapat menghambat penguatan konsumsi domestik
-  **Overregulasi dan proses perizinan masih cenderung kompleks** yang menghambat arus investasi
-  **Ketergantungan ekspor komoditas bernilai rendah** yang meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga global
-  **Adopsi teknologi dan digitalisasi belum merata** dapat memperlambat transformasi digital dan menurunkan daya saing

Sumber: OECD, World Bank, dan Kompas.com

2

4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2027

mengangkat tema ***“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi Dan Industri”***.

4.2.2.1. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Nasional.

a. Prioritas Nasional 1/ PN 1.

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional;
- 2) Penguatan komunikasi publik dan media;
- 3) penguatan lembaga demokrasi; serta
- 4) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

b. Prioritas Nasional 2/ PN 2.

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan postur pertahanan;
- 2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan;
- 3) Penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung;
- 4) Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri;
- 5) Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal;
- 6) Peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;
- 7) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 8) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian;
- 9) Penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi.

c. Prioritas Nasional 3/ PN 3.

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik;
- 2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan;
- 3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi;
- 4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan;
- 5) Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

d. Prioritas Nasional 4/ PN 4.

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
- 3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
- 4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;
- 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan;
- 6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM);
- 7) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi..

e. Prioritas Nasional 5/ PN 5.

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan;
- 2) Peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global

f. Prioritas Nasional 6/ PN 6.

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan;
- 2) Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
- 3) Pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah.
- 4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

g. Prioritas Nasional 7/ PN 7.

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, serta sistem politik yang fungsional;
- 2) Birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani;
- 3) Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 4) Tata kelola BUMN yang baik;
- 5) Peningkatan pendapatan negara yang optimal;
- 6) Tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

h. Prioritas Nasional 8/ PN 8.

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa;

- 2) Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

i. Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).

Delapan program hasil terbaik cepat ditujukan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Visualisasi uraian delapan program hasil terbaik cepat dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1. Program Terbaik Hasil Tercepat

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam keterpaduan perencanaan ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 yang berorientasi pada hasil, inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Berikut disajikan tabel keselarasan PRO-SN/Tematik Pembangunan dengan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2027.

**Tabel 4.4 Keselarasan PRO-SN/Tematik Pembangunan Dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
1	DIGITALISASI PEMBELAJARAN			
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran		
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
2	EKONOMI SYARIAH			
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Produk
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
			BIDANG SOSIAL	Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN			
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)		
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
4	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)			
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional		
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
				Kabupaten/Kota
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
5	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH			
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih		
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
6	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH			
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih		
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			MENENGAH	
7	MAKAN BERGIZI GRATIS			
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis		
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
8	MASYARAKAT ADAT			
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			MASYARAKAT DAN DESA	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
9	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)			
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)		
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
10	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM			
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan		
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
11	PANGAN AKUATIK			
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik		
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Ekstraksi Garam

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
12	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA			
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota		
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengembangan Rumah Sakit
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standa
13	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH			
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah		
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
				Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
14	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS			
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
15	PENANGGULANGAN BENCANA			
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
16	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING			
	Kesehatan untuk semua	Stunting	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peningkatan ketahanan pangan keluarga
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)
17	PENDAYAGUNAAN PENYULUHAN PERTANIAN			
	Keahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Peranian		
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas Dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP Dan Desa
18	PENGARUSUTAMAAN GENDER			
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pembentukan badan hukum berusaha
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Advokasi Dan Sosialisasi Terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota
19	PENGENDALIAN INFLASI			
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi		
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kab/Kota
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
				Kabupaten/Kota
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pementauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
20	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)			
	Kesehatan Untuk Semua	Penuntasan TBC		
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
21	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH			

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah		
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan
22	PERLINDUNGAN ANAK			
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pemberian bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Bimbingan Teknis Dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
			5.01 PERENCANAAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan Dan

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	SUB KEGIATAN
				Intoleransi
			1.06 URUSAN PEMERINAHAN BIDANG SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial
23	SEKOLAH RAKYAT			
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat		
			1.06 URUSAN PEMERINAHAN BIDANG SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2027.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Maluku Tahun 2027 sejalan dengan Prioritas Nasional serta isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2027, maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yaitu:

Penguatan Daya Saing Daerah Dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal”

Adapun permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimanya aksesibilitas dan layanan kesehatan;
- 2) Kesenjangan antar wilayah masih tinggi;
- 3) Belum merata dan memadainya infrastruktur wilayah dan dasar;
- 4) Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pengembangan IPTEKIN dan riset;
- 6) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah;

- 7) Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana.
- 8) Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Masih tinggi;
- 9) Masih tingginya tingkat pengangguran;
- 10) Belum optimalnya pelestarian budaya dan potensi instabilitas sosial;
- 11) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam unggulan daerah;
- 2) Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif dan UMKM;
- 3) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah kepulauan;;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung daya saing dan produktivitas daerah;
- 5) Penguatan tata kelola pemerintahan dan ketahanan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 6) Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2027.

4.3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menetapkan Program Prioritas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Penetapan program prioritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi Sumber daya pembangunan difokuskan pada isu-isu strategis dan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Program prioritas disusun sebagai jawaban atas tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Buru Selatan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berdaya saing di era transformasi digital.

Adapun Prioritas Kabupaten Buru Selatan tahun 2027 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ;
- 2) Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah;
- 3) Penguatan UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan Lokal yang Inklusif;
- 4) Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;
- 5) Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;
- 6) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;
- 7) Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana;

4.3.1.1 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan prioritas utama pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, mengingat peran strategis SDM sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Pembangunan SDM diarahkan untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, terampil, berkarakter, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan ekonomi lokal.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penguatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, serta pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis potensi unggulan daerah guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap kerja sesuai kebutuhan sektor-sektor unggulan daerah.

Di bidang kesehatan, pembangunan difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, peningkatan status gizi masyarakat, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung produktivitas tenaga kerja. Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan terus diperkuat agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Melalui prioritas ini diharapkan terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta terbentuknya SDM Buru Selatan yang unggul dan berdaya saing.

4.3.1.2. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah.

Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah menjadi fokus penting pembangunan Tahun 2027 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sarana dan prasarana produksi. Hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti ubi kayu untuk mendukung Program Prioritas Nasional dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi serta menjadi strategi utama untuk memperpanjang rantai nilai, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas kesempatan kerja.

Selain itu, pengembangan kawasan sentra produksi dan ekonomi berbasis wilayah terus didorong guna memperkuat keterkaitan antar sektor dan antar wilayah. Dengan penguatan ekonomi lokal yang berbasis potensi unggulan dan bernilai tambah, diharapkan perekonomian daerah tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing.

4.3.1.3 Penguatan UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan Lokal yang Inklusif.

UMKM, koperasi, dan kewirausahaan lokal memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi rakyat dan pilar pembangunan ekonomi inklusif. Pada Tahun 2027, pembangunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM serta koperasi agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Penguatan UMKM dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha, penguatan manajemen dan tata kelola usaha, peningkatan mutu dan diversifikasi produk, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pemasaran. Akses terhadap permodalan, kemitraan usaha, dan pasar terus diperluas, baik melalui lembaga keuangan maupun kemitraan dengan dunia usaha yang lebih besar.

Pengembangan kewirausahaan lokal, khususnya di kalangan pemuda dan perempuan, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal menjadi bagian penting dari prioritas ini. Dengan demikian, UMKM dan koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

4.3.1.4 Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusif.

Percepatan penurunan kemiskinan merupakan agenda strategis pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, seiring dengan upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Pembangunan diarahkan pada penanganan kemiskinan secara terpadu melalui integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Penguatan ekonomi desa dan kawasan tertinggal dilakukan melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan peran BUMDes dan ekonomi komunitas. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pengendalian kerentanan sosial ekonomi menjadi fokus penting untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan pembangunan ekonomi

inklusif, diharapkan angka kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dapat ditekan secara berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata

4.3.1.5 Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal.

Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2027 diarahkan sebagai faktor pendukung utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai dan merata menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Prioritas pembangunan infrastruktur meliputi peningkatan konektivitas antar wilayah dan sentra produksi, penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, perumahan layak, serta peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penguatan infrastruktur digital dan layanan dasar lainnya terus didorong guna mendukung transformasi ekonomi dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata juga menjadi fokus untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi distribusi, dan daya saing ekonomi daerah.

4.3.1.6 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif.

Penguatan tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Pada Tahun 2027, pembangunan diarahkan pada reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara, penyederhanaan prosedur pelayanan publik, serta optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penguatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diperkuat guna

menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.

4.3.1.7 Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana.

Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan wilayah. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan secara bijak dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim terus diperkuat melalui peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, serta penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Pengembangan ekonomi hijau, desa ramah lingkungan, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Melalui prioritas ini diharapkan terwujud ketahanan lingkungan dan sosial yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Upaya mewujudkan pencapaian pembangunan daerah sesuai visi, misi pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan diperlukan arah kebijakan pembangunan pada periodisasi pemerintahan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan tahun 2027 guna mencapai tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan tersebut. Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terdapat Dasa Cita 10 Program Prioritas Pengembangan Kabupaten Buru Selatan dengan Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut

:

1. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS :

- Menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang TK hingga SMP;
- Memberikan beasiswa kepada 500 mahasiswa kurang mampu dan berprestasi melalui subsidi SPP/BPP, termasuk beasiswa khusus untuk Fakultas Kedokteran;
- Memberikan insentif bulanan bagi guru dan tenaga kesehatan honorer sebagai bentuk apresiasi;

- Memperluas kolaborasi dengan universitas, baik negeri maupun swasta, untuk pengembangan SDM unggul Kabupaten Buru Selatan;
- Memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu;
- Meningkatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole, RS Pratama Fogi serta seluruh Puskesmas;
- Menjamin ketersediaan obat-obatan dengan pengawasan ketat (CCTV) di gudang obat untuk mencegah kecurangan dan pencurian.

2. PROGRAM KETAHANAN ENERGI :

- Meningkatkan kuota BBM, khususnya minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga, memperbaiki distribusi BBM di Kabupaten Buru Selatan dan membangun SPBU khusus nelayan untuk mengatasi antrean serta keterbatasan BBM bagi nelayan;
- subsidi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu melalui pemasangan listrik gratis.

3. PERUMAHAN RAKYAT : 1.000 RUMAH LAYAK HUNI dan 1.000 MCK LAYAK:

- Membangun 1.000 rumah layak huni dan 1.000 fasilitas MCK layak bagi warga berpenghasilan rendah di 6 Kecamatan.

4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : JALAN, JEMBATAN & TRANSPORTASI LAUT:

- Pembangunan bertahap jalan dan jembatan di 6 kecamatan, dengan prioritas pada Kec. Waesama, Kepala Madan, Ambalau dan Fena Fafan;
- Renovasi pelabuhan rakyat serta bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan transportasi laut yang nyaman dan aman, termasuk subsidi bagi pengelola kapal serta menyediakan rute antar desa, kecamatan dan rute Ambon-Namrole akan tersedia setiap hari.

5. INTERNET SATELIT GRATIS : 1 DESA 1 STARLINK:

- Internet gratis 24 jam : setiap desa akan memiliki 1 unit starlink di balai desa yang menyediakan akses internet gratis untuk warga, terutama bagi pemuda dan pelajar.

6. PANGAN RAKYAT : BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT MISKIN:

- Beras gratis untuk masyarakat miskin, anak-anak stunting dan yatim piatu, diselaraskan dengan program penanganan stunting kabupaten.

7. WIRAUSAHA & UMKM : CIPTA 1.000 PENGUSAHA BARU:

- Menciptakan 1.000 pengusaha baru, terutama anak muda melalui pelatihan, pendampingan, permodalan dan promosi.

8. KETAHANAN PANGAN DAERAH : LAHAN PERTANIAN BARU & GUDANG LOGISTIK:

- Mencetak lahan pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buru Selatan dan membangun gudang logistik terpadu untuk mendukung ketahanan pangan, bekerja sama dengan TNI/Polri dan Kementerian terkait, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pertanian lokal.

9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT : 100 JUTA PER DESA/TAHUN:

- Melegitimasi keberadaan lembaga adat di setiap desa/dusun, membangun rumah adat, dan mengalokasikan dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar Rp.100.000.000,- per desa/tahun;
- Kelompok adat akan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan daerah.

10. PROGRAM BURU SELATAN BERAKHLAK:

- Percepatan pembangunan rumah ibadah (masjid, gereja, dll.) di setiap desa dan kecamatan dengan dana hibah proporsional;
- Memberikan insentif bulanan bagi tokoh agama, termasuk guru sekolah minggu dan guru mengaji'

- Mengembangkan budaya Aroha sebagai bagian dari wisata religi & kearifan lokal dengan anggaran khusus untuk kegiatan Aroha di desa.

4.3.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Dasa Cita:

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah serta agenda strategis kepala daerah. Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan teknokratis dan kebijakan politis, Prioritas Pembangunan Tahun 2027 diselaraskan dengan Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sinkronisasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh prioritas, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta memberikan arah yang jelas bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027. Melalui penyelarasan tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan daya saing daerah dengan memperhatikan konsistensi terhadap RPJMD, keterkaitan antar sektor dan wilayah, serta kemampuan pendanaan daerah, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2027 dan Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati
1	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1. Pendidikan dan Kesehatan Gratis 2. Internet Satelit Gratis (1 Desa 1 Starlink) 3. Program Buru Selatan Berakhlak
2	Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan yang bernilai tambah	1. Ketahanan Pangan Daerah 2. Program Ketahanan Energi 2. Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut

3	Penguatan UMKM, koperasi, dan kewirausahaan lokal yang inklusif	1. Wirausaha & UMKM: Cipta 1.000 Pengusaha Baru 2. Pemberdayaan Masyarakat Adat (100 Juta/Desa/Tahun)
4	Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi inklusi	1. Pangan Rakyat: Beras Gratis untuk Masyarakat Miskin 2. Perumahan Rakyat: 1.000 Rumah Layak Huni & 1.000 MCK Layak 3. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
5	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendukung SDM dan ekonomi lokal	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan & Transportasi Laut 2. Internet Satelit Gratis 3. Perumahan Rakyat
6	Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif	1. Program Buru Selatan Berakhlak 2. Internet Satelit Gratis
7	Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan ketahanan bencana	1. Ketahanan Energi 3. Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Buru Selatan, terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan di tahun 2027, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027**

Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1	2	3	4
Prioritas 1 :Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan
		1. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Penduduk	1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Kesehatan
		1. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Kesehatan

		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan
		2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Dinas Kesehatan
	Pendidikan dan pelatihan	1. Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM
		2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMPDPP

Prioritas 2 : Penguatan Ekonomi Lokal Berkas Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program pengawasan keamanan pangan	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1. Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
	Program penyuluhan pertanian	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

	Program pengembangan ekspor	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan
Prioritas 3 : Penguatan UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan Lokal yang Inklusif.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	DISKOP dan UKM
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DISKOP dan UKM
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	DISKOP dan UKM
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	DISKOP dan UKM
	Program Hubungan Industrial	1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	DISKOP dan UKM
		2. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
		3. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM

	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DISKOP dan UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DISKOP dan UKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	DISKOP dan UKM



	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dinas Sosial
	Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	DPMPTSP
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
Prioritas 4: Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi.	Program Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT	Dinas Sosial
		2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
	Program perlindungan dan jaminan sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial



	Program perlindungan perempuan	1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPDPP
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPDPP
	Program pengelolaan SDE untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	Program penanganan kerawanan pangan	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan
	Program pengelolaan perikanan tangkap	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan

	Program pengelola perikanan budidaya	1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
		2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
		3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
Prioritas 5: Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Permukiman	1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR

	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas PUPR
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dinas Permukim
	Program Kawasan Permukiman	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Dinas Permukim

	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Permukim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Permukim
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Permukim
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dinas Permukim
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
		2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
Prioritas 6 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Program pengelolaan pelayaran	1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan



		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
	Program kepegawaian daerah	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM
		2. Mutasi dan Promosi ASN	
		3. Pengembangan Kompetensi ASN	
	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat, SETDA, BPKAD
	Program pengembangan kebudayaan	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
		2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata

Prioritas 7: Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana	Program penanganan bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	Program perencanaan lingkungan hidup	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	DLH
		2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
	Program pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	DLH
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)R	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH



	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan ppl	1. pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	DLH
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluh lingkungan hidup untuk masyarakat	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH
	Program penanganan untuk lingkungan hidup	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	DLH
	Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR



	Program penanggulangan bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
		2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

Sumber : Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2027 dari Aplikasi SIPD-RI, 2027

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Buru Selatan berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi Pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi Masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Penetapan besaran pagu anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu keterkaitan dengan target kinerja RPJMD dan RKPD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan program prioritas nasional dan prioritas Provinsi Maluku, kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, alokasi anggaran juga memperhatikan efisiensi, efektivitas, pemerataan pembangunan antarwilayah serta penerapan prinsip money follows program sehingga anggaran lebih difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah.

Alokasi anggaran Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah melalui penguatan belanja yang produktif dan berorientasi hasil. Pendanaan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang bernilai tambah, Penguatan UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan yang Inklusif, Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusif, Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana.. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD.

Memperhatikan kondisi ruang fiskal daerah yang masih terbatas akibat tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, strategi penganggaran Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan efisiensi belanja dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan dan prioritas sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2027 maka rencana kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaannya tersaji dalam tabel berikut.

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka rancangan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk tahun 2027 disajikan pada tabel 5.1. berikut :

**Tabel 5.1. Rancangan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027**

URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	Proyeksi APBD 2027
1	2	3	4
A. PENDAPATAN DAERAH	574,606,096,242.81	601,108,052,140.00	631,163,454,400.00
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13,110,655,796.63	38,193,484,140.00	40,103,158,000.00
- Pajak Daerah	2,300,197,609.00	10,300,000,000.00	10,815,000,000.00
- Retribusi Daerah	4,922,916,979.00	7,521,300,000.00	7,897,365,000.00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,376,238,977.00	6,000,000,000.00	6,300,000,000.00
- Lain-lain PAD yang Sah	511,302,231.63	14,372,184,140.00	15,090,793,000.00
2. Pendapatan Transfer	558,109,247,415.18	558,714,568,000.00	586,650,296,400.00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	546,499,712,670.00	547,714,568,000.00	575,100,296,400.00
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	11,609,534,745.18	11,000,000,000.00	11,550,000,000.00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	4,410,000,000.00
- Pendapatan Hibah	-	-	-
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,386,193,031.00	4,200,000,000.00	4,410,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN	574,606,096,242.81	601,108,052,140.00	631,163,454,400.00
B. BELANJA DAERAH	441,979,833,572.00	709,558,052,140.00	628,263,255,400.00
Belanja Operasi	343,944,690,561.00	550,440,468,067.00	484,709,898,406.00
Belanja Pegawai	212,446,140,784.00	341,924,027,000.00	341,924,027,000.00

URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	Proyeksi APBD 2027
1	2	3	4
Belanja Barang dan Jasa	102,463,312,189.00	184,605,944,867.00	126,323,962,406.00
Belanja Subsidi	1,560,000,000.00	1,224,000,000.00	1,095,480,000.00
Belanja Hibah	16,023,759,001.00	22,091,496,200.00	14,871,259,000.00
Belanja Bantuan Sosial	11,451,478,587.00	595,000,000.00	495,170,000.00
Belanja Modal	13,101,851,529.00	51,019,744,340.00	36,870,516,994.00
Belanja Modal Tanah	587,682,000.00	5,229,662,600.00	4,416,973,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,761,137,079.00	14,851,506,709.00	7,185,937,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,405,964,750.00	11,037,834,908.00	10,740,751,000.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	7,347,067,700.00	19,750,946,123.00	14,392,790,994.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	149,794,000.00	134,065,000.00
Belanja Tidak Terduga	1,403,926,000.00	6,000,000,000.00	6,750,000,000.00
Belanja Tidak Terduga	1,403,926,000.00	6,000,000,000.00	6,750,000,000.00
Belanja Transfer	83,529,365,482.00	102,097,839,733.00	99,932,840,000.00
Belanja Bagi Hasil	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	83,529,365,482.00	102,097,839,733.00	99,932,840,000.00
JUMLAH BELANJA	441,979,833,572.00	709,558,052,140.00	628,263,255,400.00
SURPLUS/ DEFISIT	132,626,262,670.81	(108,450,000,000.00)	2,900,199,000.00
C. PEMBIAYAAN	12,517,688,152.00	108,450,000,000.00	(2,900,199,000.00)
Penerimaan Pembiayaan	12,517,688,152.00	160,700,000,000.00	10,714,801,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12,517,688,152.00	10,700,000,000.00	10,714,801,000.00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	150,000,000,000.00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12,517,688,152.00	160,700,000,000.00	10,714,801,000.00
Pengeluaran Pembiayaan	-	52,250,000,000.00	13,615,000,000.00
Penyertaan Modal Daerah	-	250,000,000.00	250,000,000.00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	52,000,000,000.00	13,365,000,000.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	52,250,000,000.00	13,615,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	12,517,688,152.00	108,450,000,000.00	(2,900,199,000.00)
-	145,143,950,822.81	=	=

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan, 2026

5.2. RENCANA PROGRAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Indikasi rencana program tahun 2027 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh. Rencana Program, Outcome/indikator Outcome RPJMD tahun 2027 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program, kegiatan dan sub kegiatan dengan melihat pada capaian kinerja tahun 2025 dan tahapan perencanaan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Musrenbang Tahun 2026 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun RKPD Tahun 2027, dimana pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan yaitu pihak akademis, dunia usaha, komunitas pemerintah dan masyarakat Buru Selatan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta merupakan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat diuraikan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2027 disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel lampiran 5.2 (Renja OPD Tahun 2027).

Tabel 5.3
KESELARASAN PRO-SN/TEMATIK PEMBANGUNAN
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBANG 2026 KESEPAKATAN	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran								
			1.01.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan	Orang			PROVINSI :
			BIDANG PENDIDIKAN		Peningkatan Kapasitas Bidang	Teknis, Pelatihan, dan/atau				KABKOTA :
					Pendidikan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan	Orang			PROVINSI :
			BIDANG PENDIDIKAN		Peningkatan Kapasitas Bidang	Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk				KABKOTA :
					Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				SKPD : APIP :
2	EKONOMI SYARIAH									
										PROVINSI : KABKOTA :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
										SKPD : APIP :
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk	Dokumen			PROVINSI :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			BIDANG PERINDUSTRIAN		Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	halal yang dapat diimplementasika n				KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)								
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATAN	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
						Baku yang Disusun				
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
										APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit		10	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas	Jumlah Nelayan Kecil yang	Orang			PROVINSI :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		Nelayan Kecil	Meningkat Kapasitasnya				KABKOTA : SKPD : APIP :
6	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis								



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen		1	PROVINSI :
			BIDANG KESEHATAN		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan	Orang			PROVINSI :
			BIDANG PENDIDIKAN		Pendidikan	Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				KABKOTA : SKPD : APIP :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen		5	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		5	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8	MASYARAKAT ADAT									



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Dokumen	1	6	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi	Dokumen	1	6	PROVINSI : KABKOTA :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATAN	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			MASYARAKAT DAN DESA			Masyarakat Hukum Adat				SKPD : APIP :
9	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)								
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
					Kabupaten/Kota	Pangan Berkelanjutan				SKPD : APIP :
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit		4	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah	unit			PROVINSI : KABKOTA :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang tersedia				SKPD : APIP :
10	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM									
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
						Kewenangan Kabupaten/Kota				APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam	Pelaku Usaha			PROVINSI :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya				KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit		10	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
12	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota								



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	2	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :
										APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	500	50	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
13	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah								
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah		3	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraa n Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	Dokumen	3	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
					Teknis (TPT), Penilik, da	Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	8	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka	Unit			PROVINSI :
			BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pencegahan Kumuh				KABKOTA : SKPD : APIP :
14	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1	1	PROVINSI :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			BIDANG KESEHATAN		Kesehatan Penyakit Menular	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
15	PENANGGULANGAN BENCANA									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			MASYARAKAT			(satu) tahun				
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Kegiatan		1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Kabupaten/Kota yang dilegalkan				APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
16	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING									
	Kesehatan untuk Semua	Stunting								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		25	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
						Kesehatan Gizi Masyarakat				SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		2	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pegantin/Calon PUS, Ibu	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pegantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
					Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
17	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN									
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian								
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Unit		12	PROVINSI :
					Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya				KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit			PROVINSI :
					Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara				KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
18	PENGARUSUTAMAA N GENDER									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan	Orang			PROVINSI :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATAN	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			BIDANG PENDIDIKAN		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
19	PENGENDALIAN INFLASI									
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan		1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATAN	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
20	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	155	300	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATAN	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	170		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
21	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan,	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen		0	PROVINSI :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			BIDANG PENDIDIKAN		Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
22	PERLINDUNGAN ANAK									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan	Orang			PROVINSI :
			BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	bimbingan teknis dan pendampingan.				KABKOTA : SKPD : APIP :
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara		1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Kegiatan		0	PROVINSI :
			BIDANG PENDIDIKAN		intoleransi	intoleransi				KABKOTA :

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATAN	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
										SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
23	SEKOLAH RAKYAT									
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD :



NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUB KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKBA NG 2026 KESEPAKATA N	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
						Kelayakan Operasi yang Diberikan				APIP :

Tabel 5.4
KESELARASAN OUTCOME PRIORITAS MENDUKUNG ASTA CITA HASIL
KESEPAKATAN DESK URUSAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 DENGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal									
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi	Kegiatan Usaha	15	15	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :



NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKA TAN RAKORTEK BANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
									Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	15		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global									
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							



NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKA TAN RAKORTEK BANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
							3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan			PROVINSI : KABUPATEN : SKPD : APIP :
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha			PROVINSI : KABUPATEN : SKPD : APIP :



Tabel 5.5.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025 DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2027

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			145,536,781,690.00			173,012,467,700.00	
	Terlaksananya Pelayanan dasar pemerintahan Bidang Pendiidkan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95.00%	145,536,781,690.00	100,00%	94.00%	173,012,467,700.00	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			57,013,622,249.00			4,831,200,000.00	
	Meningkatnya Kualitas Pendiidkan dan SDM masyarakat Buru Selatan	Angka Partsipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD	100% 100% 97,60%	57,013,622,249.00	86,95% 74,73% 76,24%	100% 114,64% 97,60	4,831,200,000.00	Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			104,658,989,000.00			76,712,705,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95,00%	104,658,989,000.00	103,08%	95,00%	76,712,705,000.00	Dinas Kesehatan, Pengencialan Penduduk dan Keluarga Berencana

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			76,495,889,000.00			7,962,737,000.00	
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta derajat kesehatan masyarakat	Presentase penemuan kasus TBC	60.00%	76,495,889,000.00	34,47%	60,00%	7,962,737,000.00	Dinas Kesehatan RSUD Dr. Salim Alkatiri
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			862,422,000.00			60,000,000.00	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi	23,32%	862,422,000.00	100.00%	20,51%	60,000,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			862,422,000.00			50,000,000.00	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan	Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	100,00% 100,00%	862,422,000.00	100%	100,00% 50,00%	50,000,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1,456,893,000.00			30,000,000.00	
	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup	74,60%	1,456,893,000.00	84.00%	70,50%	30,000,000.00	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			5,738,767,600.00			2,514,915,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	97,00%	5,738,767,600.00	98,75%	96,00%	2,514,915,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			3,400,000,000.00			850,000,000.00	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	25,00%	3,400,000,000.00	20,00%	25,00%	850,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			3,590,000,000.00			450,000,000.00	
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	80,00%	3,590,000,000.00	65,37%	75,00%	450,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			750,000,000.00			100,000,000.00	
	Meningkatnya pegelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	62,00%	750,000,000.00	82,00%	60,00%	100,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			2,015,000,000.00			1,350,000,000.00	
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	91,00%	2,015,000,000.00	82,00%	87,00%	1,350,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			300,000,000.00			200,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pengembangan permukiman	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	1,34%	300,000,000.00	13,00%	1,29%	200,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			11,850,000,000.00			600,000,000.00	
	Tersedianya penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	1,34%	11,850,000,000.00	13,00%	1,29%	600,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			600,000,000.00			500,000,000.00	
	Terlaksananya penataan Bangunan dan lingkungannya	Presentase penataan Bangunan dan lingkungannya	1,34%	600,000,000.00	13,00%	1,29%	500,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			8,750,000,000.00			1,300,000,000.00	
	Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Persentase kondisi mantap jalan	70,00%	8,750,000,000.00	16,53%	60,00%	1,300,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1,050,000,000.00			498,695,000.00	
	Terselenggaranya penyelenggaraan penataan ruang	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	26,00%	1,050,000,000.00		24,00%	498,695,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,962,172,220.00			1,795,907,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	94,00%	2,962,172,220.00	99,80%	92,00%	1,795,907,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			8,248,206,000.00			230,000,000.00	
	Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	50,00% 70,00%	8,248,206,000.00			230,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2,000,000,000.00			110,000,000.00	
	Presentase Permukiman Tertata	Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	57,43% 58,67%	2,000,000,000.00	95,45% 89,52%	25,30% 54,69%	110,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			2,320,450,000.00			225,000,000.00	
	Meningkatkan kualitas hunian dan fungsi infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	2,24%	2,320,450,000.00	0,23%	1,32%	225,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			750,000,000.00			100,000,000.00	
	Meningkatnya Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	79,61%	750,000,000.00		78,05%	100,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,010,433,722.00			2,676,635,000.00	
	Terlaksananya Pelayanan dasar pemerintahan Bidang Pendiidkan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96,00%	4,010,433,722.00	99,68%	95,00%	2,676,635,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	90,00%	2,830,379,000.00	99,37%	89,00%	2,798,116,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,100,000,000.00			300,000,000.00	
	meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	79,00%	1,100,000,000.00	75,00%	77,00%	300,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			4,829,000,000.00			265,218,000.00	



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Terencana dan Terpadu serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	200 Orang	4,829,000,000.00	60 Orang	150 Orang	265,218,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN			500,000,000.00			80,000,000.00	
	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	25,00%	500,000,000.00		-	80,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06	URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL							
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			3,741,717,000.00			2,687,686,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	88,00%	3,741,717,000.00	97,78%	100,00%	2,687,686,000.00	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			757,863,906.00			40,000,000.00	
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial	78,00%	757,863,906.00		76,00%	40,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			543,000,000.00			50,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	67,50%	543,000,000.00	58,73%		50,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL			1,340,000,000.00			198,000,000.00	
	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	61,10%	1,340,000,000.00	58,73%	60,00%	198,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			365,000,000.00			125,000,000.00	
	Meningkatnya Penangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	74,00%	365,000,000.00	100,00%	100,00%	125,000,000.00	Dinas Sosial
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			280,000,000.00			80,000,000.00	
	Terwujudnya implementasi program ketenagakerjaan yang berbasis data dan terarah	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	128 Orang	280,000,000.00	44 Orang	127	80,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-			85,000,000.00	
							85,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			176,000,000.00			110,000,000.00	
	Meningkatnya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan dan terserap ke dunia kerja (formal maupun informal)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	20,00%	176,000,000.00		18,00%	110,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	19,00%			19,00%		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-			700,000,000.00	
							700,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			3,947,000,000.00			2,401,935,000.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100,00%	3,947,000,000.00	99,66%	100,00%	2,401,935,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			75,000,000.00			75,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OPD Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan PPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	12,00%	75,000,000.00	6,00%	12,00%	75,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			-			35,000,000.00	
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender	0.00%	-	87,33%	0.00%	35,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			85,000,000.00			50,000,000.00	
	Menurunnya Jumlah Kasus ekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	0.15:0.15	85,000,000.00	0.20:0.20	0.00%	50,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			3,267,080,490.00			2,480,056,500.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	94,00%	3,267,080,490.00	99,66%	93,00%	2,480,056,500.00	Dinas Ketahanan Pangan

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			163,900,000.00			47,711,000.00	
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama	2400 Kkal/ Kapital	163,900,000.00	1429 Kkal/ Kapital	2400 Kkal/ Kapital	47,711,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			369,580,190.00			319,989,500.00	
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	64,43	369,580,190.00	78,00	62,65	319,989,500.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			233,900,000.00			95,000,000.00	
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	31,50%	233,900,000.00	35,81%	37,68%	95,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			16,531,350.00			15,028,000.00	
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	2100	16,531,350.00	50,00%	2100	15,028,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			2,100,000,000.00			600,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	70,00% 80,00%	2,100,000,000.00		60,00% 80,00%	600,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			100,000,000.00			100,000,000.00	
	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	presentase tanah kosong yang dikelola	70,00%	100,000,000.00		70,00%	100,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			7,110,961,223.00			1,806,000,000.00	
	terwujudnya dukungan administratif dan operasional yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	97,00%	7,110,961,223.00	98,96%	96,00%	1,806,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			40,000,000.00			446,000,000.00	
	terlaksananya dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengendalikan pembangunan agar tidak merusak lingkungan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100,00%	40,000,000.00	100,00%	100,00%	446,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1,407,000,000.00			75,000,000.00	
	tercapainya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan indikator seperti penurunan tingkat polusi udara, perbaikan kualitas air, dan pelestarian keanekaragaman hayati	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana laboratorium	40,00%	1,407,000,000.00		35,00%	75,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			535,000,000.00			20,000,000.00	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragam Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		535,000,000.00		30,00%	20,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			355,700,000.00			100,000,000.00	
	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	70,00%	355,700,000.00	55,00%	65,00%	100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			240,000,000.00			50,000,000.00	
	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengatahuan Tradisional dan Hak MHA Yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40,00%	240,000,000.00		35,00%	50,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			145,000,000.00			50,000,000.00	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	67,00%	145,000,000.00		65,00%	50,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			55,300,000.00			50,000,000.00	
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Kasus Tindak Pindana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	40,00%	55,300,000.00		35,00%	50,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			405,000,000.00			1,382,000,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	0,50	405,000,000.00	0,30%	0,40	1,382,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penanganan Sampah	8497,10		8018,41	8254,29		

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,958,111,080.00			2,022,950,000.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	94,87%	2,958,111,080.00	97,58%	93,93%	2,022,950,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			1,188,500,000.00			133,400,000.00	
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	86,60%	1,188,500,000.00		85,70%	133,400,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			353,500,000.00			10,000,000.00	
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dan Pelaporan atas Peristiwa Penting tepat waktu	91,60%	353,500,000.00		91,00%	10,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			392,000,000.00			1,350,000.00	
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase data sinkron dan OPD Pengguna data Kependudukan	50,72%	392,000,000.00		44,10%	1,350,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1,650,000,000.00			1,048,000,000.00	
	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	2	1,650,000,000.00	1	1	1,048,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			500,000,000.00			185,000,000.00	
	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	70,00%	500,000,000.00	20,00%	60,00%	185,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			10,010,000,000.00			110,000,000.00	



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	63,90% 12.60% 5,6%	10,010,000,000.00	59,76% 7,50% 10,57%	10,30% 60.80% 6,70%	110,000,000.00	Dinas Kesehatan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			16,858,854,000.00			220,000,000.00	
	Terkendalnya Angka Kelahiran dan Terpenuhinya Kebutuhan ber-KB	Persentase KB Pasca Persalinan	37,99%	16,858,854,000.00	44,34%	35,29%	220,000,000.00	Dinas Kesehatan
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			10,450,000,000.00			130,000,000.00	
	Terciptanya Keluarga Yang Mandiri dan Berkualitas	Indek Lansia Berdaya Indeks Pembangunan Keluarga (BANGA)	71,13% 63,70%	10,450,000,000.00	33,94% 0,322%	62,50% 70,20%	130,000,000.00	Dinas Kesehatan
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			3,117,553,000.00			2,155,805,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	92,00%	3,117,553,000.00	99,66%	91,00%	2,155,805,000.00	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAMPENYELENGGARAAN LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN (LLAJ)			6,500,000,000.00			235,600,000.00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	45,00%	6,500,000,000.00	36,76%	0,12%	235,600,000.00	Dinas Perhubungan
		Persentase Kepemilikan KIR	25,00%		16,07%	10,00%		
		Persentase Layanan Angkutan Darat	10,00%		10,48%	20,00%		
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,12		0,12%	40,00%		
2.15.03	PROGRAMPENYELENGGARAAN LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN (LLAJ)			21,300,000,000.00			210,600,000.00	
	Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut	50000	21,300,000,000.00	51467	45000	210,600,000.00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Barang Melalui Dermaga	95000		536016	90000		
2.16	URUSANPEMERINTAHANBIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,120,808,480.00			2,047,140,000.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	98,00%	2,120,808,480.00	99,38%	99,99%	2,047,140,000.00	Dinas Perhubungan
2.16.01	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2,120,808,480.00			95,000,000.00	
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik. Tingkat Keterbukaan Informasi Publi	3,00% 3,80%	2,120,808,480.00		3,50% 3,60%	95,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.16.01	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			140,760,000.00			75,000,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,66	140,760,000.00			75,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH							
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			1,647,800,000.00			2,156,000,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	79,00%	1,647,800,000.00	96,08%	77,00%	2,156,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			250,000,000.00			250,000,000.00	
	Terwujudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi)	76	250,000,000.00		74	250,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			-			90,000,000.00	
	Terwujudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					90,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKANDAN LATIHAN PERKOPERASIAN			125,000,000.00			95,000,000.00	
	Tercapainya SDM Koperasi yang Profesional	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	56	125,000,000.00	15	54	95,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			625,000,000.00			100,000,000.00	
	Koperasi mampu meningkatkan volume usaha, aset, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga menjadi mandiri dan mampu bersaing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	23	625,000,000.00	15	22	100,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			544,000,000.00			100,000,000.00	
	Peningkatan rata-rata volume penjualan dan keuntungan bersih UMKM yang menjadi sasaran program secara signifikan dan berkelanjutan	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan ((%))	28	544,000,000.00	70	22	100,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			111,000,000.00			100,000,000.00	
	peningkatan signifikan pada rata-rata omzet dan aset UMKM, dengan indikator keberhasilan paling tinggi adalah perpindahan kategori usaha	Update dan Pengumpulan data UMKM (Presentase)	24,00%	111,000,000.00			100,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,399,000,000.00			2,033,429,000.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	89,00%	2,399,000,000.00	98,61%	87,00%	2,033,429,000.00	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			200,000,000.00			50,000,000.00	
	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Iumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor)	10	200,000,000.00	20	20	50,000,000.00	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			100,000,000.00			135,000,000.00	
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	2	100,000,000.00	0	2	135,000,000.00	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			150,000,000.00			175,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha	690	150,000,000.00	630	660	175,000,000.00	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			100,000,000.00			100,000,000.00	
	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal di Daerah	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN (%)	0,00%	100,000,000.00	0,00%	0,00%	100,000,000.00	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	39,60%		36,55%	36,55%		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			10,000,000.00			35,000,000.00	
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi	4	10,000,000.00	2	3	35,000,000.00	Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,141,844,134.00			1,688,116,900.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93,30%	2,141,844,134.00	95,30%	92,70%	1,688,116,900.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			495,100,320.00			200,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasi kemasyarakatan (%)	77,00%	495,100,320.00			200,000,000.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			918,763,280.00			428,000,000.00	
	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga (Persentase)	17,50%	918,763,280.00			428,000,000.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			918,763,280.00			30,000,000.00	
	Meningkatnya Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	17,50%	918,763,280.00		30%	30,000,000.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			63,240,000.00			40,800,000.00	
	Meningkatkan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Indeks)	2,20	63,240,000.00			40,800,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2,778,750,000.00			120,000,000.00	
	Meningkatnya aktualisasi kesenian daerah, sarana prasarana lembaga adat, dan tersedianya dokumen PPKD	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	54	2,778,750,000.00		52	120,000,000.00	Dinas Pariwisata

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			661,500,000.00			25,000,000.00	
	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	19,00%	661,500,000.00	16,00%	16,00%	25,000,000.00	Dinas Pariwisata
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	33,00%		93,75%	30,00%		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			1,603,500,000.00			1,803,389,200.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	52,50	1,603,500,000.00	49,55		1,803,389,200.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			333,000,000.00			294,769,000.00	
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	72,50	333,000,000.00	65,58%		294,769,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			76,500,000.00			9,447,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	3,50%	76,500,000.00	2.00%		9,447,000.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			120,000,000.00			105,394,800.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	50	120,000,000.00		10	105,394,800.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Tingkat Ketersediaan Arsip	15%			45%		
3.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							
3.20.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			7,445,000,000.00			59,768,000.00	
	Meningkatnya Kelestarian Sumber daya Alam Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	7,445,000,000.00		0	59,768,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			3,827,414,000.00			3,164,122,000.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	88,00%	3,827,414,000.00	98,24%	85,00%	3,164,122,000.00	Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3,350,000,000.00			1,535,000,000.00	
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0,00%	3,350,000,000.00	123	0,00%	1,535,000,000.00	Dinas Perikanan

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1,005,000,000.00			480,000,000.00	
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0,00%	1,005,000,000.00	1,01 Ton	0,00%	480,000,000.00	Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			420,000,000.00			230,000,000.00	
	Meningkatnya jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat	Jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat	0,00%	420,000,000.00		0,00%	230,000,000.00	Dinas Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,172,092,993.00			1,855,563,000.00	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95,00%	2,172,092,993.00	97,67%	94,00%	1,855,563,000.00	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1,313,610,559.00			125,000,000.00	
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4.048 336 98.438.000	1,313,610,559.00	2.807 357 15.453.000	317 3819 93.750.000	125,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			404,727,750.00			125,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya promosi dan kerjasama pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	75,00%	404,727,750.00		75,00%	125,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			826,875,000.00			40,000,000.00	
	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana kotakreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yangAktif dan Tervalidasi (Persentase)	40,00%	826,875,000.00			40,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			275,625,000.00			37,500,000.00	
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	50 Orang	275,625,000.00	34 Orang		37,500,000.00	Dinas Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,991,677,020.00			4,729,167,300.00	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	94,00%	4,991,677,020.00	97,93%	98,00%	4,729,167,300.00	Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3,309,849,408.00			982,220,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian	Persentease Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	93,00%	3,309,849,408.00		92,00%	982,220,000.00	Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			-			280,000,000.00	
	Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian	Persentease Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	0.00%	-		0.00%	280,000,000.00	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			38,464,200.00			20,000,000.00	
	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	93,00%	38,464,200.00		90,00%	20,000,000.00	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			-			60,000,000.00	
						0.00%	60,000,000.00	Dinas Pertanian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,857,000,000.00			2,988,073,000.00	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	71,80%	2,857,000,000.00	95,45%	67,20%	2,988,073,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1,653,000,000.00			246,150,000.00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	28,69%	1,653,000,000.00		21,56%	246,150,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			175,000,000.00			271,091,750.00	
	Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, serta mengurangi disparitas harga	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	65,20%	175,000,000.00		64,10%	271,091,750.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			182,000,000.00			267,223,735.00	
	Peningkatan daya saing produk nasional, penyerapan tenaga kerja	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	68,40%	182,000,000.00		67,20%	267,223,735.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			131,150,000.00			197,350,000.00	
	Meningkatnya kepercayaan konsumen, berkurangnya kasus peredaran barang berbahaya, dan meningkatnya keadilan bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik yang adil	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	61,00%	131,150,000.00		58,90%	197,350,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-			14,000,000.00	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	71,80%		95,45%	100,00%	14,000,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			81,680,000.00			362,241,750.00	
	Meningkatnya kontribusi industri terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, dan terwujudnya industri yang berkelanjutan dan terintegras	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	4,23%	81,680,000	3,66	64,10%	362,241,750.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			1,150,000,000.00			260,000,000.00	
	Kawasan transmigrasi memiliki dokumen legalitas lahan yang sah dan tuntas (sertifikat hak atas tanah) serta kepastian hukum tata ruang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	53,00%	1,150,000,000.00		52,00%	260,000,000.00	Dinas Koperassi, Usaha Kecil dan Menengah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
'4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			79,822,048,556.00			32,672,500,900.00	
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	70,00%	60,990,111,928.00	99,87%	92,00%	21,247,402,400.00	Selretariat Daerah
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	94,00%	778,898,800.00	95,65%	92,00%	230,615,000.00	Bagian adminsitrase Pembangunan
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	91,00%	958,200,000.00	94,15%	90,00%	349,000,000.00	Bagian Hukum
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	99,99%	1,504,297,500.00	91,10%	99,99%	574,600,000.00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95,00%	1,222,926,320.00	85,28%	94,00%	439,800,000.00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	60-70	780,470,000.00	89,37%	48,84	435,000,000.00	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93,00%	910,000,000.00	83,13%	92,00%	301,066,000.00	Bagiann Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93,00%	572,144,008.00	84,40%	92,00%	183,000,000.00	Bagian Pemerintahan



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93,00%	555,000,000.00	97,75%	92,00%	357,000,000.00	Bagian Perekonomian dan SDA
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	92,00%	11,550,000,000.00	94,50%	90,00%	8,555,017,500.00	Bagian Umum
'4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			8,581,400,000.00			574,320,000.00	
	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	91,45%	508,000,000.00	87,00%	91,40%	188,320,000.00	Bagian Hukum
	Meningkatnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	96,00%	7,125,800,000.00		95,00%	143,000,000.00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya capaian program pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	94,00%	947,600,000.00		93,00%	243,000,000.00	Bagian Pemerintahan
'4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,814,775,300.00			531,519,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Evaluasi Pengawasan, Pengendalian Program dan Percepatan Penyerapan APBD	92,00%	673,350,300.00	90,00%	91,00%	229,585,000.00	Bagian adminsitasi Pembangunan
	Meningkatnya Proses Pengelolaan Barang danJasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	29,95	910,000,000.00		28,53	151,934,000.00	Bagiann Pelayanan Pengedaan Barang dan Jasa

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	93,00%	231,425,000.00		92,00%	150,000,000.00	Bagian Perekonomian dan SDA
4.02	SEKRETARIAT DPRD							
'4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,691,532,500.00			17,577,536,000.00	
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	92,00%	11,691,532,500.00	95,33%	91,00%	17,577,536,000.00	Sekretariat DPRD
'4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			9,059,464,800.00			7,199,702,000.00	
	Meningkatnya Kualiatas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	72,00%	9,059,464,800.00		71,00%	7,199,702,000.00	Sekretariat DPRD
5.01	PERENCANAAN							
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,420,036,288.00			5,266,540,200.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	83,00%	6,420,036,288.00	92,30%	82,00%	5,266,540,200.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2,854,972,970.00			593,567,200.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	92,00%	2,854,972,970.00	91,00%	90,00%	593,567,200.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,833,874,570.00			335,124,600.00	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	92,00%	1,833,874,570.00	100,00%	90,00%	335,124,600.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.02	KEUANGAN							
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,430,973,227.00			29,535,946,020.00	
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	94,00%	10,430,973,227.00	77,79%	93,00%	29,535,946,020.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi SKPD	Indeks Pelayanan Publik.	3,00%	5,050,350,714.46		83,00%	2,716,838,000.00	Badan Pendapatan Daerah

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			3,606,210,000.00			1,870,000,000.00	
	Meningkatnya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	95,00%	3,606,210,000.00		94,00%	1,870,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			796,620,000.00			355,000,000.00	
	Tersedianya dokumen barang milik daerah, dan kartu inventarisasi barang milik daerah	Persentase Penurunan Masalah Penilaian dan Pengakuan Aset	93,00%	796,620,000.00		92,00%	355,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2,588,152,550.00			637,835,000.00	
	Meningkatnya Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	3,05%	2,588,152,550.00	6,35%	3,04%	637,835,000.00	Badan Pendapatan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN							
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,010,445,000.00			2,540,744,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93,00%	5,010,445,000.00	98,62%	92,00%	2,540,744,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1,996,900,000.00			1,087,000,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAW AB
			TARGET 2027					
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang berkinerja minimal Baik Persentase ASN yang berpendidikan Minimal D3 Persentase ASN yang disiplin Persentase Pemenuhan Sub Indikator Pengelolaan Manajemen ASN	74,00% 86,00% 85,00% 76,00%	1,996,900,000.00		72,00% 75,00% 84,00% 85,00%	1,087,000,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PRNDIDIKAN DAN PELATIHAN							
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1,210,000,000.00			1,020,700,000.00	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	12 Orang	1,210,000,000.00		10 Orang	1,020,700,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			281,122,365.00			150,000,000.00	
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan embangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	82,00%	281,122,365.00	46,00%	81,00%	150,000,000.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,137,108,000.00			3,202,643,000.00	
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	94,00%	4,137,108,000.00	95,62%	92,00%	3,202,643,000.00	Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2,780,000,000.00			698,897,080.00	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kebabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	63,00%	2,780,000,000.00		62,00%	698,897,080.00	Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			850,000,000.00			452,000,000.00	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	63,00%	850,000,000.00		62,00%	452,000,000.00	Inspektorat Daerah
7.01	KECAMATAN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13,583,148,165.00			10,343,803,900.00	
	Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	3,00	1,471,197,005.00		86	1,242,439,500.00	Kecamatan Ambalau
	Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	78,00%	1,869,400,000.00		77,00%	1,445,588,400.00	Kecamatan Fenafafan



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	88,00%	2,571,316,000.00		85,00%	1,825,640,000.00	Kecamatan Kepala Madan
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	79,00%	3,123,753,160.00		77,00%	2,744,170,000.00	Kecamatan Leksula
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93,00%	2,439,100,000.00		92,00%	1,586,771,000.00	Kecamatan Namrole
	Meningkatnya Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	3,00	2,108,382,000.00		2.34	1,499,195,000.00	Kecamatan Waesama
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			205,000,000.00			152,729,000.00	
	Meningkatnya Tingkat Prtisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,00	45,000,000.00		86	28,000,000.00	Kecamatan Ambalau
	Telaksananya PenyelenggaraanPelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	76,000,000.00		78	76,000,000.00	Kecamatan Fenafafan
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,40	19,000,000.00		79,38	8,000,000.00	Kecamatan Kepala Madan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79,39	43,000,000.00		79,38	30,570,000.00	Kecamatan Leksula
	Meningktanya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79,40	22,000,000.00		79,38	10,159,000.00	Kecamatan Waesama
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			102,699,000.00			50,116,000.00	

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Kelurahan	88,29	60,000,000.00		88,27	25,000,000.00	Kecamatan Kepala Madan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	88,29	42,699,000.00		88,27	25,116,000.00	Kecamatan Waesama
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			385,881,000.00			90,111,000.00	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di tingkat Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	3,00	20,000,000.00		86	20,000,000.00	Kecamatan Ambalau
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahah yang baik	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	78,00%	131,000,000.00		77,00%	17,000,000.00	Kecamatan Fenafafan
	Terlaksananya ProgramP enyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	98,00%	62,000,000.00		97,00%	15,000,000.00	Kecamatan Leksula
	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	98,00%	172,881,000.00		97,00%	38,111,000.00	Kecamatan Waesama
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			505,860,000.00			250,375,500.00	
	Meningkatnya Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih	Indeks Pelayanan Publik	3,00	60,000,000.00		86	36,000,000.00	Kecamatan Ambalau
	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	3,00	60,000,000.00		77	41,458,600.00	Kecamatan Fenafafan



No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pelayanan dalam Memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	102	180,000,000.00		102	65,000,000.00	Kecamatan Kepala Madan
	Terwujudnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan ntuk urusan pemerintahan desa	102	67,000,000.00		102	41,464,900.00	Kecamatan Leksula
	Terlaksananya Peningkatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	102	117,000,000.00		102	50,000,000.00	Kecamatan Namrole
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	100	21,860,000.00		100	16,452,000.00	Kecamatan Waesama
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,110,720,380.00			2,166,651,000.00	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93,00%	2,110,720,380.00	97,83%	92,00%	2,166,651,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			800,000,000.00			705,850,400.00	
	Meningkatnya penguatan deologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	92,00%	800,000,000.00	95,00%	91,00%	705,850,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			66,400,000.00			66,400,000.00	
	Meningkatnya Etika dan Budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	90,00%	66,400,000.00	100,00%	90,00%	66,400,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			32,250,000.00			32,400,000.00	
	Meningkatnya Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	90,00%	32,250,000.00	100,00%		32,400,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1,647,990,479.00			858,457,400.00	
	Meningkatnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi sosial,budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan konomSosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	95,00%	1,647,990,479.00			858,457,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	RPJMD 2025-2029		REALISASI KINERJA 2025	RKPD 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAW AB
			TARGET 2027			Kinerja	Pagu	
			Kinerja	Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			417,529,800.00			332,550,000.00	
	Meningkatnya Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	87,00%	417,529,800.00		86,00%	332,550,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Aplikasi SIPD-RI Kabupaten Buru Selatan 2026, diolah

5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Tabel 5.6 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

No.	Urusan/Bidang Urusan	Realisasi 2025 (Rp)	Target 2026 (Rp)	Pagu Indikatif tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4	5
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2,123,442,520	4,232,372,813	1,660,000,000
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2,123,442,520	4,232,372,813	1,660,000,000
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1,398,825,520	2,735,442,813	750,000,000
1.1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	514,785,900	-	
1.2.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	299,988,000	-	
1.3.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	957,600,000	
1.4.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	202,060,000	200,000,000
1.5.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	
1.6.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	150,000,000
1.7.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	196,924,120	303,804,000	100,000,000
1.8.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	
1.9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	87,139,500	1,072,189,813	200,000,000
1.10.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	299,988,000	199,789,000	100,000,000
1.11.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	434,829,500	
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	520,926,000	1,284,180,000	510,000,000
2.1.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	151,326,000	-	
2.2.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	369,600,000	705,600,000	150,000,000
2.3.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	-	147,546,000	200,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan	Realisasi 2025 (Rp)	Target 2026 (Rp)	Pagu Indikatif tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4	5
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
2.4.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	
2.5.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	123,050,000	80,000,000
2.6.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	153,666,000	
2.7.	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	-	154,318,000	80,000,000
2.8.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	
2.9.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	203,691,000	212,750,000	400,000,000
3.1.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	39,532,000	77,452,500	150,000,000
3.1.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	-	24,092,850	
3.2.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	
3.3.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	203,691,000	108,000,000	
3.4.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	-	4,750,000	200,000,000
3.5.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	-	100,000,000	200,000,000
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-
4.1.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2,816,116,000	3,169,042,000	90,000,000
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,816,116,000	3,169,042,000	90,000,000
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	2,816,116,000	3,169,042,000	90,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan	Realisasi 2025 (Rp)	Target 2026 (Rp)	Pagu Indikatif tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4	5
	Kabupaten/Kota			
1.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	613,391,000	915,499,000	10,000,000
1.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	422,650,000	272,423,000	10,000,000
1.3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1,125,000	386,795,000	10,000,000
1.4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	296,100,000	-	10,000,000
1.5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	771,350,000	583,450,000	10,000,000
1.6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	211,000,000	-	10,000,000
1.7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	472,350,000	613,801,000	10,000,000
1.8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	382,350,000	10,000,000
1.9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28,150,000	14,724,000	10,000,000
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5,661,715,750	4,031,287,113	450,000,000
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5,548,411,750	3,825,068,113	450,000,000
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5,548,411,750	3,825,068,113	450,000,000
1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100,000,000	-	-
1.2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1,406,519,500	3,645,538,113	250,000,000
1.3.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	249,927,000	179,530,000	200,000,000
1.4.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,791,965,250	-	-
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	113,304,000	206,219,000	-
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	113,304,000	206,219,000	-

No.	Urusan/Bidang Urusan	Realisasi 2025 (Rp)	Target 2026 (Rp)	Pagu Indikatif tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4	5
	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
'1.1.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	113,304,000	206,219,000	-
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANERMUKIMAN	146,541,000	53,125,000	40,000,000
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	146,541,000	53,125,000	40,000,000
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	146,541,000	53,125,000	40,000,000
1.1.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	-	-	
1.2.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	131,300,000	53,125,000	
1.3.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	15,241,000	-	40,000,000
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	500,717,000	482,681,000	525,820,000
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	369,600,000	369,600,000	300,000,000
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	369,600,000	369,600,000	300,000,000
1.1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	369,600,000	369,600,000	300,000,000
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	15,423,000	9,701,000	50,000,000
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15,423,000	9,701,000	50,000,000
1.1.	Pembinaan Aparatur Pemadam		9,701,000	

No.	Urusan/Bidang Urusan	Realisasi 2025 (Rp)	Target 2026 (Rp)	Pagu Indikatif tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4	5
	Kebakaran	15,423,000		50,000,000
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	115,694,000	103,380,000	175,820,000
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	36,224,000	67,350,000	36,350,000
1.1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	36,224,000	67,350,000	36,350,000
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	60,000,000
2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-	60,000,000
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	79,470,000	36,030,000	79,470,000
3.1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	79,470,000	36,030,000	79,470,000
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	94,128,000	121,590,000	100,000,000
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	34,128,000	66,590,000	50,000,000
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	34,128,000	66,590,000	50,000,000
1.1.	Pemberian Layanan Rujukan	34,128,000	66,590,000	50,000,000
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	60,000,000	55,000,000	50,000,000
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	60,000,000	55,000,000	50,000,000
1.1.	Penyediaan Permakanan	60,000,000	55,000,000	50,000,000
TOTAL		11,342,660,270	2,090,097,926	2,865,820,000

Sumber : Aplikasi SIPD-RI Kabupaten Buru Selatan, 2026 diolah

5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027

Rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD I tahun 2027 yang merupakan rencana alternatif pendanaan pembangunan tahun 2027 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4. Rencana Program/ Kegiatan yang Bersumber APBN/APBD I Tahun 2027

No.	OPD	Program	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Koperasi Dan UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	APBN
		Program Pasar Tradisional	APBN
		Program Dana Dekonsentrasi	APBN
		Program Padat Karya	APBN
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD I
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBN
2.	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	APBN
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Keluarga	APBN
3.	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	APBN
4.	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	APBD I/APBN
		Program Pengembangan Pariwisata	APBD I/APBN
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	APBD I/APBN
5.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	APBN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	APBN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	APBN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	APBN
6.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	APBN
7.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	APBN
8.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	APBN
9.	Dinas Perikanan	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	APBN
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	APBD I
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagiusaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	APBN
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	APBD I
10.	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	APBD I

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan juga pencapaian keberhasilan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja tahunan juga menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2027 dapat tercapai

6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2027

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 - 2029 , maka telah di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Buru Selatan yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2027	Target Akhir RPJMD (Th. 2029)
1	2		3	4	5
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	5,68	6,48
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	63,70	72,40
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,36	71,14	72,94
4	Tingkat Kemiskinan	%	14,84	14,25	13,83
5	Rasio Gini	Indeks	0,23	0,20	0,19
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,41	83,69	84,03

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2027	Target Akhir RPJMD (Th. 2029)
1	2		3	4	5
7	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3,66	4,23	4,62
8	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	48,83	56,60	58,90
9	Indeks Infrastruktur	Angka	2,78	3,02	3,29
10	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	24,20	24,33	25,01
11	Persentase Desa Mandiri	%	2,50	3,80	6,33
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,29	1,09	0,95
13	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155,20	118,47	114,19
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	82,41	83,69	84,03
15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	N/A	25,66	19,18
16	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,54	72,93	74,75
17	Pertumbuhan Ekonomi	Miliar Rupiah	1.114,48	1.115,30	1.115,62

Sumber : - Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2026, BPS
 - Rancangan Awal RPJMD Kab. Buru Selatan Tahun 2025-2029
 - Hasil Analisis

**Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,41	83,69	84,03
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	48,83	56,60	58,90
3	Indeks Infrastruktur	Angka	2,78	3,02	3,29
4	Perkembangan Indeks Desa	Indeks	N/A	0,685	0,729
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	N/A	36,65	38,56
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	N/A	73,48	75,60
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	(%)	N/A	100,00	100,00

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	N/A	30,51	28,96
7	Kapasitas Air Baku	(%)	151,60	151,75	151,85
8	Indeks Inovasi dan Riset Maritim	Indeks	N/A	34,97	35,97
9	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	0,78	0,85	0,92
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	67,07	69,60	72,22
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155,20	118,47	114,19
12	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	N/A	188,60	190,50
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	66,25	88,67	90,45
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	70	80	90
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	82,41	83,69	84,03
16	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	N/A	225	215
17	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0,19	0,21	0,24
18	Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase	N/A	70	80
19	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	N/A	40	50
20	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	N/A	25	35
21	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	N/A	67	69
22	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	97	99
23	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium	Persentase	N/A	40	50

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
24	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	N/A	100	100
25	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	N/A	1	1
26	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	N/A	0,5	0,7
27	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	95,45	57,43	63,31
28	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	N/A	40	50
29	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	N/A	40	50
30	Penanganan Sampah	Ton	8.018,41	8.497,10	9.004,37
31	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	(%)	1.609	2.100	2.100
32	Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Ton	3,55	17,42	19,2
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	5,68	6,48
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,54	73,58	75,78
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,36	71,14	72,94
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	14,84	14,25	13,83
5	Rasio Gini	Indeks	0,23	0,20	0,19
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	N/A	60,88	61,88
7	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	24,20	24,33	25,01
8	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(%)	6,33	4,45	5,25
9	PDRB Ekonomi Kreatif	(%)	N/A	14,75	15,12
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	22,55	29,94	35,32
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	N/A	59,12	61,67

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	36,91	95,68	98,40
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	N/A	66,32	68,25
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	58,00	86,11	100
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	N/A	83,70	85,88
14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0	15,00	19,00
15	Angka Literasi/Numerasi	%	N/A	70	90
16	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	57,90	63,54	68,51
17	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	N/A	86,03	92,32
18	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N/A	20,00	30,00
19	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	0	3	2
20	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	N/A	16,25	20,15
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	61,20	73,40	74,30
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,29	1,09	0,95
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,59	0,55	0,53
24	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	N/A	52,50	54,50
25	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	9	5	4
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	89,02	87,19	88,21
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,33	87,41	87,51

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
28	Indeks Literasi Digital	Angka	N/A	4,19	4,48
29	Persentase Angka criminal	%	N/A	0,01	0,01
30	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	8,30	8,99	9,34
31	Rasio Kriminal	Rasio	N/A	1,33	1,06
32	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	(%)	89,02	66,42	72,72
33	Akses sanitasi layak	%	57,17	69,60	72,22
34	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	12,95	13,02
35	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio	N/A	1,26	1,32
36	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	58,96	59,26	59,46
37	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	N/A	15,34	15,54
38	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	N/A	N/A	N/A
39	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,01	2,38	2,45
40	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.074,20	13.658	14.348
41	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	105,84	100	100
42	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	39,07	28,00	21,00
43	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	123	123	125
44	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	N/A	23	24
45	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	N/A	18	20
46	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	N/A	87	89

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
47	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	50,00	100	100
48	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	N/A	70	90
49	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	15	56	60
50	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	95,00	92	94
51	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	90	90
52	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	90	95
53	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase	10,48	10	10
54	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	Desa	N/A	10	20
55	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut	Orang	51.467	50	60
56	Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Persentase	N/A	17,5	20
57	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	93,75	19	25
58	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	0	2	4
59	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	92	94
60	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	93,3	95,2
61	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Persentase	100	100	100
62	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan	Persentase	N/A	54	60

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
	Kebudayaan				
63	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	N/A	648	1.458
64	Jumlah Barang Melalui Dermaga	Ton	536.016	95	105
65	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,12	0,12	0,12
66	Persentase Kepemilikan KIR	Persentase	N/A	25	35
67	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	N/A	4.048	4.549
68	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	N/A	45	55
69	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	N/A	336	377
70	Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Ikan	Unit	0	7	10
71	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Unit	92	80	90
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	N/A	6,82	7,31
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (IUP)	%	0	3,00	3,8
3	Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi	%	N/A	0,1	0,1
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	3,66	4,23	4,62
5	Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program pembangunan	Angka	N/A	6	7
6	Tingkat Inflasi	(%)	N/A	2,50	2,15
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,07	3,29	3,51
9	Persentase Desa Mandiri	%	2,50	3,80	6,33
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	89,52	58,67	61,90

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,56	0,55	0,58
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45,67	47,83	50,84
13	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	N/A	0,01	0,02
14	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	N/A	0,300	0,390
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	N/A	0,26	0,27
16	Inklusi Keuangan	(%)	N/A	2,41	2,58
17	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	N/A	1,53	1,18
18	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	N/A	2,78	3,10
19	Koefisien Variasi Harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	N/A	0,35	0,55
20	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	%	N/A	0,423	0,444
21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	N/A	2,41	2,58
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	N/A	7,71	7,79
23	Total Kredit/PDRB	(%)	N/A	0,261	0,271
24	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	N/A	54,32	54,94
25	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	N/A	11,26	12,26
26	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	N/A	49,15	50,10
27	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	N/A	68,4	70,6
27	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	15	32,40	48,49
28	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	N/A	40	60
29	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	N/A	75	75
30	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	75,60	65,2	68
31	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	20	10	10
32	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	Investor	0	2	4

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
33	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN	%	0:00	0:00	0:00
34	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	N/A	65,2	68
35	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan	%	N/A	77	83
36	Persentase jumlah hasil pemantauan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri dikeluarkan Besaryang oleh instansi terkait	%	0	61	66
37	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha	Perusahaan/UKM/IKM	630	690	750
38	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	N/A	98.438.000	108.518.000
39	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	34,00	50	60
40	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	N/A	28,69	41,13
41	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	97	99
42	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	89	95
43	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	70,47	68,4	74,9
44	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	%	N/A	61	68
45	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi	Data	2	4	5
46	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	93,75	33	39
47	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah	70.479.571.105	39.593.576.103	45.684.896.501
48	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	36,55	39,60	45,70
49	Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA)	Indeks	N/A	63,7	66,1

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
IV ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	63,70	72,40
2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	N/A	80,10	81,10
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	N/A	2,66	3,44
4	Nilai SAKIP	Nilai	N/A	60-70	70-80
5	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,96	3,00	3,39
6	Indeks Merit	Indeks	N/A	0.61-0.80	0.80-100
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	66,04	41,50	44,50
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	N/A	82	84
9	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government)	Persentase	N/A	5,00	7,00
10	Indeks Integritas Nasional	Persentase	N/A	70,37	70,57
11	Jumlah aplikasi atau platform digital yang disediakan untuk partisipasi masyarakat dalam	Angka	1	1	1
12	Persentase Capaian Aksi HAM	%	38,92	78,65	79,00
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	N/A	81,15	89,46
13	Persentase Penegakan Perda	%	75,00	100	100
14	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	30-50	60-70	70-80
15	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	78	80
16	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	93	95
17	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	78	80
18	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,29	88,31

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
19	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	88	95
20	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	79	85
21	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	83	85
22	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	%	N/A	96	98
23	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	98	100
24	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	99,99	99,99
25	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	95	99
26	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	71,8	74,9
27	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	25	35	45
28	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	90	92
29	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,29	88,31
30	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,29	88,31
31	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	93	95
32	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	102	102
33	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	94	97

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
34	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	95	98
35	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	98	100
36	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	78	80
37	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	102	102
38	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	102	102
39	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	100	100
40	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	98,00	98	100
41	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	78	80
42	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,75	88,29	88,31
43	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	94	96
44	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	88	90
45	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,40	79,42
46	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,39	79,43
47	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,40	79,42
48	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	78	80
49	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	79,40	79,42

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
50	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	25	40
51	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	60	200	300
52	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	100	100	100
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	51,24	97,00	98,00
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI	%	96,06	97,60	97,42
3	Persentase Guru Bersertifikat	%	70,21	74,00	77,00
4	Persentase Sekolah dengan Sarana Prasarana yang Layak	%	78,02	62,50	63,50
5	Jumlah Siswa pada Jenjang PAUD	Angka	2.254	2.350	2.366
6	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI	%	1,50	1,60	1,70
7	Angka Partisipasi Sekolah SMP/ MTs	%	56,91	98,46	99,98
8	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SMP/ MTs	%	N/A	40	44
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	%	113,08	100	100
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	%	90,90	100	100
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	%	0	13,20	12,50
12	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	12	19	23
13	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SD/ MI	%	N/A	40	44
14	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs	%	114,25	114,66	114,75
15	Angka Partisipasi Sekolah SD/ MI	%	98,01	98,03	98,05
16	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,82	0,72	0,68

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	100	100	100
2	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	25	100	100
3	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	N/A	95	96
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100	53,86	69,26
5	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase	N/A	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persentase	100	60,0	80,0
7	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	22,00	10,4	8,4
8	Persentase Sarana IRT yang memenuhi ketentuan	Persentase	50,00	100	100
9	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup	Persentase	84,00	74,60	80,03
10	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	100	69,25	84,65
11	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Persentase	80,00	53,05	61,75
12	Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persentase	100	100	100
13	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	49,00	1,4	1,4
14	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar	Persentase	79,00	100	100
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	11,90	55,00	65,00

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
16	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	N/A	6	4
17	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi	Persentase	18,00	23,02	28,04
18	Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persentase	N/A	100	100
19	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase	46,15	69,25	84,65
20	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	Persentase	N/A	79,09	81,09
21	Penemuan Kasus TBC	%	34,47	60,0	75,0
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	20	25	25
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	6,60	91	98
3	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	1,30	1,34	1,36
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	1,30	1,34	1,35
5	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	16,53	70	90
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	N/A	62	66
7	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persentase	N/A	26	29
8	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	65,37	80	90
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	N/A	50	50
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	N/A	70	70
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	N/A	79,61	86,10

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	0,23	2,24	5,03
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	60	150	250
2	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	95	98
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	79	81
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Persentase Penurunan PPKS	%	0,28	3,3	3,5
2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	N/A	67,5	68,0
3	Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan Sosial	Persentase	58,73	61,10	63,00
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	74,00	76,00
5	Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial	Kepala Keluarga	N/A	78	80
AG	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	6	12	16
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	N/A	0.15:0.15	0.05:0.05
AH	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	35,81	37,08	35,89

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kkal/Kapita/Hari	1.429	2.4	2.4
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	50	2.1	2.1
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	78,00	64,43	67,99
AI	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	N/A	70	90
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	N/A	80	80
3	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persentase	N/A	70	70
AJ	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	50,48	63,9	65,2
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	31,04	14,7	14,2
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	59,76	63,9	67,4
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	N/A	71,3	73,1
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	N/A	24.4-24.5	24.2-24.3
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	7,50	12,6	16,3
7	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	10,57	5,6	4,5
8	Persentase KB Pasca Persalinan	Persentase	44,34	37,99	46,09
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	33,00	63,7	66,1
AK	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Rasio Kenektivitas Darat	Rasio	0,50	0,50	0,60
2	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0,87	0,50	0,60
AL	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2029
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	N/A	54,6	59,2
AM	5.01 – PERENCANAAN				
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	91	92	95
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	92	95
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	91	92	95
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	92	95
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	92	95
AN	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	N/A	82	84
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	N/A	50	53

Sumber :
 - Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2026, BPS
 - Rancangan Awal RPJMD Kab. Buru Selatan Tahun 2025-2029
 - Hasil Analisis

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan berbagai tahapan perencanaan dalam melengkapi dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 yang dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut dengan MUSRENBANG RKPD yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten, kemudian tingkat Provinsi dan Nasional.

Berkaitan dengan itu, dokumen RKPD juga berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaran urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelayanan publik maupun investasi pemerintah, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah kabupaten serta prioritas pembangunan daerah termasuk didalamnya rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2027 ini dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2027.

4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing Kepala OPD.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2027 setiap Kepala (OPD) wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2027.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala OPD, yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Dengan demikian dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Namrole, 29 Juli 2026

BUPATI BURUSELATAN,



LA HAMIDI

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Pendidikan						177.843.667.700,00								177.953.667.700,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						177.843.667.700,00								177.953.667.700,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						177.843.667.700,00								177.953.667.700,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						173.012.467.700,00								173.122.467.700,00	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah						173.012.467.700,00								173.122.467.700,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %		94 %	95 %	173.012.467.700,00							98 %	173.122.467.700,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						166.930.449.000,00						-		166.930.449.000,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi						166.930.449.000,00						-		166.930.449.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		46 Orang/bulan	49 Orang/bulan	166.930.449.000,00							52 Orang/bulan	166.930.449.000,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						166.930.449.000,00			-	-	PP5, Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			166.930.449.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		46 Orang/bulan	1 Tahun Orang/bulan	166.930.449.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					52 Orang/bulan	166.930.449.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						80.000.000,00						-		85.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah						80.000.000,00						-		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	80.000.000,00							-	85.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						80.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			85.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.079.418.700,00						-		1.109.418.700,00	
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah						1.079.418.700,00						-		1.109.418.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	120.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	800.000.000,00							-	800.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	159.418.700,00							-	159.418.700,00	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						159.418.700,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			159.418.700,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	159.418.700,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	159.418.700,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						120.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-		-	7 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						800.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	800.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00						-		200.000.000,00	
		Tersusunnya laporan barang milik daerah perangkat daerah secara berkala						150.000.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	150.000.000,00							3 Unit	200.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						150.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Elfule 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.724.600.000,00						-		4.749.600.000,00	
		Tersediannya Pelayanan Umum Kantor yang Baik						4.724.600.000,00						-		4.749.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.674.600.000,00							-	4.674.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00							5 Laporan	75.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						50.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Elfule 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.674.600.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			4.674.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Tahun Laporan	4.674.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.674.600.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
		tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dan dinas						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00							1 Unit	48.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Tahun Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	48.000.000,00	Dinas Pendidikan
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						4.831.200.000,00								4.831.200.000,00	
		Meningkatkanya kualitas pendidikan dan SDM masyarakat Buru Selatan						1.201.200.000,00								1.201.200.000,00	
			11.Angka Partisipasi Sekolah SD/ MI	98.06 %		98.02 %	98.03 %	1.201.200.000,00							98.04 %	1.201.200.000,00	
			11.Angka Partisipasi Sekolah SMP/ MTs	100 %		98.25 %	98.46 %	1.201.200.000,00							99.52 %	1.201.200.000,00	
			12.Sekolah Kondisi Bangunan Baik SD/ MI	46 %		38 %	40 %	1.201.200.000,00							42 %	1.201.200.000,00	
			12.Sekolah Kondisi Bangunan Baik SMP/ MTs	46 %		38 %	40 %	1.201.200.000,00							42 %	1.201.200.000,00	
			14.Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI	1.25 %		1.46 %	1.42 %	1.201.200.000,00							1.38 %	1.201.200.000,00	
			15.Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs	114.78 %		114.64 %	114.66 %	1.201.200.000,00							114.72 %	1.201.200.000,00	
			16.Jumlah Siswa pada Jenjang PAUD	2374 Angka		2330 Angka	2350 Angka	1.201.200.000,00							2363 Angka	1.201.200.000,00	
			1.Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	98.50 %		96.50 %	97.00 %	1.201.200.000,00							97.50 %	1.201.200.000,00	
			2.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI	97.33 %		97.68 %	97.60 %	1.201.200.000,00							97.51 %	1.201.200.000,00	
			3.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	100 %		100 %	100 %	1.201.200.000,00							100 %	1.201.200.000,00	
			4.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	100 %		97.12 %	100 %	1.201.200.000,00							100 %	1.201.200.000,00	
			5.Angka Literasi/Numerasi	74.22 %		67.24 %	68.92 %	1.201.200.000,00							70.64 %	1.201.200.000,00	
			6.Persentase Guru Bersertifikat	79.00 %		72.00 %	74.00 %	1.201.200.000,00							75.00 %	1.201.200.000,00	
			7.Persentase Sekolah dengan Sarana Prasarana yang Layak	64.00 %		62.00 %	62.50 %	1.201.200.000,00							63.00 %	1.201.200.000,00	
			8.Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.64 %		0.77 %	0.72 %	1.201.200.000,00							0.68 %	1.201.200.000,00	
			9.Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	17.62 %		13.48 %	14.41 %	1.201.200.000,00							15.41 %	1.201.200.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						2.321.200.000,00						-		2.321.200.000,00	
		Terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang efektif dan merata						2.321.200.000,00						-		2.321.200.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket		7 Paket	7 Paket	100.000.000,00							7 Paket	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	58 Konten Digital		50 Konten Digital	52 Konten Digital	150.000.000,00							54 Konten Digital	150.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket		5 Paket	5 Paket	150.000.000,00							5 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	107 Orang		107 Orang	107 Orang	100.000.000,00							107 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	200.000.000,00							30 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	107 Orang		107 Orang	107 Orang	250.000.000,00							107 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang		6 Ruang	4 Ruang	200.000.000,00							5 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00							4 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107 Orang		107 Orang	107 Orang	241.200.000,00							Orang	241.200.000,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						200.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		4 Unit	10 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						150.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket		5 Paket	3 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Paket	150.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						200.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang		30 Orang	25 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Orang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						241.200.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			241.200.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107 Orang		107 Orang	137 Orang	241.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Orang	241.200.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						100.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	107 Orang		107 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					107 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						150.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	58 Konten Digital		50 Konten Digital	0 Konten Digital	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					54 Konten Digital	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						250.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			250.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	107 Orang		107 Orang	0 Orang	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					107 Orang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						200.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang		6 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						100.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket		7 Paket	0 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.410.000.000,00						-		1.410.000.000,00	
		Terselenggaranya layanan pendidikan menengah pertama yang efektif dan merata						1.410.000.000,00						-		1.410.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	80.000.000,00							7 Kegiatan	80.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket		5 Paket	5 Paket	100.000.000,00							6 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130 Orang		47 Orang	107 Orang	80.000.000,00							112 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	107 Orang		107 Orang	107 Orang	150.000.000,00							107 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00							11 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	47 Orang		47 Orang	47 Orang	100.000.000,00							47 Orang	100.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						200.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit		10 Unit	0 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						100.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket		5 Paket	0 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						150.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	107 Orang		107 Orang	0 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					107 Orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						100.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	47 Orang		47 Orang	0 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					47 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						80.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130 Orang		47 Orang	10 Orang	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					112 Orang	80.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						80.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			80.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8 Kegiatan		6 Kegiatan	0 Kegiatan	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Kegiatan	80.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas dan merata						1.100.000.000,00						-		1.100.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	12 Paket		12 Paket	12 Paket	200.000.000,00							12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	108 Dokumen		100 Dokumen	102 Dokumen	100.000.000,00							104 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	205 Paket		200 Paket	200 Paket	200.000.000,00							205 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	112 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00							11 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	148 Orang		148 Orang	148 Orang	100.000.000,00							148 Orang	100.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						150.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	112 Unit		10 Unit	0 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						200.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	205 Paket		200 Paket	0 Paket	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					205 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						100.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	148 Orang		148 Orang	0 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					148 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	108 Dokumen		100 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					104 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						200.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	12 Paket		12 Paket	0 Paket	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang efektif dan merata						2.321.200.000,00						-		2.321.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	150.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	200.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	180.000.000,00							-	180.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						180.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			180.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	0 Peserta Didik	180.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	180.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						150.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	0 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						100.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						100.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	0 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						200.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	0 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Terselenggaranya layanan pendidikan menengah pertama yang efektif dan merata						1.410.000.000,00						-		1.410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	200.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	200.000.000,00							-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	200.000.000,00							-	200.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						200.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Ruang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						200.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Ruang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						200.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	0 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						1.100.000.000,00						-		1.100.000.000,00	
		Terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas dan merata						1.100.000.000,00						-		1.100.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	150.000.000,00							-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	200.000.000,00							-	200.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						200.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	0 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						150.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	0 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						79.322.705.000,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						78.852.705.000,00								0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						78.852.705.000,00								0,00	
3.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						76.712.705.000,00								0,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						75.122.705.000,00								0,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96 %		95 %	95 %	75.122.705.000,00							95 %	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						80.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.937.705.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan OPD						74.937.705.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00							2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00							2 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	74.647.705.000,00							12 Orang/bulan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						74.647.705.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	1093 Orang/bulan	74.647.705.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang/bulan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						40.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						40.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah						190.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	10.000.000,00							25 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		2 Orang	3 Orang	10.000.000,00							3 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	0,00	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	15 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	25 Orang		25 Orang	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		2 Orang	3 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						290.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						290.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							Paket	0,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						940.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						940.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	320 Unit		250 Unit	280 Unit	40.000.000,00							300 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	7 Unit		5 Unit	5 Unit	200.000.000,00							6 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	11 Unit		9 Unit	9 Unit	30.000.000,00							10 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit		9 Unit	11 Unit	30.000.000,00							12 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit		21 Unit	23 Unit	30.000.000,00							25 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit		10 Unit	12 Unit	30.000.000,00							14 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit		20 Unit	22 Unit	30.000.000,00							24 Unit	0,00	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	4 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						200.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						200.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	7 Unit		5 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						40.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	320 Unit		250 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					300 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit		21 Unit	15 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit		9 Unit	15 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						30.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	11 Unit		9 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	15 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit		10 Unit	14 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit		20 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00						-		0,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit		2 Unit	3 Unit	10.000.000,00							3 Unit	0,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		7 Unit	7 Unit	10.000.000,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		3 Unit	3 Unit	10.000.000,00							3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	10.000.000,00							3 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		26 Unit	26 Unit	10.000.000,00							28 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00							5 Unit	0,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	14 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		3 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit		2 Unit	14 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		26 Unit	14 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		5 Unit	14 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		7 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		5 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						45.000.000,00						-		0,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						45.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45.000.000,00							2 Unit Kerja	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						45.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit Kerja	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			-	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						190.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah						190.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						40.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						40.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						40.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						40.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						20.000.000,00						-		0,00	
		-						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.000.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						525.000.000,00								0,00	
			10.Penemuan Kasus TBC	80.0 %		55.0 %	60.0 %	525.000.000,00							65.0 %	0,00	
			10.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %		1.4 %	1.4 %	525.000.000,00							1.4 %	0,00	
			11.Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	7.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	525.000.000,00							9.4 Persentase	0,00	
			11.Persentase lanjut usia yang mandiri	70.00 %		50.00 %	55.00 %	525.000.000,00							60.00 %	0,00	
			11.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	3 %		7 %	6 %	525.000.000,00							5 %	0,00	
			17.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	525.000.000,00							100 Persentase	0,00	
			18.Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92.35 Persentase		61.55 Persentase	69.25 Persentase	525.000.000,00							76.95 Persentase	0,00	
			19.Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	66.10 Persentase		48.70 Persentase	53.05 Persentase	525.000.000,00							57.40 Persentase	0,00	
			20.Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	82.09 Persentase		78.09 Persentase	79.09 Persentase	525.000.000,00							80.09 Persentase	0,00	
			21.Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna	92.35 Persentase		61.55 Persentase	69.25 Persentase	525.000.000,00							76.95 Persentase	0,00	
			22.Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	76.96 Persentase		46.16 Persentase	53.86 Persentase	525.000.000,00							61.56 Persentase	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.540.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP						1.540.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	375 Unit		305 Unit	325 Unit	75.000.000,00							340 Unit	0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80 Unit		45 Unit	55 Unit	75.000.000,00							65 Unit	0,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	50.000.000,00							8 Paket	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	13 Unit		13 Unit	13 Unit	100.000.000,00							13 Unit	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	5627 Keluarga		4412 Keluarga	4815 Keluarga	30.000.000,00							5076 Keluarga	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	13 Paket		7 Paket	9 Paket	100.000.000,00							11 Paket	0,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	15 Layanan		15 Layanan	15 Layanan	50.000.000,00							15 Layanan	0,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	13 Unit		13 Unit	13 Unit	75.000.000,00							13 Unit	0,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		3 Unit	3 Unit	100.000.000,00							4 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit		2 Unit	3 Unit	100.000.000,00							3 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit		2 Unit	2 Unit	175.000.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00							2 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1770 Unit		1600 Unit	1650 Unit	100.000.000,00							1700 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	75.000.000,00							13 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit		13 Unit	13 Unit	85.000.000,00							13 Unit	0,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						175.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit		2 Unit	1 Unit	175.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas						100.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						100.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						100.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						100.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		3 Unit	13 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						100.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	13 Unit		13 Unit	39 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						100.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1770 Unit		1600 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1700 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						85.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit		13 Unit	13 Unit	85.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						75.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	13 Unit		13 Unit	39 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						75.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit		1 Unit	43 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						75.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80 Unit		45 Unit	13 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					65 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						75.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	13 Unit		13 Unit	13 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						75.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	375 Unit		305 Unit	13 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					340 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						75.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	13 Paket		7 Paket	13 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						30.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	5627 Keluarga		4412 Keluarga	13 Keluarga	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5076 Keluarga	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						50.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	15 Layanan		15 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Layanan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						50.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	8 Paket		8 Paket	13 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						410.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						410.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2800 Orang		2420 Orang	2500 Orang	10.000.000,00							2600 Orang	0,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7380 Orang		7355 Orang	7363 Orang	10.000.000,00							7370 Orang	0,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1057 Orang		1033 Orang	1038 Orang	10.000.000,00							1043 Orang	0,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00							13 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00							13 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	16 Unit		16 Unit	16 Unit	10.000.000,00							16 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit		2 Unit	3 Unit	10.000.000,00							4 Unit	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1660 Orang		1640 Orang	1648 Orang	10.000.000,00							1650 Orang	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1910 Orang		1850 Orang	1860 Orang	10.000.000,00							1890 Orang	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang		16 Orang	19 Orang	10.000.000,00							21 Orang	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	170 Orang		150 Orang	155 Orang	10.000.000,00							160 Orang	0,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	36 Orang		20 Orang	24 Orang	10.000.000,00							28 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang		40 Orang	43 Orang	10.000.000,00							46 Orang	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	682 Orang		590 Orang	623 Orang	10.000.000,00							643 Orang	0,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4440 Orang		4386 Orang	4399 Orang	10.000.000,00							4413 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3450 Orang		3110 Orang	3223 Orang	10.000.000,00							3320 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50250 Orang		50120 Orang	50150 Orang	10.000.000,00							50200 Orang	0,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		Orang	Orang	10.000.000,00							Orang	0,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan		2 Tatanan	2 Tatanan	10.000.000,00							2 Tatanan	0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1910 Orang		1850 Orang	1100 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1890 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1660 Orang		1640 Orang	1100 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1650 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1057 Orang		1033 Orang	800 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1043 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7380 Orang		7355 Orang	5265 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7370 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2800 Orang		2420 Orang	8300 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2600 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50250 Orang		50120 Orang	10000 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					50200 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3450 Orang		3110 Orang	8000 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3320 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4440 Orang		4386 Orang	40 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4413 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	682 Orang		590 Orang	400 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					643 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang		40 Orang	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					46 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	170 Orang		150 Orang	300 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					160 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang		16 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit		2 Unit	13 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen		13 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	16 Unit		16 Unit	15 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	36 Orang		20 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan		2 Tatanan	15 Tatanan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Tatanan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13 Dokumen		13 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						10.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah						40.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit		16 Unit	16 Unit	10.000.000,00							16 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	17 Unit		16 Unit	16 Unit	10.000.000,00							16 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	17 Unit		16 Unit	16 Unit	10.000.000,00							16 Unit	0,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	17 Unit		16 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	17 Unit		16 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit		16 Unit	15 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						410.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						60.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						30.000.000,00								0,00	
			2.Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00							100 %	0,00	
			3.Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi	30.55 Persentase		20.51 Persentase	23.02 Persentase	30.000.000,00							25.53 Persentase	0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	0,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		0,00	
		Terpenuhinya mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	180 Orang		160 Orang	168 Orang	20.000.000,00							173 Orang	0,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	180 Orang		160 Orang	50 Orang	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					173 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		0,00	
		terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						50.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan						10.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00							100 Persentase	0,00	
			2.Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00							100 Persentase	0,00	
			3.Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00							100 Persentase	0,00	
			4.Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00							100 Persentase	0,00	
			5.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	90.0 Persentase		50.0 Persentase	60.0 Persentase	10.000.000,00							70.0 Persentase	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						10.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17 Dokumen		9 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00							13 Dokumen	0,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						10.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						10.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						10.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						10.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	41 Unit		37 Unit	38 Unit	10.000.000,00							39 Unit	0,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	41 Unit		37 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					39 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						30.000.000,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat						10.000.000,00								0,00	
			1.Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup	82.28 Persentase		70.50 Persentase	74.60 Persentase	10.000.000,00							77.78 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	80 Unit		40 Unit	50 Unit	10.000.000,00							60 Unit	0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	80 Unit		40 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksannya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						460.000.000,00								0,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						460.000.000,00								0,00	
8.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						110.000.000,00								0,00	
		<i>Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk</i>						10.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	17.9 Persentase		10.3 Persentase	12.6 Persentase	10.000.000,00							14.6 Persentase	0,00	
			2.Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	4.3 Persentase		6.7 Persentase	5.6 Persentase	10.000.000,00							4.9 Persentase	0,00	
			3.Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	68.3 Indeks		60.8 Indeks	63.9 Indeks	10.000.000,00							66.0 Indeks	0,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						30.000.000,00						-		0,00	
		terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						30.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00							1 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan		1 Kegiatan	4 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Kegiatan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						30.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	80 Kampung KB	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	6 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatkan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0035	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatkan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	1 Laporan / Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						220.000.000,00								0,00	
		<i>Terkendalinya Angka Kelahiran dan Terpenuhinya Kebutuhan ber-KB</i>						<i>10.000.000,00</i>								<i>0,00</i>	
			2.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	10.000.000,00							Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	0,00	
			4.Persentase KB Pasca Persalinan	48.79 Persentase		35.29 Persentase	37.99 Persentase	10.000.000,00							40.69 Persentase	0,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						70.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						70.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi		6 Organisasi	7 Organisasi	10.000.000,00							8 Organisasi	0,00	
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	35 Unit		15 Unit	20 Unit	10.000.000,00							25 Unit	0,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	35 Unit		15 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi		6 Organisasi	1 Organisasi	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Organisasi	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						40.000.000,00						-		0,00	
		PKB/PLKB aktif melaksanakan tugas pembinaan dan penyuluhan program Keluarga Berencana di wilayah binaannya.						40.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	405 Orang		324 Orang	324 Orang	10.000.000,00							324 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	6 Organisasi		6 Organisasi	6 Organisasi	10.000.000,00							6 Organisasi	0,00	
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	61 Unit		37 Unit	43 Unit	10.000.000,00							49 Unit	0,00	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	61 Unit		37 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					49 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	405 Orang		324 Orang	12 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					324 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	6 Organisasi		6 Organisasi	2 Organisasi	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Organisasi	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten						110.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100 Orang		60 Orang	70 Orang	10.000.000,00							80 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	550 Orang		470 Orang	490 Orang	10.000.000,00							510 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	3000 Orang		2265 Orang	2300 Orang	10.000.000,00							2340 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Orang		4 Orang	5 Orang	10.000.000,00							6 Orang	0,00	
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	18 Orang		8 Orang	10 Orang	10.000.000,00							13 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	28 Unit		19 Unit	21 Unit	10.000.000,00							23 Unit	0,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	550 Orang		470 Orang	4 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					510 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	28 Unit		19 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					23 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	3000 Orang		2265 Orang	6 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2340 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	18 Orang		8 Orang	6 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100 Orang		60 Orang	6 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					80 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Orang		4 Orang	6 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						110.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten						110.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	2.14.03.2.03.0028	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya dukungan operasional pelayanan KB Bergerak (Tim pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	6 Layanan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						10.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						130.000.000,00								0,00	
		<i>Terciptanya Keluarga Yang Mandiri dan Berkualitas</i>						<i>10.000.000,00</i>								<i>0,00</i>	
			1.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	67.2 Indeks		62.5 Indeks	63.7 Indeks	10.000.000,00							64.9 Indeks	0,00	
			2.Indeks Lansia Berdaya	74.0 Indeks		70.2 Indeks	71.3 Indeks	10.000.000,00							72.2 Indeks	0,00	
			3.Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA)	67.2 Indeks		62.5 Indeks	63.7 Indeks	10.000.000,00							64.9 Indeks	0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						130.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						130.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	447 Orang		427 Orang	432 Orang	10.000.000,00							437 Orang	0,00	
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	262 Orang		242 Orang	248 Orang	10.000.000,00							252 Orang	0,00	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	135 Kelompok		125 Kelompok	120 Kelompok	10.000.000,00							125 Kelompok	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	800 Keluarga		400 Keluarga	500 Keluarga	10.000.000,00							600 Keluarga	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00							6 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	9800 Orang		8800 Orang	9000 Orang	10.000.000,00							9200 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	135 Unit		115 Unit	120 Unit	10.000.000,00							125 Unit	0,00	
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	800 Keluarga		400 Keluarga	3 Keluarga	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					600 Keluarga	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	135 Unit		115 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					125 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	262 Orang		242 Orang	6 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					252 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	9800 Orang		8800 Orang	6 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					9200 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	447 Orang		427 Orang	6 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					437 Orang	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	135 Kelompok		125 Kelompok	3 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					125 Kelompok	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						130.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	1 Laporan / Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0034	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	2 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X							10.000.000,00								0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.000.000,00								0,00	
11.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.000.000,00								0,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	95 %	10.000.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00						-		0,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	Unit	10.000.000,00							1 Unit	0,00	
	X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						10.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		RSUD dr. Salim Alkatiri						5.962.737.000,00								6.245.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.962.737.000,00								6.245.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.962.737.000,00								6.245.000.000,00	
12.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						5.962.737.000,00								6.245.000.000,00	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						3.792.737.000,00								4.485.000.000,00	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)		150.33 (per 100.000 kelahiran hidup)	107.78 (per 100.000 kelahiran hidup)	3.792.737.000,00							65.23 (per 100.000 kelahiran hidup)	4.485.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						4.240.000.000,00						-		4.450.000.000,00	
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan						4.240.000.000,00						-		4.450.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	120 Unit		100 Unit	105 Unit	220.000.000,00							110 Unit	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		10 Unit	15 Unit	500.000.000,00							20 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00							1 Unit	510.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.500.000.000,00							5 Paket	1.550.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000.000,00							2 Unit	510.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00							1 Unit	510.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	220.000.000,00							1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00							10 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	45 Unit		25 Unit	30 Unit	100.000.000,00							35 Unit	110.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						500.000.000,00			-	-	-			510.000.000,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Unit	510.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						500.000.000,00			-	-	-			510.000.000,00	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Unit	510.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						500.000.000,00			-	-	-			510.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit		2 Unit	3 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					2 Unit	510.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						200.000.000,00			-	-	-			210.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					10 Unit	210.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	45 Unit		25 Unit	25 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					35 Unit	110.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000.000,00			-	-	-			550.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		10 Unit	50 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					20 Unit	550.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						220.000.000,00			-	-	-			250.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	120 Unit		100 Unit	25 Unit	220.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					110 Unit	250.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						220.000.000,00			-	-	-			250.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Unit	250.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.500.000.000,00			-	-	-			1.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					5 Paket	1.550.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.222.737.000,00						-		1.230.000.000,00	
		Terlaksananya seluruh kegiatan UKM dan UKP sesuai standar, serta Berfungsinya mekanisme rujukan secara efektif dari tingkat primer ke tingkat lanjutan						1.222.737.000,00						-		1.230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	922.737.000,00							1 Dokumen	910.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	210.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Dokumen	110.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						922.737.000,00			-	-	-			910.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	922.737.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Dokumen	910.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	-			210.000.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Unit	210.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						70.000.000,00						-		80.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Kesehatan yang Akurat dan Tepat Waktu						70.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00							1 Dokumen	80.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						70.000.000,00			-	-	-			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Dokumen	80.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						430.000.000,00						-		485.000.000,00	
		Tersedianya dokumen legalitas resmi yang memungkinkan fasilitas tersebut beroperasi dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat						430.000.000,00						-		485.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00							1 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00							1 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00							1 Unit	170.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						150.000.000,00			-	-	-			170.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Unit	170.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	-			170.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Unit	170.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Unit	55.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						80.000.000,00			-	-	-			90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					1 Dokumen	90.000.000,00	RSUD dr. Salim Alkatiri
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah						8.363.610.000,00								9.199.971.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.363.610.000,00								9.199.971.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						8.363.610.000,00								9.199.971.000,00	
13.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.514.915.000,00								2.766.406.500,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						2.514.915.000,00								2.766.406.500,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %		96 %	97 %	2.514.915.000,00							98 %	2.766.406.500,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.250.000,00						-		25.575.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.250.000,00						-		25.575.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	23.250.000,00							8 Dokumen	25.575.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						23.250.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			25.575.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	23.250.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Dokumen	25.575.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		5.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		5.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan		53 Orang/bulan	56 Orang/bulan	0,00							59 Orang/bulan	0,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan		53 Orang/bulan	14 BULAN Orang/bulan	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					59 Orang/bulan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						183.100.000,00						-		201.410.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						183.100.000,00						-		201.410.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	58.100.000,00							1 Paket	63.910.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		15 Orang	10 Orang	125.000.000,00							8 Orang	137.500.000,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						58.100.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			63.910.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	58.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	63.910.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						125.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			137.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		15 Orang	5 Orang	125.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Orang	137.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.272.365.000,00						-		1.399.601.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.272.365.000,00						-		1.399.601.500,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00							1 Dokumen	82.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	627.000.000,00							10 Laporan	689.700.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	126.000.000,00							1 Paket	138.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	444.365.000,00							1 Paket	488.801.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						444.365.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			488.801.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	444.365.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	488.801.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						126.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			138.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	126.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	138.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						75.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			82.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	82.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						627.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			689.700.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	627.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Laporan	689.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						785.200.000,00						-		863.720.000,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						785.200.000,00						-		863.720.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00							1 Laporan	85.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	682.200.000,00							1 Laporan	750.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00							1 Laporan	16.500.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			16.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	16.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						78.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			85.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	85.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			11.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	11.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						682.200.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			750.420.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	682.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	750.420.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.000.000,00						-		270.600.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.000.000,00						-		270.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00							2 Unit	165.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	96.000.000,00							2 Unit	105.600.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						96.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			105.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	96.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	105.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						150.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			165.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			5.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
14.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						850.000.000,00								935.000.000,00	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						850.000.000,00								935.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	25 %		25 %	25 %	850.000.000,00							25 %	935.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						850.000.000,00						-		935.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						850.000.000,00						-		935.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00							1 Dokumen	275.000.000,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	600.000.000,00							0.5 KM	660.000.000,00	
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	1 KM		1 KM	1 KM	0,00							1 KM	0,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM		1 KM	1 KM	0,00							1 KM	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.4 KM		0.4 KM	0.4 KM	0,00							0.5 KM	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.3 KM		0.1 KM	0.2 KM	0,00							0.3 KM	0,00	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM		1 KM	1 KM	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						600.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			660.000.000,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.5 KM		0.5 KM	0,5 KM	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					0.5 KM	660.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	1 KM		1 KM	1 KM	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.4 KM		0.4 KM	0,5 KM	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					0.5 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						250.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			275.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.3 KM		0.1 KM	0,1 KM	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					0.3 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
15.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						450.000.000,00								495.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum						450.000.000,00								495.000.000,00	
			1.Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	95 %		75 %	80 %	450.000.000,00							85 %	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						450.000.000,00						-		495.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						450.000.000,00						-		495.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		420 SR	500 SR	0,00							500 SR	0,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	6 Unit		6 Unit	6 Unit	250.000.000,00							6 Unit	275.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	5 Unit		1 Unit	2 Unit	200.000.000,00							3 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	9 Unit		5 Unit	6 Unit	0,00							7 Unit	0,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	40 Liter/Detik		40 Liter/Detik	40 Liter/Detik	0,00							40 Liter/Detik	0,00	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						250.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			275.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	6 Unit		6 Unit	3 Unit	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	40 Liter/Detik		40 Liter/Detik	2 Liter/Detik	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Liter/Detik	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	9 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			220.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	5 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		420 SR	250 SR	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					500 SR	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
16.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						100.000.000,00								110.000.000,00	
		Meningkatnya pegelolaan dan pengembangan sistem air limbah						100.000.000,00								110.000.000,00	
			1.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68 %		60 %	62 %	100.000.000,00							64 %	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	110.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						100.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			110.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.03.05.2.01.0046	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	0 Unit Rumah	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
17.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.350.000.000,00								1.485.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase						1.350.000.000,00								1.485.000.000,00	
			1.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	100 Persentase		87 Persentase	91 Persentase	1.350.000.000,00							95 Persentase	1.485.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.350.000.000,00						-		1.485.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.350.000.000,00						-		1.485.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan		3 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00							1 Sistem Drainase Perkotaan	550.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00							1 Sistem Drainase Perkotaan	440.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M		500 M	500 M	0,00							500 M	0,00	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	250 Meter		100 Meter	150 Meter	250.000.000,00							250 Meter	275.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M		500 M	500 M	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					500 M	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						250.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			275.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	250 Meter		100 Meter	100 Meter	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					250 Meter	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						400.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			440.000.000,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Sistem Drainase Perkotaan	440.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						500.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan		3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Sistem Drainase Perkotaan	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						200.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			220.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
18.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						200.000.000,00								220.000.000,00	
		Meningkatnya pengembangan permukiman						200.000.000,00								220.000.000,00	
			1.Rasio kepatuhan IMB kab/kota	1.37 %		1.29 %	1.34 %	200.000.000,00							1.24 %	220.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00						-		220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00						-		220.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	650 SR		450 SR	500 SR	200.000.000,00							550 SR	220.000.000,00	
	1.03.07.2.01.0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			220.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	650 SR		450 SR	100 SR	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					550 SR	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00						-		220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.03.07.2.01.0042	1.03.07.2.01.0026 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	-		-	0 M³/Hari	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
19.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						600.000.000,00								660.000.000,00	
		Tersedianya penataan bangunan gedung						600.000.000,00								660.000.000,00	
			1.Rasio kepatuhan IMB kab/kota	1.37 %		1.29 %	1.34 %	600.000.000,00							1.24 %	660.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						600.000.000,00						-		660.000.000,00	
		Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						600.000.000,00						-		660.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00							1 Dokumen	165.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	5 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	450.000.000,00							4 Dokumen	495.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						150.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						450.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			495.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	495.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
		Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						600.000.000,00						-		660.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	5 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
20.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						500.000.000,00								550.000.000,00	
		<i>Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya</i>						500.000.000,00								550.000.000,00	
			1.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.37 Persentase		1.29 Persentase	1.34 Persentase	500.000.000,00							1.24 Persentase	550.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00						-		550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	6 Kawasan		6 Kawasan	6 Kawasan	500.000.000,00							6 Kawasan	550.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			550.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	6 Kawasan		6 Kawasan	6 Kawasan	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Kawasan	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
21.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						1.300.000.000,00								1.430.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan jalan						900.000.000,00								990.000.000,00	
			1.Persentase kondisi mantap jalan	100 %		60 %	70 %	900.000.000,00							80 %	990.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00						-		1.430.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00						-		1.430.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00							2 Dokumen	440.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	5 KM		1 KM	2 KM	0,00							3 KM	0,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	384.29 KM		384.29 KM	384.29 KM	400.000.000,00							384.29 KM	440.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	5 KM		1 KM	2 KM	0,00							3 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM		20.47 KM	25 KM	500.000.000,00							30 KM	550.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	10 Meter		10 Meter	10 Meter	0,00							10 Meter	0,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						400.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	440.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						400.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			440.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	384.29 KM		384.29 KM	384,29 KM	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					384.29 KM	440.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						500.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			550.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM		20.47 KM	20,468 KM	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 KM	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	5 KM		1 KM	2 KM	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	5 KM		1 KM	1 KM	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	10 Meter		10 Meter	10 Meter	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
22.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						498.695.000,00								548.564.500,00	
		<i>Terselenggaranya penyelenggaraan penataan ruang</i>						498.695.000,00								548.564.500,00	
			1.Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	30 Persentase		24 Persentase	26 Persentase	498.695.000,00							27 Persentase	548.564.500,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						250.000.000,00						-		275.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						250.000.000,00						-		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00							2 Dokumen	275.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota						250.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			275.000.000,00	
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00							1 Dokumen	165.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			165.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Sistem Informasi		4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	0,00							4 Sistem Informasi	0,00	
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Sistem Informasi		4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Sistem Informasi	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						98.695.000,00						-		108.564.500,00	
		T erlaksanmanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						98.695.000,00						-		108.564.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00							4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	98.695.000,00							1 Dokumen	108.564.500,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						98.695.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			108.564.500,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	98.695.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	108.564.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
	X							0,00								0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00								0,00	
23.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0,00								0,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	97 %	0,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan	-					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan						3.160.907.000,00								3.469.907.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.460.907.000,00								2.569.907.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2.460.907.000,00								2.569.907.000,00	
24.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.795.907.000,00								1.809.907.000,00	
		Meningkatnya Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.783.407.000,00								1.788.907.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	99 %		92 %	94 %	1.783.407.000,00							95 %	1.788.907.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.000.000,00						-		20.000.000,00	
		Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						17.000.000,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00							1 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	6.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.000.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	7.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.000.000,00			-	-	-			7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.113.307.000,00						-		1.114.307.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	1.098.307.000,00							31 Orang/bulan	1.098.307.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.098.307.000,00			-	-	-			1.098.307.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		31 Orang/bulan	27 Orang/bulan	1.098.307.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					31 Orang/bulan	1.098.307.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						123.000.000,00						-		129.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan penunjang urusan administrasi umum perangkat daerah						123.000.000,00						-		129.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00							1 Laporan	115.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.500.000,00							1 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.500.000,00							1 Paket	7.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.500.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						110.000.000,00			-	-	-			115.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	115.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						484.600.000,00						-		487.600.000,00	
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah						484.600.000,00						-		487.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00							12 Laporan	13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	435.600.000,00							12 Laporan	435.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00							12 Laporan	31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00							12 Laporan	8.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00			-	-	-			8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	8.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00			-	-	-			13.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	13.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-	-			31.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	31.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						435.600.000,00			-	-	-			435.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	435.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	435.600.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00						-		59.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00						-		59.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	48.000.000,00							4 Unit	49.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	-			49.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	49.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.113.307.000,00						-		1.114.307.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.113.307.000,00						-		1.114.307.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	15.000.000,00							-	16.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00			-	-	-			16.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00						-		59.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
25.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						230.000.000,00								300.000.000,00	
		Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan						190.000.000,00								250.000.000,00	
			1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	50 %		0 %	50 %	190.000.000,00							50 %	250.000.000,00	
			1.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	70 %		0 %	70 %	190.000.000,00							70 %	250.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		100.000.000,00	
		Pendataan Rumah Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		200.000.000,00	
		Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten Kota						150.000.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah		5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	150.000.000,00							5 Unit Rumah	200.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						150.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah		5 Unit Rumah	3 Unit Rumah	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit Rumah	200.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
26.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						110.000.000,00								120.000.000,00	
		Persentase Pemukiman Tertata						110.000.000,00								120.000.000,00	
			1.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	66.48 (%)		54.69 (%)	57.43 (%)	110.000.000,00							60.3 (%)	120.000.000,00	
			1.Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		25.30 %	25.49 %	110.000.000,00							25.67 %	120.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						110.000.000,00						-		120.000.000,00	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh						110.000.000,00						-		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00							1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00							1 Dokumen	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						75.000.000,00			-	-	-			80.000.000,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						35.000.000,00			-	-	-			40.000.000,00	
		Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
27.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						225.000.000,00								230.000.000,00	
		Meningkatkan kualitas hunian dan fungsi infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman						225.000.000,00								230.000.000,00	
			1.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	6.54 Persentase		1.32 Persentase	2.24 Persentase	225.000.000,00							3.35 Persentase	230.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00						-		230.000.000,00	
		Peningkatan kualitas/ Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni						225.000.000,00						-		230.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	35 Unit Rumah		10 Unit Rumah	35 Unit Rumah	225.000.000,00							35 Unit Rumah	230.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						225.000.000,00			-	-	-			230.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	35 Unit Rumah		10 Unit Rumah	8 Unit Rumah	225.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Unit Rumah	230.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
28.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						100.000.000,00								110.000.000,00	
		Meningkatnya Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						100.000.000,00								110.000.000,00	
			1.Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	91.26 %		78.05 %	79.61 %	100.000.000,00							82 %	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
		Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang sehat						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	5 Lokasi		5 Lokasi	5 Lokasi	100.000.000,00							5 Lokasi	110.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	5 Lokasi		5 Lokasi	2 Lokasi	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Lokasi	110.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						700.000.000,00								900.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						700.000.000,00								900.000.000,00	
29.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						600.000.000,00								750.000.000,00	
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan						600.000.000,00								750.000.000,00	
			1.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	80 Persentase		80 Persentase	80 Persentase	600.000.000,00							80 Persentase	750.000.000,00	
			2.Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100 Indeks		60 Indeks	70 Indeks	600.000.000,00							80 Indeks	750.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00						-		750.000.000,00	
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00						-		750.000.000,00	
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	500.000.000,00							1 Dokumen	600.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00			-	-	-			600.000.000,00	
		Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00						-		750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	-		-	-	100.000.000,00							-	150.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
30.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						100.000.000,00								150.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong						100.000.000,00								150.000.000,00	
			1.Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	70 Persentase		70 Persentase	70 Persentase	100.000.000,00							70 Persentase	150.000.000,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						100.000.000,00						-		150.000.000,00	
		Pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.						100.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						100.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		1 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						3.179.016.000,00								3.179.016.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.085.098.000,00								3.085.098.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.085.098.000,00								3.085.098.000,00	
31.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.705.098.000,00								2.705.098.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						2.700.098.000,00								2.700.098.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	93 %		89 %	90 %	2.700.098.000,00							91 %	2.700.098.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00							4 Dokumen	10.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.079.416.000,00						-		1.079.416.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.079.416.000,00						-		1.079.416.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		16 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.074.416.000,00							25 Orang/bulan	1.074.416.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.074.416.000,00			-	-	-			1.074.416.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		16 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.074.416.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Orang/bulan	1.074.416.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						217.182.000,00						-		217.182.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						217.182.000,00						-		217.182.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00							1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	32.182.000,00							1 Paket	32.182.000,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.182.000,00			-	-	-			32.182.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	32.182.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	32.182.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.314.500.000,00						-		1.314.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.314.500.000,00						-		1.314.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00							1 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan		93 Laporan	90 Laporan	1.287.000.000,00							90 Laporan	1.287.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00							Laporan	3.500.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00			-	-	-			3.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Laporan	3.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00			-	-	-			24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	24.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	24.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.287.000.000,00			-	-	-			1.287.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan		93 Laporan	0 Laporan	1.287.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					90 Laporan	1.287.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.000.000,00						-		84.000.000,00	
		Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.000.000,00						-		84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	84.000.000,00							-	84.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						84.000.000,00			-	-	-			84.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	84.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
32.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						300.000.000,00								300.000.000,00	
		meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						300.000.000,00								300.000.000,00	
			1.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	82 %		77 %	79 %	300.000.000,00							80 %	300.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00						-		300.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00						-		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	300.000.000,00							1 laporan	300.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						300.000.000,00			-	-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan		1 laporan	0 laporan	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 laporan	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
33.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						80.000.000,00								80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						80.000.000,00								80.000.000,00	
			1.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	50 %		0 %	25 %	80.000.000,00							30 %	80.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		80.000.000,00	
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						80.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	26 Orang		20 Orang	23 Orang	50.000.000,00							26 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit		4 Unit	5 Unit	30.000.000,00							6 Unit	30.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	26 Orang		20 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					26 Orang	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						30.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit		4 Unit	0 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X							93.918.000,00								93.918.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						93.918.000,00								93.918.000,00	
34.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						93.918.000,00								93.918.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	90 %	93.918.000,00							-	93.918.000,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						93.918.000,00						-		93.918.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						93.918.000,00						-		93.918.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	93.918.000,00							1 Paket	93.918.000,00	
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						93.918.000,00			-	-	-			93.918.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	93.918.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	93.918.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						2.941.853.000,00								2.941.853.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.941.853.000,00								2.941.853.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.941.853.000,00								2.941.853.000,00	
35.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.676.635.000,00								2.676.635.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						2.676.635.000,00								2.676.635.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %		95 %	96 %	2.676.635.000,00							98 %	2.676.635.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.350.000,00						-		16.350.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.350.000,00						-		16.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.447.000,00							2 Dokumen	3.447.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.296.000,00							1 Dokumen	2.296.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.607.000,00							1 Laporan	10.607.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.447.000,00			-	-	-			3.447.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	3.447.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	3.447.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.296.000,00			-	-	-			2.296.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.296.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.296.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.607.000,00			-	-	-			10.607.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.607.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	10.607.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.637.959.000,00						-		1.637.959.000,00	
		Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah						1.637.959.000,00						-		1.637.959.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	1.637.959.000,00							1 Orang/bulan	1.637.959.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.637.959.000,00			-	-	-			1.637.959.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.637.959.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang/bulan	1.637.959.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						44.643.000,00						-		44.643.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						44.643.000,00						-		44.643.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		5 Orang	6 Orang	44.643.000,00							10 Orang	44.643.000,00	
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						44.643.000,00			-	-	-			44.643.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		5 Orang	3 Orang	44.643.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Orang	44.643.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						143.702.000,00						-		143.702.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						143.702.000,00						-		143.702.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00							5 Dokumen	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	89.899.000,00							1 Laporan	89.899.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.328.000,00							1 Paket	11.328.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	8.841.000,00							1 Paket	8.841.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.280.000,00							1 Paket	4.280.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.354.000,00							1 Paket	27.354.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.280.000,00			-	-	-			4.280.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.280.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	4.280.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.354.000,00			-	-	-			27.354.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.354.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	27.354.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.328.000,00			-	-	-			11.328.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.328.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	11.328.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.841.000,00			-	-	-			8.841.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	8.841.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	8.841.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00			-	-	-			2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	2.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.899.000,00			-	-	-			89.899.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	89.899.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	89.899.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.000.000,00						-		70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daeah Penujang Urusan Pemerintahan						70.000.000,00						-		70.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00							1 Unit	70.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						70.000.000,00			-	-	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						648.550.000,00						-		648.550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						648.550.000,00						-		648.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.800.000,00							1 Laporan	2.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	634.200.000,00							1 Laporan	634.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.550.000,00							1 Laporan	11.550.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.550.000,00			-	-	-			11.550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	11.550.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	11.550.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.800.000,00			-	-	-			2.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	2.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						634.200.000,00			-	-	-			634.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	634.200.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	634.200.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.431.000,00						-		115.431.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.431.000,00						-		115.431.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	6.856.000,00							3 Unit	6.856.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		Unit	1 Unit	108.575.000,00							1 Unit	108.575.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						108.575.000,00			-	-	-			108.575.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		Unit	2 Unit	108.575.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	108.575.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						6.856.000,00			-	-	-			6.856.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	1 Unit	6.856.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	6.856.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						265.218.000,00								265.218.000,00	
		Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Terencana dan Terpadu serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana						265.218.000,00								265.218.000,00	
			1.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	350 Orang		150 Orang	200 Orang	265.218.000,00							250 Orang	265.218.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						85.651.000,00						-		85.651.000,00	
		peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana						85.651.000,00						-		85.651.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.301.000,00							1 Dokumen	49.301.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	800 Orang		400 Orang	500 Orang	36.350.000,00							600 Orang	36.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						36.350.000,00			-	-	-			36.350.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	800 Orang		400 Orang	150 Orang	36.350.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					600 Orang	36.350.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						49.301.000,00			-	-	-			49.301.000,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.301.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	49.301.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						60.000.000,00						-		60.000.000,00	
		Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat tentang Risiko Bencana						60.000.000,00						-		60.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00							1 Dokumen	60.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						79.470.000,00						-		79.470.000,00	
		Tingkat Fasilitasi Penanganan Pasca Bencana						79.470.000,00						-		79.470.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	79.470.000,00							1 Dokumen	79.470.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						79.470.000,00			-	-	-			79.470.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	79.470.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	79.470.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						40.097.000,00						-		40.097.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan kerja sama yang efektif antarpihak terkait						40.097.000,00						-		40.097.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	40.097.000,00							5 Kegiatan	40.097.000,00	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						40.097.000,00			-	-	-			40.097.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	1 Kegiatan	40.097.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Kegiatan	40.097.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial						3.100.686.000,00								3.021.450.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						413.000.000,00								363.000.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						413.000.000,00								363.000.000,00	
37.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						40.000.000,00								40.000.000,00	
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial						30.000.000,00								30.000.000,00	
			1.Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial	85 Kepala Keluarga		76 Kepala Keluarga	78 Kepala Keluarga	30.000.000,00							79 Kepala Keluarga	30.000.000,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
		Tersedianya Komunitas Adat Terpencil						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7.0 Keluarga		5.0 Keluarga	5.5 Keluarga	30.000.000,00							6.0 Keluarga	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT						30.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			30.000.000,00	
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7.0 Keluarga		5.0 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6.0 Keluarga	30.000.000,00	Dinas Sosial
			-	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Sosial
38.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						50.000.000,00								50.000.000,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
39.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						198.000.000,00								198.000.000,00	
		Meningkatkan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial						198.000.000,00								198.000.000,00	
			1.Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan Sosial	64.00 Persentase		60.00 Persentase	61.10 Persentase	198.000.000,00							62.20 Persentase	198.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						198.000.000,00						-		198.000.000,00	
		Terlaksanannya Pengelolahan Data						198.000.000,00						-		198.000.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	8.5 Orang		7.0 Orang	7.5 Orang	178.000.000,00							7.9 Orang	178.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.0 Orang		7.0 Orang	7.5 Orang	20.000.000,00							7.6 Orang	20.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						178.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			178.000.000,00	
		Terlaksanannya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	8.5 Orang		7.0 Orang	81 Orang	178.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7.9 Orang	178.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						20.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			20.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.0 Orang		7.0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-					7.6 Orang	20.000.000,00	Dinas Sosial
40.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						125.000.000,00								75.000.000,00	
		Meningkatnya Korban Bencana Alam						75.000.000,00								75.000.000,00	
			1.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	80.00 %		73.00 %	74.00 %	75.000.000,00							75.00 %	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	80 %		76 %	77 %	75.000.000,00							78 %	75.000.000,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-		75.000.000,00	
		Terlaksananya Siaga Bencana Alam						75.000.000,00						-		75.000.000,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	-	75.000.000,00							-	75.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						75.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			75.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-		-	50 Orang	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	75.000.000,00	Dinas Sosial
	X							2.687.686.000,00								2.658.450.600,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.687.686.000,00								2.658.450.600,00	
41.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.687.686.000,00								2.658.450.600,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	88 %	2.687.686.000,00							-	2.658.450.600,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.8 Laporan		6 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00							8 Laporan	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.8 Laporan		6 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	10.000.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.862.886.000,00						-		1.855.886.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan						1.862.886.000,00						-		1.855.886.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		6 Laporan	6.5 Laporan	7.000.000,00							7 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.6 Orang/bulan		7 Orang/bulan	7.5 Orang/bulan	1.855.886.000,00							8 Orang/bulan	1.855.886.000,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.855.886.000,00			-	-	-			1.855.886.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.6 Orang/bulan		7 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.855.886.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Orang/bulan	1.855.886.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		6 Laporan	0 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Laporan	0,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						189.000.000,00						-		189.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						189.000.000,00						-		189.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00							5 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan		23 Laporan	24 Laporan	158.000.000,00							25 Laporan	158.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00							-	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	13.000.000,00							-	13.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.000.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.000.000,00			-	-	-			13.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	13.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	13.000.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	6.000.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						158.000.000,00			-	-	-			158.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan		23 Laporan	0 Laporan	158.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Laporan	158.000.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						577.800.000,00						-		555.564.600,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						577.800.000,00						-		555.564.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00							12 Laporan	900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	550.800.000,00							75 Laporan	550.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.706.000,00							-	1.570.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.294.000,00							12 Laporan	2.294.000,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.294.000,00			-	-	-			2.294.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	2.294.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	2.294.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00			-	-	-			900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	900.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.706.000,00			-	-	-			1.570.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	15.706.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.570.600,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						550.800.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			550.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan		75 Laporan	0 Laporan	550.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					75 Laporan	550.800.000,00	Dinas Sosial
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	48.000.000,00							-	48.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	48.000.000,00	Dinas Sosial
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						3.609.935.000,00								0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.559.935.000,00								0,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.511.935.000,00								0,00	
42.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.351.935.000,00								0,00	
			1.Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	-		-	100 Persentase	2.316.935.000,00							-	0,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.790.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.790.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	1.775.000.000,00							40 Orang/bulan	0,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.775.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	41 Orang/bulan	1.775.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Orang/bulan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						47.935.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						47.935.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	47.935.000,00							5 Orang	0,00	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						47.935.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	47.935.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Orang	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						125.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						125.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00							4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	100.000.000,00							75 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		75 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					75 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4 Unit	Unit	50.000.000,00							Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4 Unit	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Unit	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						268.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah						268.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	248.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						248.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	248.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	66.000.000,00							5 Unit	0,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	1 Unit	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
43.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						75.000.000,00								0,00	
		Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan						75.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	20 %		10 %	12 %	75.000.000,00							14 %	0,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Layanan rujukan						75.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						75.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
44.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						35.000.000,00								0,00	
			-	-		-	-	35.000.000,00							-	0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00						-		0,00	
		-						35.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanaan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	-	35.000.000,00							-	0,00	
	2.08.05.2.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas						35.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanaan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
45.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						50.000.000,00								0,00	
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1.048.000.000,00								0,00	
46.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						863.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa						813.000.000,00								0,00	
			1.Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	5 Desa		1 Desa	2 Desa	813.000.000,00							3 Desa	0,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						863.000.000,00						-		0,00	
		peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi desa						863.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang		50 Orang	100 Orang	35.000.000,00							100 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00							1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	548.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						35.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang		50 Orang	100 Orang	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Orang	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						548.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	81 Laporan	548.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						100.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi desa						863.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-		-	-	80.000.000,00							-	0,00	
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa						80.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-		-	81 Laporan	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
47.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						185.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat						135.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100 Persentase		60 Persentase	70 Persentase	135.000.000,00							80 Persentase	0,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						185.000.000,00						-		0,00	
		peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui berbagai program, seperti pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan desa dan adat, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan ketahanan pangan						185.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		21 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	75.000.000,00							1 Lembaga	0,00	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						75.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	6 Lembaga	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Lembaga	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		21 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	X							50.000.000,00								0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						50.000.000,00								0,00	
48.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						50.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	-		-	100 Persentase	50.000.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		5 Unit	Unit	50.000.000,00							Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		5 Unit	20 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Unit	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Dinas Ketahanan Pangan						2.957.785.000,00								209.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.945.338.500,00								209.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2.945.338.500,00								209.000.000,00	
49.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.467.610.000,00								209.000.000,00	
		Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan						2.467.610.000,00								209.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	97 %		93 %	94 %	2.467.610.000,00							95 %	209.000.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.100.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.100.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.876.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.224.000,00							2 Dokumen	0,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.876.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	4.876.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.224.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	8 Dokumen	1.224.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.892.385.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.892.385.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/bulan		2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	1.892.385.000,00							2 Orang/bulan	0,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.892.385.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/bulan		2 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.892.385.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Orang/bulan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						198.726.000,00						-		209.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						198.726.000,00						-		209.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00							3 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	154.833.000,00							6 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	14.256.000,00							6 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	26.637.000,00							6 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.637.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	26.637.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.256.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	14.256.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	9.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						154.833.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	154.833.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						322.399.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output						322.399.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.999.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	302.400.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00							5 Laporan	0,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.999.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.999.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						302.400.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	302.400.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas kantor						48.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00							1 Unit	0,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
50.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						47.711.000,00								0,00	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan						47.711.000,00								0,00	
			1.Ketersediaan Pangan Utama	2400 Kkal/Ka pita/Hari		2400 Kkal/Ka pita/Hari	2400 Kkal/Ka pita/Hari	47.711.000,00							2400 Kkal/Ka pita/Hari	0,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						47.711.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan						47.711.000,00						-		0,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	47.711.000,00							10 Unit	0,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						47.711.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	10 Unit		10 Unit	4 Unit	47.711.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
51.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						319.989.500,00								0,00	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						269.989.500,00								0,00	
			1.Skor Pola Pangan Harapan	68.23 Nilai		62.65 Nilai	64.43 Nilai	269.989.500,00							66.21 Nilai	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)						207.289.500,00						-		0,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	19.289.500,00							15 Dokumen	0,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00							1 Laporan	0,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						207.289.500,00						-		0,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	19.289.500,00							15 Dokumen	0,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						30.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Waelikut 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Wali 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						19.289.500,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			0,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	15 Dokumen		15 Dokumen	6 Dokumen	19.289.500,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton		10 Ton	10 Ton	50.000.000,00							10 Ton	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton		10 Ton	5 Ton	50.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Elara 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Wamkana 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Pohon Batu 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Ton	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						62.700.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						62.700.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	62.700.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						62.700.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	62.700.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						207.289.500,00						-		0,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)						207.289.500,00						-		0,00	
			Informasi Stok Pangan	-		-	-	5.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	-	3.000.000,00							-	0,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						207.289.500,00						-		0,00	
			Informasi Stok Pangan	-		-	-	5.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	-	3.000.000,00							-	0,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Waefusi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	1 laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Leksula Desa Leksula 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan						5.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Leksula Desa Leksula 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						3.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Leksula Desa Leksula 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
52.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						95.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						95.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	36.98 %		37.68 %	37.08 %	95.000.000,00							36.48 %	0,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						50.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						50.000.000,00						-		0,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	0,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						50.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						45.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						45.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						15.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			0,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
53.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						15.028.000,00								0,00	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						15.028.000,00								0,00	
			1.Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	2100 %		2100 %	2100 %	15.028.000,00							2100 %	0,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						15.028.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						15.028.000,00						-		0,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.028.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						15.028.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			0,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	15.028.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Wali 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	X							12.446.500,00								0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.446.500,00								0,00	
54.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.446.500,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	94 %	12.446.500,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.446.500,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.446.500,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	7.098.500,00							5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.348.000,00							4 Laporan	0,00	
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.098.500,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	7.098.500,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.348.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	5.348.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Dinas Lingkungan Hidup						4.038.768.000,00								2.382.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.979.000.000,00								2.382.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.979.000.000,00								2.382.000.000,00	
55.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.806.000.000,00								1.992.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		terwujudnya dukungan administratif dan operasional yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah						1.646.000.000,00								1.502.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %		96 %	97 %	1.646.000.000,00							98 %	1.502.000.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
		dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	1.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.000.000.000,00						-		1.000.000.000,00	
		laporan atau hasil kegiatan dari pengelolaan keuangan, seperti laporan pertanggungjawaban pelaksanaan						1.000.000.000,00						-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan		276 Orang/bulan	276 Orang/bulan	1.000.000.000,00							276 Orang/bulan	1.000.000.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.000.000.000,00			-	-	-			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan		276 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					276 Orang/bulan	1.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
		dapat berupa dokumen atau aplikasi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	10.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						10.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						350.000.000,00						-		490.000.000,00	
		berbagai hasil nyata dari kegiatan operasional dan dukungan administrasi						350.000.000,00						-		490.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00							1 Laporan	330.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			330.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	330.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45.000.000,00						-		50.000.000,00	
		tersedianya barang yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintah daerah						45.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		22 Unit	21 Unit	45.000.000,00							20 Unit	50.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		22 Unit	2 Unit	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Unit	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360.000.000,00						-		397.000.000,00	
		terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360.000.000,00						-		397.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00							1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00							1 Laporan	330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	55.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						300.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			330.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	330.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00						-		44.000.000,00	
		persentase jumlah barang yang dipelihara, yang bertujuan untuk memastikan kelaikan dan fungsionalitas aset daerah agar dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan						40.000.000,00						-		44.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	40.000.000,00							3 Unit	44.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			44.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	44.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
56.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						446.000.000,00								150.000.000,00	
		terlaksananya dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengendalikan pembangunan agar tidak merusak lingkungan						446.000.000,00								150.000.000,00	
			1.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	446.000.000,00							100 Persentase	150.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						296.000.000,00						-		0,00	
		dokumen yang memuat rencana strategis pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang, menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)						296.000.000,00						-		0,00	
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	96.000.000,00							0 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00							0 Dokumen	0,00	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						96.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH						200.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-					0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		150.000.000,00	
		dokumen laporan KLHS yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah						150.000.000,00						-		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00							0 Dokumen	150.000.000,00	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						150.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
57.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						75.000.000,00								75.000.000,00	
		tercapainya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan indikator seperti penurunan tingkat polusi udara, perbaikan kualitas air, dan pelestarian keanekaragaman hayati						75.000.000,00								75.000.000,00	
			1.Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium	55 Persentase		35 Persentase	40 Persentase	75.000.000,00							45 Persentase	75.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-		75.000.000,00	
		penyusunan kebijakan, pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah), penentuan baku mutu lingkungan, serta program seperti 3R (Reduce, Reuse, Recycle), penghijauan, dan pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya melalui instrumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL						75.000.000,00						-		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00							1 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00							1 Dokumen	30.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						30.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						45.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			45.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
58.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						20.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragam Hayati						20.000.000,00								0,00	
			1.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	50 (%)		30 (%)	35 (%)	20.000.000,00							40 (%)	0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		0,00	
		pelestarian spesies melalui konservasi in situ (misalnya, taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan) dan ex situ (seperti kebun raya), pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), serta pengembangan ekowisata						20.000.000,00						-		0,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha		1 Ha	2 Ha	20.000.000,00							2 Ha	0,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						20.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha		1 Ha	1 Ha	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Ha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
59.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						100.000.000,00								50.000.000,00	
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan						50.000.000,00								50.000.000,00	
			1.Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	85 Persentase		65 Persentase	70 Persentase	50.000.000,00							75 Persentase	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		50.000.000,00	
		penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban dalam izin, deteksi dini dan mitigasi pencemaran, serta penyampaian rekomendasi/sanksi administratif sesuai hasil pengawasan. Selain itu, outputnya juga berupa fasilitasi pemenuhan kewajiban dan diseminasi peraturan perundang-undangan						100.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	690 Usaha/Kegiatan		650 Usaha/Kegiatan	660 Usaha/Kegiatan	50.000.000,00							670 Usaha/Kegiatan	0,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			50.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	790 Badan Usaha		700 Badan Usaha	250 Badan Usaha	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					760 Badan Usaha	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	690 Usaha/Kegiatan		650 Usaha/Kegiatan	60 Usaha/Ke giatan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					670 Usaha/Kegiatan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
60.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						50.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengatahuan Tradisional dan Hak MHA Yang terkait PPLH						50.000.000,00								0,00	
			1.Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	55 Persentase		35 Persentase	40 Persentase	50.000.000,00							45 Persentase	0,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						50.000.000,00						-		0,00	
		Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi MHA,Data Kearifan Lokal/Pengetahuan Tradisional,, Hasil Verifikasi dan Validasi,						50.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00							0 Dokumen	0,00	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
61.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						50.000.000,00								5.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup						50.000.000,00								5.000.000,00	
			1.Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	70 Persentase		65 Persentase	67 Persentase	50.000.000,00							68 Persentase	5.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		5.000.000,00	
		Persentase atau Jumlah Kegiatan Terlaksana,Peningkatan Kapasitas SDM,umlah Masyarakat/Lembaga Terlibat:						50.000.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
62.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						50.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup						50.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	55 Persentase		35 Persentase	40 Persentase	50.000.000,00							45 Persentase	0,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		Laporan Hasil Pemeriksaan/Verifikasi yang memuat analisis, kesimpulan, dan Rekomendasi Tindak Lanjut						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3 Pengaduan		3 Pengaduan	3 Pengaduan	50.000.000,00							3 Pengaduan	0,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3 Pengaduan		3 Pengaduan	35 Pengaduan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Pengaduan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
63.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.382.000.000,00								110.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelolaan Persampahan						1.382.000.000,00								110.000.000,00	
			1.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	0.8 poin		0.4 poin	0.5 poin	1.382.000.000,00							0.6 poin	110.000.000,00	
			2.Penanganan Sampah	9269.25 Ton		8254.29 Ton	8497.10 Ton	1.382.000.000,00							8747.06 Ton	110.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						1.382.000.000,00						-		110.000.000,00	
		hasil akhir dari proses penanganan sampah, yang bisa berupa produk yang dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali, seperti bahan bakar alternatif (RDF), kompos, atau produk daur ulang lainnya, serta proses pemusnahan akhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) jika sampah tidak dapat dikelola						1.382.000.000,00						-		110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00							1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	282.000.000,00							3 Kelompok	0,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						282.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok		3 Kelompok	1 Kelompok	282.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Kelompok	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						1.100.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			110.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	1.100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						59.768.000,00								0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						59.768.000,00								0,00	
64.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						59.768.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kelestarian Sumber daya Alam Hayati						59.768.000,00								0,00	
			1.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Poin		0 Poin	1 Poin	59.768.000,00							1 Poin	0,00	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						59.768.000,00						-		0,00	
		proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan						59.768.000,00						-		0,00	
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	1 Ha		0 Ha	1 Ha	50.000.000,00							1 Ha	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	1 Ha		0 Ha	1 Ha	9.768.000,00							1 Ha	0,00	
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota						9.768.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	1 Ha		0 Ha	1 Ha	9.768.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Ha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	1 Ha		0 Ha	1 Ha	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Ha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						2.167.700.000,00								2.548.856.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.167.700.000,00								2.548.856.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.167.700.000,00								2.548.856.000,00	
65.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.022.950.000,00								2.121.856.000,00	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah						2.022.950.000,00								2.101.856.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	99.77 %		93.93 %	94.87 %	2.022.950.000,00							95.82 %	2.101.856.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.400.000,00						-		1.470.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD						1.400.000,00						-		1.470.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00							2 Dokumen	1.470.000,00	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.400.000,00			-	-	-			1.470.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	1.470.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.526.900.000,00						-		1.529.900.000,00	
		Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD						1.526.900.000,00						-		1.529.900.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00							1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		28 Orang/bulan	29 Orang/bulan	1.519.900.000,00							29 Orang/bulan	1.519.900.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.519.900.000,00			-	-	-			1.519.900.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		28 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.519.900.000,00	Kab. Buru Selatan	-					29 Orang/bulan	1.519.900.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						181.580.000,00						-		206.436.000,00	
		Terlaksananya tata kelola administrasi perkantoran secara tertib, efisien dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah						181.580.000,00						-		206.436.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	114.250.000,00							1 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.830.000,00							1 Paket	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.469.000,00							1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.065.000,00							1 Paket	2.436.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.966.000,00							1 Paket	52.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.065.000,00			-	-	-			2.436.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	2.065.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	2.436.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.966.000,00			-	-	-			52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.966.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	52.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.830.000,00			-	-	-			17.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.830.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	17.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.469.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.469.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	10.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						114.250.000,00			-	-	-			125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	114.250.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	125.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.070.000,00						-		75.000.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara tertib, efisien, dan akuntabel						25.070.000,00						-		75.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.070.000,00							1 Unit	75.000.000,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.070.000,00			-	-	-			75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	25.070.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	75.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						222.000.000,00						-		231.050.000,00	
		Terlaksananya tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien melalui dukungan jasa penunjang yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan operasional						222.000.000,00						-		231.050.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.100.000,00							1 Laporan	23.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	199.800.000,00							1 Laporan	199.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00							1 Laporan	7.500.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.100.000,00			-	-	-			7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	2.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.500.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.100.000,00			-	-	-			23.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	20.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	23.750.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						199.800.000,00			-	-	-			199.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	9 Laporan	199.800.000,00	Kab. Buru Selatan	-					1 Laporan	199.800.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.000.000,00						-		78.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasaran operasional pemerintah daerah						66.000.000,00						-		78.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.000.000,00							2 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00							1 Unit	48.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	16.000.000,00							2 Unit	20.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.000.000,00			-	-	-			48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	48.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.000.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	20.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	10.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
66.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						133.400.000,00								277.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						133.400.000,00								277.000.000,00	
			1.Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	88.52 Persentase		85.70 Persentase	86.6 Persentase	133.400.000,00							87.03 Persentase	277.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						133.400.000,00						-		277.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien						133.400.000,00						-		277.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	22.550.000,00							6 Dokumen	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00							6 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	101.850.000,00							3 Dokumen	137.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						22.550.000,00			-	-	-			105.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	22.550.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	105.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						9.000.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk						101.850.000,00			-	-	-			137.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	3 Dokumen		3 Dokumen	6 Dokumen	101.850.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	137.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
67.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						10.000.000,00								145.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						10.000.000,00								145.000.000,00	
			1.Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dan Pelaporan atas Peristiwa Penting tepat waktu	92.74 Persentase		91 Persentase	91.06 Persentase	10.000.000,00							91.21 Persentase	145.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						10.000.000,00						-		145.000.000,00	
		Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil secara baik dan partisipatif						10.000.000,00						-		145.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00							6 Dokumen	145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						10.000.000,00			-	-	-			145.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	145.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
68.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						1.350.000,00								5.000.000,00	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						1.350.000,00								5.000.000,00	
			1.Persentase data sinkron dan OPD Pengguna data Kependudukan	83.69 Persentase		44.1 Persentase	50.72 Persentase	1.350.000,00							60.86 Persentase	5.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						1.350.000,00						-		5.000.000,00	
		Tersedianya data kependudukan yang lengkap, akurat dan mutakhir						1.350.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						1.350.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	1.350.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Perhubungan						2.602.005.000,00								200.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.602.005.000,00								200.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						2.602.005.000,00								200.000.000,00	
69.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.155.805.000,00								0,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						2.144.705.000,00								0,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95 %		91 %	92 %	2.144.705.000,00							93 %	0,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.700.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.700.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.600.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						11.100.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						18.600.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	18.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.457.905.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.457.905.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.100.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.446.805.000,00							21 Orang/bulan	0,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.446.805.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.446.805.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Orang/bulan	0,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						11.100.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						169.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						169.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	126.849.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.030.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.065.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.496.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.560.000,00							1 Paket	0,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.496.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.496.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.560.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.560.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.030.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.030.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.065.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.065.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						126.849.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	126.849.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.000.000,00							1 Unit	0,00	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						424.200.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						424.200.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	54.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	367.200.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						367.200.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	367.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
70.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						235.600.000,00								0,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan						235.600.000,00								0,00	
			1.Persentase Layanan Angkutan Darat	10 Persentase		10 Persentase	10 Persentase	235.600.000,00							10 Persentase	0,00	
			2.rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.12 Rasio		0.12 Rasio	0.12 Rasio	235.600.000,00							0.12 Rasio	0,00	
			3.Persentase Kepemilikan KIR	40 Persentase		20 Persentase	25 Persentase	235.600.000,00							30 Persentase	0,00	
			4.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	60 Persentase		40 Persentase	45 Persentase	235.600.000,00							50 Persentase	0,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						178.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						178.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	178.000.000,00							40 Unit	0,00	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						178.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit		40 Unit	20 Unit	178.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Unit	0,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						57.600.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						57.600.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	57.600.000,00							2 Laporan	0,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						57.600.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	57.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
71.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						210.600.000,00								200.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran						210.600.000,00								200.000.000,00	
			1.Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut	65000 Orang		45000 Orang	50000 Orang	210.600.000,00							55000 Orang	200.000.000,00	
			2.Jumlah Barang Melalui Dermaga	110000 Ton		90000 Ton	95000 Ton	210.600.000,00							100000 Ton	200.000.000,00	
	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.600.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.600.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.600.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota						30.600.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	30.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						180.000.000,00						-		200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						180.000.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	180.000.000,00							1 Unit	200.000.000,00	
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal						180.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			200.000.000,00	
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	2 Unit	180.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						2.257.940.000,00								2.289.580.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.257.940.000,00								2.289.580.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.217.140.000,00								2.246.740.000,00	
72.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.047.140.000,00								2.068.240.000,00	
			-	-		-	-	1.982.140.000,00							-	2.015.740.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00						-		21.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00						-		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	5.250.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.250.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Waenono 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	10.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.368.340.000,00						-		1.368.590.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.368.340.000,00						-		1.368.590.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00							-	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.363.340.000,00							18 Orang/bulan	1.363.340.000,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.363.340.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.363.340.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.363.340.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Orang/bulan	1.363.340.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	5 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Waenono 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						210.000.000,00						-		226.250.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						210.000.000,00						-		226.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00							1 Laporan	147.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00							1 Paket	15.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00							1 Paket	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00							1 Paket	21.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Waenono 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	21.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			15.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			42.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	42.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						140.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			147.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	147.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00						-		26.250.000,00	
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						25.000.000,00						-		26.250.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00							10 Unit	10.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	15.000.000,00							3 Unit	15.750.000,00	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	10.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			15.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						375.800.000,00						-		378.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						375.800.000,00						-		378.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00							1 Laporan	33.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	328.800.000,00							39 Laporan	328.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00							1 Laporan	15.750.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			15.750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Waenono 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			33.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Waenono 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	33.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						328.800.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			328.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan		39 Laporan	1 Laporan	328.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					39 Laporan	328.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1 Unit	Unit	48.000.000,00							Unit	48.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Unit	48.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
73.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						95.000.000,00								99.750.000,00	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah						70.000.000,00								73.500.000,00	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	4.50 Indeks		3.50 Indeks	3.65 Indeks	70.000.000,00							4.00 Indeks	73.500.000,00	
			2.Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	4.60 Indeks		3.60 Indeks	3.80 Indeks	70.000.000,00							4.00 Indeks	73.500.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						95.000.000,00						-		99.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						95.000.000,00						-		99.750.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00							2 Laporan	26.250.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						25.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			26.250.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	26.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						95.000.000,00						-		99.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	25.000.000,00							-	26.250.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	45.000.000,00							-	47.250.000,00	
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						25.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			26.250.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	2 Komunitas	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	26.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						45.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			47.250.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	3 Konten	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	47.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
74.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						75.000.000,00								78.750.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola SPBE						35.000.000,00								36.750.000,00	
			1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.95 Indeks		3.70 Indeks	3.75 Indeks	35.000.000,00							3.80 Indeks	36.750.000,00	
			2.Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	60 %		48 %	50 %	35.000.000,00							53 %	36.750.000,00	
			3.Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government)	65 Persentase		23 Persentase	35 Persentase	35.000.000,00							40 Persentase	36.750.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-		78.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-		78.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	20.000.000,00							-	21.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	20.000.000,00							-	21.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	20.000.000,00							-	21.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	15.000.000,00							-	15.750.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						20.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			21.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						20.000.000,00			-	-	-			21.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	36 Layanan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						15.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			15.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	36 Titik	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						40.800.000,00								42.840.000,00	
75.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						40.800.000,00								42.840.000,00	
		Meningkatkan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah						40.800.000,00								42.840.000,00	
			1.Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3.30 Indeks		1.80 Indeks	2.20 Indeks	40.800.000,00							2.60 Indeks	42.840.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						40.800.000,00						-		42.840.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan persandiaan untuk pengamanan informasi Kabupaten/Kota						40.800.000,00						-		42.840.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	5.800.000,00							-	6.090.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	20.000.000,00							-	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	-	15.000.000,00							-	15.750.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						15.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			15.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						5.800.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.090.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	5.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.090.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			21.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						4.161.000.000,00								4.308.700.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.865.000.000,00								1.973.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						975.000.000,00								1.010.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
76.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						80.000.000,00								90.000.000,00	
		Terwujudnya implementasi program ketenagakerjaan yang berbasis data dan terarah						80.000.000,00								90.000.000,00	
			1.Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	131 Orang		127 Orang	128 Orang	80.000.000,00							129 Orang	90.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						80.000.000,00						-		90.000.000,00	
		Terlaksananya Program Data Base ketenagakerjaan Daerah						80.000.000,00						-		90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	31 Dokumen		27 Dokumen	28 Dokumen	80.000.000,00							29 Dokumen	90.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						80.000.000,00			-	-	-			90.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	31 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					29 Dokumen	90.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
77.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						85.000.000,00								90.000.000,00	
			-	-		-	-	85.000.000,00							-	90.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						85.000.000,00						-		90.000.000,00	
		-						85.000.000,00						-		90.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	85.000.000,00							-	90.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						85.000.000,00			-	-	-			90.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	50 Orang	85.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	90.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
78.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						110.000.000,00								120.000.000,00	
		Meningkatnya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan dan terserap ke dunia kerja (formal maupun informal)						110.000.000,00								120.000.000,00	
			1.Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	23 %		19 %	20 %	110.000.000,00							21 %	120.000.000,00	
			1.Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	22 %		18 %	19 %	110.000.000,00							20 %	120.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						110.000.000,00						-		120.000.000,00	
		Ketersediaan dan peningkatan layanan bursa kerja						110.000.000,00						-		120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	51 Orang		47 Orang	48 Orang	60.000.000,00							49 Orang	65.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	24 Orang		20 Orang	21 Orang	50.000.000,00							22 Orang	55.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	24 Orang		20 Orang	150 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Orang	55.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						60.000.000,00			-	-	-			65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	51 Orang		47 Orang	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					49 Orang	65.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
79.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						700.000.000,00								710.000.000,00	
			-	-		-	-	700.000.000,00							-	710.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						700.000.000,00						-		710.000.000,00	
		-						700.000.000,00						-		710.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	700.000.000,00							-	710.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						700.000.000,00			-	-	-			710.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	1 Laporan	700.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	710.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						890.000.000,00								963.000.000,00	
80.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						120.000.000,00								133.000.000,00	
		Meningkatnnya Tata Kelola Pemerintahan						70.000.000,00								78.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	81 %		77 %	79 %	70.000.000,00							80 %	78.000.000,00	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.000.000,00						-		38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah Dokumen Surat Masuk dan Surat Keluar yang diproses, didistribusikan, dan diarsipkan						35.000.000,00						-		38.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00							1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00							1 Paket	22.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	22.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00			-	-	-			16.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	16.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.000.000,00						-		40.000.000,00	
		Jumlah Dokumen/Surat yang didistribusikan (surat keluar/masuk) sesuai target						35.000.000,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00							1 Laporan	40.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						35.000.000,00			-	-	-			40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	40.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						-		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
81.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						250.000.000,00								270.000.000,00	
		<i>Terwujudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel</i>						250.000.000,00								270.000.000,00	
			1.Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	82 %		74 %	76 %	250.000.000,00							78 %	270.000.000,00	
			1.Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	82 Persentase		74 Persentase	76 Persentase	250.000.000,00							78 Persentase	270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						250.000.000,00						-		270.000.000,00	
		Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)						250.000.000,00						-		270.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	76 Unit Usaha		72 Unit Usaha	74 Unit Usaha	100.000.000,00							74 Unit Usaha	110.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Unit Usaha		72 Unit Usaha	74 Unit Usaha	150.000.000,00							76 Unit Usaha	160.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	76 Unit Usaha		72 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					74 Unit Usaha	110.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	-			160.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Unit Usaha		72 Unit Usaha	50 Unit Usaha	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					76 Unit Usaha	160.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
82.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						90.000.000,00								100.000.000,00	
			-	-		-	-	90.000.000,00							-	100.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00						-		100.000.000,00	
		-						90.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-		-	-	90.000.000,00							-	100.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						90.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-		-	50 Unit Usaha	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
83.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						95.000.000,00								100.000.000,00	
		Tercapainya SDM Koperasi yang Profesional						95.000.000,00								100.000.000,00	
			1.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	62 Persentase		54 Persentase	56 Persentase	95.000.000,00							58 Persentase	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						95.000.000,00						-		100.000.000,00	
		Diterbitkannya dokumen resmi (sertifikat atau surat keterangan) bagi Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Anggota yang telah menyelesaikan pelatihan, sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dan pengetahuan yang diperoleh						95.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang		42 Orang	44 Orang	95.000.000,00							46 Orang	100.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						95.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang		42 Orang	40 Orang	95.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					46 Orang	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
84.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						100.000.000,00								110.000.000,00	
		<i>Koperasi mampu meningkatkan volume usaha, aset, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga menjadi mandiri dan mampu bersaing</i>						100.000.000,00								110.000.000,00	
			1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	26 Persentase		22 Persentase	23 Persentase	100.000.000,00							24 Persentase	110.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
		Tersalurkannya bantuan dana bergulir, hibah, atau fasilitasi penjaminan kredit/akses ke lembaga pembiayaan (bank/non-bank) kepada koperasi terpilih yang memenuhi syarat.						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	21 Unit Usaha		17 Unit Usaha	18 Unit Usaha	100.000.000,00							19 Unit Usaha	110.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	21 Unit Usaha		17 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					19 Unit Usaha	110.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
85.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						155.000.000,00								165.000.000,00	
		<i>Terjadi peningkatan rata-rata volume penjualan dan keuntungan bersih UMKM yang menjadi sasaran program secara signifikan dan berkelanjutan</i>						155.000.000,00								165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	31 (%)		27 (%)	28 (%)	155.000.000,00							29 (%)	165.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						155.000.000,00						-		165.000.000,00	
		Tersedianya Basis Data Tunggal UMi yang akurat, terverifikasi, dan siap digunakan oleh pemerintah daerah untuk intervensi kebijakan						155.000.000,00						-		165.000.000,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	75.000.000,00							-	80.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	-	80.000.000,00							-	85.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha						80.000.000,00			-	-	-			85.000.000,00	
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	50 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.2.01.0020	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						75.000.000,00			-	-	-			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	50 Orang	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
86.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						80.000.000,00								85.000.000,00	
		Terjadinya peningkatan signifikan pada rata-rata omzet dan aset UMKM, dengan indikator keberhasilan paling tinggi adalah perpindahan kategori usaha						80.000.000,00								85.000.000,00	
			1.Update dan pengumpulan Data UMKM	27 Persentase		23 Persentase	24 Persentase	80.000.000,00							25 Persentase	85.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						80.000.000,00						-		85.000.000,00	
		Usaha Mikro yang sebelumnya hanya mengandalkan modal sendiri atau ultra mikro, kini memenuhi syarat dan berhasil mengakses kredit perbankan untuk ekspansi usaha						80.000.000,00						-		85.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-	80.000.000,00							-	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.08.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						80.000.000,00			-	-	-			85.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	80 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						260.000.000,00								280.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						260.000.000,00								280.000.000,00	
87.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI						260.000.000,00								280.000.000,00	
		Kawasan transmigrasi memiliki dokumen legalitas lahan yang sah dan tuntas (sertifikat hak atas tanah) serta kepastian hukum tata ruang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten						180.000.000,00								195.000.000,00	
			1.Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	56 Persentase		52 Persentase	53 Persentase	180.000.000,00							54 Persentase	195.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						260.000.000,00						-		280.000.000,00	
		Terlaksannya Dokumen Legal dan Tata Ruang						260.000.000,00						-		280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	55 Dokumen		51 Dokumen	52 Dokumen	100.000.000,00							53 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	55 Kawasan Transmigrasi		51 Kawasan Transmigrasi	52 Kawasan Transmigrasi	80.000.000,00							53 Kawasan Transmigrasi	85.000.000,00	
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	25 Hektar		21 Hektar	22 Hektar	80.000.000,00							23 Hektar	85.000.000,00	
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	55 Dokumen		51 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					53 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						80.000.000,00			-	-	-			85.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	55 Kawasan Transmigrasi		51 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					53 Kawasan Transmigrasi	85.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi						80.000.000,00			-	-	-			85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	25 Hektar		21 Hektar	25 Hektar	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-					23 Hektar	85.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X							2.036.000.000,00								2.055.700.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.036.000.000,00								2.055.700.000,00	
88.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.036.000.000,00								2.055.700.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	79 %	1.997.000.000,00							-	2.011.700.000,00	
			-	-		-	-	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.000.000,00						-		18.000.000,00	
		Terciptannya administratif, umum, dan dukungan teknis						18.000.000,00						-		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	9.000.000,00							6 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	9.000.000,00							6 Dokumen	9.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.000.000,00			-	-	-			9.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-					6 Dokumen	9.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						9.000.000,00			-	-	-			9.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-					6 Dokumen	9.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.207.000.000,00						-		1.207.200.000,00	
		Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai yang diproses dan dibayarkan (diukur dalam jumlah orang/bulan atau jumlah dokumen/SPM						1.207.000.000,00						-		1.207.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00							3 Laporan	7.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		16 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.200.000.000,00							18 Orang/bulan	1.200.000.000,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.200.000.000,00			-	-	-			1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		16 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Orang/bulan	1.200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.000.000,00			-	-	-			7.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	7.200.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
		Jumlah Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periodik yang diproses dan diterbitkan.						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00							1 Paket	30.000.000,00	
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						30.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						467.000.000,00						-		481.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Surat Masuk dan Surat Keluar yang diproses, didistribusikan, dan diarsipkan						467.000.000,00						-		481.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00							13 Laporan	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00							1 Paket	16.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.000.000,00							1 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00							1 Paket	42.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00			-	-	-			42.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	42.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00			-	-	-			13.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	13.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.000.000,00			-	-	-			16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	16.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						400.000.000,00			-	-	-			410.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Laporan	410.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00						-		35.000.000,00	
		-						30.000.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.000.000,00						-		230.500.000,00	
		Jumlah Dokumen/Surat yang didistribusikan (surat keluar/masuk) sesuai target						230.000.000,00						-		230.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	225.000.000,00							54 Laporan	225.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	5.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						225.000.000,00			-	-	-			225.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	54 Laporan		54 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					54 Laporan	225.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.000.000,00						-		54.000.000,00	
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan						54.000.000,00						-		54.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	54.000.000,00							50 Unit	54.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						54.000.000,00			-	-	-			54.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit		50 Unit	1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Unit	54.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						2.528.429.000,00								0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.528.429.000,00								0,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						2.528.429.000,00								0,00	
89.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.033.429.000,00								0,00	
		Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan						1.883.429.000,00								0,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %		87 %	89 %	1.883.429.000,00							90 %	0,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00						-		0,00	
		tercapainya dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)						25.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00							5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.544.429.000,00						-		0,00	
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN						1.544.429.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	1.534.429.000,00							1 Orang/bulan	0,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.534.429.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.534.429.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang/bulan	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Bimtek bagi aparatur						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		5 Orang	5 Orang	50.000.000,00							6 Orang	0,00	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Orang	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						150.000.000,00						-		0,00	
		terwujudnya Peningkatan kualitas dan ketersediaan pendukung operasional kantor						150.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00							1 Paket	0,00	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	10 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00						-		0,00	
		terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	7 Unit	35.000.000,00							8 Unit	0,00	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	5 Unit	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.000.000,00						-		0,00	
		tersedianya layanan dasar untuk operasional kantor						115.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	100.000.000,00							50 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan		50 Laporan	39 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Laporan	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						114.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						114.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	84.000.000,00							1 Unit	0,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						84.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						114.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
90.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						50.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi						50.000.000,00								0,00	
			1.Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	12 Investor		10 Investor	10 Investor	50.000.000,00							10 Investor	0,00	
			2.Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	48730556700 Rupiah		36547915904 Rupiah	39593576103 Rupiah	50.000.000,00							42639236302 Rupiah	0,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		tersedianya dokumen yang berisi identifikasi dan visualisasi peluang investasi di daerah kabupaten/kota						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
91.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						135.000.000,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						135.000.000,00								0,00	
			1.Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	5 Investor		2 Investor	2 Investor	135.000.000,00							3 Investor	0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00						-		0,00	
		terwujudnya promosinya potensi investasi daerah kepada calon investor, yang diharapkan akan meningkatkan minat investasi						135.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00							2 Dokumen	0,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						85.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
92.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						175.000.000,00								0,00	
		Jumlah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin						125.000.000,00								0,00	
			1.Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha	780 Perusahaan/UKM/IKM		660 Perusahaan/UKM/IKM	690 Perusahaan/UKM/IKM	125.000.000,00							720 Perusahaan/UKM/IKM	0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						175.000.000,00						-		0,00	
		tercapainya pemberian izin dan non-izin yang terintegrasi, yang meliputi proses permohonan hingga penyelesaian produk pelayanan						175.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	50.000.000,00							150 Pelaku Usaha	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha		650 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	75.000.000,00							650 Pelaku Usaha	0,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						75.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha		650 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					650 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					150 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		tercapainya pemberian izin dan non-izin yang terintegrasi, yang meliputi proses permohonan hingga penyelesaian produk pelayanan						175.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	10 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
93.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						100.000.000,00								0,00	
		terkendalinya pelaksanaan penanaman modal di Daerah						50.000.000,00								0,00	
			1.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN	0:0 %		0:0 %	0:0 %	50.000.000,00							0:0 %	0,00	
			2.Realisasi Total terhadap Target Investasi	48.75 %		36.55 %	39.60 %	50.000.000,00							42.65 %	0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		0,00	
		tersedianya pemantauan kepatuhan investasi dan pelaporan kinerja investasi						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	50.000.000,00							15 Kegiatan Usaha	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50.000.000,00							15 Pelaku Usaha	0,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						50.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Kegiatan Usaha	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
94.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						35.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						35.000.000,00								0,00	
			1.Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi	5 Data		3 Data	4 Data	35.000.000,00							5 Data	0,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00						-		0,00	
		terwujudnya sistem data yang tunggal dan terpadu untuk seluruh layanan, serta tersedianya laporan dan analisis yang akurat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan						35.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	35.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						35.000.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga						2.346.116.900,00								2.366.116.900,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.310.362.200,00								2.330.362.200,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						2.310.362.200,00								2.330.362.200,00	
95.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.652.362.200,00								1.652.362.200,00	
		Menikatnya tata kelola pemerintahan daerah						1.628.362.200,00								1.628.362.200,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96.4 %		92.7 %	93.3 %	1.628.362.200,00							94.6 %	1.628.362.200,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.000.000,00						-		11.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.000.000,00						-		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00							4 Dokumen	11.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-					4 Dokumen	11.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.041.262.200,00						-		1.041.262.200,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.041.262.200,00						-		1.041.262.200,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00							1 Laporan	13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.028.262.200,00							17 Orang/bulan	1.028.262.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.028.262.200,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.028.262.200,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		14 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.028.262.200,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					17 Orang/bulan	1.028.262.200,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						13.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			13.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	13.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	13.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						344.900.000,00						-		344.900.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						344.900.000,00						-		344.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00							2 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	61.900.000,00							2 Paket	61.900.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.000.000,00							1 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00							1 Paket	100.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						61.900.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			61.900.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	61.900.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	61.900.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			13.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	13.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	13.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						170.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			170.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	170.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	170.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.000.000,00						-		29.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.000.000,00						-		29.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	4 Unit	29.000.000,00							5 Unit	29.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			29.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	0 Unit	29.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	29.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						178.200.000,00						-		178.200.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						178.200.000,00						-		178.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00							3 Laporan	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	160.200.000,00							12 Laporan	160.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			11.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	11.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	11.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						160.200.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			160.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	160.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	160.200.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	2 Unit	48.000.000,00							5 Unit	48.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	0 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	48.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
96.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						200.000.000,00								200.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						200.000.000,00								200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	85 %		75 %	77 %	200.000.000,00							79 %	200.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						50.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	0 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	150.000.000,00							-	150.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						150.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	0 Organisasi	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
97.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						428.000.000,00								448.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						398.000.000,00								398.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	25 Persentase		16 Persentase	17.5 Persentase	398.000.000,00							19 Persentase	398.000.000,00	
			-	-		-	-	30.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Meingkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						50.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			50.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	0 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	48.000.000,00							-	48.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						48.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			48.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	0 Orang	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	48.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						300.000.000,00						-		300.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						300.000.000,00						-		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	300.000.000,00							-	300.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						300.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			300.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	0 Kerja Sama	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						30.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						30.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	-	30.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						30.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			50.000.000,00	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	0 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
98.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						30.000.000,00								30.000.000,00	
		Meningkatnya Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						30.000.000,00								30.000.000,00	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	50 Persentase		30 Persentase	35 Persentase	30.000.000,00							40 Persentase	30.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00							1 Organisasi	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						30.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			30.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	0 Organisasi	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Organisasi	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	X							35.754.700,00								35.754.700,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						35.754.700,00								35.754.700,00	
99.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						35.754.700,00								35.754.700,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	93.3 %	35.754.700,00							-	35.754.700,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.754.700,00						-		35.754.700,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.754.700,00						-		35.754.700,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	35.754.700,00							-	35.754.700,00	
	X.XX.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						35.754.700,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			35.754.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	0 Dokumen	35.754.700,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.754.700,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						2.213.000.000,00								2.485.175.200,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.213.000.000,00								2.485.175.200,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.098.158.200,00								2.350.675.200,00	
100.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.803.389.200,00								1.983.675.200,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						1.775.789.200,00								1.881.875.200,00	
			1.Indeks pembangunan literasi masyarakat	55.5 Indeks		51.5 Indeks	52.5 Indeks	1.775.789.200,00							53.5 Indeks	1.881.875.200,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.128.000.000,00						-		1.307.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah						1.128.000.000,00						-		1.307.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.122.000.000,00							14 Orang/bulan	1.300.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.122.000.000,00			-	-	-			1.300.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.122.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Orang/bulan	1.300.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						203.437.200,00						-		225.000.000,00	
		Tersedianya administrasi umum kearsipan daerah						203.437.200,00						-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.240.000,00							4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	159.514.800,00							4 Laporan	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.832.400,00							1 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.200.000,00							1 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.650.000,00							1 Paket	15.000.000,00	
		Tersedianya administrasi umum kesekretariatan dan perpustakaan						203.437.200,00						-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.240.000,00							4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	159.514.800,00							4 Laporan	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.832.400,00							1 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.200.000,00							1 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.650.000,00							1 Paket	15.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.832.400,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	10.832.400,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.650.000,00			-	-	-			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.650.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.240.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	24 Dokumen	12.240.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.200.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						159.514.800,00			-	-	-			165.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	18 Laporan	159.514.800,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	165.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355.600.000,00						-		359.000.000,00	
		Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik						355.600.000,00						-		359.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00							12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	334.000.000,00							12 Laporan	334.000.000,00	
		Tersedianya pelayanan umum untuk kearsipan dan perpustakaan						355.600.000,00						-		359.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00							12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	334.000.000,00							12 Laporan	334.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.600.000,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						334.000.000,00			-	-	-			334.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	334.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	334.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.752.000,00						-		50.875.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya pemeliharaan gedung bangunan kantor, unit kendaraan operasional, dan tenaga supir perpustakaan keliling serta peralatan dan perabot						88.752.000,00						-		50.875.200,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00							1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	58.752.000,00							1 Unit	5.875.200,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00							10 Unit	15.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						58.752.000,00			-	-	-			5.875.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	58.752.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	5.875.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			-	-		-	-	27.600.000,00							-	41.800.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.600.000,00						-		16.800.000,00	
		-						12.600.000,00						-		16.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.600.000,00							-	16.800.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.600.000,00			-	-	-			16.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah						1.128.000.000,00						-		1.307.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	6.000.000,00							-	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.000.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00						-		25.000.000,00	
		-						15.000.000,00						-		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00							-	25.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
101.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						294.769.000,00								367.000.000,00	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)						219.769.000,00								267.000.000,00	
			1.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	75.5 Nilai		71.5 Nilai	72.5 Nilai	219.769.000,00							73.5 Nilai	267.000.000,00	
		Terkelolanya pelayanan perpustakaan dan bahan pustaka kewenangan Kabupaten Buru Selatan						156.500.000,00						-		182.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6500 Eksemplar		4500 Eksemplar	5000 Eksemplar	75.000.000,00							5500 Eksemplar	100.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	6.500.000,00							1 Perpustakaan	7.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						75.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6500 Eksemplar		4500 Eksemplar	75 Eksemplar	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5500 Eksemplar	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						6.500.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Perpustakaan	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya pembudayaan gemar membaca, pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan peningkatan literasi						138.269.000,00						-		185.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	36 Orang		36 Orang	36 Orang	31.118.000,00							36 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan		2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	32.101.000,00							2 Perpustakaan	50.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						32.101.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan		2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	32.101.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						31.118.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	36 Orang		36 Orang	36 Orang	31.118.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					36 Orang	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						156.500.000,00						-		182.000.000,00	
		Terkelolanya pelayanan perpustakaan dan bahan pustaka kewenangan Kabupaten Buru Selatan						156.500.000,00						-		182.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00							-	75.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00			-	-	-			75.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						138.269.000,00						-		185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya pembudayaan gemar membaca, pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan peningkatan literasi						138.269.000,00						-		185.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	-	75.050.000,00							-	100.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						75.050.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	1 Perpustakaan	75.050.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						114.841.800,00								134.500.000,00	
102.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.447.000,00								14.500.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						9.447.000,00								14.500.000,00	
			1.Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	5.00 Persentase		2.50 Persentase	3.50 Persentase	9.447.000,00							4.00 Persentase	14.500.000,00	
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.950.000,00						-		4.500.000,00	
		Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik						3.950.000,00						-		4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.950.000,00							12 Laporan	4.500.000,00	
		Tersedianya pelayanan umum untuk kearsipan dan perpustakaan						3.950.000,00						-		4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.950.000,00							12 Laporan	4.500.000,00	
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.950.000,00			-	-	-			4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.950.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	4.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.497.000,00						-		10.000.000,00	
		Tersedianya administrasi umum kearsipan daerah						5.497.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.497.000,00							-	10.000.000,00	
		Tersedianya administrasi umum kesekretariatan dan perpustakaan						5.497.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.497.000,00							-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.497.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.497.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
103.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						105.394.800,00								120.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Daerah						105.394.800,00								120.000.000,00	
			1.Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	70 Nilai		45 Nilai	50 Nilai	105.394.800,00							60 Nilai	120.000.000,00	
			2.Tingkat Ketersediaan Arsip	30 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	105.394.800,00							20 Persentase	120.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						105.394.800,00						-		120.000.000,00	
		Terkelolanya arsip dinamis lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan						105.394.800,00						-		120.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas		1000 Berkas	1000 Berkas	12.000.000,00							1000 Berkas	15.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas		1000 Berkas	1000 Berkas	20.000.000,00							1000 Berkas	25.000.000,00	
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	25 Instansi		5 Instansi	10 Instansi	45.400.000,00							15 Instansi	50.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						12.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas		1000 Berkas	3000 Berkas	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1000 Berkas	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						20.000.000,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas		1000 Berkas	3000 Berkas	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1000 Berkas	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota						45.400.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	25 Instansi		5 Instansi	8 Instansi	45.400.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Instansi	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Terkelolanya arsip dinamis lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan						105.394.800,00						-		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	27.994.800,00							-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						27.994.800,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Laporan	27.994.800,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Perikanan						5.409.122.000,00								5.679.578.100,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.409.122.000,00								5.679.578.100,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.409.122.000,00								5.679.578.100,00	
104.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.164.122.000,00								3.322.328.100,00	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan						3.157.122.000,00								3.314.978.100,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95 %		85 %	88 %	3.157.122.000,00							90 %	3.314.978.100,00	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.633.332.000,00						-		1.714.998.600,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						1.633.332.000,00						-		1.714.998.600,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	6.500.000,00							1 Laporan	6.825.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.626.832.000,00							12 Orang/bulan	1.708.173.600,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.626.832.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.708.173.600,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.626.832.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang/bulan	1.708.173.600,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.825.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.825.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						189.490.000,00						-		198.964.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						189.490.000,00						-		198.964.500,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	157.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	7.000.000,00							1 Paket	7.350.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.490.000,00							1 Paket	7.864.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00							2 Paket	21.000.000,00	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	5 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	21.000.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			7.350.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	4 Paket	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.350.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.490.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			7.864.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	7.490.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.864.500,00	Dinas Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.250.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			157.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	157.500.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						135.000.000,00						-		141.750.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						135.000.000,00						-		141.750.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	12 Unit	75.000.000,00							15 Unit	78.750.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	4 Unit	60.000.000,00							3 Unit	63.000.000,00	
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			78.750.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	12 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Unit	78.750.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			63.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	4 Unit	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	63.000.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.093.300.000,00						-		1.147.965.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.093.300.000,00						-		1.147.965.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00							1 Laporan	26.775.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.060.800.000,00							1 Laporan	1.113.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00							1 Laporan	7.350.000,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			7.350.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.350.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			26.775.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	26.775.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.060.800.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.113.840.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	1.060.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	1.113.840.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113.000.000,00						-		118.650.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113.000.000,00						-		118.650.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	55.000.000,00							1 Unit	57.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00							1 Unit	50.400.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.000.000,00							7 Unit	10.500.000,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			50.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	50.400.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	12 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Unit	10.500.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						55.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			57.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	57.750.000,00	Dinas Perikanan
105.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1.535.000.000,00								1.611.750.000,00	
		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan						1.535.000.000,00								1.611.750.000,00	
			1.Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0 Indeks		0 Indeks	0 Indeks	1.535.000.000,00							0 Indeks	1.611.750.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						55.000.000,00						-		57.750.000,00	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						55.000.000,00						-		57.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	57.750.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						55.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			57.750.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	57.750.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.480.000.000,00						-		1.554.000.000,00	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						1.480.000.000,00						-		1.554.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	35 Unit		25 Unit	30 Unit	980.000.000,00							35 Unit	1.029.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	500.000.000,00							2 Unit Usaha	525.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						500.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			525.000.000,00	
		Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	4 Unit Usaha	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit Usaha	525.000.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						980.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			1.029.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	35 Unit		25 Unit	10 Unit	980.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Unit	1.029.000.000,00	Dinas Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
106.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						480.000.000,00								504.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya						480.000.000,00								504.000.000,00	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0 Ton		0 Ton	0 Ton	480.000.000,00							0 Ton	504.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						50.000.000,00						-		52.500.000,00	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						50.000.000,00						-		52.500.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok		5 Kelompok	5 Kelompok	50.000.000,00							5 Kelompok	52.500.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						50.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			52.500.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok		5 Kelompok	24 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Kelompok	52.500.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						430.000.000,00						-		451.500.000,00	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						430.000.000,00						-		451.500.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	57.750.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	10 Unit	375.000.000,00							10 Unit	393.750.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			57.750.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	57.750.000,00	Dinas Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						375.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			393.750.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	5 Unit	375.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	393.750.000,00	Dinas Perikanan
107.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						230.000.000,00								241.500.000,00	
		Meningkatnya jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat						150.000.000,00								157.500.000,00	
			1.Jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat	0 Unit		0 Unit	0 Unit	150.000.000,00							0 Unit	157.500.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						80.000.000,00						-		84.000.000,00	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						80.000.000,00						-		84.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00							1 Dokumen	84.000.000,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						80.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			84.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	84.000.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						70.000.000,00						-		73.500.000,00	
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						70.000.000,00						-		73.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	40 Unit Usaha		30 Unit Usaha	35 Unit Usaha	70.000.000,00							40 Unit Usaha	73.500.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						70.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			73.500.000,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	40 Unit Usaha		30 Unit Usaha	5 Unit Usaha	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Unit Usaha	73.500.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						80.000.000,00						-		84.000.000,00	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		84.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	80.000.000,00							20 Pelaku Usaha	84.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			84.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Pelaku Usaha	84.000.000,00	Dinas Perikanan
		Dinas Pariwisata						2.328.063.000,00								3.097.230.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						145.000.000,00								350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						145.000.000,00								350.000.000,00	
108.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						120.000.000,00								250.000.000,00	
		Meningkatnya aktualisasi kesenian daerah, sarana prasarana lembaga adat, dan tersedianya dokumen PPKD						80.000.000,00								150.000.000,00	
			2.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	63 Persentase		52 Persentase	54 Persentase	80.000.000,00							57 Persentase	150.000.000,00	
		Tersedianya dokumen pokok pokok pikiran kebudayaan daerah						55.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	15.000.000,00							1 Objek	50.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						15.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	10 Objek	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Objek	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Meningkatnya aktualisasi kesenian daerah						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek		12 Objek	12 Objek	40.000.000,00							13 Objek	50.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						40.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek		12 Objek	12 Objek	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Objek	50.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana lembaga adat						25.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	14 Unit		12 Unit	13 Unit	25.000.000,00							13 Unit	50.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						25.000.000,00			-	-	PP1. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana			50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	14 Unit		12 Unit	10 Unit	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00						-		150.000.000,00	
		Tersedianya dokumen pokok pokok pikiran kebudayaan daerah						55.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	-	40.000.000,00							-	100.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
109.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						25.000.000,00								100.000.000,00	
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan						25.000.000,00								100.000.000,00	
			1.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	28 %		16 %	19 %	25.000.000,00							22 %	100.000.000,00	
			2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	42 Persentase		30 Persentase	33 Persentase	25.000.000,00							36 Persentase	100.000.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						25.000.000,00						-		100.000.000,00	
		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan						25.000.000,00						-		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	8 Objek		4 Objek	5 Objek	25.000.000,00							6 Objek	100.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan						25.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			100.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	8 Objek		4 Objek	10 Objek	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Objek	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.183.063.000,00								2.747.230.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.183.063.000,00								2.747.230.000,00	
110.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.855.563.000,00								2.047.230.000,00	
		Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah						1.839.063.000,00								2.033.455.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	99 %		94 %	95 %	1.839.063.000,00							97 %	2.033.455.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		9.450.000,00	
		Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						10.000.000,00						-		9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00							2 Dokumen	200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	2.625.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	2.625.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.500.000,00							3 Laporan	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	200.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			2.625.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.625.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			2.625.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.625.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.407.963.000,00						-		1.504.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah						1.407.963.000,00						-		1.504.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00							1 Laporan	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		15 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.404.963.000,00							25 Orang/bulan	1.500.000.000,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.404.963.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.404.963.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Orang/bulan	1.500.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	4.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						123.000.000,00						-		174.150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umu Perangkat daerah						123.000.000,00						-		174.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00							1 Dokumen	3.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00							12 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00							1 Paket	7.350.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00							1 Paket	3.150.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	10.500.000,00	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	10.500.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			7.350.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.350.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			3.150.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	3.150.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			3.150.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	3.150.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.000.000,00						-		80.000.000,00	
		Terlaksananya Kelancaran Tugas-Tugas Kantor						55.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		5 Unit	7 Unit	25.000.000,00							8 Unit	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	3 Unit	30.000.000,00							4 Unit	50.000.000,00	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		5 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	30.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201.600.000,00						-		213.230.000,00	
		Meningkatnya Aktifitas Perkantoran						201.600.000,00						-		213.230.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	192.600.000,00							1 Laporan	202.230.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00							1 Laporan	4.000.000,00	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	4.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						192.600.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			202.230.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	192.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	202.230.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00						-		66.400.000,00	
		Meningkatnya Aktifitas Perkantoran						58.000.000,00						-		66.400.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		4 Unit	5 Unit	5.000.000,00							6 Unit	6.000.000,00	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		4 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	6.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Aktifitas Perkantoran						58.000.000,00						-		66.400.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	48.000.000,00							-	50.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			50.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.400.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pariwisata
111.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						125.000.000,00								250.000.000,00	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						75.000.000,00								150.000.000,00	
			1.Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	113944000 %		93750000 %	98438000 %	75.000.000,00							103350000 %	150.000.000,00	
			3.Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	4822 Orang		3819 Orang	4048 Orang	75.000.000,00							4291 Orang	150.000.000,00	
			4.Jumlah wisatawan mancanegara	400 Orang		317 Orang	336 Orang	75.000.000,00							356 Orang	150.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-		150.000.000,00	
		Jumlah destinasi wisata						75.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi		3 Lokasi	4 Lokasi	50.000.000,00							5 Lokasi	100.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Lokasi	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						25.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			50.000.000,00	
		Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		100.000.000,00	
		Meningkatnya destinasi pariwisata daerah						50.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi		3 Lokasi	4 Lokasi	25.000.000,00							5 Lokasi	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit		3 Unit	4 Unit	25.000.000,00							5 Unit	50.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						25.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Lokasi	50.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						25.000.000,00			-	-	PP3. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			50.000.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit		3 Unit	2 Unit	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
112.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						125.000.000,00								250.000.000,00	
		Meningkatnya promosi dan kerjasama pariwisata						75.000.000,00								150.000.000,00	
			1.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	75 Persentase		75 Persentase	75 Persentase	75.000.000,00							75 Persentase	150.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						125.000.000,00						-		250.000.000,00	
		Jumlah media promosi dan event vestifal						125.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Promosi		8 Promosi	9 Promosi	25.000.000,00							10 Promosi	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00							7 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan		7 Kegiatan	7 Kegiatan	25.000.000,00							7 Kegiatan	50.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						25.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						50.000.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			100.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						25.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan		7 Kegiatan	3 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						25.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Promosi		8 Promosi	7 Promosi	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Promosi	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
113.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						40.000.000,00								100.000.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif						20.000.000,00								50.000.000,00	
			1.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	70 Persentase		30 Persentase	40 Persentase	20.000.000,00							50 Persentase	50.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						40.000.000,00						-		100.000.000,00	
		Meningkatnya usaha ekonomi kreatif						40.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	-		-	-	20.000.000,00							-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-		-	-	20.000.000,00							-	50.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah						20.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	-		-	1 Kebijakan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual						20.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-		-	8 Produk	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
114.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						37.500.000,00								100.000.000,00	
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						37.500.000,00								50.000.000,00	
			1.Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	65 Orang		45 Orang	50 Orang	37.500.000,00							55 Orang	50.000.000,00	
			2.Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	2187 Orang		432 Orang	648 Orang	37.500.000,00							972 Orang	50.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						37.500.000,00						-		100.000.000,00	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata						37.500.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	-	20.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-		-	-	17.500.000,00							-	50.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						20.000.000,00			-	-	PP6. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan Lokal yang Inklusif;			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.2.01.0013	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif						17.500.000,00			-	-	PP3. Penin gkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Pendukung SDM dan Ekonomi Lokal;			50.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-		-	40 Orang	17.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Dinas Pertanian						6.071.387.300,00								6.374.956.665,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.071.387.300,00								6.374.956.665,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.071.387.300,00								6.374.956.665,00	
115.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.729.167.300,00								4.965.625.665,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						4.729.167.300,00								4.965.625.665,00	
			1.Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	5187429060 %		4893801000 %	4991677020 %	4.729.167.300,00							5089553040 %	4.965.625.665,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00						-		15.750.000,00	
		Terwujudnya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						15.000.000,00						-		15.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97 Dokumen		93 Dokumen	94 Dokumen	15.000.000,00							95 Dokumen	15.750.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			15.750.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97 Dokumen		93 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Elfule 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					95 Dokumen	15.750.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.521.591.000,00						-		3.697.670.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah						3.521.591.000,00						-		3.697.670.550,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	5.000.000,00							100 Laporan	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan		94 Orang/bulan	95 Orang/bulan	3.516.591.000,00							96 Orang/bulan	3.692.420.550,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.516.591.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			3.692.420.550,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan		94 Orang/bulan	109 Orang/bulan	3.516.591.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					96 Orang/bulan	3.692.420.550,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			5.250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Laporan	5.250.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						241.516.300,00						-		253.592.115,00	
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah						241.516.300,00						-		253.592.115,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan		92 Laporan	93 Laporan	217.464.300,00							94 Laporan	228.337.515,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	96 Paket		92 Paket	93 Paket	8.817.000,00							94 Paket	9.257.850,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96 Paket		92 Paket	93 Paket	15.235.000,00							94 Paket	15.996.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.235.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			15.996.750,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96 Paket		92 Paket	6 Paket	15.235.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					94 Paket	15.996.750,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.817.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			9.257.850,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	96 Paket		92 Paket	10 Paket	8.817.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					94 Paket	9.257.850,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						217.464.300,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			228.337.515,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan		92 Laporan	20 Laporan	217.464.300,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					94 Laporan	228.337.515,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						849.060.000,00						-		891.513.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						849.060.000,00						-		891.513.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan		92 Laporan	93 Laporan	4.560.000,00							94 Laporan	4.788.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	837.600.000,00							-	879.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96 Laporan		92 Laporan	93 Laporan	6.900.000,00							94 Laporan	7.245.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.900.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			7.245.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96 Laporan		92 Laporan	110 Laporan	6.900.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					94 Laporan	7.245.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.560.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			4.788.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan		92 Laporan	12 Laporan	4.560.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					94 Laporan	4.788.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						837.600.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			879.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	837.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	879.480.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102.000.000,00						-		107.100.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						102.000.000,00						-		107.100.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00							-	21.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	97 Unit		93 Unit	94 Unit	34.000.000,00							95 Unit	35.700.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	96 Unit		92 Unit	93 Unit	48.000.000,00							94 Unit	50.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			50.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	96 Unit		92 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					94 Unit	50.400.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						34.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			35.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	97 Unit		93 Unit	3 Unit	34.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					95 Unit	35.700.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.000.000,00	Dinas Pertanian
116.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						982.220.000,00								1.031.331.000,00	
		Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian						810.600.000,00								851.130.000,00	
			1.Persentease Kontribus Sektor Pertanian terhadap PDRB	3504546432 Persentase		3244950400 Persentase	3309849408 Persentase	810.600.000,00							3374748416 Persentase	851.130.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						810.600.000,00						-		851.130.000,00	
		Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian						810.600.000,00						-		851.130.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	97 Laporan		93 Laporan	94 Laporan	510.600.000,00							95 Laporan	536.130.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	95 Laporan		91 Laporan	92 Laporan	300.000.000,00							93 Laporan	315.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						300.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			315.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	95 Laporan		91 Laporan	15 Laporan	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					93 Laporan	315.000.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						510.600.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			536.130.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	97 Laporan		93 Laporan	200 Laporan	510.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					95 Laporan	536.130.000,00	Dinas Pertanian
			-	-		-	-	171.620.000,00							-	180.201.000,00	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						171.620.000,00						-		180.201.000,00	
		-						171.620.000,00						-		180.201.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	171.620.000,00							-	180.201.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						171.620.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			180.201.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	600 Ekor	171.620.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	180.201.000,00	Dinas Pertanian
117.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						280.000.000,00								294.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			-	-		-	-	280.000.000,00							-	294.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						280.000.000,00						-		294.000.000,00	
		-						280.000.000,00						-		294.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	200.000.000,00							-	210.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	80.000.000,00							-	84.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						200.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			210.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	210.000.000,00	Dinas Pertanian
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						80.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			84.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	6 Unit	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	84.000.000,00	Dinas Pertanian
118.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						20.000.000,00								21.000.000,00	
		Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)						20.000.000,00								21.000.000,00	
			1.Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	40726800 %		37710000 %	38464200 %	20.000.000,00							39218400 %	21.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		21.000.000,00	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular						20.000.000,00						-		21.000.000,00	
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-		-	-	20.000.000,00							-	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						20.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			21.000.000,00	
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-		-	3 Wilayah	20.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Wali 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Elfule 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	21.000.000,00	Dinas Pertanian	
119.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						60.000.000,00								63.000.000,00	
			-	-		-	-	60.000.000,00							-	63.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						60.000.000,00						-		63.000.000,00	
		-						60.000.000,00						-		63.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	60.000.000,00							-	63.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						60.000.000,00			-	-	PP7. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Unggulan yang Bernilai Tambah			63.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	12 Unit	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	63.000.000,00	Dinas Pertanian
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan						4.346.130.235,00								4.476.392.750,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.346.130.235,00								4.476.392.750,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.969.888.485,00								4.093.151.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
120.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.988.073.000,00								3.070.210.000,00	
		Peningkatan kualitas layanan Publik Urusan Dinas Perdagangan						2.988.073.000,00								3.070.210.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	80 %		67.2 %	71.8 %	2.988.073.000,00							72.1 %	3.070.210.000,00	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.869.773.000,00						-		1.926.250.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.869.773.000,00						-		1.926.250.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	81 Laporan		61.8 Laporan	61.8 Laporan	14.500.000,00							73 Laporan	14.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	1.855.273.000,00							80 Orang/bulan	1.911.500.000,00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.855.273.000,00			-	-	-			1.911.500.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	340 Orang/bulan	1.855.273.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					80 Orang/bulan	1.911.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						14.500.000,00			-	-	-			14.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	81 Laporan		61.8 Laporan	12 Laporan	14.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					73 Laporan	14.750.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						108.360.000,00						-		111.370.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						108.360.000,00						-		111.370.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74.5 Orang		65 Orang	70 Orang	108.360.000,00							70 Orang	111.370.000,00	
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						108.360.000,00			-	-	-			111.370.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74.5 Orang		65 Orang	4 Orang	108.360.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					70 Orang	111.370.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						410.650.000,00						-		429.800.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						410.650.000,00						-		429.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	62.5 Dokumen		62.5 Dokumen	62.5 Dokumen	12.000.000,00							62.5 Dokumen	14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		63 Laporan	61.8 Laporan	306.000.000,00							61.8 Laporan	318.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket		62 Paket	62 Paket	25.000.000,00							62 Paket	27.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		61 Paket	61 Paket	11.850.000,00							61 Paket	12.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket		64.5 Paket	64.5 Paket	38.800.000,00							64.5 Paket	39.700.000,00	
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.800.000,00			-	-	-			39.700.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket		64.5 Paket	24 Paket	38.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					64.5 Paket	39.700.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00			-	-	-			27.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket		62 Paket	12 Paket	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					62 Paket	27.600.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.850.000,00			-	-	-			12.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		61 Paket	36 Paket	11.850.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					61 Paket	12.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00			-	-	-			14.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	62.5 Dokumen		62.5 Dokumen	24 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					62.5 Dokumen	14.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						306.000.000,00			-	-	-			318.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		63 Laporan	36 Laporan	306.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					61.8 Laporan	318.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						76.690.000,00						-		77.690.000,00	
		Presentase Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						76.690.000,00						-		77.690.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit		61.8 Unit	64 Unit	76.690.000,00							65 Unit	77.690.000,00	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						76.690.000,00			-	-	-			77.690.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit		61.8 Unit	13 Unit	76.690.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					65 Unit	77.690.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						233.600.000,00						-		234.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						233.600.000,00						-		234.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61.8 Laporan		61.8 Laporan	61.8 Laporan	219.600.000,00							61.8 Laporan	219.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.5 Laporan		62.5 Laporan	62.5 Laporan	14.000.000,00							62.5 Laporan	15.000.000,00	
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						14.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.5 Laporan		62.5 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					62.5 Laporan	15.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						219.600.000,00			-	-	-			219.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61.8 Laporan		61.8 Laporan	35 Laporan	219.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					61.8 Laporan	219.600.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00						-		16.500.000,00	
		Meningkatnya Evaluasi Kinerja						15.000.000,00						-		16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.000.000,00							-	16.500.000,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00			-	-	-			16.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						410.650.000,00						-		429.800.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.000.000,00							-	18.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.000.000,00			-	-	-			18.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	17.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						274.000.000,00						-		274.000.000,00	
		Meingkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						274.000.000,00						-		274.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	226.000.000,00							-	226.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	48.000.000,00							-	48.000.000,00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	-			48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	48.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						226.000.000,00			-	-	-			226.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	226.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	226.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
121.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						246.150.000,00								258.150.000,00	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan						246.150.000,00								258.150.000,00	
			1.Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	51 Persentase		21.56 Persentase	28.69 Persentase	246.150.000,00							39.42 Persentase	258.150.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						246.150.000,00						-		258.150.000,00	
		Meningkatnya Gedung Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						246.150.000,00						-		258.150.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	60 Unit		57 Unit	57 Unit	88.150.000,00							57 Unit	98.150.000,00	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						88.150.000,00			-	-	-			98.150.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	60 Unit		57 Unit	6 Unit	88.150.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					57 Unit	98.150.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Gedung Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						246.150.000,00						-		258.150.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	158.000.000,00							-	160.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						158.000.000,00			-	-	-			160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	3 Unit	158.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Leksula Desa Leksula 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1 Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	160.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
122.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						271.091.750,00								272.091.000,00	
		Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, serta mengurangi disparitas harga						271.091.750,00								272.091.000,00	
			1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	68.7 Persentase		64.1 Persentase	65.2 Persentase	271.091.750,00							66 Persentase	272.091.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						271.091.750,00						-		272.091.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok						271.091.750,00						-		272.091.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60 Laporan		54 Laporan	55 Laporan	178.991.750,00							56 Laporan	179.991.000,00	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						178.991.750,00			-	-	-			179.991.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60 Laporan		54 Laporan	36 Laporan	178.991.750,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					56 Laporan	179.991.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok						271.091.750,00						-		272.091.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	92.100.000,00							-	92.100.000,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						92.100.000,00			-	-	-			92.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	36 Laporan	92.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	92.100.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
123.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						267.223.735,00								285.550.000,00	
		Peningkatan daya saing produk nasional, penyerapan tenaga kerja						267.223.735,00								285.550.000,00	
			1.Persentase peningkatan investasi di kabupaten	75.5 %		67.2 %	68.4 %	267.223.735,00							72.1 %	285.550.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						267.223.735,00						-		285.550.000,00	
		Presentase Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						267.223.735,00						-		285.550.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	70 Pelaku Usaha		65 Pelaku Usaha	66 Pelaku Usaha	212.673.735,00							67.5 Pelaku Usaha	221.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	70 Pelaku Usaha		58 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	54.550.000,00							62.5 Pelaku Usaha	64.550.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						212.673.735,00			-	-	-			221.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	70 Pelaku Usaha		65 Pelaku Usaha	32 Pelaku Usaha	212.673.735,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					67.5 Pelaku Usaha	221.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						54.550.000,00			-	-	-			64.550.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	70 Pelaku Usaha		58 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	54.550.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					62.5 Pelaku Usaha	64.550.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
124.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						197.350.000,00								207.150.000,00	
		Meningkatnya kepercayaan konsumen, berkurangnya kasus peredaran barang berbahaya, dan meningkatnya keadilan bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik yang adil						197.350.000,00								207.150.000,00	
			1.Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	68.7 %		58.9 %	61 %	197.350.000,00							66 %	207.150.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						197.350.000,00						-		207.150.000,00	
		Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						197.350.000,00						-		207.150.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	72 Unit		55 Unit	62 Unit	119.700.000,00							65 Unit	128.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	74.5 Orang		67.8 Orang	69 Orang	77.650.000,00							71 Orang	78.650.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						119.700.000,00			-	-	-			128.500.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	72 Unit		55 Unit	125 Unit	119.700.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					65 Unit	128.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						77.650.000,00			-	-	-			78.650.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	74.5 Orang		67.8 Orang	26 Orang	77.650.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					71 Orang	78.650.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						376.241.750,00								383.241.750,00	
125.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.000.000,00								14.500.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	71.8 %	14.000.000,00							-	14.500.000,00	
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.000.000,00						-		14.500.000,00	
		Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.000.000,00						-		14.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62.5 Laporan		62.5 Laporan	62.5 Laporan	14.000.000,00							62.5 Laporan	14.500.000,00	
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.000.000,00			-	-	-			14.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62.5 Laporan		62.5 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					62.5 Laporan	14.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
126.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						362.241.750,00								368.741.750,00	
		Meningkatnya kontribusi industri terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, dan terwujudnya industri yang berkelanjutan dan terintegrasi						362.241.750,00								368.741.750,00	
			1.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	70 (%)		64.1 (%)	65.2 (%)	362.241.750,00							66 (%)	368.741.750,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						362.241.750,00						-		368.741.750,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri						362.241.750,00						-		368.741.750,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	85 Dokumen		66.1 Dokumen	69 Dokumen	161.300.000,00							73 Dokumen	162.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						161.300.000,00			-	-	-			162.800.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	85 Dokumen		66.1 Dokumen	36 Dokumen	161.300.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					73 Dokumen	162.800.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri						362.241.750,00						-		368.741.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	200.941.750,00							-	205.941.750,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						200.941.750,00			-	-	-			205.941.750,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	36 Dokumen	200.941.750,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	205.941.750,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sekretariat Daerah						21.247.402.400,00								23.367.142.640,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21.097.402.400,00								23.202.142.640,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						21.097.402.400,00								23.202.142.640,00	
127.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.097.402.400,00								23.202.142.640,00	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan						19.397.402.400,00								21.387.142.640,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96 %		92 %	93 %	19.397.402.400,00							94 %	21.387.142.640,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.050.000.000,00						-		8.855.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.050.000.000,00						-		8.855.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00							1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	8.000.000.000,00							1 Orang/bulan	8.800.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.000.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			8.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	119 Orang/bulan	8.000.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang/bulan	8.800.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	55.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00							1 Paket	110.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						100.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			110.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	110.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.829.740.000,00						-		6.412.714.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.829.740.000,00						-		6.412.714.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00							1 Dokumen	440.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00							1 Laporan	330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000,00							1 Laporan	4.400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	400.000.000,00							1 Paket	440.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00							1 Paket	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.740.000,00							1 Paket	170.214.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00							1 Paket	82.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	350.000.000,00							1 Paket	385.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						75.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			82.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	82.500.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						350.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			385.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	385.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						400.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	440.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						154.740.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			170.214.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.740.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	170.214.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						400.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			440.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	440.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						150.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			165.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	165.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						300.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			330.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	330.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.000.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			4.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	4.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	4.400.000.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						950.000.000,00						-		1.045.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						950.000.000,00						-		1.045.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00							1 Unit	165.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	220.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			220.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	220.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			165.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	165.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			220.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	220.000.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			220.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	220.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			220.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	220.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.662.400,00						-		3.698.928.640,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.662.400,00						-		3.698.928.640,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00							1 Laporan	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.042.662.400,00							1 Laporan	3.346.928.640,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00							1 Laporan	132.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						120.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			132.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	132.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	220.000.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.042.662.400,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			3.346.928.640,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.042.662.400,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	3.346.928.640,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.590.000.000,00						-		1.749.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.590.000.000,00						-		1.749.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00							1 Unit	330.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00							1 Unit	1.320.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00							1 Unit	99.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.200.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.320.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	7 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	1.320.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			99.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	99.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	330.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						500.000.000,00						-		550.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						500.000.000,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan		1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	500.000.000,00							1 Orang/Bulan	550.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						500.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			550.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan		1 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang/Bulan	550.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						640.000.000,00						-		704.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						640.000.000,00						-		704.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	640.000.000,00							1 Paket	704.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						640.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			704.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	640.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	704.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00						-		27.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00						-		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	25.000.000,00							-	27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						25.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	Sekretariat Daerah
	X							150.000.000,00								165.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						150.000.000,00								165.000.000,00	
128.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						150.000.000,00								165.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	93 %	150.000.000,00							-	165.000.000,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	150.000.000,00							1 Orang	165.000.000,00	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			165.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	7 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang	165.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Bagian Pemerintahan Setda						426.000.000,00								492.200.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						426.000.000,00								492.200.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						426.000.000,00								492.200.000,00	
129.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						183.000.000,00								220.200.000,00	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah						124.000.000,00								178.700.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96 %		92 %	93 %	124.000.000,00							94 %	178.700.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedinya dokumen Perencanaan OPD						5.000.000,00						-		5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00							2 Dokumen	5.500.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	5.500.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.000.000,00						-		45.500.000,00	
		tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Aparatur						29.000.000,00						-		45.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00							1 Laporan	32.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.000.000,00							1 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00							1 Paket	5.500.000,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	5.500.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.000.000,00			-	-	-			8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	8.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			32.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	32.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00						-		40.000.000,00	
		tersedianya peralatan mesin kantor untu menunjang operasional aparatur pemerintah daerah.						20.000.000,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit		23 Unit	23 Unit	20.000.000,00							23 Unit	40.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			-	-	-			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit		23 Unit	12 Unit	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					23 Unit	40.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						93.000.000,00						-		93.200.000,00	
		terealisasinya kebutuhan administrasi dan oprasional kantor.						93.000.000,00						-		93.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00							1 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00							1 Laporan	3.200.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			-	-	-			3.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	3.200.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						90.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	90.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
			-	-		-	-	36.000.000,00							-	36.000.000,00	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
		-						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	36.000.000,00							-	36.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	-			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
130.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						243.000.000,00								272.000.000,00	
		Meningkatnya capaian program pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat.						243.000.000,00								272.000.000,00	
			1.Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	97 %		93 %	94 %	243.000.000,00							95 %	272.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						228.000.000,00						-		242.000.000,00	
		terlaksananya pengambilan keputusan Pemerintah						228.000.000,00						-		242.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	118.000.000,00							3 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00							3 Dokumen	52.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00							3 Dokumen	90.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						50.000.000,00			-	-	-			52.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	52.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						60.000.000,00			-	-	-			90.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	90.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah						118.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	118.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	100.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
	4.01.02.2.04	Fasilitas Kerja Sama Daerah						15.000.000,00						-		30.000.000,00	
		terlaksannya evektifitas kerjasama dikalangan pemerintah daerah dan daerah lain						15.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00							1 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri						15.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	30.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam						507.000.000,00								620.050.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						507.000.000,00								620.050.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						507.000.000,00								620.050.000,00	
131.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						357.000.000,00								418.700.000,00	
		Meningkatnya tata kelolah pemerintahan						338.600.000,00								387.700.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96 %		92 %	93 %	338.600.000,00							94 %	387.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.400.000,00						-		8.200.000,00	
		Tersedianya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						8.400.000,00						-		8.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.400.000,00							4 Dokumen	8.200.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.400.000,00			-	-	-			8.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	8.200.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.200.000,00						-		5.000.000,00	
		Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah						4.200.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00							1 Laporan	5.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.200.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	5.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.500.000,00						-		17.500.000,00	
		Terlaksanya tata kelola kepegawaian perangkat daerah						16.500.000,00						-		17.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	11 Orang	11.500.000,00							1 Orang	12.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						5.000.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	5.500.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						11.500.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	2 Orang	11.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang	12.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						102.500.000,00						-		105.000.000,00	
		Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah						102.500.000,00						-		105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.900.000,00							2 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00							9 Laporan	51.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.100.000,00							1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.750.000,00							1 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.750.000,00							1 Paket	29.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.750.000,00			-	-	-			29.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.750.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	29.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.100.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	12.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.750.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.750.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	6.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.900.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	7.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00			-	-	-			51.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					9 Laporan	51.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.500.000,00						-		12.000.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah						11.500.000,00						-		12.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	11.500.000,00							1 Unit	12.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						11.500.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		Unit	20 Unit	11.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	12.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.900.000,00						-		235.000.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						177.900.000,00						-		235.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	171.000.000,00							1 Laporan	228.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.900.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.900.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.900.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						171.000.000,00			-	-	-			228.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	171.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	228.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
		Tersedianya dokumen pemeliharaan barang milik daerah						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							1 Unit	36.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36.000.000,00			-	-	-			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	36.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
132.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						150.000.000,00								201.350.000,00	
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah						110.000.000,00								127.450.000,00	
			1.Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	96 %		92 %	93 %	110.000.000,00							94 %	127.450.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						120.000.000,00						-		122.000.000,00	
		Tersedianya dokumen kebijakan perekonomian						120.000.000,00						-		122.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	3 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00							2 Dokumen	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00							3 Dokumen	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan		6 Laporan	7 Laporan	80.000.000,00							8 Laporan	80.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						20.000.000,00			-	-	-			21.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	21.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						80.000.000,00			-	-	-			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	80.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)						20.000.000,00			-	-	-			21.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	21.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						30.000.000,00						-		79.350.000,00	
		Tersedianya laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam						30.000.000,00						-		79.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	26.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	26.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	26.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						10.000.000,00			-	-	-			26.450.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	26.450.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						10.000.000,00			-	-	-			26.450.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	26.450.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						10.000.000,00			-	-	-			26.450.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	26.450.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Bagian Kesejahteraan Rakyat						717.600.000,00								788.760.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						717.600.000,00								788.760.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						717.600.000,00								788.760.000,00	
133.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						574.600.000,00								631.460.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						574.600.000,00								631.460.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	99.99 %		99.99 %	99.99 %	574.600.000,00							99.99 %	631.460.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.500.000,00						-		4.950.000,00	
		Terpenuhinya administrasi tugas ASN						4.500.000,00						-		4.950.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00							1 Laporan	4.950.000,00	
		Terpenuhinya gaji & tunjangan ASN						4.500.000,00						-		4.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00							1 Laporan	4.950.000,00	
		Terpenuhinya Penatausahaan & Verifikasi Keuangan SKPD						4.500.000,00						-		4.950.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00							1 Laporan	4.950.000,00	
		Terpenuhinya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						4.500.000,00						-		4.950.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00							1 Laporan	4.950.000,00	
		Tersusunnya Laporan dalam bentuk Dokumen						4.500.000,00						-		4.950.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00							1 Laporan	4.950.000,00	
		Tersusunnya pelaporan keuangan Semesteran dalam bentuk dokumen						4.500.000,00						-		4.950.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00							1 Laporan	4.950.000,00	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.500.000,00			-	-	-			4.950.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	4.950.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						227.500.000,00						-		249.650.000,00	
		Meningkatnya pengetahuan Aparatur						227.500.000,00						-		249.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00							1 Laporan	166.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.500.000,00							1 Paket	11.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00							1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00							1 Paket	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terciptanya keselarasan dalam kinerja di dalam Daerah & luar Daerah						227.500.000,00						-		249.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00							1 Laporan	166.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.500.000,00							1 Paket	11.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00							1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00							1 Paket	60.000.000,00	
		Terpenuhinya Bahan logistik Kantor						227.500.000,00						-		249.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00							1 Laporan	166.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.500.000,00							1 Paket	11.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00							1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00							1 Paket	60.000.000,00	
		Terpenuhinya Barang cetakan & Penggandaan						227.500.000,00						-		249.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00							1 Laporan	166.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.500.000,00							1 Paket	11.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00							1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00							1 Paket	60.000.000,00	
		Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kantor						227.500.000,00						-		249.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00							1 Laporan	166.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.500.000,00							1 Paket	11.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00							1 Paket	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00							1 Paket	60.000.000,00	
		Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga						227.500.000,00						-		249.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00							1 Laporan	166.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.500.000,00							1 Paket	11.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00							1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00							1 Paket	60.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	60.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.500.000,00			-	-	-			11.550.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	11.550.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.000.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	12.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						151.000.000,00			-	-	-			166.100.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	151.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	166.100.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306.600.000,00						-		337.260.000,00	
		Meningkatnya kinerja aparat adm. Teknis perkantoran						306.600.000,00						-		337.260.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	291.600.000,00							1 Laporan	320.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00							1 Laporan	9.900.000,00	
		Meningkatnya kinerja ASN						306.600.000,00						-		337.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	291.600.000,00							1 Laporan	320.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00							1 Laporan	9.900.000,00	
		Tercapainya jasa surat menyurat						306.600.000,00						-		337.260.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	291.600.000,00							1 Laporan	320.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00							1 Laporan	9.900.000,00	
		Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor						306.600.000,00						-		337.260.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	291.600.000,00							1 Laporan	320.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00							1 Laporan	9.900.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.000.000,00			-	-	-			9.900.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	9.900.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00			-	-	-			6.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.600.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						291.600.000,00			-	-	-			320.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	291.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	320.760.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		39.600.000,00	
		Meningkatnya pekerjaan kantor						36.000.000,00						-		39.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							1 Unit	39.600.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya						36.000.000,00						-		39.600.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							1 Unit	39.600.000,00	
		Terpenuhinya pemeliharaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor lainnya						36.000.000,00						-		39.600.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							1 Unit	39.600.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	-			39.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	39.600.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
134.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						143.000.000,00								157.300.000,00	
		Meningkatnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						143.000.000,00								157.300.000,00	
			1.Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	100 %		95 %	96 %	143.000.000,00							97 %	157.300.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						143.000.000,00						-		157.300.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						143.000.000,00						-		157.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.000.000,00							1 Dokumen	135.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						20.000.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	22.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						123.000.000,00			-	-	-			135.300.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	135.300.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Bagian Hukum						537.320.000,00								670.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						537.320.000,00								670.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						537.320.000,00								670.000.000,00	
135.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						349.000.000,00								407.000.000,00	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan						313.000.000,00								371.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	94 %		90 %	91 %	313.000.000,00							92 %	371.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						208.000.000,00						-		265.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						208.000.000,00						-		265.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.000.000,00							1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.000.000,00							1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00							1 Paket	35.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	35.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	10.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.000.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	19.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	20.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	200.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						105.000.000,00						-		106.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						105.000.000,00						-		106.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.000.000,00							1 Laporan	99.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						99.000.000,00			-	-	-			99.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	99.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	99.000.000,00	Bagian Hukum
			-	-		-	-	36.000.000,00							-	36.000.000,00	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
		-						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	36.000.000,00							-	36.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	-			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
136.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						188.320.000,00								263.000.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						188.320.000,00								263.000.000,00	
			1.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	91.60 Persentase		91.40 Persentase	91.45 Persentase	188.320.000,00							91.50 Persentase	263.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						188.320.000,00						-		263.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						188.320.000,00						-		263.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	50.000.000,00							1 Kasus	60.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00							1 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.320.000,00							1 Dokumen	28.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						120.000.000,00			-	-	-			175.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	175.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						50.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus		1 Kasus	3 Kasus	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Kasus	60.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						18.320.000,00			-	-	-			28.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	18.320.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	28.000.000,00	Bagian Hukum
		Bagian Umum						8.555.017.500,00								8.982.825.074,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.555.017.500,00								8.982.825.074,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.555.017.500,00								8.982.825.074,00	
137.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.555.017.500,00								8.982.825.074,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						8.255.017.500,00								8.667.825.074,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95 %		90 %	92 %	8.255.017.500,00							93 %	8.667.825.074,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.800.000,00						-		48.090.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.800.000,00						-		48.090.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.500.000,00							2 Dokumen	22.575.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	24.300.000,00							3 Dokumen	25.515.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.500.000,00			-	-	-			22.575.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	22.575.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						24.300.000,00			-	-	-			25.515.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	24.300.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	25.515.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						94.377.000,00						-		99.095.850,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai						94.377.000,00						-		99.095.850,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		10 Orang	10 Orang	94.377.000,00							11 Orang	99.095.850,00	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						94.377.000,00			-	-	-			99.095.850,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		10 Orang	7 Orang	94.377.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Orang	99.095.850,00	Bagian Umum
		Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						596.720.500,00						-		626.556.525,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.520.000,00							1 Dokumen	23.646.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00							1 Laporan	315.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00							1 Paket	68.250.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.200.500,00							1 Paket	42.210.525,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	45.000.000,00							1 Paket	47.250.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00							1 Paket	105.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						45.000.000,00			-	-	-			47.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	45.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	47.250.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-	-			105.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	105.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						65.000.000,00			-	-	-			68.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	68.250.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.200.500,00			-	-	-			42.210.525,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.200.500,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	42.210.525,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-	-			315.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	315.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						22.520.000,00			-	-	-			23.646.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.520.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	23.646.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						576.020.000,00						-		604.821.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Brang Milik Daerah						576.020.000,00						-		604.821.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00							1 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	376.020.000,00							2 Unit	394.821.000,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						376.020.000,00			-	-	-			394.821.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	376.020.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	394.821.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000,00			-	-	-			210.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	200.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	210.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						877.539.000,00						-		921.472.650,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						877.539.000,00						-		921.472.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00							2 Laporan	315.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	546.800.000,00							1 Laporan	574.140.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.739.000,00							1 Laporan	32.332.650,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.739.000,00			-	-	-			32.332.650,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.739.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	32.332.650,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300.000.000,00			-	-	-			315.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	315.000.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						546.800.000,00			-	-	-			574.140.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	546.800.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	574.140.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						288.900.000,00						-		303.345.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						288.900.000,00						-		303.345.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.900.000,00							3 Unit	210.945.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	88.000.000,00							1 Unit	92.400.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						88.000.000,00			-	-	-			92.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	88.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	92.400.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.900.000,00			-	-	-			210.945.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	200.900.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	210.945.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.239.333.433,00						-		3.401.300.104,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.239.333.433,00						-		3.401.300.104,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.619.666.700,00							-	1.700.650.035,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.619.666.733,00							1 Paket	1.700.650.069,00	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.619.666.733,00			-	-	-			1.700.650.069,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.619.666.733,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	1.700.650.069,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.619.666.700,00			-	-	-			1.700.650.035,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	24 Orang/Bulan	1.619.666.700,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.700.650.035,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						2.836.327.567,00						-		2.978.143.945,00	
		Tersedianya Kebutuhan dan Fasilitas Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.836.327.567,00						-		2.978.143.945,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.309.833.367,00							1 Paket	1.375.325.035,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.526.494.200,00							1 Paket	1.602.818.910,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.309.833.367,00			-	-	-			1.375.325.035,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.309.833.367,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	1.375.325.035,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.526.494.200,00			-	-	-			1.602.818.910,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.526.494.200,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	1.602.818.910,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						596.720.500,00						-		626.556.525,00	
		Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						596.720.500,00						-		626.556.525,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00							-	25.200.000,00	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.000.000,00			-	-	-			25.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	24.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.200.000,00	Bagian Umum
		Bagian Organisasi						435.000.000,00								478.500.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						435.000.000,00								478.500.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						435.000.000,00								478.500.000,00	
138.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						435.000.000,00								478.500.000,00	
		Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						435.000.000,00								478.500.000,00	
			1.Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	Nilai	435.000.000,00							Nilai	478.500.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.756.000,00						-		6.331.600,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.756.000,00						-		6.331.600,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.756.000,00							1 Dokumen	6.331.600,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.756.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			6.331.600,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.756.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	6.331.600,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.770.000,00						-		8.547.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.770.000,00						-		8.547.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.770.000,00							1 Laporan	8.547.000,00	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.770.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			8.547.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.770.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	8.547.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						149.155.000,00						-		164.070.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						149.155.000,00						-		164.070.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.629.000,00							1 Laporan	137.091.900,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.000.000,00							1 Paket	4.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.750.000,00							1 Paket	4.125.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.776.000,00							1 Paket	18.453.600,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.776.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			18.453.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.776.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	18.453.600,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			4.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	4.400.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.750.000,00			-	-	PP4. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Inklusi;			4.125.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.750.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	4.125.000,00	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						124.629.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			137.091.900,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.629.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	137.091.900,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.000.000,00						-		24.200.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.000.000,00						-		24.200.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	22.000.000,00							2 Unit	24.200.000,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			24.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	22.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	24.200.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.125.000,00						-		120.037.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.125.000,00						-		120.037.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.000.000,00							1 Laporan	108.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.125.000,00							1 Laporan	4.537.500,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.125.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			4.537.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.125.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	4.537.500,00	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			6.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.600.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						99.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			108.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	108.900.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		39.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		39.600.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							1 Unit	39.600.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			39.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	39.600.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						105.194.000,00						-		115.713.400,00	
		Terlaksananya Penataan Organisasi						105.194.000,00						-		115.713.400,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.194.000,00							2 Dokumen	27.713.400,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.870.000,00							1 Dokumen	22.957.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44 Dokumen		44 Dokumen	44 Dokumen	21.840.000,00							44 Dokumen	24.024.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.920.000,00							2 Dokumen	23.012.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.370.000,00							1 Laporan	18.007.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						21.840.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			24.024.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44 Dokumen		44 Dokumen	44 Dokumen	21.840.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					44 Dokumen	24.024.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						16.370.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			18.007.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.370.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	18.007.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						20.920.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			23.012.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.920.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	23.012.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						20.870.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			22.957.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.870.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	22.957.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						25.194.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			27.713.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	25.194.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	27.713.400,00	Bagian Organisasi
		Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler						439.800.000,00								439.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						439.800.000,00								439.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						439.800.000,00								439.000.000,00	
139.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						439.800.000,00								439.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah						426.800.000,00								426.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %		94 %	95 %	426.800.000,00							96 %	426.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00						-		4.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perecanaan Perangkat Daerah(Penyusunan Renstra, Renja. dan Laporan Keuangan						4.000.000,00						-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00							4 Dokumen	4.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	4.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						118.500.000,00						-		118.500.000,00	
		Tersediannya alat tulis kantor,barang cetakan dan penggandaan, makan dan minum serta terlaksananya penyelenggaraan rapat kordinasi dan Konsultasi						118.500.000,00						-		118.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	89.000.000,00							100 Laporan	89.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00							1 Paket	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.500.000,00							1 Paket	5.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.000.000,00							1 Paket	13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			13.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	13.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	13.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	11.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	11.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	5.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	5.500.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			89.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	0 Laporan	89.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Laporan	89.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102.300.000,00						-		101.500.000,00	
		Meningkatnya Peningkatan Jasa Komunikasi Fiximile dan Astinet						102.300.000,00						-		101.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00							1 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	73.800.000,00							100 Laporan	73.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00							1 Laporan	4.500.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.500.000,00			-	-	-			4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	4.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	4.500.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	24.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	24.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						73.800.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			73.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	0 Laporan	73.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Laporan	73.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
		Lancarnya Pelayanan kendaraan dinas operasional						36.000.000,00						-		36.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							Unit	36.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	0 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Unit	36.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						179.000.000,00						-		179.000.000,00	
		Pelayanan Jasa Dokumentasi Pimpinan						179.000.000,00						-		179.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	166.000.000,00							100 Laporan	166.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	13.000.000,00							100 Laporan	13.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						166.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			166.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100 Laporan		100 Laporan	0 Laporan	166.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Laporan	166.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						13.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			13.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Laporan		100 Laporan	0 Laporan	13.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Laporan	13.000.000,00	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
		Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa						453.000.000,00								732.900.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						453.000.000,00								732.900.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						453.000.000,00								732.900.000,00	
140.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						301.066.000,00								432.900.000,00	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan						253.066.000,00								377.900.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96 %		92 %	93 %	253.066.000,00							94 %	377.900.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00						-		13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	3.500.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	3.500.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.000.000,00						-		8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.000.000,00						-		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00							1 Laporan	8.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	8.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.041.000,00						-		100.000.000,00	
		Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah						55.041.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		7 Orang	7 Orang	55.041.000,00							8 Orang	100.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						55.041.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		7 Orang	10 Orang	55.041.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Orang	100.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.525.000,00						-		115.400.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.525.000,00						-		115.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.700.000,00							1 Laporan	70.700.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.325.000,00							1 Paket	22.700.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00							1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000,00							1 Paket	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	10.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	2.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	10.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.325.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			22.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.325.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	22.700.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	10.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.700.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			70.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	40.700.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	70.700.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.000.000,00						-		156.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.000.000,00						-		156.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	117.000.000,00							1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00							1 Laporan	6.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	30.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						117.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	117.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	120.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			-	-		-	-	36.000.000,00							-	40.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00						-		13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00						-		13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.500.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.500.000,00							-	5.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		40.000.000,00	
		-						36.000.000,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	36.000.000,00							-	40.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
141.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						151.934.000,00								300.000.000,00	
		Meningkatnya Proses Pengelolaan Barang dan Jasa						151.934.000,00								300.000.000,00	
			1.Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	34.68 Nilai		28.53 Nilai	29.95 Nilai	151.934.000,00							31.45 Nilai	300.000.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						151.934.000,00						-		300.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pengelolaan Barang dan Jasa						151.934.000,00						-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.934.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00							1 Dokumen	200.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						100.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			200.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	200.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						51.934.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			100.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.934.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	100.000.000,00	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Bagian Administrasi Pembangunan						460.200.000,00								601.600.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						460.200.000,00								601.600.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						460.200.000,00								601.600.000,00	
142.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						230.615.000,00								326.000.000,00	
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan						230.615.000,00								326.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	98 %		92 %	94 %	230.615.000,00							96 %	326.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.415.000,00						-		107.400.000,00	
		Terlaksananya Urusan Kebutuhan Umum Kantor						64.415.000,00						-		107.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.415.000,00							1 Laporan	99.900.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00							1 Paket	4.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.000.000,00							1 Paket	2.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00							1 Paket	800.000,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00			-	-	-			800.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	800.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00			-	-	-			4.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	4.500.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00			-	-	-			2.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	2.200.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.415.000,00			-	-	-			99.900.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.415.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	99.900.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130.200.000,00						-		173.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Kantor						130.200.000,00						-		173.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00							12 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.200.000,00							1 Laporan	165.600.000,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00			-	-	-			8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	8.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.200.000,00			-	-	-			165.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	165.600.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.000.000,00						-		45.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						36.000.000,00						-		45.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							1 Unit	45.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	-			45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	45.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
143.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						229.585.000,00								275.600.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan Daerah						229.585.000,00								275.600.000,00	
			1.Persentase Peningkatan Evaluasi Pengawasan, Pengendalian Program dan Percepatan Penyerapan APBD	95 %		91 %	92 %	229.585.000,00							93 %	275.600.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						229.585.000,00						-		275.600.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						229.585.000,00						-		275.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.400.000,00							1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	127.185.000,00							1 Laporan	165.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	79.000.000,00							2 Laporan	85.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						23.400.000,00			-	-	-			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	23.400.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	25.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						79.000.000,00			-	-	-			85.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	85.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						127.185.000,00			-	-	-			165.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	127.185.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	165.600.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
		Sekretariat DPRD						24.777.238.000,00								0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						24.777.238.000,00								0,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						24.777.238.000,00								0,00	
144.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.577.536.000,00								0,00	
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan						17.506.336.000,00								0,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	95.00 %		91.00 %	92.00 %	17.506.336.000,00							93.00 %	0,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						56.700.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah						56.700.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.450.000,00							1 Laporan	0,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.275.718.000,00						-		0,00	
		Tersediannya gaji aparatus Sipil Negara						3.275.718.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.450.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	3.266.268.000,00							1 Orang/bulan	0,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.266.268.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	52 Orang/bulan	3.266.268.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang/bulan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.732.544.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah						2.732.544.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	439.528.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.830.450.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	67.008.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.840.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	307.838.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.880.000,00							1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.840.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.840.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						307.838.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	307.838.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						27.880.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.880.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.830.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.830.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						67.008.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	67.008.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						439.528.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	439.528.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						57.512.000,00						-		0,00	
		Terlaksannya Pengadaan Barang Mikik Daerah						57.512.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.012.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.500.000,00							1 Unit	0,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						43.012.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	43.012.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.500.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	15 Unit	14.500.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.300.000,00						-		0,00	
		terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana						579.300.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12 Laporan	Laporan	222.000.000,00							Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	340.800.000,00							11 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00							12 Laporan	0,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.500.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						222.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12 Laporan	1 Laporan	222.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					Laporan	0,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						340.800.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	340.800.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97.500.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97.500.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	83.000.000,00							12 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	14.500.000,00							12 Unit	0,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						83.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	2 Unit	83.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.500.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	2 Unit	14.500.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						10.557.582.000,00						-		0,00	
		terlaksananya Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						10.557.582.000,00						-		0,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	10.067.520.000,00							12 Orang/Bulan	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang		20 Orang	20 Orang	319.062.000,00							20 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	171.000.000,00							5 Paket	0,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						10.067.520.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan		12 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	10.067.520.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang/Bulan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						171.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	171.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						319.062.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang		20 Orang	20 Orang	319.062.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Orang	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						220.680.000,00						-		0,00	
		terlaksananya Layanan Administrasi DPRD						220.680.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.300.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	44.380.000,00							12 Paket	0,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						176.300.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	176.300.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						44.380.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	44.380.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	0,00	Sekretariat DPRD
145.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						7.199.702.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kualiatas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						7.105.202.000,00								0,00	
			1.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	75.00 Persentase		71.00 Persentase	72.00 Persentase	7.105.202.000,00							73.00 Persentase	0,00	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						47.250.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan						47.250.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						9.450.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Memastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Efektif dan Efesien						9.450.000,00						-		0,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						905.640.000,00						-		0,00	
		Meningkatnya Pemahaman Anggota DPRD dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi						905.640.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	424.440.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	56.700.000,00							5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	9.450.000,00							5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	405.600.000,00							8 Orang	0,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						424.440.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	424.440.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						405.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	15 Orang	405.600.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Orang	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						56.700.000,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	56.700.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						4.137.000.000,00						-		0,00	
		terlaksananya kegiatan pokok-pokok pikiran dan aspirasi						4.137.000.000,00						-		0,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	3.132.000.000,00							60 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	9.450.000,00							20 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	995.550.000,00							6 Laporan	0,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						995.550.000,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	995.550.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	20 Dokumen		20 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						3.132.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	3.132.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.100.362.000,00						-		0,00	
		terlaksananya hasil kerja sekretariat DPRD yang berfokus pada dukungan kerja-kerja DPRD						2.100.362.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.450.000,00							2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.450.000,00							4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.081.462.000,00							4 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						2.081.462.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	2.081.462.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus						9.450.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	0,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						6.345.232.000,00								2.604.840.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.345.232.000,00								2.604.840.000,00	
	5.01	PERENCANAAN						6.195.232.000,00								2.447.340.000,00	
146.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.266.540.200,00								1.472.213.610,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah						5.200.857.000,00								1.403.246.250,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	86 %		82 %	83 %	5.200.857.000,00							84 %	1.403.246.250,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						197.806.000,00						-		207.696.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						197.806.000,00						-		207.696.300,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	65.683.200,00							2 Dokumen	68.967.360,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	66.439.600,00							1 Laporan	69.761.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						65.683.200,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			68.967.360,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	65.683.200,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	68.967.360,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						66.439.600,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			69.761.580,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	66.439.600,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	69.761.580,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.876.647.000,00						-		12.825.750,00	
		Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.876.647.000,00						-		12.825.750,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.215.000,00							Laporan	12.825.750,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		42 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3.864.432.000,00							44 Orang/bulan	0,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.864.432.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.864.432.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					44 Orang/bulan	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12.215.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			12.825.750,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.215.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					Laporan	12.825.750,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						766.935.200,00						-		805.281.960,00	
		Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						766.935.200,00						-		805.281.960,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	547.887.700,00							100 Laporan	575.282.085,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	33.200.000,00							1 Paket	34.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	82.257.500,00							1 Paket	86.370.375,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.814.000,00							1 Paket	6.104.700,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	97.776.000,00							1 Paket	102.664.800,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.814.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.104.700,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.814.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	6.104.700,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						97.776.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			102.664.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	97.776.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	102.664.800,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.200.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			34.860.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	33.200.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	34.860.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						82.257.500,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			86.370.375,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	82.257.500,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	86.370.375,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						547.887.700,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			575.282.085,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	547.887.700,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Laporan	575.282.085,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.772.000,00						-		26.010.600,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan						24.772.000,00						-		26.010.600,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		13 Unit	10 Unit	24.772.000,00							10 Unit	26.010.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.772.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			26.010.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		13 Unit	10 Unit	24.772.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	26.010.600,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323.200.000,00						-		339.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						323.200.000,00						-		339.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	33.600.000,00							4 Laporan	35.280.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	280.800.000,00							12 Laporan	294.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00							1 Laporan	9.240.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.800.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			9.240.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	9.240.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33.600.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			35.280.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	35.280.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						280.800.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			294.840.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	45 Orang/ Laporan	280.800.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	294.840.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.180.000,00						-		81.039.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						77.180.000,00						-		81.039.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	77.180.000,00							6 Unit	81.039.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						77.180.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			81.039.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	5 Unit	77.180.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	81.039.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						197.806.000,00						-		207.696.300,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	65.683.200,00							-	68.967.360,00	
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						65.683.200,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			68.967.360,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	65.683.200,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	68.967.360,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
147.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						593.567.200,00								623.245.560,00	
		Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan						593.567.200,00								623.245.560,00	
			1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	95 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	593.567.200,00							93 Persentase	623.245.560,00	
			2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	95 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	593.567.200,00							93 Persentase	623.245.560,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						233.070.600,00						-		244.724.130,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah						233.070.600,00						-		244.724.130,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	52.058.900,00							1 Berita Acara	54.661.845,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	104.743.400,00							1 Berita Acara	109.980.570,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R KPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.268.300,00							1 Dokumen	80.081.715,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						52.058.900,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			54.661.845,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	52.058.900,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Berita Acara	54.661.845,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						104.743.400,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			109.980.570,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	104.743.400,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Berita Acara	109.980.570,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						76.268.300,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			80.081.715,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R KPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.268.300,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	80.081.715,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						75.541.100,00						-		79.318.155,00	
		Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						75.541.100,00						-		79.318.155,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	15 Orang		Orang	15 Orang	75.541.100,00							15 Orang	79.318.155,00	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						75.541.100,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			79.318.155,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	15 Orang		Orang	45 OPD/ Orang	75.541.100,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Orang	79.318.155,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						184.756.700,00						-		193.994.535,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						184.756.700,00						-		193.994.535,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	99.417.400,00							6 Laporan	104.388.270,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	85.339.300,00							2 Laporan	89.606.265,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						85.339.300,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			89.606.265,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	85.339.300,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	89.606.265,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						99.417.400,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			104.388.270,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	99.417.400,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	104.388.270,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						100.198.800,00						-		105.208.740,00	
		Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						100.198.800,00						-		105.208.740,00	
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	100.198.800,00							45 Dokumen	105.208.740,00	
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						100.198.800,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			105.208.740,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	45 Dokumen		45 Dokumen	1 Dokumen	100.198.800,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Dokumen	105.208.740,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
148.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						335.124.600,00								351.880.830,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Sosial dan Budaya						335.124.600,00								351.880.830,00	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	335.124.600,00							93 Persentase	351.880.830,00	
			2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	335.124.600,00							93 Persentase	351.880.830,00	
			3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	95 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	335.124.600,00							93 Persentase	351.880.830,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						80.225.800,00						-		84.237.090,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						80.225.800,00						-		84.237.090,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	80.225.800,00							9 Laporan	84.237.090,00	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						80.225.800,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			84.237.090,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	80.225.800,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					9 Laporan	84.237.090,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						254.898.800,00						-		267.643.740,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						254.898.800,00						-		267.643.740,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	151.101.500,00							7 Dokumen	158.656.575,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	103.797.300,00							3 Laporan	108.987.165,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						151.101.500,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			158.656.575,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	151.101.500,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Dokumen	158.656.575,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						103.797.300,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			108.987.165,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	103.797.300,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	108.987.165,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						150.000.000,00								157.500.000,00	
149.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						150.000.000,00								157.500.000,00	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah						150.000.000,00								157.500.000,00	
			1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	85 Persentase		81 Persentase	82 Persentase	150.000.000,00							83 Persentase	157.500.000,00	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						150.000.000,00						-		157.500.000,00	
		Terlaksananya Inovasi dan Teknologi						150.000.000,00						-		157.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	157.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						150.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			157.500.000,00	
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Labuang 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	157.500.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						31.760.946.020,00								33.150.432.723,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						31.760.946.020,00								33.150.432.723,00	
	5.02	KEUANGAN						31.760.946.020,00								33.150.432.723,00	
150.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						29.535.946.020,00								30.293.792.517,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi SKPD						29.210.946.020,00								30.029.827.267,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	97 %		93 %	94 %	29.210.946.020,00							95 %	30.029.827.267,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.000.000,00						-		253.803.363,00	
		Tersedianya Dokumen perencanaan SKPD						170.000.000,00						-		253.803.363,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	65.000.000,00							4 Dokumen	136.427.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00							1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00							1 Laporan	62.375.863,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			136.427.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	136.427.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						55.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			62.375.863,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	62.375.863,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.867.346.020,00						-		28.018.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	27.850.000.000,00							58 Orang/bulan	28.000.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						27.850.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			28.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		58 Orang/bulan	14 BLN Orang/bulan	27.850.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					58 Orang/bulan	28.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						960.000.000,00						-		999.134.954,00	
		Meningkatnya Penataan Administrasi Umum SKPD						960.000.000,00						-		999.134.954,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00							4 Dokumen	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00							4 Laporan	563.750.226,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00							12 Paket	112.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00							12 Paket	77.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100.000.000,00							12 Paket	88.134.728,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			88.134.728,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	88.134.728,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			112.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	112.750.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			77.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	77.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						450.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			563.750.226,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	563.750.226,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						60.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			102.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	102.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00						-		208.965.250,00	
		Meningkatnya kelancaran pekerjaan SKPD						30.000.000,00						-		208.965.250,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	30.000.000,00							2 Unit	153.965.250,00	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			153.965.250,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	153.965.250,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						413.600.000,00						-		554.348.700,00	
		Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi Perkantoran						413.600.000,00						-		554.348.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00							12 Laporan	78.646.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	363.600.000,00							12 Laporan	372.690.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00							12 Laporan	103.012.500,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			103.012.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	103.012.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			78.646.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	78.646.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						363.600.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			372.690.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	363.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	372.690.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.000.000,00						-		259.540.250,00	
		Meningkatnya kelancaran operasional kantor						95.000.000,00						-		259.540.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	65.000.000,00							12 Unit	105.575.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			105.575.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	1 Unit	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	105.575.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.867.346.020,00						-		28.018.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.867.346.020,00						-		28.018.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	17.346.020,00							-	18.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						17.346.020,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			18.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	17.346.020,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya Penataan Administrasi Umum SKPD						960.000.000,00						-		999.134.954,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			55.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya kelancaran pekerjaan SKPD						30.000.000,00						-		208.965.250,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	55.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			55.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 PAKET Unit	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya kelancaran operasional kantor						95.000.000,00						-		259.540.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	30.000.000,00							-	153.965.250,00	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			153.965.250,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	153.965.250,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
151.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						1.870.000.000,00								2.420.807.181,00	
		Meningkatnya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						760.000.000,00								2.079.807.181,00	
			1.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	98 Indeks		94 Indeks	95 Indeks	760.000.000,00							96 Indeks	2.079.807.181,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.000.000.000,00						-		1.339.184.788,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersediannya Dokument APBD dan APBDP						1.000.000.000,00						-		1.339.184.788,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	70.000.000,00							22 Dokumen	77.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	65.000.000,00							22 Dokumen	99.809.888,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00							1 Dokumen	496.953.825,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	65.000.000,00							45 Dokumen	83.342.750,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	75.000.000,00							22 Dokumen	142.078.325,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	70.000.000,00							22 Dokumen	77.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	70.000.000,00							45 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	70.000.000,00							45 Dokumen	77.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	65.000.000,00							45 Dokumen	121.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			77.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	22 Dokumen		22 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Dokumen	77.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			99.809.888,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	22 Dokumen		22 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Dokumen	99.809.888,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			121.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Dokumen	121.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			77.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Dokumen	77.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			83.342.750,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Dokumen	83.342.750,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			110.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen		45 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Dokumen	110.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						75.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			142.078.325,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	22 Dokumen		22 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Dokumen	142.078.325,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			77.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	22 Dokumen		22 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Dokumen	77.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						400.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			496.953.825,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	496.953.825,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daera						395.000.000,00						-		579.166.193,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00							1 Dokumen	78.002.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00							2 Dokumen	188.974.843,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00							2 Dokumen	88.035.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00							2 Dokumen	92.153.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00							2 Laporan	66.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						75.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			78.002.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	78.002.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			88.035.200,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	88.035.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			188.974.843,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	188.974.843,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						60.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	66.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			92.153.650,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	92.153.650,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						435.000.000,00						-		439.931.200,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						435.000.000,00						-		439.931.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00							1 Dokumen	49.958.500,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	60.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00							2 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00							1 Laporan	66.756.200,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	70.000.000,00							45 Laporan	89.763.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00							1 Dokumen	51.953.150,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			49.958.500,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	49.958.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			89.763.350,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	45 Laporan		45 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Laporan	89.763.350,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			66.756.200,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	66.756.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			51.953.150,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	51.953.150,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			60.500.000,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	60.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						40.000.000,00						-		62.525.000,00	
		Tersedianya Data dan Implementasi Sistem Informasi di Lingkup Keuangan Daerah						40.000.000,00						-		62.525.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16 Orang		16 Orang	16 Orang	40.000.000,00							16 Orang	62.525.000,00	
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			62.525.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16 Orang		16 Orang	45 Orang	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Orang	62.525.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			-	-		-	-	0,00							-	0,00	
		Tersediannya Dokument APBD dan APBDP						1.000.000.000,00						-		1.339.184.788,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						395.000.000,00						-		579.166.193,00	
		Meningkatnya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daera						395.000.000,00						-		579.166.193,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	-	50.000.000,00							-	66.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			66.000.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						435.000.000,00						-		439.931.200,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		-	-	60.000.000,00							-	66.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						60.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	-	0,00							-	0,00	
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						0,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						0,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						0,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
152.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						355.000.000,00								435.833.025,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya dokumen barang milik daerah, dan kartu inventarisasi barang milik daerah						290.000.000,00								435.833.025,00	
			1.Persentase Penurunan Masalah Penilaian dan Pengakuan Aset	96 Persentase		92 Persentase	93 Persentase	290.000.000,00							94 Persentase	435.833.025,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						355.000.000,00						-		435.833.025,00	
		Tersedianya Dokumen dan Barang Milik Daerah						355.000.000,00						-		435.833.025,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00							1 Dokumen	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00							1 Laporan	100.933.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00							1 Laporan	47.156.150,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00							1 Dokumen	128.743.075,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						80.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			128.743.075,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	128.743.075,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						75.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			100.933.800,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	100.933.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			88.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	88.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						65.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			47.156.150,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	47.156.150,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tersedianya Dokumen dan Barang Milik Daerah						355.000.000,00						-		435.833.025,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	70.000.000,00							-	71.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			71.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	71.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah						3.355.673.000,00								4.025.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.355.673.000,00								4.025.000,00	
	5.02	KEUANGAN						3.355.673.000,00								4.025.000,00	
153.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.716.838.000,00								2.875.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi SKPD						2.690.838.000,00								2.875.000,00	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	88 Indeks		83 Indeks	84 Indeks	2.690.838.000,00							85 Indeks	2.875.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00						-		2.875.000,00	
		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00						-		2.875.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.500.000,00							-	2.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			2.875.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.875.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.959.073.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.959.073.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.957.073.000,00							-	0,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.957.073.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	12 Orang/bulan	1.957.073.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						54.450.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Meningkatnya Tata Kelola Administrasi SKPD						54.450.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	54.450.000,00							-	0,00	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						54.450.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Orang	54.450.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						221.789.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						221.789.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	7.789.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	54.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00							-	0,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						54.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.789.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	7.789.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.426.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.426.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	45.426.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Unit	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.426.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	45.426.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335.600.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335.600.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	27.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	300.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	8.000.000,00							-	0,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	27.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						300.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	300.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	48.000.000,00							-	0,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
154.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						1.000.000,00								1.150.000,00	
			-	-		-	-	1.000.000,00							-	1.150.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.000.000,00						-		1.150.000,00	
		-						1.000.000,00						-		1.150.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	1.000.000,00							-	1.150.000,00	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						1.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.150.000,00	Badan Pendapatan Daerah
155.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						637.835.000,00								0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan pendapatan Daerah						487.835.000,00								0,00	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	3.09 Persentase		3.04 Persentase	3.05 Persentase	487.835.000,00							3.07 Persentase	0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						637.835.000,00						-		0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah						637.835.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	112.000.000,00							6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00							6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	70.000.000,00							6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	58.000.000,00							20 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	55.000.000,00							80 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	75.000.000,00							80 Laporan	0,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	80 Layanan		80 Layanan	80 Layanan	75.000.000,00							80 Layanan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit		6 Unit	6 Unit	117.835.000,00							6 Unit	0,00	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						75.000.000,00			-	-	PP5, Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	80 Laporan		80 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					80 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						117.835.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit		6 Unit	1 Unit	117.835.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						58.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	20 Laporan		20 Laporan	1 Laporan	58.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-					20 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						55.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80 Laporan		80 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					80 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						75.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						75.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	80 Layanan		80 Layanan	1 Layanan	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					80 Layanan	0,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						112.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	112.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						70.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia						4.648.444.000,00								0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.648.444.000,00								0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						3.627.744.000,00								0,00	
156.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.540.744.000,00								0,00	
		Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan						2.540.744.000,00								0,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	97 %		92 %	93 %	2.540.744.000,00							94 %	0,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.973.844.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.973.844.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	1.973.844.000,00							37 Orang/bulan	0,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.973.844.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	28 Orang/bulan	1.973.844.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					37 Orang/bulan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						290.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						290.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	200.000.000,00							150 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70.000.000,00							1 Paket	0,00	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	24 Laporan	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					150 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.900.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.900.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00							1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.500.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.800.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						48.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	48.000.000,00							10 Unit	0,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.900.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	201.600.000,00							-	0,00	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						201.600.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	201.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
157.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.087.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintah Daerah						587.000.000,00								0,00	
			1.Persentase Pemenuhan Sub Indikator Pengelolaan Manajemen ASN	79 Persentase		75 Persentase	76 Persentase	587.000.000,00							77 Persentase	0,00	
			2.Persentase ASN yang berkinerja minimal Baik	80 Persentase		72 Persentase	74 Persentase	587.000.000,00							75 Persentase	0,00	
			3.Persentase ASN yang berpendidikan Minimal D3	90 Persentase		85 Persentase	86 Persentase	587.000.000,00							87 Persentase	0,00	
			4.Persentase ASN yang disiplin	90 Persentase		84 Persentase	85 Persentase	587.000.000,00							86 Persentase	0,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						87.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						87.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	62.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						62.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	62.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						25.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						500.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN						500.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00							1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						500.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						500.000.000,00						-		0,00	
		Meningkatnya Kompetensi ASN						500.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	15 Orang		5 Orang	7 Orang	500.000.000,00							10 Orang	0,00	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						500.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	15 Orang		5 Orang	50 Orang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					10 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.020.700.000,00								0,00	
158.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.020.700.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatus Sipil Negara						615.000.000,00								0,00	
			1.Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang		10 Orang	12 Orang	615.000.000,00							14 Orang	0,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						615.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN						615.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang		30 Orang	30 Orang	615.000.000,00							30 Orang	0,00	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						615.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang		30 Orang	30 Orang	615.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					30 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			-	-		-	-	405.700.000,00							-	0,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						405.700.000,00						-		0,00	
		-						405.700.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-		-	-	405.700.000,00							-	0,00	
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						405.700.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-		-	4 Dokumen	405.700.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat Daerah						4.353.540.080,00								4.628.529.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						4.353.540.080,00								4.628.529.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						4.353.540.080,00								4.628.529.000,00	
159.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.202.643.000,00								3.228.529.000,00	
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan						3.202.643.000,00								3.222.529.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	98 %		92 %	94 %	3.202.643.000,00							96 %	3.222.529.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.600.000,00						-		60.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD						54.600.000,00						-		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	54.600.000,00							4 Dokumen	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						54.600.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	54.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	60.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.458.629.000,00						-		2.460.429.000,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.458.629.000,00						-		2.460.429.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.454.429.000,00							12 Orang/bulan	2.454.429.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.454.429.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			2.454.429.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.454.429.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang/bulan	2.454.429.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.314.000,00						-		200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.314.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang		22 Orang	24 Orang	200.314.000,00							24 Orang	200.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						200.314.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang		22 Orang	18 Orang	200.314.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Orang	200.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						301.000.000,00						-		316.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan, Sarana dan Prasarana Administrasi Kantor						301.000.000,00						-		316.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00							12 Laporan	260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.000.000,00							12 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00							12 Paket	50.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	50.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	6.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	260.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.500.000,00						-		35.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur						32.500.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	4 Unit	32.500.000,00							4 Unit	35.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						32.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	4 Unit	32.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	35.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154.100.000,00						-		155.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154.100.000,00						-		155.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00							12 Laporan	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	129.600.000,00							12 Laporan	129.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00							12 Laporan	9.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	9.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			17.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	17.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						129.600.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			129.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	129.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	129.600.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.500.000,00						-		1.500.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.500.000,00						-		1.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	1.500.000,00							12 Unit	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	1.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	1.500.000,00	Inspektorat Daerah
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.458.629.000,00						-		2.460.429.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	4.200.000,00							-	6.000.000,00	
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.200.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	4.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Inspektorat Daerah
160.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						698.897.080,00								820.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						698.897.080,00								720.000.000,00	
			1.Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)	66 Nilai		62 Nilai	63 Nilai	698.897.080,00							64 Nilai	720.000.000,00	
			2.Peningkatan Kebabilitasn Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	66 Nilai		62 Nilai	63 Nilai	698.897.080,00							64 Nilai	720.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						411.672.480,00						-		510.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal						411.672.480,00						-		510.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	81 Laporan		81 Laporan	81 Laporan	128.172.480,00							81 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00							12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00							1 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	73.500.000,00							6 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						170.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			180.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	45 Laporan	170.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	180.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						73.500.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			100.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	73.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						40.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			80.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	80.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						128.172.480,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	81 Laporan		81 Laporan	81 Laporan	128.172.480,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					81 Laporan	150.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						287.224.600,00						-		310.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						287.224.600,00						-		310.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00							12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	197.224.600,00							12 Laporan	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						197.224.600,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			210.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan		12 Laporan	45 Laporan	197.224.600,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	210.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						90.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat Daerah
161.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						452.000.000,00								580.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						452.000.000,00								580.000.000,00	
			1.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	66 Nilai		62 Nilai	63 Nilai	452.000.000,00							64 Nilai	580.000.000,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						452.000.000,00						-		580.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						452.000.000,00						-		580.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	450 Kegiatan		450 Kegiatan	450 Kegiatan	110.000.000,00							450 Kegiatan	200.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 perangkat daerah		45 perangkat daerah	45 perangkat daerah	10.000.000,00							45 perangkat daerah	20.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3 perangkat daerah		3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	45.000.000,00							3 perangkat daerah	50.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah		12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	287.000.000,00							12 perangkat daerah	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						287.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			310.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah		12 perangkat daerah	45 perangkat daerah	287.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 perangkat daerah	310.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						45.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3 perangkat daerah		3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 perangkat daerah	50.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						110.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	450 Kegiatan		450 Kegiatan	3 Kegiatan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					450 Kegiatan	200.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 perangkat daerah		45 perangkat daerah	65 perangkat daerah	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 perangkat daerah	20.000.000,00	Inspektorat Daerah
		Kecamatan Namrole						1.636.771.000,00								1.588.771.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.636.771.000,00								1.588.771.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.636.771.000,00								1.588.771.000,00	
162.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.586.771.000,00								1.538.771.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		meningkatnya tata kelola pemerintahan						1.570.771.000,00								1.522.771.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96 %		92 %	93 %	1.570.771.000,00							94 %	1.522.771.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.000.000,00						-		11.000.000,00	
		terwujudnya tata kelola pemerintahan						11.000.000,00						-		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.268.571.000,00						-		1.268.571.000,00	
		terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik						1.268.571.000,00						-		1.268.571.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	1.262.571.000,00							26 Orang/bulan	1.262.571.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.262.571.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			1.262.571.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.262.571.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					26 Orang/bulan	1.262.571.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.000.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						152.000.000,00						-		152.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						152.000.000,00						-		152.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00							1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00							1 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00							1 Paket	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Namrole

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.000.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						120.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.200.000,00						-		107.200.000,00	
		Tersedianya Kelancaran Pemerintahan						107.200.000,00						-		107.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00							12 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	88.200.000,00							1 Laporan	88.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26 Laporan		18 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00							22 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26 Laporan		18 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Namrole

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			14.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	14.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	14.000.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						88.200.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			88.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	88.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	88.200.000,00	Kecamatan Namrole
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Tata Kelola Pemerintahan yang baik						48.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.000.000,00							1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	0 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Kecamatan Namrole
163.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						50.000.000,00								50.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00								50.000.000,00	
			1.Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	102 Angka		102 Angka	102 Angka	50.000.000,00							102 Angka	50.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						50.000.000,00						-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Desa Pada Wilayah Kecamatan						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	82 Dokumen		75 Dokumen	77 Dokumen	50.000.000,00							79 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						50.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	82 Dokumen		75 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Namrole
		Kecamatan Leksula						2.831.204.900,00								3.193.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.831.204.900,00								3.193.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.831.204.900,00								3.193.400.000,00	
164.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.744.170.000,00								3.055.400.000,00	
		Meningkatnya Tata kelolah Pemerintahan.						2.744.170.000,00								3.055.400.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	90 %		77 %	79 %	2.744.170.000,00							83 %	3.055.400.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.253.805.000,00						-		2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						2.253.805.000,00						-		2.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	2.253.805.000,00							1 Orang/bulan	2.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.253.805.000,00			-	-	-			2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan		1 Orang/bulan	45 Orang/bulan	2.253.805.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang/bulan	2.500.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.515.000,00						-		220.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.515.000,00						-		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.395.000,00							1 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.084.000,00							1 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.361.000,00							1 Paket	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	32.675.000,00							1 Paket	45.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.675.000,00			-	-	-			45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	32.675.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	45.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.084.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	27.084.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.361.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.361.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	15.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.395.000,00			-	-	-			125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	90.395.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.390.000,00						-		292.400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.390.000,00						-		292.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00							1 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	266.400.000,00							-	266.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.790.000,00							1 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.790.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	16.790.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.200.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						266.400.000,00			-	-	-			266.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	60 Laporan	266.400.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	266.400.000,00	Kecamatan Leksula

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.460.000,00						-		43.000.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.460.000,00						-		43.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00							1 Unit	36.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	-			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	36.000.000,00	Kecamatan Leksula
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.460.000,00						-		43.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	6.460.000,00							-	7.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.460.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	6.460.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.000.000,00	Kecamatan Leksula
165.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						30.570.000,00								48.500.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan						30.570.000,00								48.500.000,00	
			1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79.44 Indeks		79.38 Indeks	79.39 Indeks	30.570.000,00							79.40 Indeks	48.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						30.570.000,00						-		48.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						30.570.000,00						-		48.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.549.600,00							1 Laporan	22.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						15.549.600,00			-	-	-			22.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.549.600,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Leksula Desa Leksula 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	22.500.000,00	Kecamatan Leksula
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						30.570.000,00						-		48.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	15.020.400,00							-	26.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.020.400,00			-	-	-			26.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	15.020.400,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Leksula Desa Leksula 1	-					-	26.000.000,00	Kecamatan Leksula
166.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						15.000.000,00								30.000.000,00	
		Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						15.000.000,00								30.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100 Persentase		97 Persentase	98 Persentase	15.000.000,00							99 Persentase	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00						-		30.000.000,00	
		Meningkatnya Tata kelolah Pemerintahan yag baik						15.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	71 Orang		67 Orang	68 Orang	15.000.000,00							69 Orang	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						15.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	71 Orang		67 Orang	50 Orang	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					69 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Leksula
167.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						41.464.900,00								59.500.000,00	
		Terwujudnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.						41.464.900,00								59.500.000,00	
			1.Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	102 Angka		102 Angka	102 Angka	41.464.900,00							102 Angka	59.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						41.464.900,00						-		59.500.000,00	
		Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						41.464.900,00						-		59.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90 Dokumen		77 Dokumen	78 Dokumen	26.379.500,00							79 Dokumen	39.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	80 Dokumen		77 Dokumen	78 Dokumen	15.085.400,00							Dokumen	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15.085.400,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	80 Dokumen		77 Dokumen	1 Dokumen	15.085.400,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Leksula
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						26.379.500,00			-	-	-			39.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90 Dokumen		77 Dokumen	19 Dokumen	26.379.500,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Dokumen	39.500.000,00	Kecamatan Leksula
		Kecamatan Waesama						1.589.033.000,00								1.660.900.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.589.033.000,00								1.660.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.589.033.000,00								1.660.900.000,00	
168.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.499.195.000,00								1.571.062.000,00	
		Meningkatnya Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.499.195.000,00								1.571.062.000,00	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	Indeks		2.34 Indeks	2.39 Indeks	1.499.195.000,00							2.44 Indeks	1.571.062.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.126.000,00						-		8.126.000,00	
		terciptanya Tata Kelola pemerintahan						8.126.000,00						-		8.126.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.277.000,00							1 Dokumen	2.277.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.909.000,00							1 Dokumen	2.909.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.940.000,00							1 Dokumen	2.940.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.909.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.909.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.909.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.909.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.940.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.940.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.940.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.940.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.277.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.277.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.277.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.277.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.047.136.000,00						-		1.119.003.000,00	
		terciptanya Tata Kelola pemerintahan						1.047.136.000,00						-		1.119.003.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.303.000,00							1 Laporan	3.303.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.043.833.000,00							14 Orang/bulan	1.115.700.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.043.833.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.115.700.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.043.833.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Orang/bulan	1.115.700.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.303.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			3.303.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.303.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	3.303.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						104.833.000,00						-		104.833.000,00	
		terciptanya Tata Kelola pemerintahan						104.833.000,00						-		104.833.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00							1 Laporan	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.700.000,00							4 Paket	10.700.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.750.000,00							2 Paket	13.750.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.199.000,00							1 Paket	2.199.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.184.000,00							1 Paket	30.184.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.199.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.199.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.199.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	2.199.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.184.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			30.184.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.184.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	30.184.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.700.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			10.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	10.700.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Paket	10.700.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.750.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			13.750.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.750.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	13.750.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	48.000.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.100.000,00						-		287.100.000,00	
		terciptanya Tata Kelola pemerintahan						287.100.000,00						-		287.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.400.000,00							12 Laporan	23.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan		29 Laporan	29 Laporan	259.200.000,00							29 Laporan	259.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan		300 Laporan	300 Laporan	4.500.000,00							300 Laporan	4.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.500.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan		300 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					300 Laporan	4.500.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.400.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			23.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	23.400.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	23.400.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						259.200.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			259.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan		29 Laporan	44 Laporan	259.200.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					29 Laporan	259.200.000,00	Kecamatan Waesama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.000.000,00						-		52.000.000,00	
		terciptanya Tata Kelola pemerintahan						52.000.000,00						-		52.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00							2 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	37.000.000,00							3 Unit	37.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			37.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	37.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	37.000.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Waesama
169.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10.159.000,00								10.159.000,00	
		Meningktanya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						10.159.000,00								10.159.000,00	
			1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79.44 Indeks		79.38 Indeks	79.40 Indeks	10.159.000,00							79.41 Indeks	10.159.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.159.000,00						-		10.159.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik						10.159.000,00						-		10.159.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	10.159.000,00							100 Dokumen	10.159.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						10.159.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			10.159.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Dokumen		100 Dokumen	12 Dokumen	10.159.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Dokumen	10.159.000,00	Kecamatan Waesama
170.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25.116.000,00								25.116.000,00	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						25.116.000,00								25.116.000,00	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	88.32 Persentase		88.27 Persentase	88.29 Persentase	25.116.000,00							88.30 Persentase	25.116.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.116.000,00						-		25.116.000,00	
		Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						25.116.000,00						-		25.116.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	25.116.000,00							100 Laporan	25.116.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.116.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			25.116.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan		100 Laporan	2 Laporan	25.116.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Laporan	25.116.000,00	Kecamatan Waesama
171.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						38.111.000,00								38.111.000,00	
		Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum						38.111.000,00								38.111.000,00	
			1.Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100 Persentase		97 Persentase	98 Persentase	38.111.000,00							99 Persentase	38.111.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						38.111.000,00						-		38.111.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintaha Umum						38.111.000,00						-		38.111.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	12.771.000,00							36 Dokumen	12.771.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		36 Orang	36 Orang	13.819.000,00							36 Orang	13.819.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang		50 Orang	50 Orang	11.521.000,00							50 Orang	11.521.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						13.819.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			13.819.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		36 Orang	48 Orang	13.819.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					36 Orang	13.819.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						11.521.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			11.521.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang		50 Orang	22 Orang	11.521.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Orang	11.521.000,00	Kecamatan Waesama
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						12.771.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			12.771.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen		36 Dokumen	1 Dokumen	12.771.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					36 Dokumen	12.771.000,00	Kecamatan Waesama
172.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						16.452.000,00								16.452.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.452.000,00								16.452.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	100 Angka		100 Angka	100 Angka	16.452.000,00							100 Angka	16.452.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.452.000,00						-		16.452.000,00	
		Terselenngaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.452.000,00						-		16.452.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.452.000,00							12 Dokumen	16.452.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						16.452.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			16.452.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	16.452.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Waesama Desa Wamsisi 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	16.452.000,00	Kecamatan Waesama
		Kecamatan Kepala Madan						1.923.640.000,00								1.177.540.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.923.640.000,00								1.177.540.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.923.640.000,00								1.177.540.000,00	
173.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.825.640.000,00								1.177.540.000,00	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan						1.759.890.000,00								1.177.540.000,00	
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	99 %		85 %	88 %	1.759.890.000,00							90 %	1.177.540.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.188.290.000,00						-		1.177.540.000,00	
		Twrsedian Gaji ASN dan Dokumen Laporan Keuangan						1.188.290.000,00						-		1.177.540.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.750.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.177.540.000,00							Orang/bulan	1.177.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.177.540.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.177.540.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang Orang/bulan	1.177.540.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					Orang/bulan	1.177.540.000,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.750.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.750.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.750.000,00						-		0,00	
		Jumlah Penyusunan Laporan Aset yang lancar						10.750.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.750.000,00							4 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.750.000,00			-	-	PP5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.750.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						86.200.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						86.200.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.200.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.200.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.200.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	35.000.000,00							5 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						392.950.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						392.950.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	379.650.000,00							39 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00							12 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.800.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						379.650.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	379.650.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					39 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.450.000,00						-		0,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.450.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00							1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						35.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Kecamatan Kepala Madan
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.450.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	77.450.000,00							-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						77.450.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	77.450.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Kepala Madan
174.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						8.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik						8.000.000,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79.44 Indeks		79.38 Indeks	79.40 Indeks	8.000.000,00							79.40 Indeks	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.000.000,00						-		0,00	
		Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						8.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	8.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan
175.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan						25.000.000,00								0,00	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	33.22 Persentase		88.27 Persentase	88.29 Persentase	25.000.000,00							88.30 Persentase	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.000.000,00						-		0,00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00							2 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	0,00	Kecamatan Kepala Madan
176.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						65.000.000,00								0,00	
		Meningkatnya Pelayanan dalam Memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa						65.000.000,00								0,00	
			1.Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	102 Angka		102 Angka	102 Angka	65.000.000,00							102 Angka	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						65.000.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						65.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	35.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						65.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	35.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						65.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	35.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						65.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	35.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00							16 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						30.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Dokumen	0,00	Kecamatan Kepala Madan
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						35.000.000,00			-	-	PP5. Penin gkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan Desa Bilor o 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Dokumen	0,00	Kecamatan Kepala Madan
		Kecamatan Ambalau						1.325.439.500,00								1.391.439.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.325.439.500,00								1.391.439.500,00	
	7.01	KECAMATAN						1.325.439.500,00								1.391.439.500,00	
177.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.242.439.500,00								1.277.439.500,00	
		Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.189.439.500,00								1.241.939.500,00	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	90 Indeks		86 Indeks	87 Indeks	1.189.439.500,00							88 Indeks	1.241.939.500,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD						16.000.000,00						-		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Dokumen		86 Dokumen	87 Dokumen	3.000.000,00							88 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	90 Dokumen		85 Dokumen	87 Dokumen	5.000.000,00							88 Dokumen	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Dokumen		86 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Dokumen	3.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	90 Dokumen		85 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Dokumen	5.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						643.639.500,00						-		644.139.500,00	
		Presentase Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						643.639.500,00						-		644.139.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90 Laporan		87 Laporan	88 Laporan	10.000.000,00							89 Laporan	10.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan		94 Orang/bulan	95 Orang/bulan	633.639.500,00							96 Orang/bulan	633.639.500,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						633.639.500,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			633.639.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan		94 Orang/bulan	12 Orang/bulan	633.639.500,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					96 Orang/bulan	633.639.500,00	Kecamatan Ambalau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90 Laporan		87 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					89 Laporan	10.500.000,00	Kecamatan Ambalau
		Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah						146.000.000,00						-		168.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		87 Laporan	88 Laporan	100.000.000,00							88 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket		86 Paket	87 Paket	11.000.000,00							88 Paket	11.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket		87 Paket	88 Paket	10.000.000,00							89 Paket	10.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket		86 Paket	87 Paket	20.000.000,00							88 Paket	20.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			20.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket		86 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Paket	20.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			11.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket		86 Paket	1 Paket	11.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Paket	11.500.000,00	Kecamatan Ambalau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket		87 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					89 Paket	10.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		87 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						380.800.000,00						-		381.300.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah						380.800.000,00						-		381.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan		86 Laporan	87 Laporan	370.800.000,00							88 Laporan	370.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Laporan		86 Laporan	87 Laporan	10.000.000,00							88 Laporan	10.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Laporan		86 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Laporan	10.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						370.800.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			370.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan		86 Laporan	1 Laporan	370.800.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Laporan	370.800.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.000.000,00						-		18.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD						16.000.000,00						-		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00							-	3.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						146.000.000,00						-		168.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah						146.000.000,00						-		168.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.000.000,00						-		66.000.000,00	
		Tersedianya Jumlah UnitPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintanh Daerah Yang disediakan						56.000.000,00						-		66.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	36.000.000,00							-	36.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	36.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.000.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Ambalau
178.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						28.000.000,00								34.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Tingat Prtisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						13.000.000,00								14.000.000,00	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	90 Indeks		86 Indeks	87 Indeks	13.000.000,00							88 Indeks	14.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.000.000,00						-		14.000.000,00	
		Peresentase Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecematan						13.000.000,00						-		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 Dokumen		86 Dokumen	87 Dokumen	3.000.000,00							88 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	90 Laporan		86 Laporan	87 Laporan	10.000.000,00							88 Laporan	10.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			10.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	90 Laporan		86 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Laporan	10.500.000,00	Kecamatan Ambalau
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			3.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 Dokumen		86 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Dokumen	3.500.000,00	Kecamatan Ambalau
			-	-		-	-	15.000.000,00							-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.000.000,00						-		20.000.000,00	
		-						15.000.000,00						-		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	15.000.000,00							-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			20.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Kecamatan Ambalau
179.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.000.000,00								40.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di tingkat Kecamatan						10.000.000,00								40.000.000,00	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	90 Indeks		86 Indeks	87 Indeks	10.000.000,00							88 Indeks	40.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.000.000,00						-		40.000.000,00	
		Jumlah Peserta/Desa Yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Kebangsaan dan Ketahanan nasional)						20.000.000,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang		86 Orang	87 Orang	10.000.000,00							88 Orang	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif;			15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang		86 Orang	26 Orang	10.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Orang	15.000.000,00	Kecamatan Ambalau
		Jumlah Peserta/Desa Yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Kebangsaan dan Ketahanan nasional)						20.000.000,00						-		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00							-	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			25.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Ambalau
180.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						35.000.000,00								40.000.000,00	
		Meningkatnya Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih						35.000.000,00								40.000.000,00	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	90 Indeks		86 Indeks	87 Indeks	35.000.000,00							88 Indeks	40.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						35.000.000,00						-		40.000.000,00	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						35.000.000,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90 Dokumen		86 Dokumen	87 Dokumen	35.000.000,00							88 Dokumen	40.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						35.000.000,00			-	-	PP2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif;			40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90 Dokumen		86 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Ambalau Desa Siwar 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					88 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Ambalau
		Kecamatan Fena Fafan						1.533.478.600,00								1.701.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.533.478.600,00								1.701.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.533.478.600,00								1.701.000.000,00	
181.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.445.588.400,00								1.551.000.000,00	
		Meningkatnya Tata kelolah Pemerintahan yag baik.						1.403.188.400,00								1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	85 %		77 %	78 %	1.403.188.400,00							79 %	1.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						957.879.000,00						-		1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						957.879.000,00						-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		77 Orang/bulan	78 Orang/bulan	957.879.000,00							79 Orang/bulan	1.000.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						957.879.000,00			-	-	-			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		77 Orang/bulan	15 Orang/bulan	957.879.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Orang/bulan	1.000.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.609.400,00						-		221.000.000,00	
		Terwujudnta Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.609.400,00						-		221.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		82 Laporan	83 Laporan	112.005.400,00							84 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket		77 Paket	78 Paket	27.100.000,00							79 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	85 Paket		77 Paket	78 Paket	4.350.000,00							79 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket		77 Paket	78 Paket	25.154.000,00							79 Paket	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.154.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket		77 Paket	1 Paket	25.154.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.100.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket		77 Paket	2 Paket	27.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.350.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	85 Paket		77 Paket	2 Paket	4.350.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Paket	6.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						112.005.400,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		82 Laporan	1 Laporan	112.005.400,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						276.700.000,00						-		279.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						276.700.000,00						-		279.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan		82 Laporan	83 Laporan	264.600.000,00							84 Laporan	264.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Laporan		77 Laporan	78 Laporan	12.100.000,00							79 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.100.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Laporan		77 Laporan	1 Laporan	12.100.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						264.600.000,00			-	-	-			264.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan		82 Laporan	12 Laporan	264.600.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	264.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
			-	-		-	-	42.400.000,00							-	51.000.000,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.400.000,00						-		51.000.000,00	
		-						42.400.000,00						-		51.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.400.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	36.000.000,00							-	36.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.000.000,00			-	-	-			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.400.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.400.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
182.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						29.431.600,00								55.000.000,00	
			-	-		-	-	29.431.600,00							-	55.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.861.600,00						-		33.000.000,00	
		-						15.861.600,00						-		33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	15.861.600,00							-	33.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.861.600,00			-	-	-			33.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	11 Laporan	15.861.600,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						13.570.000,00						-		22.000.000,00	
		-						13.570.000,00						-		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	-	13.570.000,00							-	22.000.000,00	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						13.570.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	11 Dokumen	13.570.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
183.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						17.000.000,00								25.000.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahah yang baik						17.000.000,00								25.000.000,00	
			1.Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	85 Persentase		77 Persentase	78 Persentase	17.000.000,00							79 Persentase	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						17.000.000,00						-		25.000.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahah yang baik						17.000.000,00						-		25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 Orang		77 Orang	78 Orang	17.000.000,00							79 Orang	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						17.000.000,00			-	-	-			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 Orang		77 Orang	50 Orang	17.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Orang	25.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
184.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						41.458.600,00								70.000.000,00	
		Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan						41.458.600,00								70.000.000,00	
			1.Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	85 Angka		77 Angka	78 Angka	41.458.600,00							79 Angka	70.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						41.458.600,00						-		70.000.000,00	
		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						41.458.600,00						-		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	85 Dokumen		77 Dokumen	78 Dokumen	25.386.900,00							79 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	85 Dokumen		77 Dokumen	78 Dokumen	16.071.700,00							79 Dokumen	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						16.071.700,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	85 Dokumen		77 Dokumen	11 Dokumen	16.071.700,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						25.386.900,00			-	-	-			45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	85 Dokumen		77 Dokumen	11 Dokumen	25.386.900,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					79 Dokumen	45.000.000,00	Kecamatan Fena Fafan
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						4.162.308.800,00								4.221.285.720,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.162.308.800,00								4.221.285.720,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.162.308.800,00								4.221.285.720,00	
185.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.166.651.000,00								2.172.517.900,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						1.896.351.000,00								1.901.392.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96 %		92 %	93 %	1.896.351.000,00							94 %	1.901.392.900,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.747.513.000,00						-		1.747.513.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.747.513.000,00						-		1.747.513.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.740.513.000,00							24 Orang/bulan	1.740.513.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.740.513.000,00			-	-	-			1.740.513.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.740.513.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Orang/bulan	1.740.513.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.000.000,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.838.000,00						-		105.879.900,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.838.000,00						-		105.879.900,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.983.000,00							1 Laporan	77.682.150,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.146.000,00							1 Paket	7.503.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.709.000,00							1 Paket	20.694.450,00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.709.000,00			-	-	-			20.694.450,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	19.709.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	20.694.450,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.146.000,00			-	-	-			7.503.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	7.146.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.503.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						73.983.000,00			-	-	-			77.682.150,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	73.983.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	77.682.150,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			-	-		-	-	270.300.000,00							-	271.125.000,00	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						270.300.000,00						-		271.125.000,00	
		-						270.300.000,00						-		271.125.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00							-	12.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	253.800.000,00							-	253.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.500.000,00							-	4.725.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.500.000,00			-	-	-			4.725.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.725.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00			-	-	-			12.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						253.800.000,00			-	-	-			253.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	253.800.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	253.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00						-		48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	48.000.000,00							-	48.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.000.000,00			-	-	-			48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	48.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	48.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
186.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						705.850.400,00								741.142.920,00	
		Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						705.850.400,00								741.142.920,00	
			1.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95 Persentase		91 Persentase	92 Persentase	705.850.400,00							93 Persentase	741.142.920,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						705.850.400,00						-		741.142.920,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						705.850.400,00						-		741.142.920,00	
			Jumlah Paskibraka	30 Orang		30 Orang	30 Orang	705.850.400,00							30 Orang	741.142.920,00	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						705.850.400,00			-	-	-			741.142.920,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	30 Orang		30 Orang	30 Orang	705.850.400,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Orang	741.142.920,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
187.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						66.400.000,00								69.720.000,00	
		Meningkatnya Etika dan Budaya politik						66.400.000,00								69.720.000,00	
			1.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	90 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	66.400.000,00							90 Persentase	69.720.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						66.400.000,00						-		69.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksanannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						66.400.000,00						-		69.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.400.000,00							1 Dokumen	69.720.000,00	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						66.400.000,00			-	-	-			69.720.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.400.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	69.720.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
188.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						32.400.000,00								34.020.000,00	
		Meningkatnya Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif						32.400.000,00								34.020.000,00	
			1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	95 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	32.400.000,00							95 Persentase	34.020.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						32.400.000,00						-		34.020.000,00	
		Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						32.400.000,00						-		34.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	32.400.000,00							-	34.020.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						32.400.000,00			-	-	-			34.020.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	21 Orang	32.400.000,00	Provinsi Maluku Kab. Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Kamlanglale 1	-					-	34.020.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
189.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						858.457.400,00								858.457.400,00	
		Meningkatnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan						858.457.400,00								858.457.400,00	
			1.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	95 Persentase		95 Persentase	95 Persentase	858.457.400,00							95 Persentase	858.457.400,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						858.457.400,00						-		858.457.400,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan						858.457.400,00						-		858.457.400,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-		-	-	858.457.400,00							-	858.457.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						858.457.400,00			-	-	-			858.457.400,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-		-	4 Dokumen	858.457.400,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	858.457.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
190.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						332.550.000,00								345.427.500,00	
		Meningkatnya Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan						332.550.000,00								345.427.500,00	
			1.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	90 Persentase		86 Persentase	87 Persentase	332.550.000,00							88 Persentase	345.427.500,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						332.550.000,00						-		345.427.500,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						332.550.000,00						-		345.427.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00							12 Laporan	75.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						75.000.000,00			-	-	-			75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	75.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						332.550.000,00						-		345.427.500,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-		-	-	257.550.000,00							-	270.427.500,00	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						257.550.000,00			-	-	-			270.427.500,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-		-	2 Dokumen	257.550.000,00	Kab. Buru Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	270.427.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							454.933.851.935,00								334.923.591.572,00	